



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RPJMD TAHUN 2025-2029

### Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan RKPD; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

### Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
  - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJMD oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil - pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. guncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

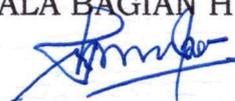
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.71/32/6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 81

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

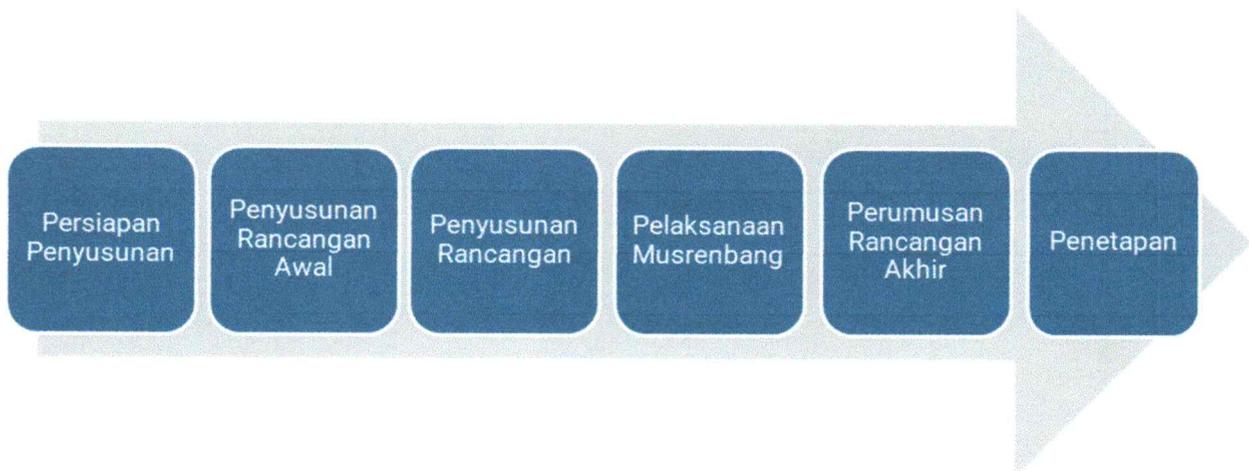
**1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Kota Balikpapan memasuki tahap pertama di dalam rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama ini merupakan tahapan krusial karena menentukan agenda transformasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Visi pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, yaitu **“Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman”**. Visi tersebut salah satunya diwujudkan melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memiliki tema berupa **“Penguatan Fondasi Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif.”**

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan lima tahun mendatang, maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat berbagai ketentuan seperti visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketiga aspek ini dijabarkan melalui berbagai komponen perencanaan seperti tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. RPJMD juga memuat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang bersifat indikatif dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam penyusunannya, RPJMD memiliki beberapa tahapan yang perlu dilalui. Dokumen RPJMD merupakan langkah lanjutan proses integrasi antara dokumen rancangan teknokratik RPJMD dengan visi, misi, dan program unggulan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih. Dokumen RPJMD bertujuan untuk menjabarkan secara lebih rinci dari perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, diantaranya adalah RPJPD, RTRW, dan dokumen perencanaan lain yang relevan. Secara umum, berikut merupakan proses tahapan penyusunan RPJMD yang akan dilalui hingga penetapannya:



**Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD**

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 mendorong dibutuhkannya perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru. Proses penyusunan RPJMD dimulai dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Rancangan RPJMD nantinya disusun dengan memerhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspon melalui rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas daerah. Nantinya, substansi dari ketetapan-ketetapan yang telah termuat dalam RPJMD akan menjadi acuan dasar bagi perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Balikpapan dalam merumuskan kebijakan perencanaan strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. Oleh karenanya, RPJMD memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029 memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

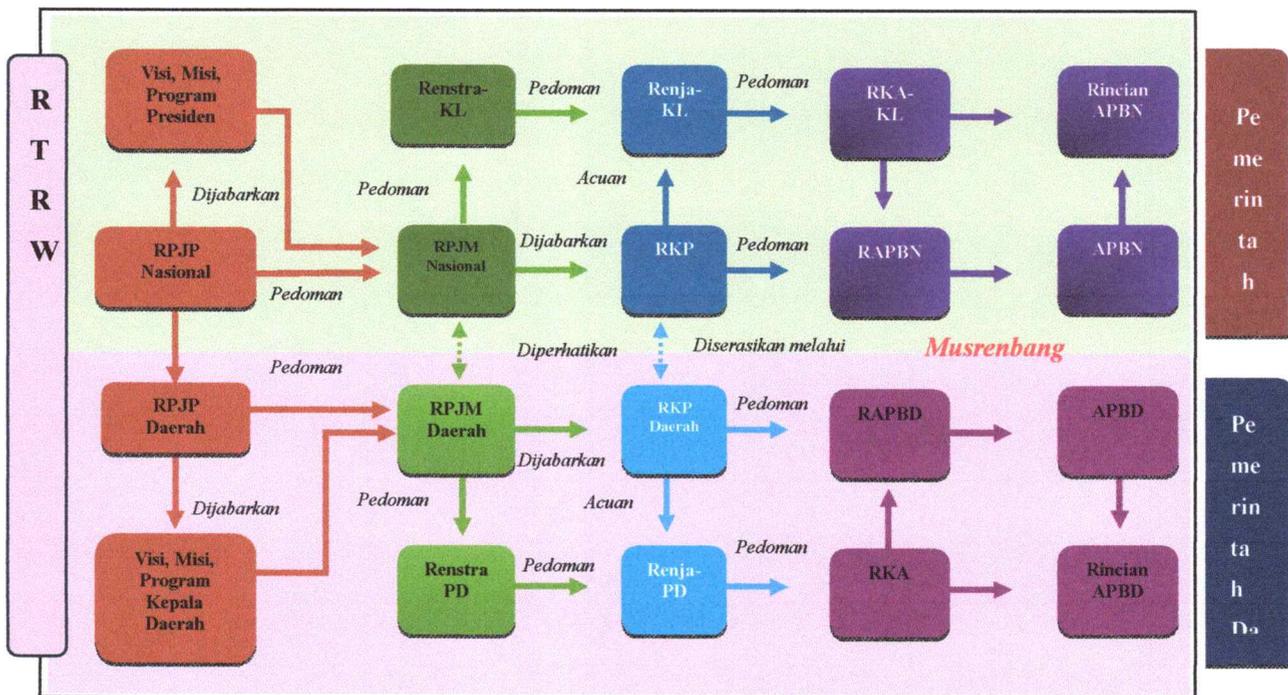
- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Penyusunan RPJMD terdiri dari beberapa tahapan, mulai tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, rancangan akhir hingga penetapan Perda RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD utuh,

seluruh pendekatan perencanaan digunakan dan dipadukan di dalam dokumen. Selain pendekatan yang berorientasi proses, pendekatan perencanaan yang berorientasi substansi juga digunakan. Pendekatan ini berupa tematik-holistik, integratif dan spasial. Melalui pendekatan ini, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan kuat dengan rencana tata ruang wilayah. Gambaran hubungan RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan hubungan antar dokumen seperti terdapat di dalam Gambar 1.1, maka penjelasan hubungan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan sebagai berikut:

### 1.3.1 Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045

Sebagai penjabaran tahap pertama perencanaan jangka panjang, maka dokumen RPJMD mulai mengacu pada substansi dokumen RPJPD. Substansi RPJPD yang ditelaah dan diacu antara lain isu-isu strategis jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan sasaran pokok. Telaah tersebut diharapkan mampu merumuskan isu strategis jangka menengah dalam rangka merespon isu jangka panjang, serta perumusan rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari penjabaran arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjang.

### 1.3.2 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD berkesesuaian waktu dengan RPJMN. Kondisi ini merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan jangka menengah daerah dengan nasional. RPJMN tahun 2025-2029

merupakan periode pertama dari RPJPN yang memiliki tema periode berupa “perkuatan fondasi transformasi”. Pembangunan jangka menengah daerah dengan demikian juga memiliki agenda besar berupa perkuatan fondasi transformasi daerah.

#### 1.3.3 Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan RPJMD berkesesuaian waktu dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memiliki peran penting untuk mewujudkan tema pembangunan Pulau Kalimantan berupa “Superhub Ekonomi Nusantara”, serta tema Provinsi Kalimantan Timur “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”. Provinsi Kalimantan Timur memiliki target pembangunan makro tahun 2029, yaitu share PDRB 5,0 persen; LPE 5,6-6,9 persen; kemiskinan 1,62-2,12 persen; gini ratio 0,309-0,312; dan TPT 4,54-5,31 persen.

#### 1.3.4 Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD harus mulai membangun sinkronisasi antara perencanaan makro dengan perencanaan tata ruang. Berdasarkan perkembangan Balikpapan yang dinamis, maka RTRW Kota Balikpapan mengalami perubahan. RTRW Kota Balikpapan memiliki tujuan berupa mewujudkan daerah sebagai kota jasa yang dinamis, selaras, berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara.

#### 1.3.5 Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Balikpapan

KLHS akan mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan yang kemudian akan menjadi salah satu landasan bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi pembangunan berkelanjutan dari KLHS akan menjadi landasan dan diintegrasikan ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD. Dengan demikian, Integrasi dokumen KLHS di dalam RPJMD untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) telah menjadi landasan di dalam perencanaan pembangunan.

#### 1.3.6 Keterkaitan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dan APBD

RPJMD harus membangun keterhubungan yang sinergis dengan perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan penganggaran tahunan. Keterhubungan ini membangun perencanaan yang sinergis mulai dari jangka panjang, menengah hingga tahunan dan

penganggaran. Dengan demikian diharapkan tercapai pendekatan perencanaan dan penganggaran berupa *money follow program, program follow result*, serta penganggaran berbasis kinerja.

#### 1.3.7 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga perlu mengacu pada beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang berisi rekomendasi kinerja dan kerja, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemetaan IPTEK Daerah (RIPJ PID), serta dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga perlu didukung dengan manajemen risiko pembangunan yang berfungsi mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan, sehingga dapat meminimalisir dampak dan memastikan bahwa RPJMD dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kinerja pembangunan dan kondisi keuangan daerah yang aktual;
2. Tersedianya dokumen yang memuat pemetaan masalah berbasis capaian kinerja dan rumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
3. Sebagai dasar perumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Balikpapan selama lima tahun kedepan;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota sekitar, serta perencanaan sektoral;
6. Menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2025-2029;
7. Sebagai tolok ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
8. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
9. Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Bab pendahuluan memuat informasi terkait latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMN, RTRW, KLHS, serta rencana sektoral lainnya), maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan sistematika penulisan.
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAERAH</b>  Gambaran umum daerah menyajikan data-data dan informasi hasil capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir. Penyajian pada bab ini memuat enam aspek antara lain aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran keuangan daerah, serta permasalahan dan isu strategis.  Aspek geografi dan demografi memuat terkait posisi dan peran

strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta demografi. Aspek kesejahteraan memuat terkait kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.

Aspek daya saing memuat terkait daya saing sumber daya manusia; iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi makro. Aspek pelayanan umum memuat terkait regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif; hukum berkadilang, keamanan nasional yang tangguh dan demokrasi substansial; ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar Kawasan; kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Gambaran keuangan daerah memuat terkait realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030. Permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan yang bersifat dominan serta identifikasi isu strategis daerah sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi daerah secara langsung maupun tidak langsung.

### BAB III

#### VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan,

lokus dan penentuan program prioritas. Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat indikasi kerangka pendanaan yang berasal dari hasil analisis pada BAB III perihal gambaran keuangan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat terkait indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi. Sedangkan IKD merupakan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025-2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

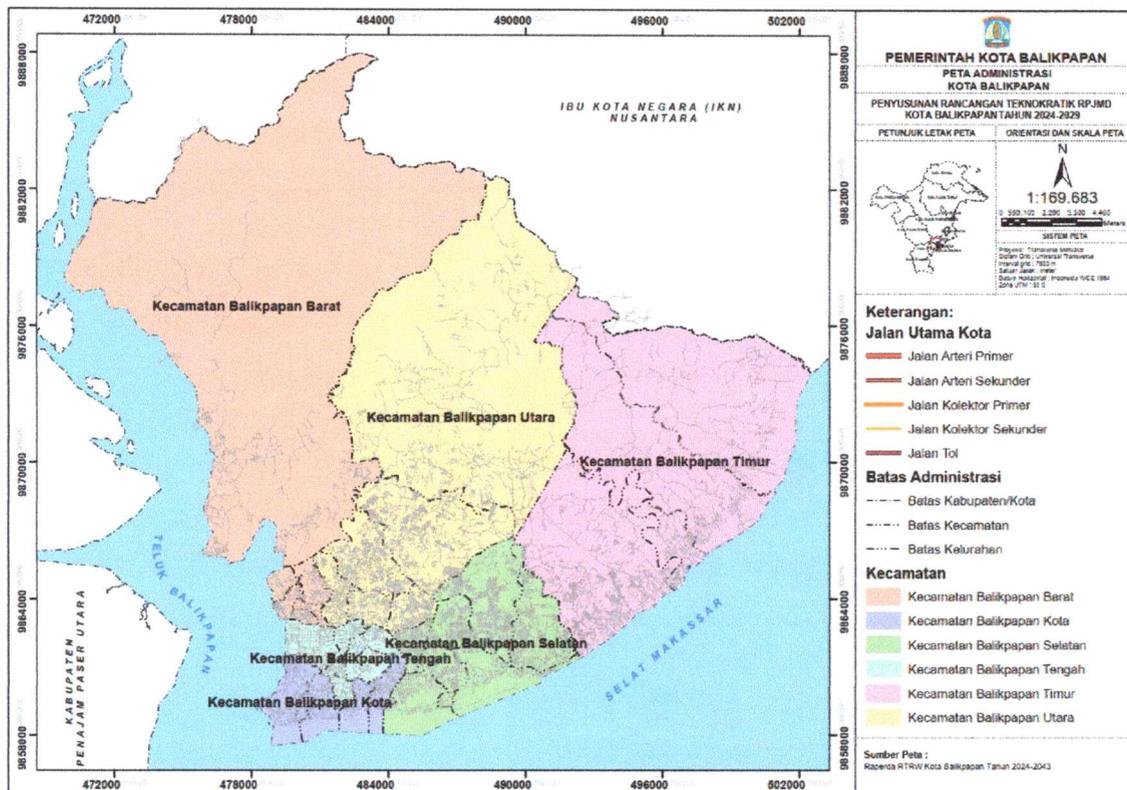
### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kota Balikpapan dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek geografi dan demografi di Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut.

#### 2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Wilayah administratif Kota Balikpapan mencakup daratan dan lautan. Adapun luas keseluruhan Kota Balikpapan sebesar 51.101,24 Ha. Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan lautan dan kabupaten lain di sekitarnya, yang mencakup:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

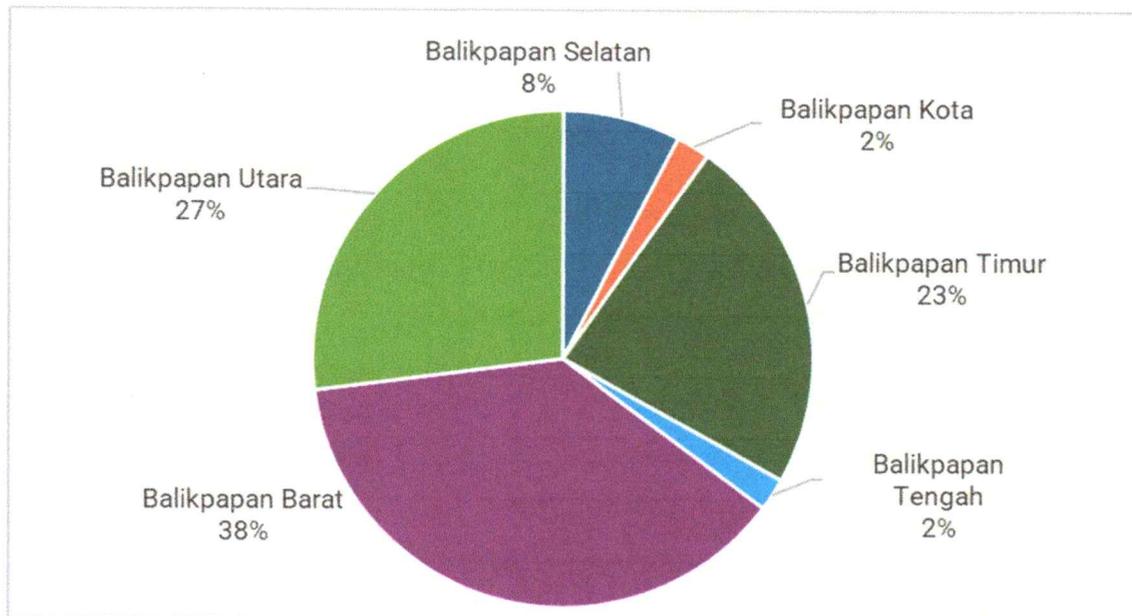


**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Balikpapan**

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan. Kondisi tersebut didasarkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang bervariasi. Berikut disajikan proporsi luasan setiap kecamatan terhadap luasan total di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 2 Persentase Luas Per Kecamatan di Kota Balikpapan**

*Sumber: Olah data, 2024*

Kecamatan terluas, berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan cakupan area sebesar 38 persen dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21 persen dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat. Adapun kecamatan dengan luas terkecil terletak di Kecamatan Balikpapan Kota. Cakupan luasnya sebesar 2,17 persen dari luas total Kota Balikpapan. Meskipun memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Balikpapan Kota memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek Kota Balikpapan sebagai pusat pemerintahan kota, dan juga pusat aktivitas perekonomian.

### **2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam**

Potensi sumber daya alam Kota Balikpapan dapat diwujudkan dengan pendekatan spasial berdasarkan pengembangan berbasis fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan ruang. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Balikpapan didukung dengan adanya potensi sumber daya yang dimiliki

dan dapat dimanfaatkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan ekowisata. Potensi pertanian tanaman padi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan termasuk dalam kategori skala kecil yakni sebesar 1.576,67 Ha. Arahan pengelolaan kawasan pertanian di Kota Balikpapan adalah untuk pengembangan pertanian tanaman pangan: kawasan pertanian lestari/sawah lahan basah dan kegiatan pertanian hortikultura.

Perkebunan juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan dengan fungsi sebagai penyangga bagi kawasan hutan lindung dengan luasan yang terbatas. Perkebunan di Kota Balikpapan merupakan perkebunan tanaman keras. Tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain tanaman karet, lada, kelapa, kakao, kemiri, kopi, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Peruntukan kawasan perkebunan di Kota Balikpapan mencapai 2.076,17 Ha atau mencapai 4,12 persen luas Kota Balikpapan. Kawasan perkebunan tersebut berlokasi di Kelurahan Karang Joang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Teritip, Kelurahan Manggar dan Kelurahan Lamaru. Namun, sebagian besar kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.

Potensi sumber daya terbarukan atau renewable resources dikembangkan pada kawasan pesisir Kota Balikpapan, khususnya pemanfaatan sumber daya perikanan. Tidak hanya di kawasan pesisir dengan potensi perikanan laut, tetapi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai potensi perikanan darat. Pengembangan kawasan minapolitan juga dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan.

Sektor industri dan perdagangan di Kota Balikpapan juga berpotensi untuk dikembangkan untuk mendukung tercapainya visi pengembangan Kota Balikpapan yang diarahkan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang potensial dan unggul. Kota Balikpapan yang terletak di wilayah strategis memiliki keunggulan komparatif berdampak pada pertumbuhan industri skala kecil/rumah tangga hingga skala besar yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Penetapan kawasan industri Kota Balikpapan yang terletak di ALKI II sekaligus menjadi pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur menjadi keunggulan untuk perkembangan industri wilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Potensi alam maupun budaya di Kota Balikpapan juga menarik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata di Kota Balikpapan seperti hutan lindung, kawasan lindung, kawasan bakau (mangrove), agrowisata, wanawisata, dan lain-lain. Sedangkan potensi wisata budaya yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi wisata sejarah yang berupa tugu, monumen dan tempat bersejarah, serta bangunan unik.

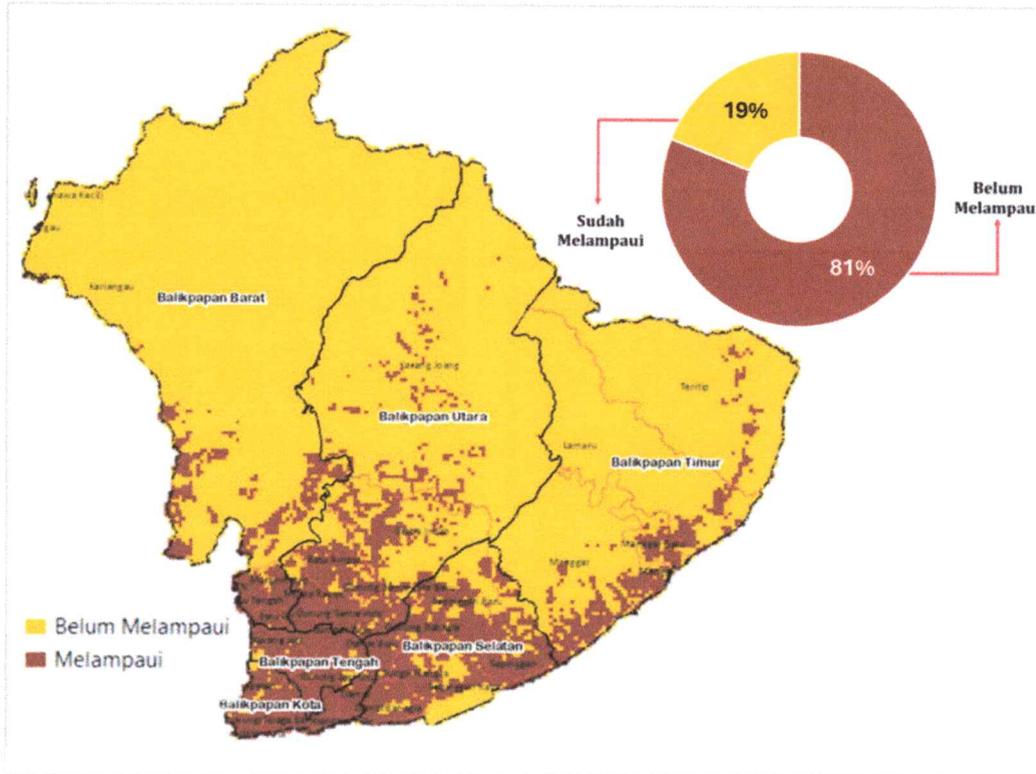
### **2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan dengan pendekatan jasa ekosistem, dengan asumsi bahwa semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia. Asumsi berikutnya yakni, semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Lebih lanjut lagi, status daya dukung lingkungan juga dapat diketahui dengan mengidentifikasi proporsi jumlah penduduk suatu wilayah terhadap ambang batas sumber daya eksisting yang tersedia saat ini. Representasi kondisi tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan menghitung dan menganalisis kapasitas daya dukung pangan dan air di Kota Balikpapan. Kedua komponen tersebut digunakan sebagai pendekatan, dengan pertimbangan peranan atas keduanya yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan, khususnya bagi keberlanjutan kehidupan manusia.

#### **2.1.3.1 DDDTLH Pangan**

Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan membandingkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat bahwa status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui sebesar 81 persen dan Sudah Melampaui sebesar 19 persen. Berikut disajikan distribusi status daya dukung pangan di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 3 Status Daya Dukung Pangan Kota Balikpapan**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan luas 2.558,18 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 17.941,54 Ha.

**Tabel 2. 1 Status daya dukung pangan Kota Balikpapan**

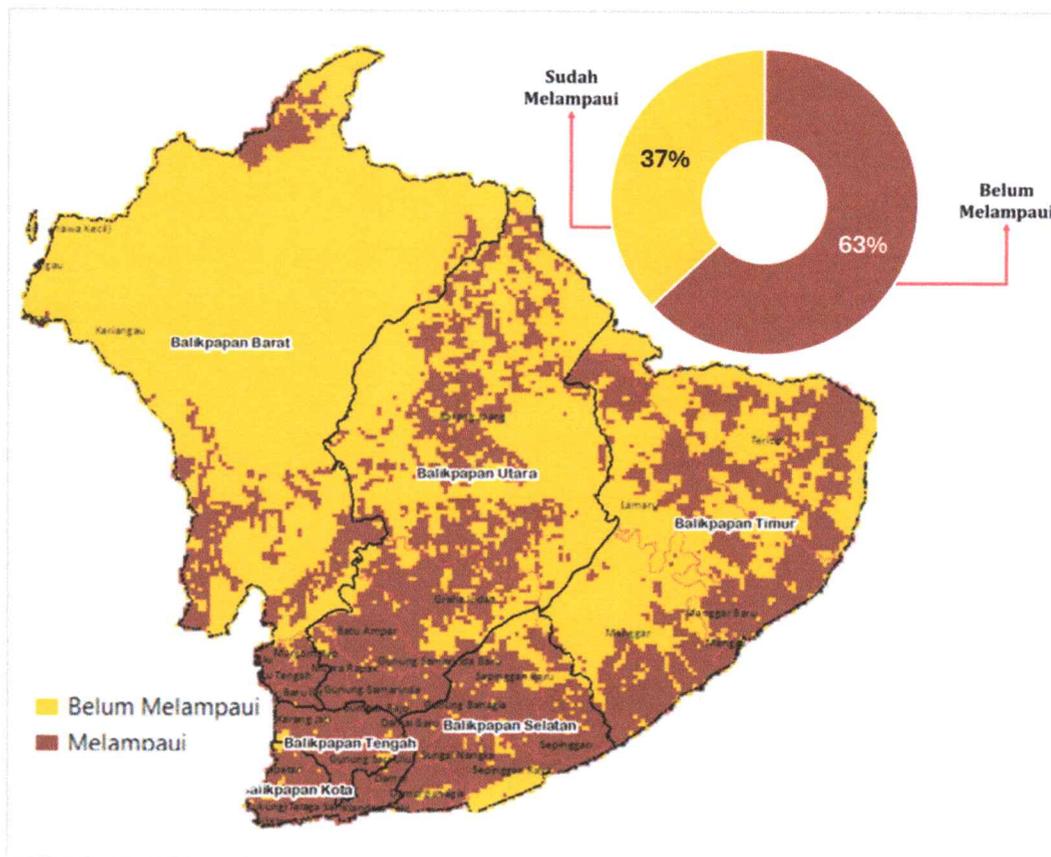
No	Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	355851962292,23	61550296750,00	294301665542,23	453459,02
2	Balikpapan Kota	17309636348,82	60537184500,00	-43227548151,21	22057,52
3	Balikpapan Selatan	59839708148,50	84120491500,00	-24280783351,50	76253,21
4	Balikpapan Tengah	17981253627,96	79236992250,00	-61255738622,07	22913,35
5	Balikpapan Timur	205971870671,05	46788364500,00	159183506171,05	262468,14
6	Balikpapan Utara	259223859518,33	100009324750,00	159214534768,33	330326,68
	<b>Grand Total</b>	<b>916178290606,89</b>	<b>432242654250,00</b>	<b>483935636356,83</b>	<b>1167477,91</b>

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Upaya untuk mempertahankan daya dukung pangan dapat dilakukan dengan menerapkan pertanian berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pangan, dan melindungi lahan pertanian. Dengan demikian, diharapkan ketahanan pangan dapat diwujudkan di Kota Balikpapan, yang selanjutnya dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

### 2.1.3.2 DDDTLH Air

Daya dukung air (*water carrying capacity*) mengacu pada kemampuan sumber daya air (seperti sungai, danau, mata air, dan sumber air lainnya) untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia secara berkelanjutan. Artinya, daya dukung air menjadi parameter yang menunjukkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Dengan demikian, komponen ini menjadi penting untuk dipertimbangan dalam setiap penyusunan kebijakan pembangunan wilayah.



**Gambar 2. 4 Status Daya Dukung Air Kota Balikpapan**

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37 persen, Sedangkan untuk daya dukung air yang belum melampaui 63 persen. Kecamatan yang mempunyai status daya dukung air yang sudah melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas 5.945,92 Ha, sedangkan kecamatan dengan daya dukung air belum melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan luas 16.728,04 Ha.

**Tabel 2. 2 Status daya dukung air Kota Balikpapan**

No	Kecamatan	Ketersediaan (M3/Tahun)	Kebutuhan (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Ambang Batas (Jiwa/Tahun)
1	Balikpapan Barat	208478674,78	71655727,90	136822946,89	258209,00
2	Balikpapan Kota	10897248,70	61815593,49	-50918344,78	13695,00
3	Balikpapan Selatan	36595054,51	88885350,79	-52290296,28	45863,00
4	Balikpapan Tengah	11286464,01	81044835,90	-69758371,90	14180,00
5	Balikpapan Timur	116936986,93	92331427,75	24605559,19	145983,00
6	Balikpapan Utara	139953015,05	129892742,34	10060272,72	174504,00
<b>Grand Total</b>		<b>524147443,99</b>	<b>525625678,16</b>	<b>-1478234,17</b>	<b>652434,00</b>

Su

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Kondisi tersebut, menjadikan daya dukung air di Kota Balikpapan memiliki urgensi tinggi untuk dipertahankan, terlebih pada wilayah-wilayah yang telah memiliki status daya dukung air melampaui ambang batas. Perlindungan terhadap ketersediaan air dapat dilakukan dengan menjaga daerah tangkapan air, membangun infrastruktur air, dan mendayagunakan air dengan optimal.

#### 2.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

##### 2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan

Kinerja penyelenggaraan pangan di Kota Balikpapan dilihat dari indeks ketahanan pangan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan atau akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2. 5 Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2020-2024**

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

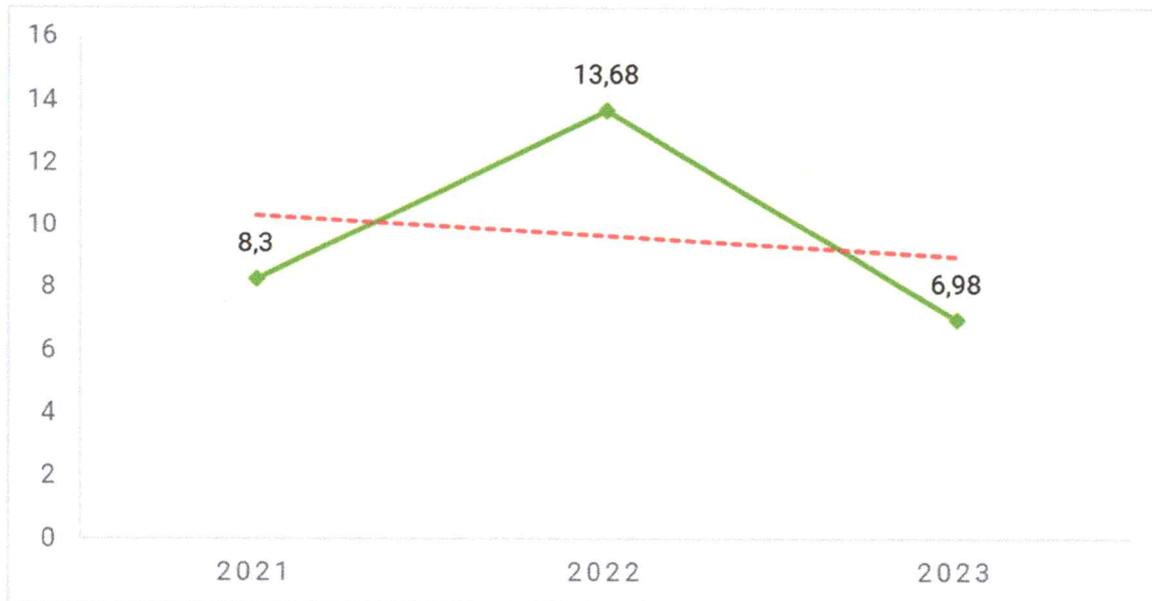
Grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan di Kota Balikpapan mengalami tren perkembangan yang terus meningkat, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024. Pada tahun 2024, indeks ketahanan pangan Kota Balikpapan turun 0,17 poin menyebabkan

penurunan peringkat dari peringkat kedelapan pada tahun 2023, turun ke peringkat lima belas nasional kategori kota. Kota Balikpapan mampu meraih nilai 91,23 meskipun hanya memiliki 15 persen lahan untuk kegiatan pangan dan sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah masyarakat untuk ditanami tanaman pangan sehingga menjadi pekarangan pangan lestari (P2L) atau dikenal juga dengan *urban farming*.

#### **2.1.4.2 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan**

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian penduduk yang mengalami kekurangan pangan. Artinya, masih terdapat kondisi ketidakmerataan distribusi pangan atau keterbatasan akses ke sumber pangan yang memadai. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab indikatif terjadinya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan adalah tingginya tingkat kemiskinan, akses terbatas terhadap pangan, produksi pangan yang tidak stabil, kurangnya diversifikasi pangan, krisis pangan dan konflik, keterbatasan pengetahuan terkait gizi, serta kebijakan pertanian dan pangan yang belum optimal dan efektif.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan, diketahui tren yang fluktuatif, dan cenderung mengalami penurunan. Artinya, pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan upaya untuk menurunkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, melalui intervensi terhadap komponen-komponen yang menjadi penyebabnya. Namun demikian, apabila disandingkan dengan target nasional, ketercapaian indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditentukan. Masih terdapat selisih sebesar 1,98% untuk memenuhi target nasional, yakni 5%. Berikut disajikan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 6 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kota Balikpapan**

*Sumber: BPS, Kota Balikpapan 2024*

Angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Balikpapan yang masih memiliki gap terhadap target yang ditentukan, menjadikan perlunya upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan aman terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi alternatif dari pengurangan permasalahan ini diantaranya dengan meningkatkan akses dan ketersediaan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, diversifikasi sumber pangan, penanggulangan kemiskinan, penyediaan pendidikan gizi, kebijakan pangan yang mendukung petani kecil.

#### **2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita**

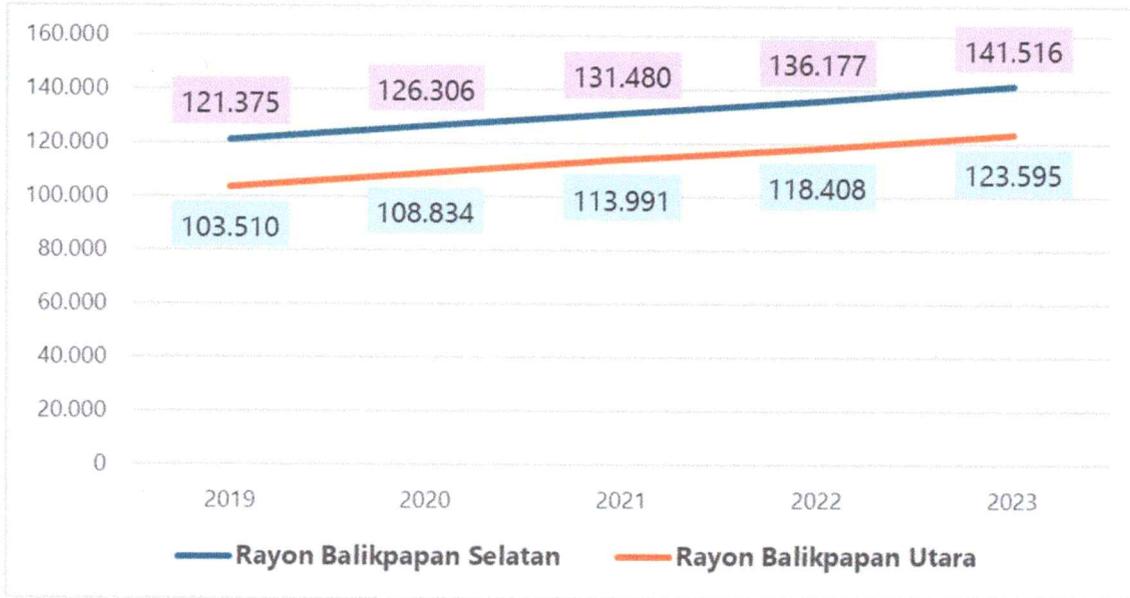
Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan fasilitas publik yang ada. Sebagai salah satu kota dengan aktivitas perekonomian yang berkembang di Pulau Kalimantan, kebutuhan listrik Kota Balikpapan sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya. Jumlah pelanggan yang menggunakan listrik terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan listrik yang meningkat. Produksi listrik pada tahun 2020 mencapai 1.088.423.119 KWh dan secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 1.504.787.490 KWh pada akhir tahun 2023.

**Tabel 2. 3 Kondisi Penyediaan Listrik di Tahun 2019-2023**

Indikator	Rayon	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Daya Terpasang (KW)</b>	Rayon Balikpapan Selatan	299.155.000	360.275.022	377.332.522	406.911.372	427.407.322
	Rayon Balikpapan Utara	217.322.000	253.489.750	281.048.500	274.779.550	295.334.400
	<b>Jumlah</b>	<b>516.477.000</b>	<b>613.764.772</b>	<b>658.381.022</b>	<b>681.690.922</b>	<b>722.741.722</b>
<b>Produksi Listrik (KWh)</b>	Rayon Balikpapan Selatan	662.436.628	634.329.711	899.728.999	951.983.433	1.004.674.090
	Rayon Balikpapan Utara	434.424.564	454.093.408	537.338.515	500.577.809	500.113.400
	<b>Jumlah</b>	<b>1.096.861.192</b>	<b>1.088.423.119</b>	<b>1.437.067.514</b>	<b>1.452.561.242</b>	<b>1.504.787.490</b>
<b>Listrik Terjual (KWh)</b>	Rayon Balikpapan Selatan	631.029.632	604.699.529	607.878.878	661.337.148	748.359.797
	Rayon Balikpapan Utara	420.782.083	441.608.722	506.627.264	467.315.011	477.217.477
	<b>Jumlah</b>	<b>1.051.811.715</b>	<b>1.046.308.251</b>	<b>1.114.506.142</b>	<b>1.128.652.159</b>	<b>1.225.577.274</b>
<b>Susut/ Hilang (KWh)</b>	Rayon Balikpapan Selatan	31.407.266	29.630.182	34.315.267	38.876.299	43.366.397
	Rayon Balikpapan Utara	13.642.481	12.484.686	19.800.095	17.376.358	17.246.559
	<b>Jumlah</b>	<b>45.049.747</b>	<b>42.114.868</b>	<b>54.115.362</b>	<b>56.252.657</b>	<b>60.612.956</b>

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah Pelanggan Listrik di wilayah Kota Balikpapan berdasar data PLN Area Balikpapan terdiri dari 2 Rayon yaitu Rayon Balikpapan Selatan dan Rayon Balikpapan Utara. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah pelanggan 2 rayon tersebut mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada gambar grafik berikut ini.



**Gambar 2. 7 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Rayon di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik rumah tangga mencapai 238.006, meningkat signifikan dari 204.281 pelanggan listrik rumah tangga pada tahun 2019. Jumlah pelanggan fasilitas publik juga meningkat pesat, mencapai 1.289 pelanggan pada tahun 2023, dari 1.089 pelanggan pada tahun 2019. Sektor bisnis juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya, rata-rata meningkat 1.331 pelanggan, dengan total 21.711 pelanggan pada tahun 2023.

**Tabel 2. 4 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2019-2023**

Kelompok Tarif	2019	2020	2021	2022	2023
Sosial	3.041	3.233	3.474	3.680	3.913
Rumah Tangga	204.281	213.850	222.361	229.500	238.006
Bisnis	16.388	16.859	18.385	20.064	21.711
Industri	86	85	87	91	94
Publik	1.089	1.113	1.164	1.222	1.289
<b>Jumlah</b>	<b>224.885</b>	<b>235.140</b>	<b>245.471</b>	<b>254.557</b>	<b>265.013</b>

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Lebih lanjut, pada sektor industri pelanggan terdapat 94 pelanggan. Sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang paling sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya, meningkat sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 yang memiliki 85 pelanggan. Melalui data ini, kelistrikan menjadi modal penting dalam merencanakan strategi pengembangan energi baru terbarukan yang telah menjadi tuntutan secara nasional.

**2.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum**

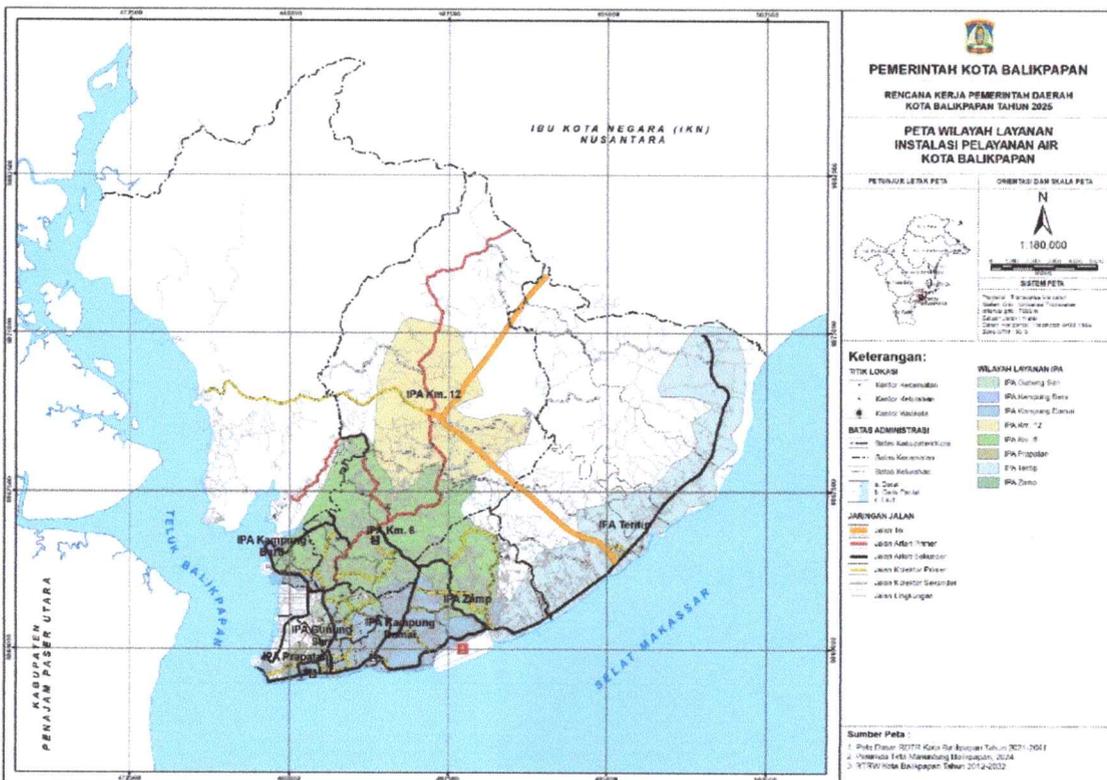
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih. Ketersediaan air bersih sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air bersih tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk produksi, seperti digunakan untuk aktivitas bisnis.

**Tabel 2. 5 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023**

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air yang Disalurkan (m <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
Sosial	1.583	1.279.314	3.580.888.164
Rumah Tangga	109.069	24.840.419	272.615.673.691
Instansi Pemerintah	263	417.516	2.034.237.393
Niaga	4.913	1.936.764	27.630.525.218
Industri	14	11.891	215.626.657
Khusus	547	335.256	6.423.996.167
<b>Jumlah</b>	<b>116.389</b>	<b>28.821.160</b>	<b>312.500.947.290</b>

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Jumlah pelanggan air bersih di Kota Balikpapan pada tahun 2023 mencapai 116.389 pelanggan. Total pelanggan tersebut didominasi pelanggan rumah tangga sebanyak 109.069 pelanggan dan niaga sebanyak 4.913 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 28.821.160m<sup>3</sup> dengan total nilai yang dihasilkan sebesar Rp 312.500.947.290. Adapun gambaran wilayah cakupan layanan instalasi air bersih Kota Balikpapan dapat dilihat pada peta berikut ini:



**Gambar 2. 8 Peta Wilayah Layanan Instalasi Air Bersih Kota Balikpapan**

Sumber: Dokumen RKPD Tahun 2025

Dokumen RISPAM menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Adapun tujuan pengembangan SPAM di antaranya mencakup, tersedianya air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum, tersedianya air setiap waktu atau kesinambungan dan tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau pemakai. Berikut pola skenario penyediaan air minum di Kota Balikpapan pada Tahun 2016-2035.



**Gambar 2. 9 Skenario penyediaan air minum Kota Balikpapan**

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kondisi eksisting pola penyediaan air minum Kota Balikpapan Tahun 2016 mencakup PDAM (76%), Perpipaan Non PDAM (12%) dan Non Perpipaan (12%). Terdapat tantangan dalam penyediaan air minum Kota Balikpapan, di antaranya keterbatasan sumber air baku, kualitas air permukaan dan air tanah, kehilangan air 30%, topografi berupa 85% berbukit dan keandalan penyediaan listrik. Berikut disajikan analisis pola penyediaan air minum di Kota Balikpapan hingga tahun 2035.

**Tabel 2. 6 Pola Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan (Liter/detik)	Pemenuhan Kebutuhan		
			PDAM (Liter/detik)	Perpipaan Non PDAM (Liter/detik)	Non Perpipaan (Liter/detik)
2016	625.968	1.781	1.220	214	214

2035	917.996	2.459	1.936	363	121
------	---------	-------	-------	-----	-----

Sumber: RISPAM Kota Balikpapan Tahun 2016-2035

Kebijakan untuk meningkatkan penyediaan air minum Kota Balikpapan di antaranya dengan meningkatkan layanan PDAM, pengendalian jaringan perpipaan PDAM dengan menggunakan air laut sebagai sumber air baku alternatif (10% air tanah dan 5% air laut), mengendalikan bukan jaringan perpipaan. Peningkatan layanan PDAM di antaranya dengan pemanfaatan *iddle capacity* dari sumber air baku eksisting, pengendalian kehilangan air secara bertahap (0,5% per tahun), dan pembangunan sumber air baku yang mencakup Bendungan Teritip (250 liter/detik), Embung Aji Raden (150 liter/detik) dan Waduk Wain (130 liter/detik) yang ditargetkan beroperasi tahun 2025. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan Waduk Semboja (100 liter/detik), Waduk Sepaku Semoi (150 liter/detik), Waduk Lambakan (1000 liter/detik) dan SPAM Regional Tebasabo (1700 liter/detik).

#### 2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting. Saat ini isu lingkungan hidup menjadi isu nasional dan global. Bahkan dalam setiap agenda pembangunan, aspek lingkungan hidup juga menjadi aspek yang selalu dipertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan lingkungan di suatu daerah.

##### 2.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup di antaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

**Tabel 2. 7 Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	88,92	88,52	84,29	89,98	NA
Indeks Kualitas Air	40,9	49,4	50,0	54,5	NA

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tutupan lahan	65,33	69,49	50,32	48,91	NA
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>65,09</b>	<b>69,18</b>	<b>63,96</b>	<b>67,64</b>	NA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mencatat bahwa IKLH Kota Balikpapan memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria capaian IKLH Kota Balikpapan tergolong sedang dari tahun 2015 hingga 2023. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balikpapan, memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2023. Capaian indeks kualitas air didominasi berkategori kurang dari tahun 2015-2023. Kondisi tersebut menunjukkan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga dapat memberikan dampak secara nyata terhadap kualitas air di Kota Balikpapan.

Penurunan nilai sekaligus predikat kualitas air tersebut dapat disebabkan karena telah terjadi kontaminasi dari zat pencemar terhadap tubuh air di Kota Balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah penambahan jumlah penduduk yang selanjutnya berdampak pada bertambahnya limbah cair domestik. Belum terkelolanya air limbah secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain itu, masih terdapat praktik usaha ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kladasan Kecil dan Kladasan II tahun 2016, dari 23 UKM yang diperkirakan limbahnya masuk ke Sungai Klandasan Kecil. Berdasarkan hasil pengukuran air limbah dari usaha kegiatan tersebut, beberapa parameternya melebihi baku mutu air limbah. Kenyataan tersebut menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbahnya secara langsung mencemari Sungai Klandasan Kecil. Meskipun berada di tengah kota, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih sangat kurang. Masih banyak kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan sarana dan prasarana yang sangat minim.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada tahun 2015-2017. Indeks kualitas udara kemudian mengalami penurunan kategori dari tahun 2018 menjadi kategori baik. Adanya penurunan kategori

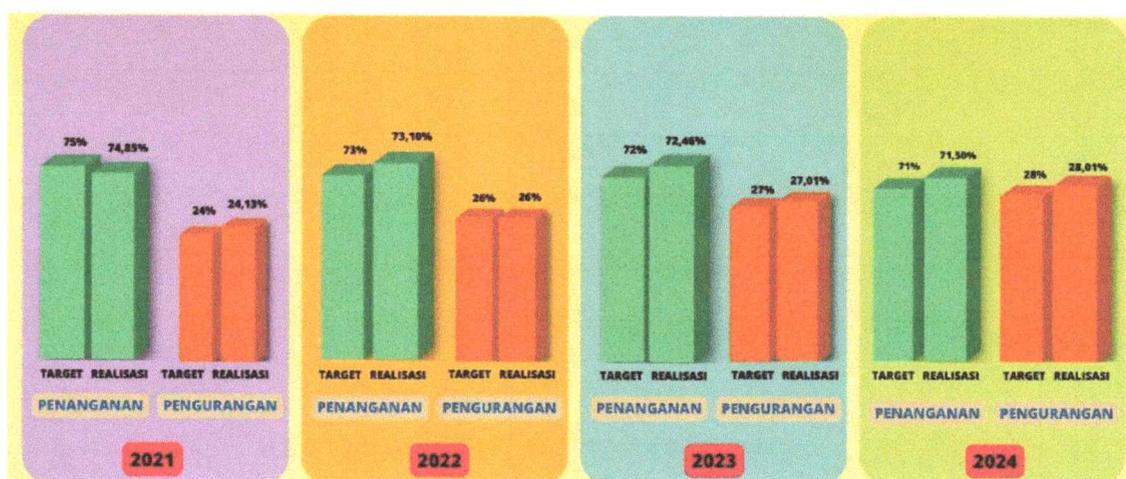
indeks kualitas udara tersebut disebabkan karena indikasi pencemaran udara di Kota Balikpapan.

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Balikpapan. Pertumbuhan pembangunan sektor industri yang relatif cepat, memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan melalui emisi yang dihasilkan oleh sektor industri. Tercatat penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7 persen, kemudian transportasi sebesar 11,7 persen dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8 persen. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga menyumbangkan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas tersebut mencapai 1.976.220 ton CO<sub>2e</sub> pada tahun 2010, atau mencakup 69,30 persen dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85 persen terhadap total emisi Kota Balikpapan pada tahun 2010. Dengan demikian, berbagai upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kota Balikpapan perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan demi terwujudnya penurunan emisi yang signifikan dan berimplikasi terhadap kualitas udara di Kota Balikpapan yang kembali berkategori sangat baik.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, dan menurun capaiannya pada tahun 2022 hingga 2023. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan di Kota Balikpapan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan (pengupasan lahan) dan perusakan ekosistem lahan mangrove. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kota Balikpapan, sehingga menjadi belum optimal hingga pada tahun 2023. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian IKTL Kota Balikpapan menjadi kategori baik. Adapun penurunan capaian IKTL tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi IKTL Kota Balikpapan oleh KLHK, yang berimplikasi terhadap perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618,3247 Ha.

### 2.1.5.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020.



**Gambar 2. 10 Pengelolaan Sampah di Sumbernya**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2021

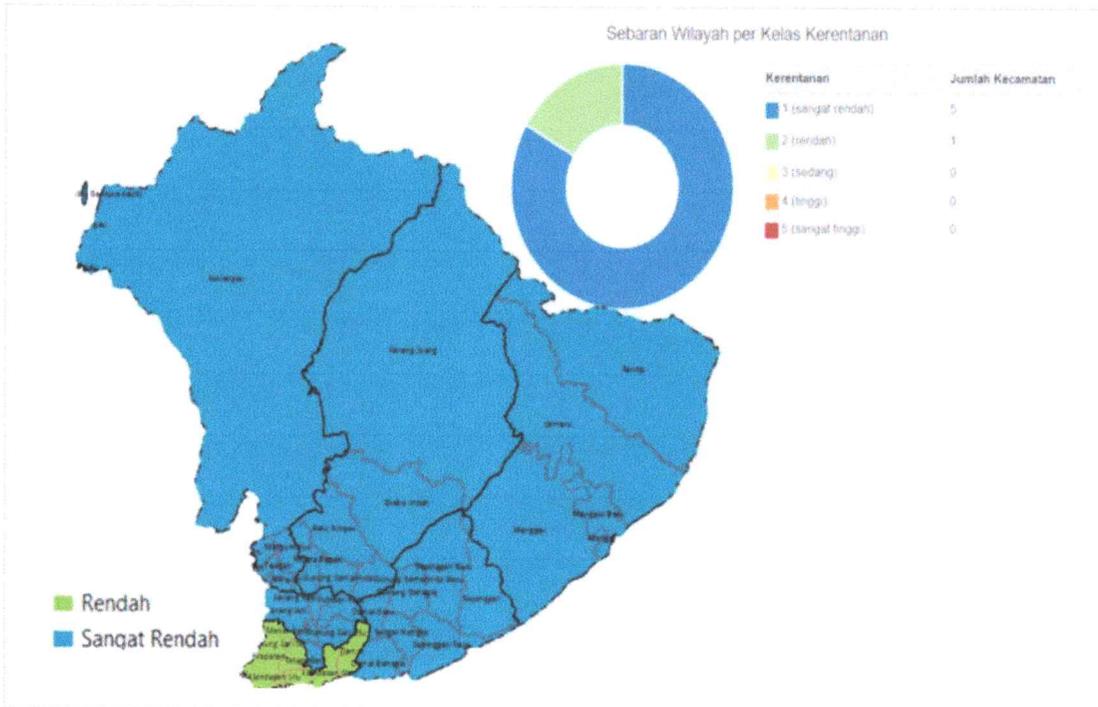
Persentase pengelolaan sampah di sumbernya di Kota Balikpapan belum mencapai hasil yang diharapkan hingga tahun 2024. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah menjadi penyebab terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Balikpapan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang didaur ulang.

Selain persampahan, layanan pengelolaan air limbah di Kota Balikpapan saat ini terdiri dari air limbah terpusat dengan jumlah sambungan rumah 1.308 SR yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya dengan sistem setempat baik yang individu maupun komunal. Prasarana air limbah komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung Bahagia (4 unit), Kelurahan Klandasan Ilir (1 unit), Kelurahan Margo Mulyo (6 unit), Kelurahan Damai (2 unit), Kelurahan Sepinggian (5 unit), Kelurahan Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), Kelurahan Damai Baru (1 unit), Kelurahan Gunung Samarinda (1 unit).

#### **2.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

Tahun 2019 menjadi tahun tertinggi angka bencana di Kota Balikpapan. Bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2019 adalah kebakaran hutan dan lahan yaitu sebanyak 125 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi 70 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan dan lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non-alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman/gedung. Dari data BPBD, kejadian kebakaran pemukiman/gedung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 39 kali terjadi kebakaran pemukiman/gedung, lalu meningkat tahun 2016 menjadi 44 kali. Hingga tahun 2019, kebakaran pemukiman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak 51 kali.



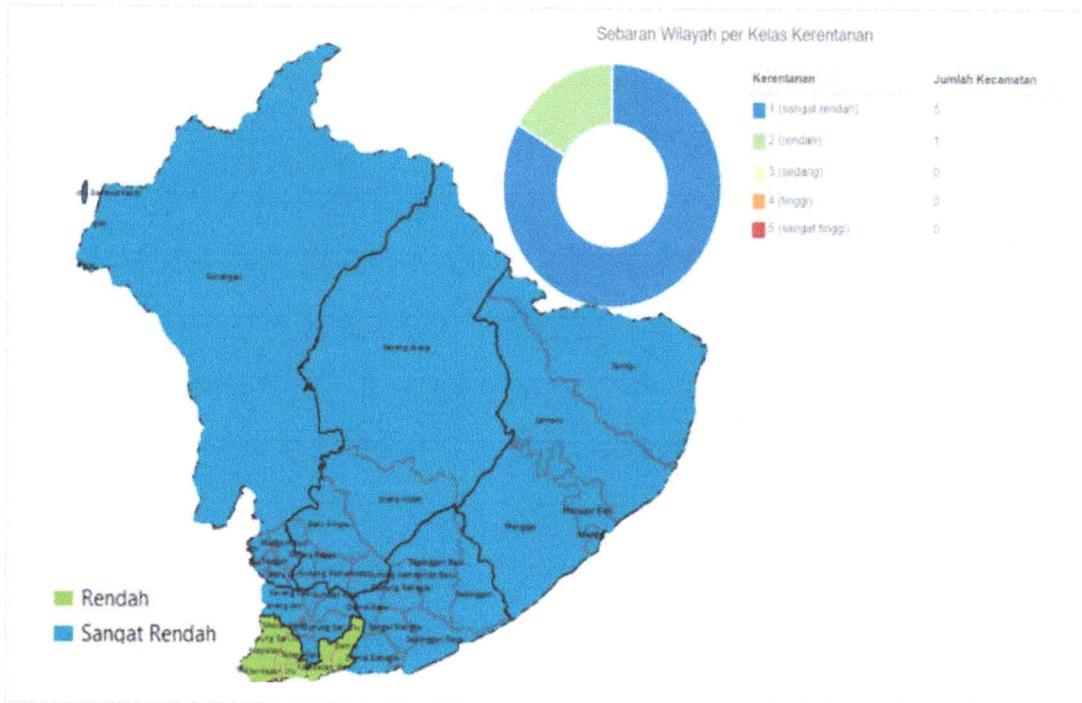
**Gambar 2. 11 Peta indeks kerentanan perubahan iklim di Kota Balikpapan**

*Sumber: KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029*

Selain risiko bencana, Kota Balikpapan juga memiliki potensi dampak perubahan iklim global. Beberapa dampak perubahan iklim tersebut, lebih lanjut lagi juga memberikan dampak kebencanaan bagi suatu daerah termasuk di Kota Balikpapan. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, hingga bencana kekeringan merupakan beberapa contoh bencana yang dapat terjadi akibat perubahan iklim di Kota Balikpapan. Dengan demikian berbagai upaya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan.

#### **2.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK**

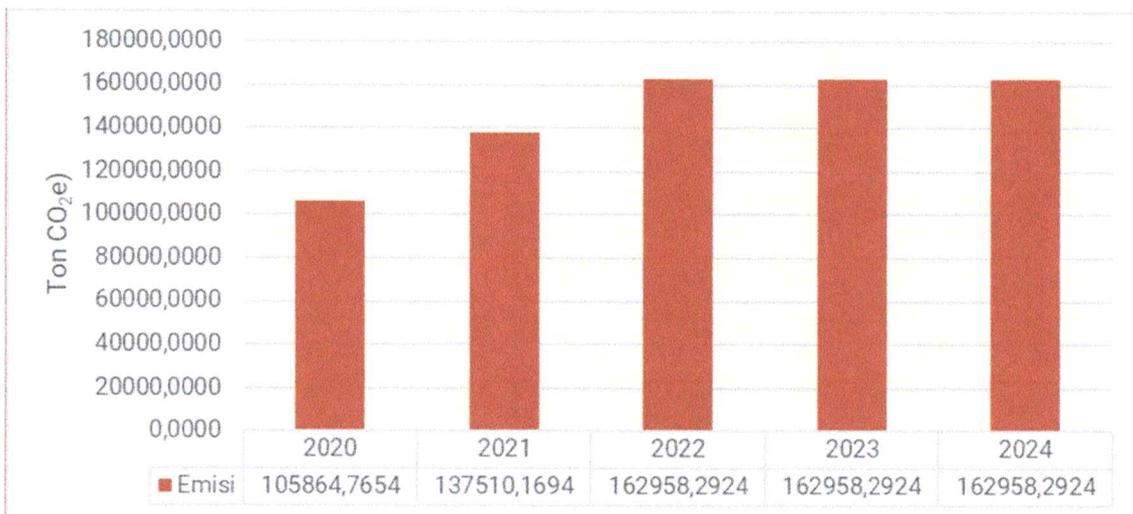
Dalam beberapa tahun terakhir, isu iklim semakin menguat disebabkan oleh peningkatan suhu global, peningkatan kejadian cuaca ekstrem, dan bencana alam. Fenomena ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampak iklim yang sudah terjadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Gangguan yang diakibatkan pada sistem cuaca dan meningkatnya frekuensi kejadian ekstrem diperkirakan akan mengganggu produksi pangan global, memperburuk kelangkaan air, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan bencana alam, serta mengganggu kenyamanan berkehidupan.



**Gambar 2. 12 Peta indeks kerentanan perubahan iklim di Kota Balikpapan**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029

Salah satu faktor pendorong perubahan iklim, diantaranya peningkatan suhu global, yang mana peningkatan suhu tersebut dipengaruhi oleh beberapa aktivitas, termasuk emisi gas rumah kaca yang meningkat. Kota Balikpapan juga memiliki potensi dampak perubahan iklim global. Sebagai bentuk respon terhadap potensi dampak perubahan iklim tersebut, maka diperlukan upaya yang berkaitan dengan aksi-aksi penurunan intensitas emisi GRK.



**Gambar 2. 13 Potensi penurunan emisi**

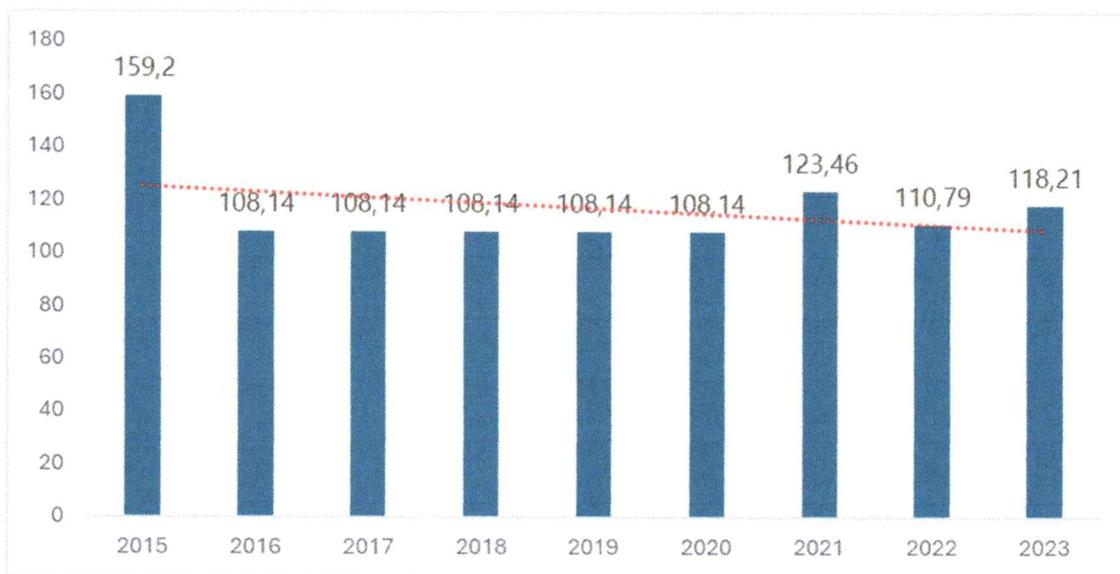
Sumber: Bappenas, 2025

Upaya terhadap penurunan intensitas emisi GRK, diantaranya dapat dilakukan terhadap berbagai sektor pembangunan, yang sekiranya dinilai memberikan kontribusi besar terhadap emisi GRK di Kota Balikpapan. Apabila tidak dilakukan respon yang tepat terhadap pengurangan emisi GRK dalam berbagai sektor pembangunan tersebut, dikhawatirkan Kota

Balikpapan dapat mengalami dampak signifikan dari dinamika perubahan iklim global. Beberapa dampak perubahan iklim tersebut, lebih lanjut lagi juga memberikan dampak kebencanaan bagi suatu daerah termasuk di Kota Balikpapan. Kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, hingga bencana kekeringan merupakan beberapa contoh bencana yang dapat terjadi akibat perubahan iklim di Kota Balikpapan. Dengan demikian berbagai upaya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan.

#### 2.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah wilayah yang mempunyai pola kejadian bencana yang terjadi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari karakteristik fisik dan sosial daerah tersebut. Salah satu indikator yang menilai terkait kerawanan bencana adalah Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (IRBI). Indeks risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2015-2023 disajikan sebagai berikut ini.



**Gambar 2. 14 Indeks risiko bencana Kota Balikpapan Tahun 2015-2023**

*Sumber: BNPB, 2024*

Indeks risiko bencana di Kota Balikpapan memiliki tren yang cenderung menurun, dan termasuk dalam kategori sedang hingga capaian termutakhir di tahun 2023. Artinya, kapasitas dalam penanggulangan bencana yakni dari sisi struktural maupun non struktural semakin optimal di Kota Balikpapan. Adapun nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020.

### **2.1.6.3 Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks ketahanan daerah merupakan komponen dari tingkat kapasitas daerah dinilai berdasarkan capaian para pemangku kebijakan (instansi/lembaga) di level pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Ketahanan daerah Kota Balikpapan berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah sebesar 0,630 yang berarti kapasitas daerah berada pada kelas Sedang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan dukungan kebijakan sistematis. Capaian yang diperoleh masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen dan pelaksanaan kebijakan yang lebih komprehensif sehingga dapat memaksimalkan pengurangan dampak negatif dari bencana, terutama untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

### **2.1.7 Demografi**

Demografi memiliki peran penting dalam perencanaan di suatu wilayah karena perubahan struktur penduduk secara langsung memengaruhi kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, serta tata guna lahan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kepadatan, dan pola migrasi menentukan bagaimana suatu wilayah berkembang dan beradaptasi terhadap tantangan masa depan.

Wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi memerlukan perencanaan yang matang dalam penyediaan perumahan, transportasi, dan fasilitas umum. Selain itu, pergerakan penduduk dari desa ke kota menciptakan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, integrasi data demografi dalam proses perencanaan di suatu wilayah menjadi suatu keharusan guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Demografi di Kota Balikpapan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, serta migrasi penduduk baik masuk maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk. Informasi

demografi yang tersedia akan menjadi dasar dalam perencanaan proyeksi kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kota Balikpapan.

### 2.1.7.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk mencerminkan besaran populasi yang menetap di suatu daerah pada periode tertentu, sedangkan laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini penting untuk memahami perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur serta layanan publik di suatu wilayah. Dengan mengetahui tren pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Pusat Statistik melalui laporan tahunan Kota Balikpapan dalam Angka 2025 menyebutkan bahwa terdapat 717.231 penduduk yang berada di Kota Balikpapan pada tahun 2024. Data tersebut merupakan gabungan dari 366.045 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 351.186 lainnya adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebanyak 7.196 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah penambahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh persentase laju pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2024 di Kota Balikpapan.



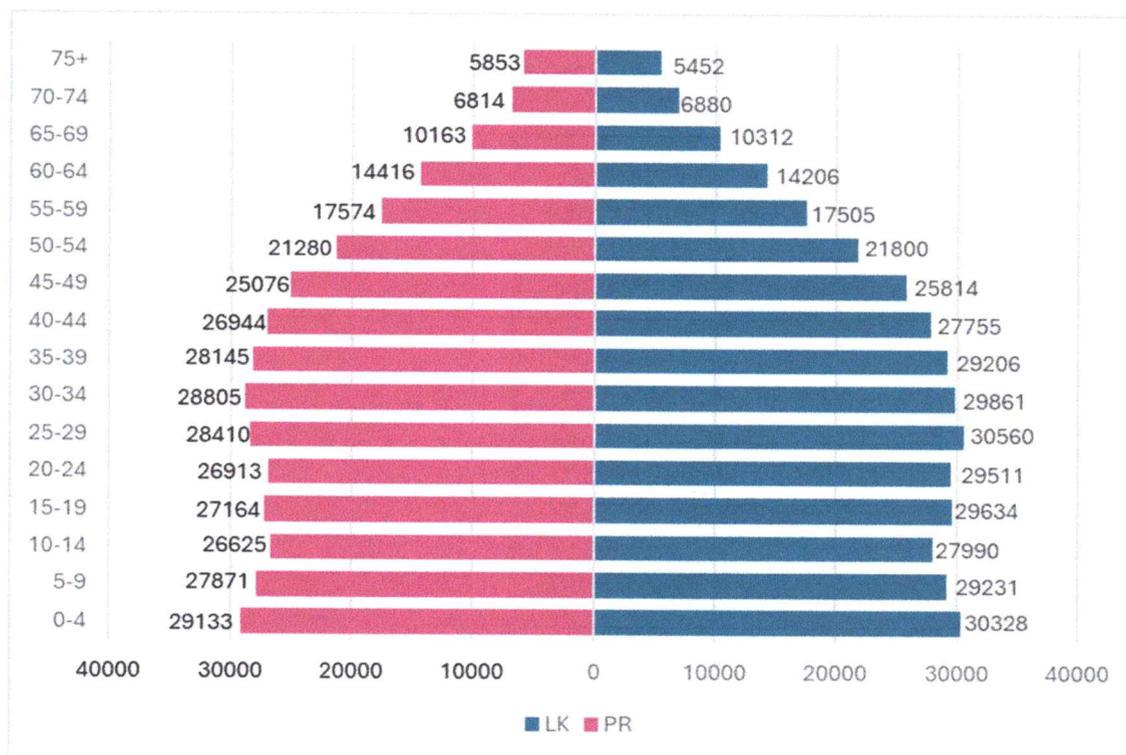
**Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan 2020-2024**

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka, 2025, diolah

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di Kota Balikpapan terjadi pada tahun 2020, yakni bertambah hingga 33.140 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 5,06 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi akibat adanya pendataan ulang melalui sensus penduduk 10 tahunan. Adanya sensus penduduk pada tahun 2020 menyebabkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal itu mengindikasikan bahwa data kependudukan tahun 2019 yang menggunakan angka proyeksi dengan data dasar sensus penduduk tahun 2010 lebih kecil dibandingkan jumlah riil penduduk sebelum dilakukan sensus penduduk 2020. Implikasi lain dari pembaharuan data kependudukan melalui sensus penduduk tersebut adalah adanya laju pertumbuhan penduduk yang lebih stabil pada tahun 2021 hingga 2024. Hal itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan yang cenderung berada pada angka 0,9 persen hingga 1,20 persen setelah basis data sensus penduduk 10 tahunan diperbaharui. Selain itu, adanya disrupsi pandemi Covid-19 juga turut andil dalam lebih rendahnya laju pertumbuhan penduduk dibandingkan sebelum sensus.

#### **2.1.7.2 Komposisi Penduduk**

Komposisi penduduk merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk memberikan gambaran mengenai berbagai aspek, seperti proporsi tenaga kerja produktif dan non-produktif, potensi bonus demografi, serta angka ketergantungan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan. Komposisi penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2024 berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin disajikan dalam gambar di bawah ini.



**Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2024**

Sumber: Kota Balikpapan dalam Angka 2025

Komposisi penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia dan jenis kelamin pada tahun 2024 menunjukkan bentuk struktur piramida stasioner. Bentuk piramida yang demikian mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk relatif stabil antara kelompok usia produktif maupun non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk usia produktif, yakni sebesar 69,79 persen dengan rincian 51,11 persen di antaranya laki-laki dan 48,89 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 23,87 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia hanya 6,34 persen. Usia produktif dianggap sebagai masa seorang individu memasuki usia kerja, yakni 15-64 tahun. Kelompok usia produktif yang lebih banyak dibandingkan non produktif menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi, terutama ketika mempertimbangkan besaran rasio ketergantungan yang dimiliki. Data pada piramida penduduk di atas menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki rasio ketergantungan sebesar 43,28 persen. Rasio ketergantungan yang masih berada di bawah angka 45 persen menunjukkan bahwa Kota Balikpapan mengalami bonus demografi pada tahun 2024. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota

Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

#### 2.1.7.3 Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kota Balikpapan dapat dianalisis melalui perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Penghitungan rasio ini berperan dalam memahami proporsi penduduk laki-laki dan perempuan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin dalam data rasio jenis kelamin atau *sex ratio* yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai *sex ratio* penduduk Kota Balikpapan, berdasarkan data awal tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 8 Sex Ratio Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
2020	352.802	335.516	688.318	105,15
2021	355.848	339.439	695.287	104,83
2022	359.563	344.048	703.611	104,51
2023	362.767	347.268	710.035	104,54
2024	366.045	351.186	717.231	104,54

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2021-2025

Angka *sex ratio* di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Angka *sex ratio* yang mencapai 105,15 poin pada tahun 2020 menunjukkan adanya 105 hingga 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* yang semakin mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kota Balikpapan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, dan adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut yang dapat diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah

#### 2.1.7.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk menghitung jumlah individu pada suatu populasi dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota

Balikpapan pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Balikpapan Selatan	38,81	145.007	3.689,75	146.689	3.732,54	148.650	3.782,44	158.320	4.079,36	163.660	4.164,38
2	Balikpapan Timur	119,16	90.243	752,09	92.542	771,25	95.064	792,27	102.959	864,04	106.968	891,47
3	Balikpapan Utara	138,24	169.150	1.237,65	172.117	1.259,36	175.440	1.283,68	188.605	1.364,33	195.158	1.427,95
4	Balikpapan Tengah	10,83	106.952	9.8748,25	106.960	9.848,99	107.155	9.866,94	105.749	9.764,45	106.282	9.814
5	Balikpapan Barat	192,88	94.123	488,09	94.130	488,12	94.302	489,02	85.078	441,09	99.404	515
6	Balikpapan Kota	11,1	82.843	7.292,52	82.849	7.293,05	83.000	7.306,34	97.821	8.812,70	85.946	7.743
<b>Kota Balikpapan</b>		511,01	688.318	1.346,98	695.287	1.360,61	703.611	1.376,90	738.532	1.445,24	757.418	1.482,2

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2021-2025

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2024. Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Balikpapan, yakni mencapai 9.814 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Pada sisi yang berlawanan, tingkat kepadatan penduduk terendah ditempati oleh Balikpapan Barat yang hanya mencapai 5,25 persen dari tingkat kepadatan penduduk di Balikpapan Tengah. Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kota Balikpapan.

#### **2.1.7.5 Keberadaan Masyarakat Adat**

Masyarakat adat merujuk pada kelompok atau komunitas yang tumbuh tak terpisahkan dan memiliki hubungan organik dengan lingkungannya. Masyarakat adat cenderung memiliki ikatan yang kuat antar anggota kelompoknya dan bersifat sukarela. Umumnya setiap anggota masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur dan menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai macam persoalan yang terjadi pada lingkungan adat terkait. Kota Balikpapan belum memiliki masyarakat adat yang dikukuhkan dalam masyarakat hukum adat (MHA) melalui peraturan daerah. Hal itu dikarenakan Kota Balikpapan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan multikultur layaknya kota besar lainnya. Daya tarik Kota Balikpapan sebagai daerah perkotaan mendorong berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi suku, etnis, dan budaya berkumpul dan menjadi penduduk di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, mengacu pada sejarah Kota Balikpapan, penamaan Balikpapan berasal dari Suku Balik yang mendiami pesisir Kota Balikpapan. Penambahan kata papan dikarenakan Suku Balik pada zaman dahulu kerap membuat papan untuk menyuplai kebutuhan kerajaan saat itu, yakni Kerajaan Kutai. Namun, ketika ditarik garis historis yang jauh, Suku Balik juga bukan suku asli dari Kota Balikpapan, melainkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **2.1.7.6 Proyeksi Penduduk**

Proyeksi demografi berfokus untuk menganalisis perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan pengelompokannya, seperti data penduduk berdasarkan jumlah, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan umur di Kota Balikpapan. Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui

kondisi penduduk lanjut usia, penduduk usia sekolah, rasio ketergantungan, dan bonus demografi. Berikut merupakan hasil proyeksi kependudukan di Kota Balikpapan selama rentang tahun 2025 hingga 2029.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk

Analisis terhadap dinamika kependudukan penting untuk dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek yang penting untuk dianalisis adalah jumlah, laju pertumbuhan penduduk, dan tingkat kepadatan penduduk. Masing-masing dari indikator tersebut memberikan gambaran kondisi kependudukan yang berbeda-beda dan saling melengkapi satu sama lain. Proyeksi demografi Kota Balikpapan memanfaatkan data kependudukan tahun 2020 sebagai data dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kota Balikpapan pada aspek jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2025 hingga 2029.



**Gambar 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035 hasil sensus penduduk 2020; hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada periode 2025 hingga 2029. Hal serupa terjadi dengan laju pertumbuhan penduduknya yang diproyeksikan secara konsisten mengalami peningkatan selama periode yang sama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,73 persen. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan bertambah sebanyak 56,03 ribu jiwa selama periode 2025-2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan *total fertility*

*rate* (TFR) yang berada pada angka 2,04. TFR mengindikasikan bahwa pada tahun 2025 hingga 2029, populasi di Kota Balikpapan akan cenderung bertumbuh. Hal itu dikarenakan TFR menunjukkan jumlah anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada masa reproduksinya. Angka TFR 2,04 merujuk rata-rata seorang perempuan di Kota Balikpapan melahirkan dua orang anak yang diharapkan mampu meneruskan keturunan sehingga menjaga laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan.

b. Kepadatan Penduduk

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan adalah tingkat kepadatan penduduk. Kota Balikpapan yang menyandang status sebagai kota besar dan menjadi salah satu mitra IKN memiliki peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan harus didasarkan pada kondisi kependudukan dalam hal ini tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2029.

**Tabel 2. 10 Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2025	2026	2027	2028	2029
Balikpapan Selatan	38,81	3988,10	4073,85	4158,77	4257,00	4369,23
Balikpapan Timur	119,16	840,27	867,73	895,05	925,25	958,59
Balikpapan Utara	138,24	1327,97	1363,43	1398,56	1438,11	1482,35
Balikpapan Tengah	10,83	9920,68	9721,24	9747,55	9803,97	9890,30
Balikpapan Barat	192,88	501,37	505,75	510,05	515,95	523,48
Balikpapan Kota	11,1	7460,63	7485,95	7510,18	7558,02	7629,37
<b>Kota Balikpapan</b>	<b>511,01</b>	<b>1419,62</b>	<b>1440,11</b>	<b>1465,14</b>	<b>1494,80</b>	<b>1529,29</b>

*Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035;*

*hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020*

Hasil proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kota Balikpapan terpusat di wilayah perkotaan. Pola kepadatan penduduk dari hasil

proyeksi di atas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat ini. Dari 6 kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi secara berurutan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, dan Kecamatan Balikpapan Selatan. Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan disebabkan oleh wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Balikpapan Kota, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Balikpapan. Sementara Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah merupakan kecamatan-kecamatan yang wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan wilayah perkotaan, seperti Kecamatan Balikpapan Barat.

Dalam konteks perkotaan, penambahan penduduk akan selalu meningkat karena kota selalu memiliki daya tarik bagi masyarakat terutama seperti Kota Balikpapan. Kota menyediakan berbagai fasilitas layanan dasar yang memadai dan berkualitas sehingga membuat sebuah kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena adanya mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun di sisi lain menimbulkan tantangan bahkan permasalahan khas perkotaan, seperti wilayah kumuh, kriminalitas, perilaku agresif dan sejenisnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi kebijakan yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni.

c. Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk yang dapat menjadi dasar kebijakan di Kota Balikpapan salah satunya adalah proyeksi penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif menjadi salah satu kriteria yang diproyeksi karena mampu memberikan gambaran penduduk yang masuk dalam usia kerja di Kota Balikpapan. Penduduk usia kerja tersebut berada di antara usia 15-64 tahun. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk berdasarkan komposisi umur yang termasuk pula penduduk usia produktif di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

**Tabel 2. 11 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Komposisi Umur Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Komposisi umur	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	171,32	171,93	172,96	174,43	176,33
15-64	505,82	512,64	521,21	531,57	543,89
65+	48,3	51,35	54,54	57,85	61,25
Angka ketergantungan	43,42%	43,55%	43,65%	43,70%	43,68%

Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035;

hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produktif yang berada pada usia 15-64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan sebanyak 505,82 ribu jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,67 persen. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk usia non produktif pada rentang usia 10-14 tahun pada tahun 2020-2025. Kelompok penduduk usia tersebut memasuki usia produktif dan ikut menyumbang proporsi dan jumlah penduduk usia produktif sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif yakni semakin banyak pula penduduk usia kerja yang ada di Kota Balikpapan. Banyaknya penduduk usia produktif yang diproyeksikan mencapai 69,60 persen pada tahun 2029 dari total keseluruhan jumlah penduduk dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila jumlah penduduk usia produktif yang tersedia juga memiliki kualitas yang baik dan mampu mengoptimalkan kesempatan yang ada pada aspek ketenagakerjaan. Tingginya tingkat pengangguran terbuka pada kondisi eksisting perlu mendapatkan perhatian lebih jauh, terutama ketika merespon peningkatan penduduk usia produktif selama lima tahun ke depan. Masalah tingginya TPT yang tidak diselesaikan pada masa kini berpotensi mengalami peningkatan selama lima tahun ke depan. Hal itu dapat mengakibatkan berbagai problematika turunan bagi Kota Balikpapan, terutama apabila banyaknya kuantitas dari penduduk usia produktif tidak sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.

d. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan penduduk usia kerja dengan penduduk usia tidak bekerja. Angka ketergantungan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Hasil proyeksi angka ketergantungan Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan setiap periode. Pada tahun 2025 proyeksi menunjukkan angka ketergantungan sebesar 43,42 persen dan meningkat menjadi 43,68 persen pada tahun 2029. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2025, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja akan menanggung 43 hingga 44 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif. Dari segi jumlah, tanggungan penduduk usia produktif pada tahun 2029 tidak bertambah atau maksimal bertambah satu penduduk non produktif per 100 penduduk usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Namun kondisi tersebut juga perlahan memberikan pengaruh terhadap produktivitas penduduk usia produktif di Kota Balikpapan. Implikasi dari beban tanggungan yang terus bertambah adalah adanya potensi perlambatan kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif.

Meningkatnya angka ketergantungan di Kota Balikpapan disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif. Hasil proyeksi terhadap penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 171,32 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi 176,33 ribu jiwa pada tahun 2029. Hal itu dipengaruhi dengan laju pertumbuhannya yang cenderung lambat, namun terus mengalami peningkatan hingga menjadi rata-rata pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang diproyeksikan menurun yang berpengaruh terhadap penduduk umur 0-14 tahun. Selain itu, tren

serupa terjadi pada kelompok usia non produktif yang berusia di atas 65 tahun. Laju pertumbuhan dari kelompok usia non produktif 65 tahun ke atas menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi di setiap periode dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,14 persen. Secara absolut penduduk usia 65 tahun ke atas diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2025 hingga 2029, yakni sebanyak 12,95 ribu jiwa. Pertambahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup penduduk Kota Balikpapan ke depannya semakin baik. Namun, kondisi ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak produktif atau lanjut usia maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjamin kesejahteraan kelompok usia tersebut.

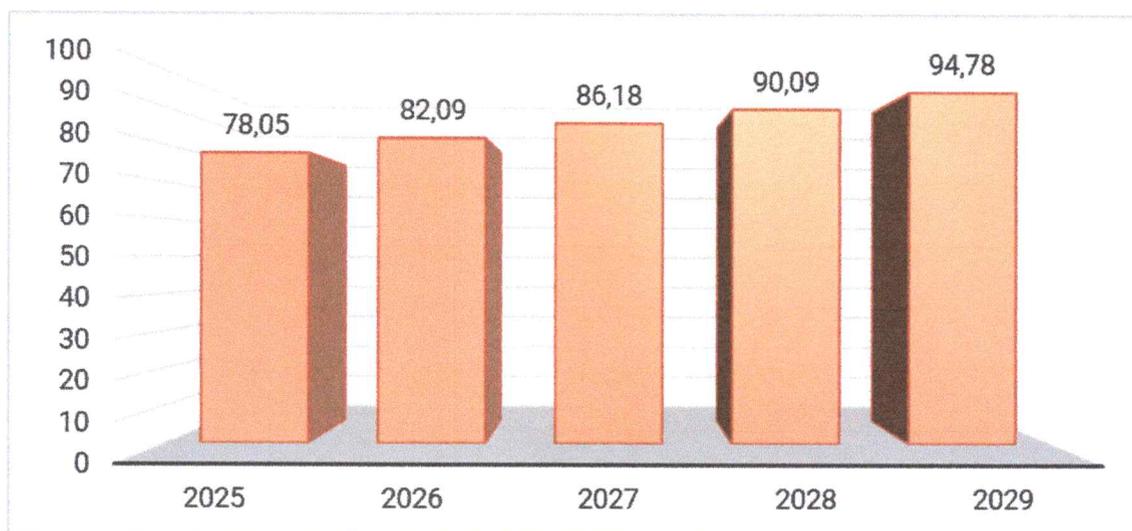
e. Bonus Demografi

Bonus demografi dimaknai sebagai masa di mana penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lebih dari 60 persen. dari total jumlah penduduk. Proporsi tersebut dapat dilihat melalui hasil proyeksi komposisi penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Selain dari aspek komposisi penduduk, ada atau tidaknya momentum bonus demografi di Kota Balikpapan dapat dilihat melalui angka ketergantungan yang dimiliki. Kota Balikpapan dianggap mendapatkan bonus demografi apabila angka ketergantungannya di bawah 45 persen.

Data hasil proyeksi komposisi penduduk dan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Kota Balikpapan akan menghadapi fase bonus demografi pada periode yang sama. Meskipun begitu, Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal karena terdapat tren peningkatan angka ketergantungan pada tahun 2025-2029. Hal itu ditandai pula dengan penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara penduduk usia non produktif semakin meningkat. Semakin tingginya angka ketergantungan di suatu daerah akan memengaruhi tingkat produktivitas di daerah tersebut akibat semakin tinggi pula beban tanggungan penduduk produktif terhadap penduduk non produktif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan sekaligus mengantisipasi dinamika kependudukan selama lima tahun ke depan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

f. Penduduk Usia Lanjut

Perubahan komposisi penduduk Kota Balikpapan di atas berdampak pada bertambahnya penduduk lanjut usia karena adanya penurunan fertilitas dan peningkatan angka harapan hidup. Penduduk lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk usia lanjut di Kota Balikpapan pada tahun 2025-2029.



**Gambar 2. 18 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Lanjut (Ribu Jiwa) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

*Sumber: Dokumen BPS Proyeksi penduduk Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035;*

*hasil olah data BPS long form survey penduduk 2020*

Pada tahun 2025 jumlah lansia sebanyak 78,05 ribu jiwa dan mengalami penambahan secara signifikan menjadi 94,78 ribu jiwa pada tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 4,94 persen. Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena di satu sisi Pemerintah Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kondisi lansia. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih mandiri

## **2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Bagian ini akan mengulas dua aspek utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Aspek kesejahteraan ekonomi mencakup data ekonomi makro yang menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut, sementara aspek kesejahteraan sosial

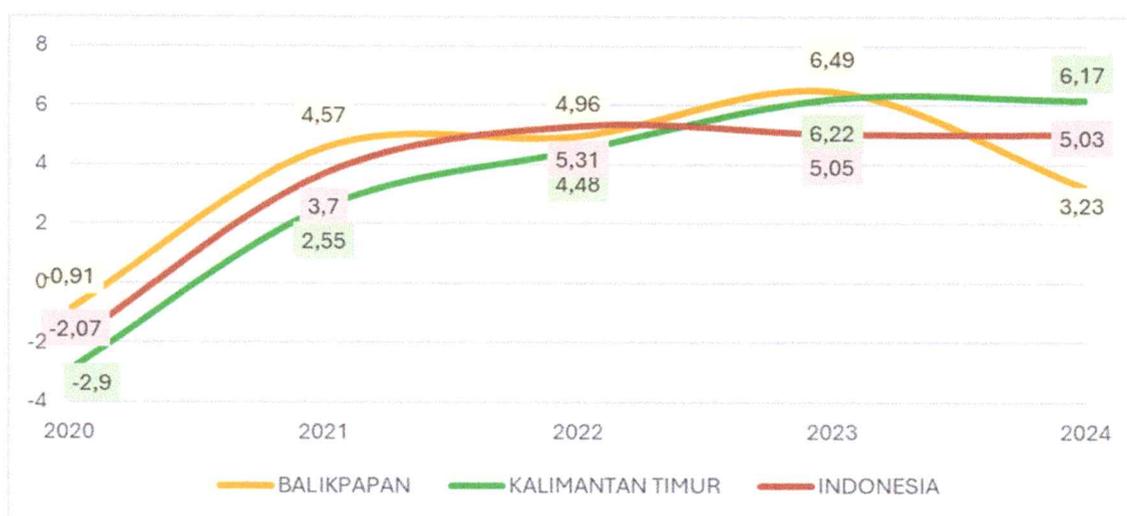
budaya berisi berbagai data makro yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, maupun papan. Kondisi ekonomi daerah dan masyarakat Kota Balikpapan diantaranya dapat digambarkan melalui beberapa indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut penjabaran berbagai data tersebut yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Balikpapan.

#### 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator ekonomi makro yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan produksi barang dan jasa. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



**Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024.**

Sumber : BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan memiliki tren fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 kemudian meningkat hingga 6,49 persen pada tahun 2023 dan menurun lagi pada tahun 2024 menjadi 3,23 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2020-2024 sebesar 3,6

persen. Rata-rata pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,3 persen dan nasional sebesar 3,4. Penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 disebabkan karena akibat pandemi Covid-19 namun kembali tumbuh positif sejak tahun 2021.

**Tabel 2. 12 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	752.931,32	770.543,55	785.789,68	798.413,90	793.320
B	Pertambangan dan Penggalian	37.656,73	39.076,39	37.185,60	37.804,24	42.140
C	Industri Pengolahan	46.877.785,28	49.028.621,09	51.352.469,24	54.532.519,46	54.512.240
D	Pengadaan Listrik dan Gas	81.902,24	85.086,57	88.876,75	102.415,08	109.910
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62.757,80	63.934,81	68.045,58	71.439,66	76.450
F	Konstruksi	11.084.167,31	11.646.022,83	11.268.748,09	12.040.816,68	12.800.090
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.757.018,53	7.235.431,54	7.844.556,64	8.288.549,61	9.098.150
H	Transportasi dan Pergudangan	5.405.994,30	5.527.050,52	6.406.269,54	7.097.481,50	7.667.270
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.206.931,44	1.230.154,74	1.347.790,15	1.412.207,58	1.570.640
J	Informasi dan Komunikasi	3.237.909,36	3.493.220,02	3.770.314,31	3.975.197,07	4.267.270
K	Jasa Keuangan	2.670.128,50	2.748.497,58	2.993.329,46	3.291.333,01	3.468.140
L	Real Estate	1.401.437,25	1.403.667,74	1.434.419,68	1.476.411,21	1.552.230
M,N	Jasa Perusahaan	207.173,56	215.291,98	226.766,54	238.034,20	254.780
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	939.939,35	954.811,42	1.035.751,99	1.106.280,22	1.212.830
P	Jasa Pendidikan	1.195.361,44	1.208.434,40	1.233.191,98	1.282.070,63	1.352.440
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552.151,62	611.164,30	641.041,18	678.601,67	714.420
R,S,T,U	Jasa Lainnya	563.464,84	570.681,06	607.610,01	630.577,09	699.420
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	83.034.710,87	86.831.690,55	91.142.156,42	97.060.152,81	100.191.740

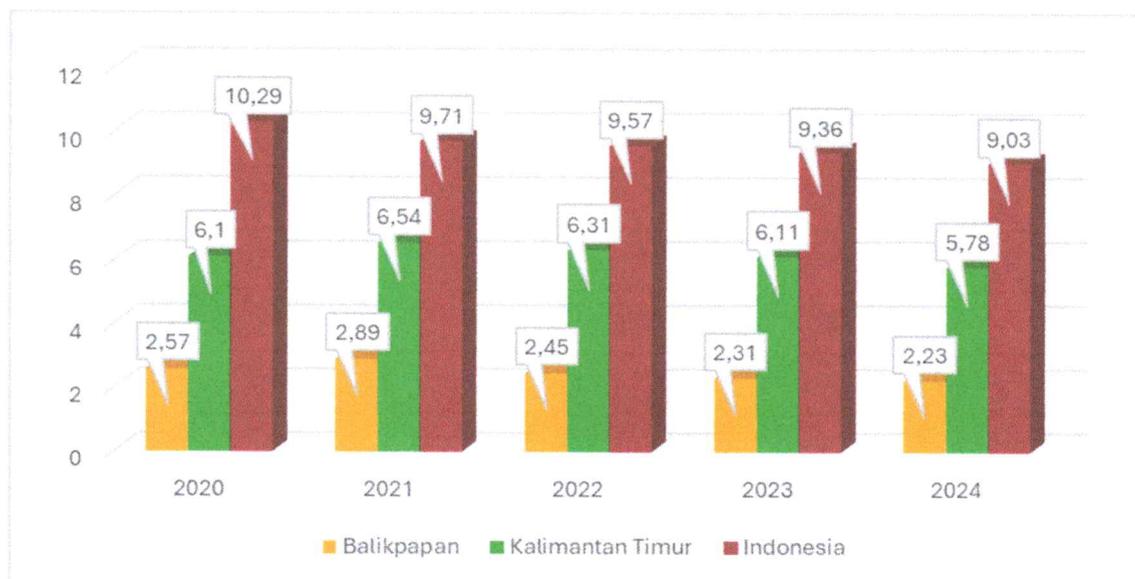
Sumber : BPS Kota Balikpapan, 2025

Sektor industri pengolahan Kota Balikpapan secara keseluruhan mengalami penurunan kontribusi terhadap perlambatan ekonomi. Pada tahun 2023, sektor ini tumbuh lebih pesat dengan kontribusi sebesar 53,74 persen, namun pada 2024 mengalami kontraksi hingga 0,65 persen.

### 2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang berkaitan dengan

makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui tingkat pengeluaran. Penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Berikut tingkat kemiskinan Kota Balikpapan 2020-2024.



**Gambar 2. 20 Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia tahun 2020-2024.**

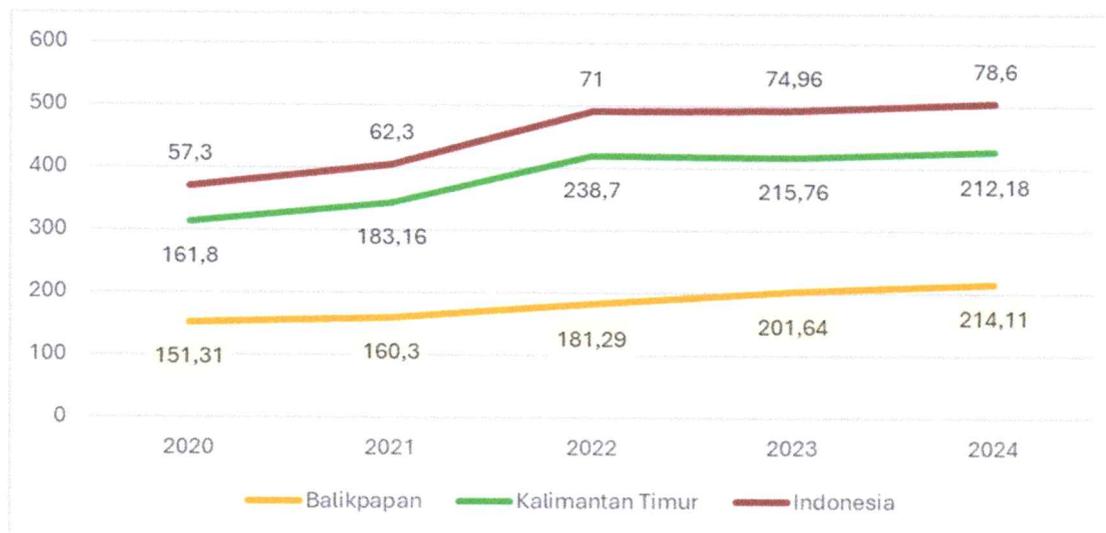
Sumber : BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

Tingkat kemiskinan di Balikpapan menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat kemiskinan di Balikpapan berkurang dari 2,57 persen pada tahun 2020 menjadi 2,23 persen pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,99 persen per tahun. Penurunan kemiskinan Kota Balikpapan selaras dengan penurunan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Balikpapan juga menunjukkan kinerja yang baik di mana angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya sebesar 0,79 persen pada tahun 2021 terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,20 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan jumlah penduduk Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem atau kurang dari 1,9 USD per orang per hari semakin berkurang. Penurunan kemiskinan di Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 didukung oleh beberapa faktor seperti subsidi kesehatan seperti BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan berupa penghapusan biaya SPP, serta peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan dan pendidikan.

### 2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menjelaskan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB daerah dengan jumlah

penduduknya, sehingga memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan individu dalam satu tahun. PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut PDRB per kapita Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



**Gambar 2. 21 PDRB Per Kapita Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Indonesia tahun 2020-2024.**

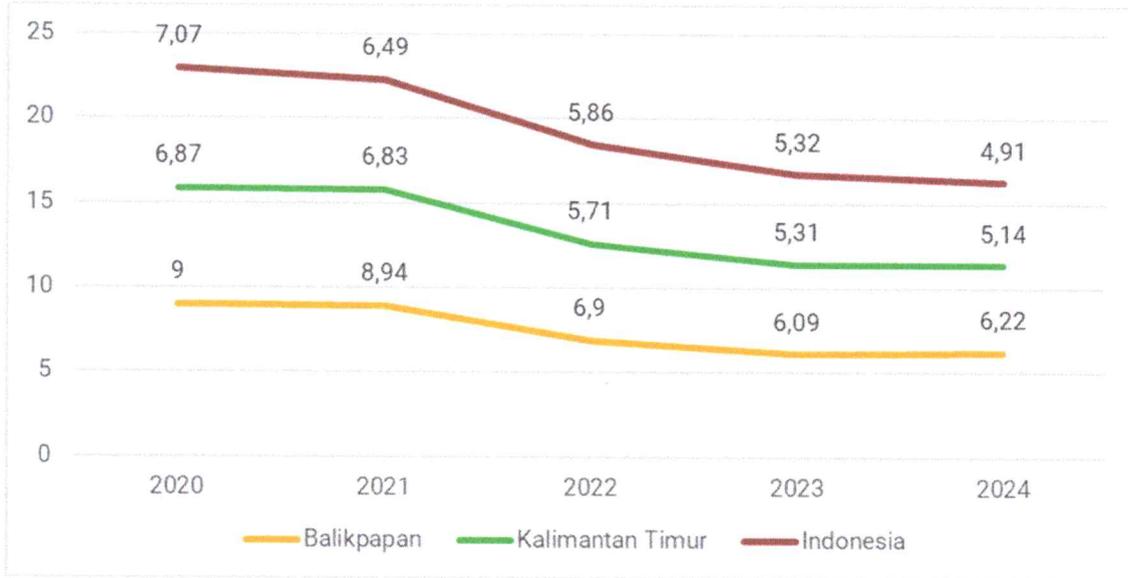
Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI, 2025

PDRB per kapita Kota Balikpapan menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. PDRB per kapita ini meningkat sebesar 62,8 juta rupiah dari 151,31 juta rupiah menjadi 214,11 juta rupiah. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan sektor jasa dan industri yang pesat. Akan tetapi, pertumbuhan yang terjadi masih dibawah PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Balikpapan.

#### **2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri merujuk pada angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum memulai pekerjaan. TPT yang tinggi mengindikasikan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, diskriminasi dalam rekrutmen, rendahnya permintaan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, kondisi ekonomi yang buruk, atau perubahan dalam struktur industri akibat

adopsi teknologi. Tingkat pengangguran terbuka dapat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



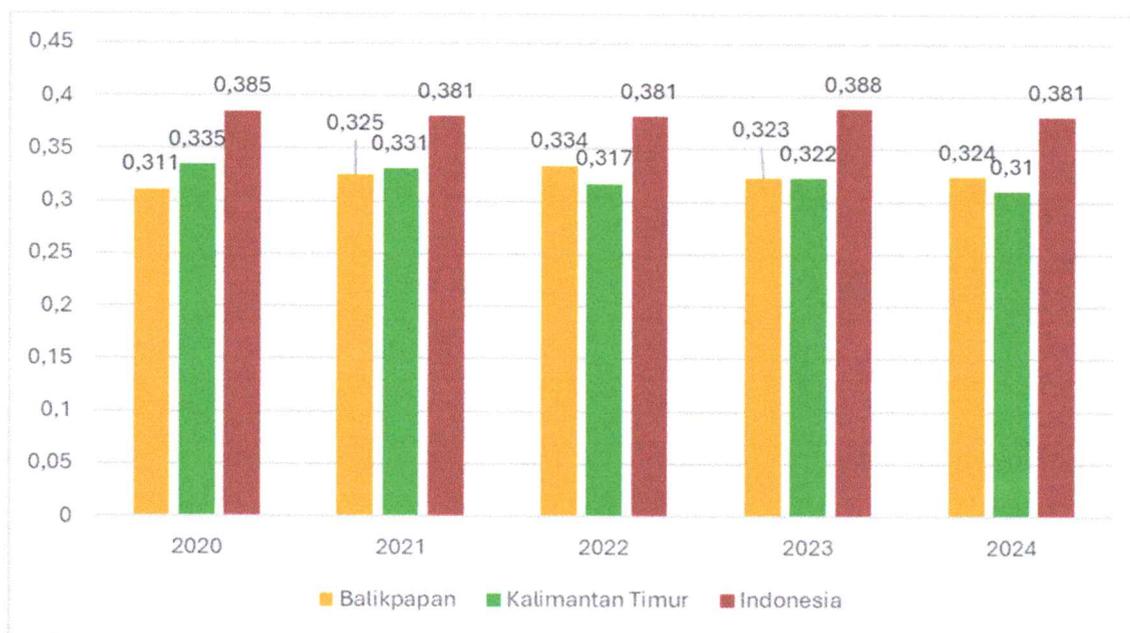
**Gambar 2. 22** Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2020-2024  
*Sumber: BPS, 2025*

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kota Balikpapan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 9 persen menjadi 6,09 persen tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0.13 persen menjadi 6,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang meningkat ini selaras dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki tantangan dalam penyerapan tenaga kerja seperti meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

#### **2.2.1.5 Indeks Gini**

Ketimpangan pendapatan di antara masyarakat dapat dianalisis melalui indeks gini. Indeks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan sangat merata, di mana setiap individu memiliki jumlah pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang ekstrem, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh

satu orang atau kelompok. Semakin tinggi angka Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, penting melakukan upaya agar Indeks Gini tetap mendekati angka 0, yang menandakan adanya pemerataan distribusi pendapatan di antara masyarakat. Berikut Indeks Gini Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



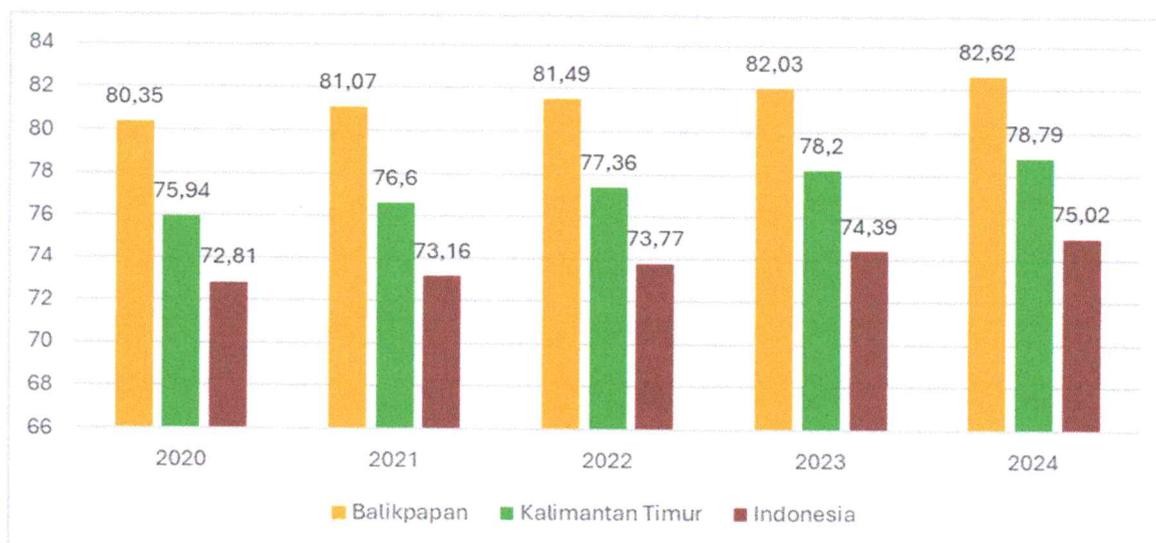
**Gambar 2. 23 Indeks Gini Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

*Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI 2025*

Indeks gini Kota Balikpapan menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan nilai rasio yang sedikit meningkat dari 0,311 di tahun 2020 menjadi 0,334 di tahun 2022, sebelum mengalami penurunan kembali menjadi 0,323 pada tahun 2023 dan sedikit meningkat lagi menjadi 0,324 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Indeks Gini di Balikpapan tercatat sebesar 0,324, yang menandakan adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang terkendali dan lebih baik dibandingkan dengan angka nasional yang berada di sekitar 0,381. Pada tahun 2024, indeks gini Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dihitung pada tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi IPM ini dikonversi menjadi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita. Berikut capaian IPM Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



**Gambar 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan tahun 2020-2024**

*Sumber : BPS Balikpapan; BPS Kalimantan Timur; BPS RI 2025*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Balikpapan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencapai 82,62 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kualitas hidup, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam periode tersebut, IPM Balikpapan meningkat dari 80,35 persen pada tahun 2020 menjadi 82,62 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kalimantan Timur yang mencapai 78,79 persen dan IPM nasional yang berada di angka 75,02 persen. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan usia harapan hidup dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, dimensi pendidikan juga menunjukkan kemajuan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Meskipun Kota Balikpapan mengalami kemajuan signifikan dalam IPM, masih terdapat tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mendukung pertumbuhan populasi.

### **2.2.2 Kesehatan untuk Semua**

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM).

Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 25 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Nasional, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Balikpapan menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut, capaian UHH Kota Balikpapan meningkat sebesar 0,61 poin dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,2 persen per tahun. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan berjalan cukup baik, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, capaian UHH Kota Balikpapan sebesar 75,1. Artinya, bayi yang baru lahir di tahun 2024 memiliki kesempatan rata-rata usia hingga 75,1 tahun.

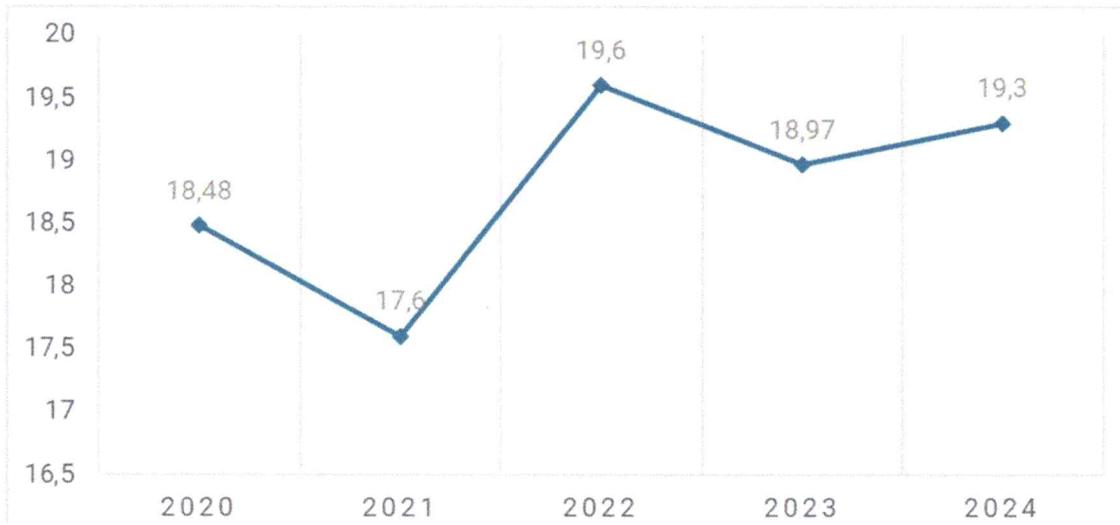
Selama periode 2020-2024, capaian UHH Kota Balikpapan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan berjalan lebih baik dibanding Provinsi dan Nasional. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat kenaikan UHH Kota Balikpapan masih lebih rendah dibanding Provinsi. Selama lima tahun terakhir, UHH Provinsi Kalimantan Timur naik 0,7 poin dengan rata-rata kenaikan 0,24 persen. Sedangkan UHH Kota Balikpapan mengalami kenaikan 0,61 poin dengan rata-rata kenaikan 0,20 persen. Dengan demikian, perlu upaya percepatan pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan dokumen Grand Desain Kesehatan Kota Balikpapan terdapat rencana aksi jangka menengah yang dapat menjadi panduan

dalam pembangunan kesehatan. Adapun strategi yang bisa dilaksanakan yakni peningkatan program promosi kesehatan masyarakat; peningkatan kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan nifas; pemenuhan gizi; pemantauan tumbuh kembang anak; peningkatan skrining berkala untuk deteksi dini, peningkatan kesehatan lansia; layanan kesehatan jiwa; surveilans kesehatan; penguatan posyandu; pengembangan layanan unggulan rumah sakit; peningkatan jumlah dan jenis tenaga medis dan non medis; peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM kesehatan; integrasi informasi kesehatan daerah; peningkatan kalibrasi alat secara rutin; pemanfaatan teknologi AI dan peralatan diagnostic, peningkatan layanan telemedicine, serta pendampingan akreditasi fasilitas kesehatan.

Selain upaya dibidang kesehatan, terdapat aspek non kesehatan yang juga perlu diperhatikan. Aspek tersebut diantaranya mekanisme pemberian jaminan kesehatan tepat sasaran, optimalisasi sumber pembiayaan kesehatan, pengelolaan tenaga cadangan kesehatan, peningkatan mitigasi bencana, peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman, optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga, penguatan pasokan pangan berkelanjutan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta penguatan pengawasan dan regulasi kesehatan.

Selain UHH, capaian kesehatan lain yang perlu diperhatikan yaitu prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Berikut capaian prevalensi stunting Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



**Gambar 2. 26 Grafik Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020-2022 dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2020-2024, prevalensi stunting Kota Balikpapan memiliki trend fluktuatif. Prevalensi stunting terendah pada tahun 2021 sebesar 17,6 persen, kemudian terus naik dan terakhir sebesar 19,3 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut cukup tinggi dan mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan bayi di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkebalikan dengan capaian UHH yang cukup tinggi. Selain itu, jika dibandingkan dengan target prevalensi stunting pada perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan tahun 2045 sebesar 4,5 persen, maka diperlukan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil rembuk stunting Kota Balikpapan tahun 2025 menyebutkan bahwa tingginya stunting Kota di Balikpapan disebabkan masih banyaknya bayi yang lahir dengan berat dibawah 2.500 gram. Selain itu, jumlah kelurahan yang memiliki kasus stunting diatas 10 persen dan keluarga beresiko naik dari 10 kelurahan menjadi 17 kelurahan. Adapun kendala penanganan stunting yakni belum optimalnya pemahaman dan edukasi terkait bahaya stunting, pola asuh, pola makan, serta status sosial ekonomi dalam akses pemenuhan gizi dan lingkungan sehat,. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih komprehensif dengan pendekatan ke hulu mulai dari remaja, calon pengantin dan ibu hamil. Upaya tersebut memerlukan kerjasama lintas sektor mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas, perangkat daerah terkait, hingga pihak swasta dan masyarakat.

**Tabel 2. 13 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024**

Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik
Balikpapan Barat	6	2	-	1	4
Balikpapan Kota	4	-	2	-	5
Balikpapan Selatan	2	2	5	-	7
Balikpapan Tengah	6	-	2	1	5
Balikpapan Timur	4	2	1	-	2
Balikpapan Utara	5	3	1	-	6
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kota Balikpapan, 2025

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan cukup memadai mulai dari tingkat dasar hingga rujukan. Kota Balikpapan memiliki 13 Rumah Sakit yang terdiri dari 11 rumah sakit umum dan 2 rumah sakit bersalin. Dari enam kecamatan, hanya Kecamatan Balikpapan Barat yang belum memiliki rumah sakit umum. Namun, Kecamatan Balikpapan Barat memiliki rumah sakit bersalin bersama dengan Kecamatan Balikpapan Tengah. Untuk fasilitas kesehatan Puskesmas dan Poliklinik sudah tersedia diseluruh kecamatan. Selain rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat laboratorium, toko obat, toko optik, alat kesehatan, ambulance, dan pelayanan kesehatan tradisional. Selain fasilitas kesehatan, perlu diidentifikasi ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan Kota Balikpapan yang berperan penting dalam memberikan layanan kesehatan. Berikut data tenaga kesehatan di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 14 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024**

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Kllinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
Balikpapan Selatan	236	2	469	81	60
Balikpapan Kota	381	1	1.149	186	164
Balikpapan Timur	36	0	59	30	19

Kecamatan	Tenaga Medis	Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
Balikpapan Utara	146	1	1.259	113	143
Balikpapan Tengah	124	0	232	58	45
Balikpapan Barat	41	0	110	64	30
<b>Total</b>	<b>964</b>	<b>4</b>	<b>3.278</b>	<b>532</b>	<b>461</b>

*Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2025, BPS Kota Balikpapan, 2025*

Secara umum, sebaran tenaga kesehatan sudah mencakup seluruh kecamatan di Kota Balikpapan yang meliputi tenaga medis, perawat, bidan, dan tenaga kefarmasian. Namun, untuk tenaga psikologis klinik belum tersedia di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, SDM kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi jumlah, kompetensi, distribusi, serta peningkatan jumlah dokter spesialis dan sub spesialis.

### **2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata**

Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mana merupakan indikator makro untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah harapan masyarakat dalam menempuh pendidikan, dan lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2024.



**Gambar 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025*

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam durasi pendidikan yang dapat dinikmati oleh penduduk usia sekolah di masa depan. Pada tahun 2024, HLS Kota Balikpapan mencapai angka 14,25 tahun, yang berarti masyarakat usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 14 tahun atau setara dengan jenjang Diploma 2 (D2). Selain itu, capaian HLS Kota Balikpapan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Provinsi Kalimantan Timur dan nasional dalam periode yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan agar tren positif ini dapat terus dipertahankan.

Capaian HLS yang tinggi mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota Balikpapan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam peningkatan angka HLS melalui berbagai kebijakan yang memperluas dan mempermudah akses pendidikan, seperti program wajib belajar, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Diharapkan, peningkatan HLS ini dapat menghasilkan generasi yang lebih kompeten, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mendukung pembangunan Kota Balikpapan yang berkelanjutan.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. RLS menjadi bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berperan dalam menunjukkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan mengalami tren yang positif selama periode lima tahun terakhir. Berikut merupakan capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024.



**Gambar 2. 28 Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025*

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, RLS di kota ini meningkat sebesar 0,31 poin. Pada tahun 2024, angka RLS Kota Balikpapan mencapai 10,99 tahun, yang berarti rata-rata masyarakat usia sekolah telah menempuh pendidikan hingga setara dengan kelas 1 SMA. Selain itu, capaian RLS Kota Balikpapan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata RLS di Provinsi Kalimantan Timur dan nasional selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini merupakan pertanda positif dalam hal upaya pembangunan pada sektor pendidikan di Kota Balikpapan.

Meskipun demikian, capaian RLS Kota Balikpapan masih perlu terus didorong agar sesuai dengan program pemerintah mengenai wajib belajar

13 tahun. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih lama dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik di Kota Balikpapan.

Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan instrumen penting dalam mengevaluasi capaian dan kualitas pendidikan di berbagai jenjang pendidikan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota maupun provinsi. Capaian ini menyajikan gambaran menyeluruh terkait indikator-indikator kunci seperti kemampuan literasi dan numerasi murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim sekolah, serta kesiapan lulusan SMK terhadap dunia kerja. Hasil rapor ini mencerminkan kekuatan dan tantangan yang dihadapi Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami capaian yang telah diraih serta area yang memerlukan perbaikan, Pemerintah Kota Balikpapan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Berikut adalah gambaran capaian rapor pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 pada jenjang SD dan SMP.

**Tabel 2. 15 Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024**

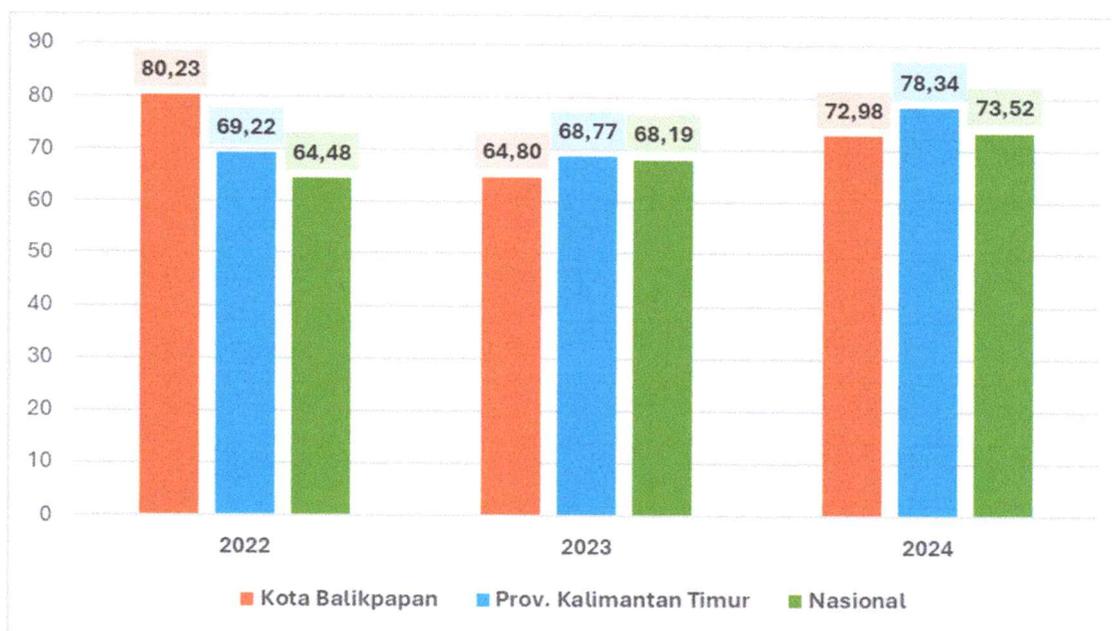
No	Indikator	PAUD	SD Umum	SD Agama	SD Setara	SMP Umum	SMP Agama	SMP Setara
1	Kemampuan Literasi Murid		Baik	Sedang	Sedang	Baik		Baik
2	Kemampuan Numerasi Murid		Baik	Sedang	Sedang	Baik		Baik
3	Karakter Murid		Baik	Baik	Baik	Baik		Baik
4	Kualitas Pembelajaran		Sedang	Sedang	Baik	Baik	Sedang	Baik
5	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	Sedang						
6	Proses Belajar yang Sesuai Bagi Anak Usia Dini	Sedang						
7	Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi	Baik						
8	Iklim Keamanan Sekolah	Sedang	Baik			Baik	Baik	Baik
9	Iklim Kebinekaan Sekolah		Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik
10	Iklim Inklusivitas Sekolah		Baik	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik

No	Indikator	PAUD	SD Umum	SD Agama	SD Setara	SMP Umum	SMP Agama	SMP Setara
11	Iklim Inklusivitas & Kebinekaan PAUD	Baik						

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

Data Ringkasan Hasil Capaian Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada jenjang pendidikan di bawah kewenangan kabupaten/kota memiliki capaian yang cukup baik. Indikator seperti *Karakter Murid*, *Kualitas Pembelajaran*, dan *Pembelajaran yang Membangun Kemampuan Fondasi* secara umum mendapatkan predikat “Baik” di hampir semua jenjang SD dan SMP, baik umum maupun agama. Hal ini mencerminkan upaya yang positif dalam penguatan kompetensi dasar dan pembentukan karakter siswa di Kota Balikpapan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan seperti pada indikator *Kemampuan Literasi* dan *Numerasi Murid* di SD Agama dan SD Setara yang masih mendapat nilai “Sedang”, kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan kemampuan dasar pada jenjang tersebut. Selain itu, masih perlu dilakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan seperti penguatan strategi pembelajaran yang lebih adaptif, penyediaan guru pendamping profesional, serta fasilitas pendidikan inklusif yang memadai. Perbaikan menyeluruh terhadap aspek inklusivitas dan dukungan pembelajaran menjadi kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata di Kota Balikpapan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dihitung oleh perpustakaan nasional guna mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah. IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM Kota Balikpapan tahun 2022 dan 2024.



**Gambar 2. 29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan Tahun 2022-2024**

*Sumber: Perpusnas, 2025*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung menurun selama periode 2022 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya minat membaca serta menurunnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dalam tiga tahun terakhir, IPLM Kota Balikpapan turun sebesar 7,25 persen, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kota ini. Selain itu, pada tahun 2022 dan 2023 IPLM Kota Balikpapan berada di bawah rata-rata capaian provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Hal ini menjadi indikasi bahwa budaya literasi masyarakat di Kota Balikpapan perlu mendapat perhatian lebih guna mencapai tren yang positif.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan perlu menerapkan berbagai strategi guna meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur perpustakaan yang lebih baik, dilengkapi dengan koleksi buku yang beragam serta tenaga pustakawan yang profesional dan kompeten.

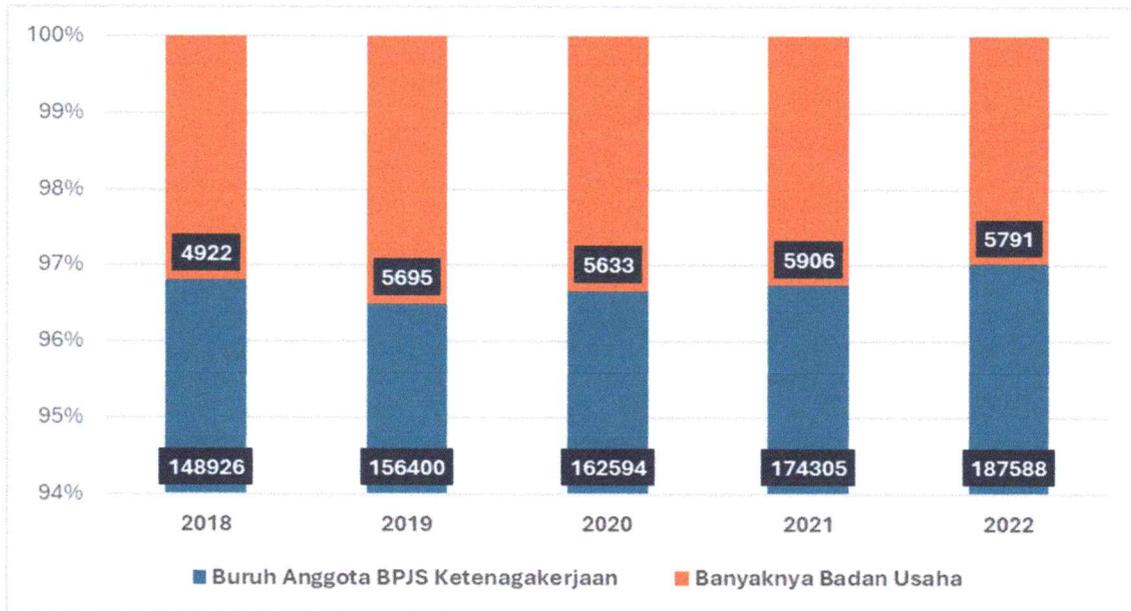
#### **2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif**

Perlindungan sosial merupakan instrumen strategis dalam upaya mengurangi kemiskinan, mengurangi kerentanan kelompok rentan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dalam konteks dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berubah, pendekatan perlindungan sosial perlu bersifat adaptif, responsif, dan inklusif terhadap

berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersifat kronis maupun yang bersifat mendadak, seperti bencana alam, pandemi, atau gejolak ekonomi.

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan penguatan sistem perlindungan sosial dengan menambahkan elemen ketangguhan terhadap risiko iklim, bencana, dan guncangan ekonomi. Sistem ini memadukan tiga pilar utama: bantuan sosial, asuransi sosial, dan program ketenagakerjaan aktif yang dirancang secara fleksibel dan terintegrasi dengan sistem peringatan dini, data kependudukan yang dinamis, serta mekanisme respons cepat. Dengan mengintegrasikan prinsip adaptif dalam perencanaan perlindungan sosial diharapkan kebijakan dan program yang dijalankan mampu meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap guncangan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial yang adaptif dapat dilihat melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja mengacu pada jumlah atau persentase tenaga kerja yang terdaftar dan memperoleh perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Cakupan kepesertaan dapat mencakup pekerja formal maupun informal. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tahun 2018 hingga 2022.



**Gambar 2. 30 Jumlah Anggota Buruh dan Badan Usaha yang Menjadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang meningkat. Jumlah buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan secara bertahap dari 148.826 orang pada tahun 2018 menjadi 187.588 orang pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah badan usaha yang terdaftar juga mengalami kenaikan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil, dari 4.922 badan usaha pada tahun 2018 menjadi 5.791 pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi baik dari pekerja maupun perusahaan terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Meskipun demikian, upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan perlu terus dilakukan, terutama bagi pekerja di sektor informal yang mungkin belum sepenuhnya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perlindungan sosial yang adaptif tidak hanya mencerminkan respons pemerintah terhadap dinamika risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Penerapan prinsip perlindungan sosial yang adaptif di Kota Balikpapan dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelompok ini memerlukan

pendekatan yang tidak hanya berbasis bantuan jangka pendek, tetapi juga upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui penguatan data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas layanan sosial dasar, serta kolaborasi lintas sektor dan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan PMKS. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip adaptif dalam perlindungan sosial, di mana kebijakan dan program disesuaikan dengan perubahan kondisi dan risiko yang dihadapi oleh kelompok rentan di tingkat lokal. Berikut merupakan data jumlah PMKS berdasarkan jenisnya di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 16 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

No	Jenis PMKS	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	8	5	5	0	3
2	Anak Terlantar	957	1.009	2.270	435	1097
3	Anak yang Berhadapan Hukum	70	51	28	14	16
4	Anak Jalanan	215	192	213	74	74
5	Anak dengan Kedisabilitas	347	347	347	249	249
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	0	78	52	83	66
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	5	2	2	9	11
8	Lanjut Usia Terlantar	1.721	1.721	1.721	633	150
9	Penyandang Disabilitas	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
10	Tuna Susila	0	0	0	4	0
11	Gelandangan	11	11	11	11	11
12	Pengemis	17	17	17	17	17
13	Pemulung	91	91	91	251	251
14	Kelompok Minoritas	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	109	109	109	109	109
16	Orang dengan HIV/AIDS	9	0	1	1	1
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0	0	0	115	115
18	Korban <i>Trafficking</i>	0	0	0	0	0
19	Korban Tindak kekerasan	0	0	0	0	0
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	0	0	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	17	80	34	439	8.175
22	Korban Bencana Sosial	161	102	35	780	411
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.	395	395	395	395	395
24	Fakir Miskin	25.290	25.290	25.497	153.220	155.135
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.	0	0	0	0	0
26	Komunitas Adat Terpencil.	0	0	0	0	0
Jumlah		30.699	30.776	32.104	158.115	167.562

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2025

Jumlah PMKS di Kota Balikpapan menunjukkan adanya peningkatan tren sejak tahun 2018 hingga 2022. Sejak 2018, PMKS Kota Balikpapan didominasi oleh fakir miskin yang mulanya memiliki proporsi sebesar 82,38 persen pada tahun 2018, kemudian meningkat sebesar 92,58 persen. Hal itu dikarenakan oleh banyak hal, salah satunya adalah semakin meningkatnya daya tarik Kota Balikpapan untuk dikunjungi oleh pendatang dalam rangka menguji peruntungan. Selain itu, pengaruh inflasi dan kenaikan harga komoditas pokok juga dapat turut memengaruhi peningkatan jumlah fakir miskin di Kota Balikpapan.

#### **2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang memberikan manfaat dan perkembangan budaya yang tetap menghormati nilai-nilai kearifan lokal sembari menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Beragama maslahat merujuk pada praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian mendorong sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antarindividu serta kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan budaya yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup kemampuan dalam menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global. Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, dan memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Kondisi ini dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

##### **2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antar umat beragama. Angka konflik SARA hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan

kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian data Angka Konflik SARA di Kota Balikpapan

**Tabel 2. 17 Angka Konflik SARA di Kota Balikpapan Tahun 2020-2025**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0

*Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka Tahun 2025*

Kota Balikpapan menunjukkan capaian positif dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama selama periode tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya laporan konflik sosial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Hal ini mencerminkan kondisi sosial yang kondusif dan harmonis, serta keberhasilan berbagai pihak dalam mendorong kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan toleran. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Balikpapan merupakan kota yang harmonis dan memiliki toleransi yang tinggi. Meskipun begitu, konflik SARA harus terus menjadi perhatian dan dipertahankan capaian positifnya, salah satunya melalui pendidikan multikultural, dialog lintas agama, serta penguatan kelembagaan lokal yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial perlu terus dikembangkan.

Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan dalam membangun dialog lintas iman, memperkuat moderasi beragama, dan menangkal potensi intoleransi sejak dini. Selain itu, pendekatan kultural dan edukatif yang melibatkan generasi muda melalui pendidikan nilai-nilai kebhinekaan juga berkontribusi menjaga tatanan sosial yang damai.

Kondisi ini menjadi modal sosial penting bagi pembangunan Kota Balikpapan ke depan mengingat stabilitas sosial merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Kota Balikpapan dapat terus mempertahankan kondisi ini dengan mekanisme deteksi dini serta forum-forum dialog lintas komunitas sebagai bentuk komitmen menjaga ruang sosial yang terbuka, aman, dan menghargai perbedaan. Tren peningkatan kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan perlu dijaga

melalui kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Kerukunan umat beragama di Balikpapan tidak hanya ditopang oleh regulasi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kohesi sosial. Dalam kerangka beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, pembangunan sosial di Balikpapan diarahkan untuk menciptakan ruang-ruang interaksi yang sehat, memperkuat nilai gotong royong, serta mendorong tata kelola kehidupan bersama yang adil dan inklusif.

#### 2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun identitas, karakter, dan daya saing suatu bangsa. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai warisan yang harus dijaga, tetapi juga sebagai kekuatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan sejauh mana kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian pembangunan kebudayaan secara komprehensif. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Berikut merupakan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2023.



**Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2020-2023**

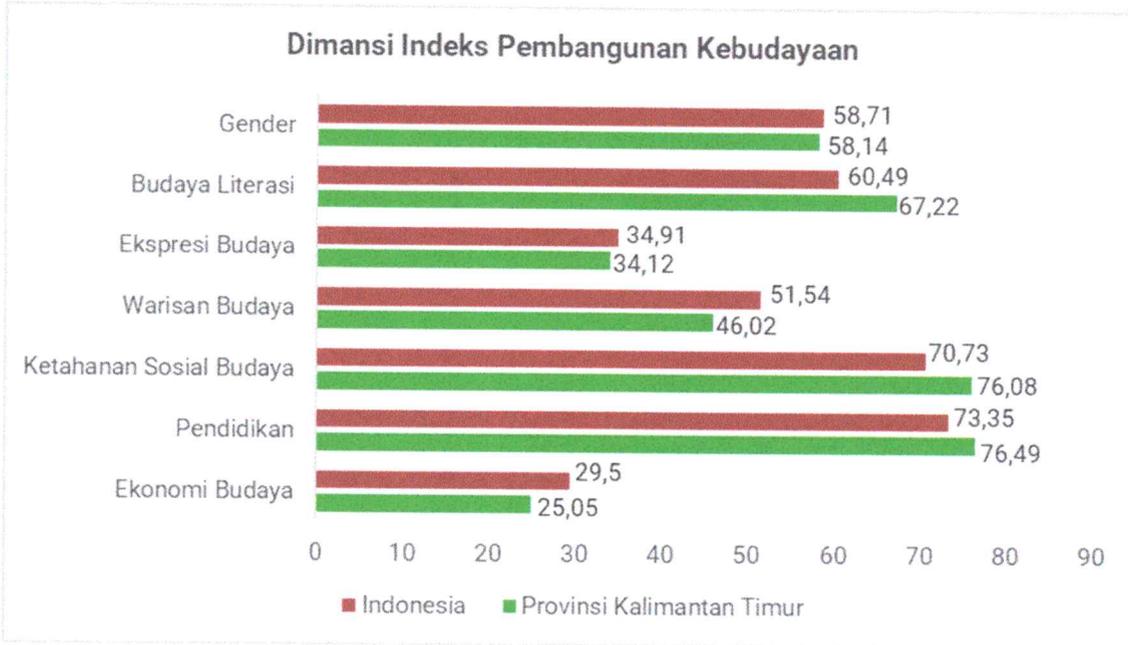
Sumber : Indeks Pembangunan Kebudayaan, Kemendikbud, 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai perkembangan sektor kebudayaan di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan berbagai aspek, seperti pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta kontribusi budaya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. IPK Kota Balikpapan menggunakan data proksi dari Provinsi Kalimantan Timur karena pengukuran IPK hanya dilakukan hingga level provinsi.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Timur dalam rentang tahun 2020 hingga 2023 secara umum mengalami fluktuasi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Penurunan data IPK yang cukup signifikan baik di tingkat provinsi maupun nasional terjadi pada tahun 2021 sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kebudayaan, seperti pagelaran seni, kegiatan komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan interaksi sosial. Peningkatan capaian IPK dapat dilakukan pada tahun 2022 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca pandemi, termasuk kebijakan dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghidupkan kembali kegiatan seni dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data capaian IPK yang mengarah pada tren peningkatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti Revitalisasi warisan budaya lokal, seperti seni tradisional, rumah adat, dan bahasa daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi pelaku seni dan budaya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

Capaian IPK disusun oleh tujuh dimensi, yakni gender, budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi budaya. Berikut merupakan capaian ketujuh dimensi komposit IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023.



**Gambar 2. 32 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur 2023**

*Sumber : Kemendikbud, 2024*

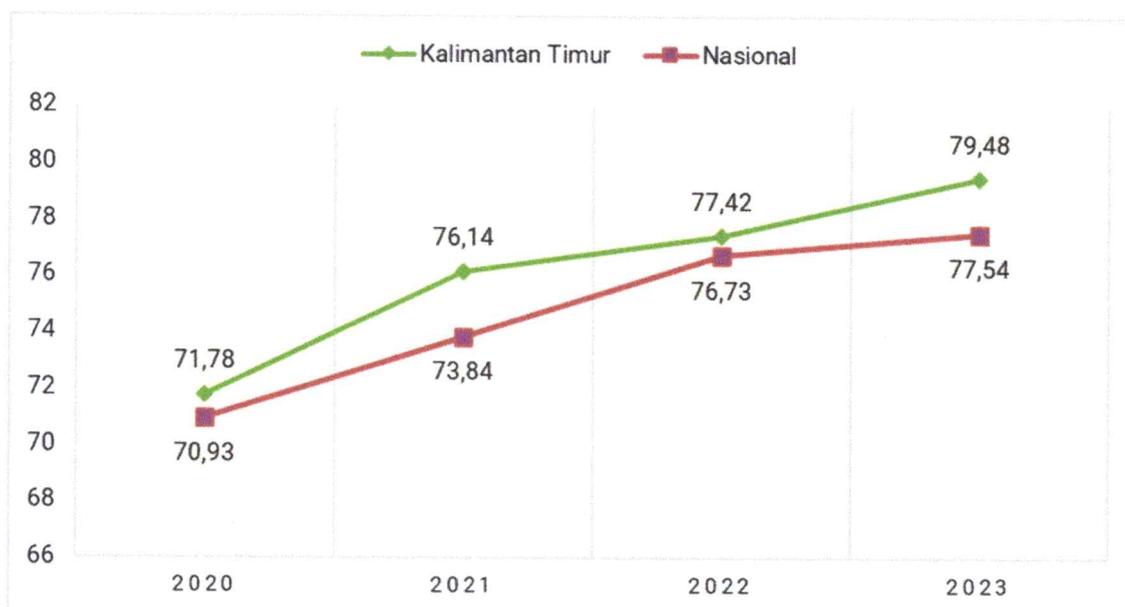
Data dari Kemendikbud mengenai capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menunjukkan bahwa beberapa dimensi IPK di Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata nasional, seperti aspek gender, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya. Diagram batang di atas memperlihatkan perbandingan IPK antara tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, Kalimantan Timur memiliki keunggulan dalam budaya literasi, ketahanan sosial budaya, serta pendidikan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bidang warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya, yang memerlukan perhatian lebih guna mendukung pembangunan kebudayaan yang lebih berkelanjutan.

#### **2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan mendukung semua individu tanpa diskriminasi. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut diantaranya indeks kualitas keluarga (IKK), indeks perlindungan anak (IPA), indeks ketimpangan gender (IKG), dan indeks pembangunan pemuda (IPP). Berikut capaian IKK, IPA, IKG, dan IPP Kota Balikpapan.

### 2.2.6.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks kualitas keluarga (IKK) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur melalui 5 dimensi yakni dimensi legalitas dan struktur ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Kelima dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Nilai Indeks kualitas keluarga (IKK) berkisar dari 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IKK maka menunjukkan kualitas keluarga semakin meningkat. Ada tiga kategori IKK yakni kurang responsif gender dan hak anak (<50), cukup responsif gender dan hak anak (50-75), dan responsif gender dan hak anak (>75). Indeks kualitas keluarga (IKK) diukur oleh KemenPPPA bersama BPS. Namun, perhitungan tersebut baru sampai pada level provinsi belum sampai kabupaten/kota. Untuk itu, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Kota Balikpapan menggunakan proxy capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar 2. 33 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2020-2023**

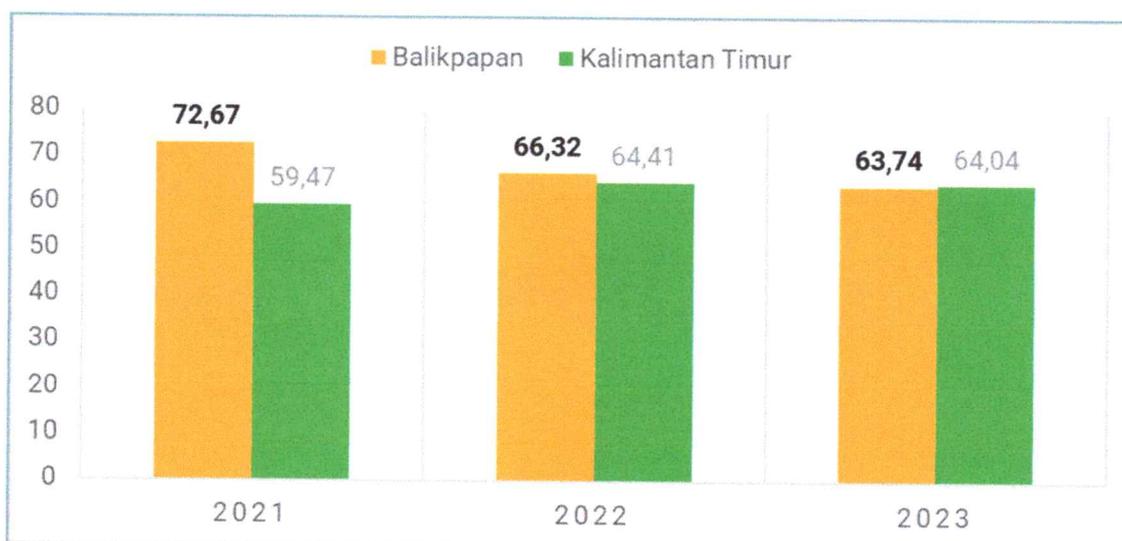
Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020-2023, KemenPPPA

Selama periode 2020-2023, capaian indeks kualitas keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Timur memiliki trend meningkat dan selalu berada diatas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas keluarga di Provinsi Kalimantan Timur relatif berjalan baik, dalam hal ini termasuk Kota Balikpapan. Pada tahun 2023, capaian IKK Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,84 masuk kategori responsif gender

dan hak anak (>75). Capaian tersebut lebih tinggi 1,94 poin dibanding rata-rata nasional. Meskipun capaian pembangunan kualitas keluarga cukup positif, upaya peningkatan masih perlu dilakukan. Hal tersebut mengingat perubahan sosial yang cukup dinamis dapat berpengaruh terhadap fungsi dan peran keluarga sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan pada setiap dimensi pembentuk kualitas keluarga seperti dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

### 2.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks perlindungan anak (IPA) merupakan indikator untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks perlindungan anak (IPA) diukur dari 5 kluster dan 27 indikator. Kluster 1 hingga kluster 4 mengacu pada 4 kluster pemenuhan hak anak sebagai pembentuk indeks pemenuhan hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak (IPKA). Sedangkan gabungan dari kluster 1 hingga kluster 5 membentuk indeks perlindungan anak (IPA). Nilai IPA berkisar 0-100 dan bermakna positif. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Berikut capaian IPA Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar 2. 34 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2021-2023, KemenPPPA dengan BPS

Selama periode 2021-2023, capaian indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan menunjukkan trend yang menurun. Pada tahun 2022,

capaian IPA Kota Balikpapan turun 6,35 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian mengalami penurunan kembali 2,58 poin pada tahun 2023. Meskipun capaian tersebut turun, namun masih berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan 63,74, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 64,04. Dengan demikian, upaya perlindungan anak baik di Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Berikut lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan tahun 2023.

**Tabel 2. 18 Hasil Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Balikpapan Tahun 2023**

No	Kota	Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Kluster 5 Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kota Balikpapan	40,6	86,27	82,23	33,41	72,06	63,74	61,27	79,33

Sumber: Laporan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tahun 2023, KemenPPPA dan BPS

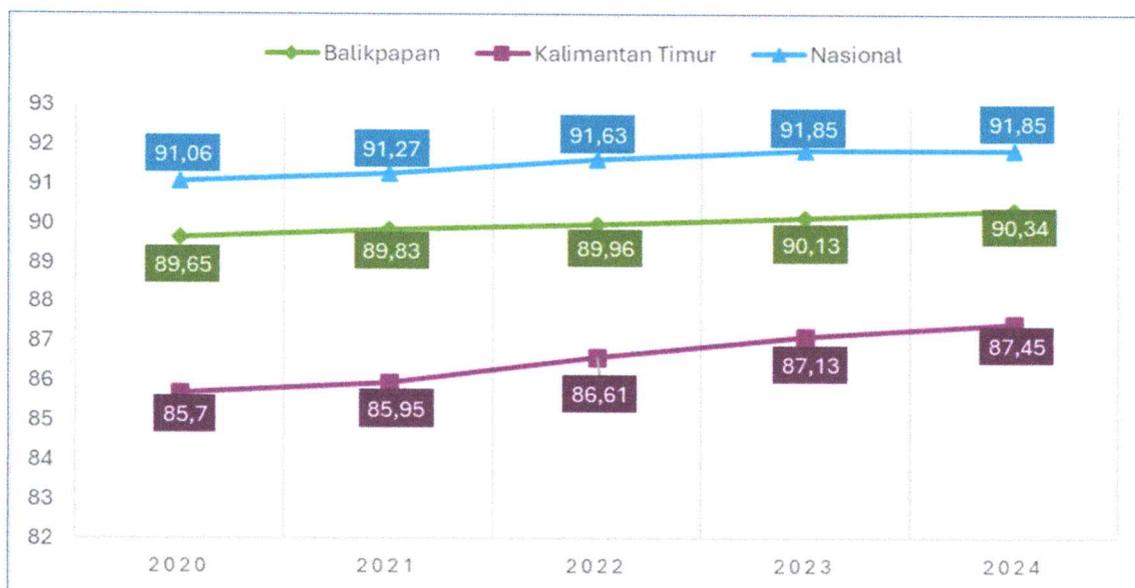
Berdasarkan lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA) Kota Balikpapan, terdapat tiga kluster memiliki capaian cukup baik yakni kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 86,27, kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan 82,33, dan kluster 5 perlindungan khusus 72,06. Kluster 2 diukur dari lima indikator yaitu jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, jumlah balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak, jumlah anak yang tidak tinggal bersama orangtua, dan angka kesiapan sekolah. Kluster 3 diukur dari sembilan indikator yaitu jumlah anak yang melahirkan di fasilitas kesehatan, balita stunting, anak yang mendapatkan ASI eksklusif, anak yang terpenuhi kebutuhan kalornya, anak yang memiliki akses sanitasi dan air minum layak, anak yang merokok, serta anak yang mendapat imunisasi lengkap. Kluster 5 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang bekerja, rasio anak yang mengakses internet, rasio angka partisipasi sekolah, jumlah anak dibawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang terlantar.

Sedangkan dua kluster lainnya memiliki capaian kurang optimal yakni kluster 1 hak sipil dan kebebasan 40,6 dan kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 33,41. Kluster 1 diukur

dari lima indikator yaitu tingkat kepemilikan akta, partisipasi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi, jumlah anak yang memanfaatkan taman bacaan, serta jumlah anak yang mengakses internet. Kluster 4 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak yang tidak sekolah, jumlah anak yang mengunjungi peninggalan sejarah dan budaya, jumlah anak yang mengikuti kursus, jumlah anak yang mengikuti ekstrakurikuler, dan jumlah anak yang terlibat dalam pertunjukan seni. Dengan demikian, untuk meningkatkan upaya perlindungan anak maka pemenuhan aspek pada masing-masing kluster perlu lebih dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

### 2.2.6.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila nilai IPG mendekati angka 100 maka semakin kecil kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian IPG Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**

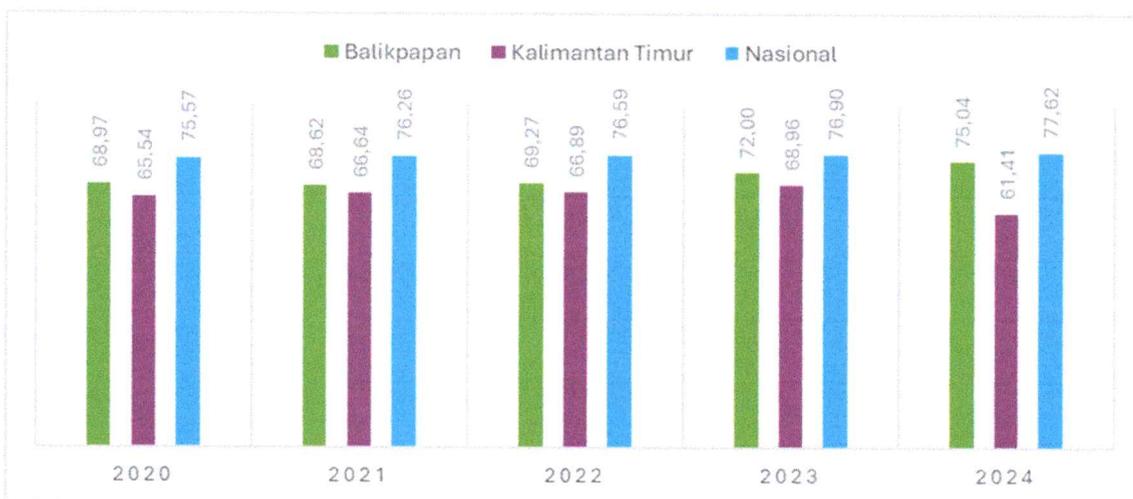
Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian IPG Kota Balikpapan mengalami trend meningkat. Selama periode tersebut IPG Balikpapan naik sebesar 0,016 poin. Selain itu, capaian IPG Balikpapan selalu berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, IPG Kota Balikpapan sebesar 90,34. Capaian tersebut lebih tinggi 2,89 poin dibanding Kalimantan Timur sebesar 87,45. Dengan demikian, pembangunan yang setara antara laki-laki dan perempuan di Kota

Balikpapan masih lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian IPG Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2024, IPG Balikpapan lebih rendah 1,51 poin dibanding IPG Nasional. Untuk itu, upaya peningkatan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan masih perlu ditingkatkan. Adapun langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

#### 2.2.6.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG terdiri dari tiga komponen indikator yaitu persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga profesional dan persentase kontribusi pendapatan perempuan.



**Gambar 2. 36 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS, 2025

Selama periode 2020-2024, capaian IDG Kota Balikpapan menunjukkan trend yang meningkat. Selama periode tersebut IDG Balikpapan naik 6,07 poin. Selain itu, capaian IDG Balikpapan selalu berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, IDG Kota Balikpapan sebesar 75,04. Capaian tersebut lebih tinggi 13,63 poin dibanding Provinsi Kalimantan Timur sebesar 61,41. Dengan demikian, pemberdayaan gender di Kota Balikpapan masih lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun, capaian IDG Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2024, IDG Balikpapan lebih rendah 2,58 poin dibanding IDG Nasional. Untuk itu, upaya peningkatan pemberdayaan gender di Kota Balikpapan masih perlu

ditingkatkan. Adapun langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan partisipasi perempuan pada ranah publik, memperkuat kebijakan pengarusutamaan gender (PUG), serta peningkatan layanan pengaduan dan pendampingan perempuan.

**Tabel 2. 19 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perempuan dalam parlemen	20	20	20	22,73	26,67
2	Persentase perempuan dalam tenaga professional	41,76	48,91	49,72	47,64	52,33
3	Persentase kontribusi pendapatan perempuan	26,61	26,75	26,41	26,46	27,56

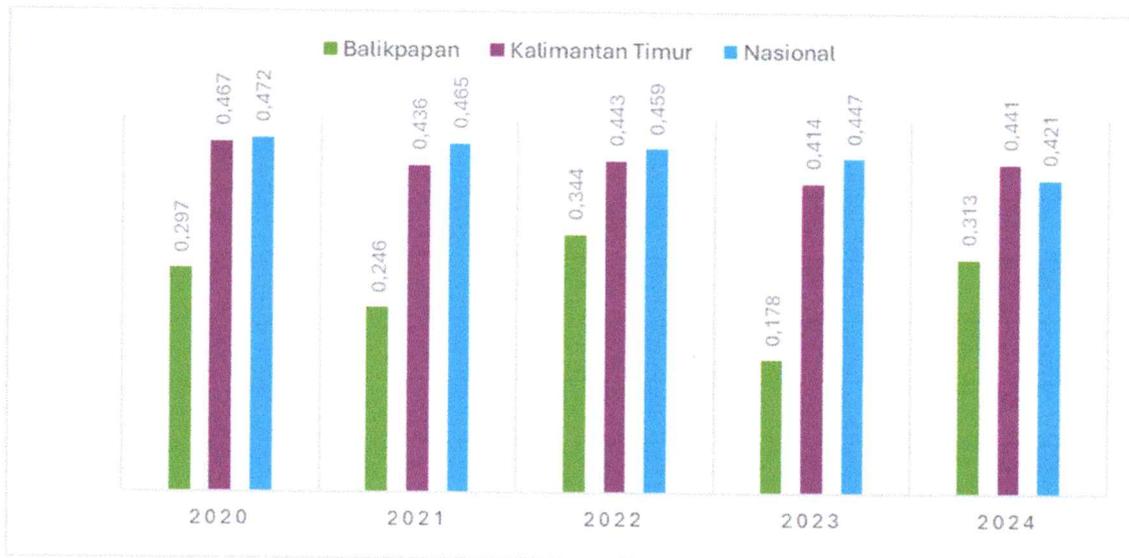
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan komponen pembentuk IDG, terlihat bahwa persentase perempuan pada parlemen masih berada pada angka 26,67 persen, sehingga belum memenuhi kuota minimal 30 persen. Selain itu persentase perempuan pada tenaga professional masih pada angka 52,33 persen dan kontribusi pendapatan perempuan sebesar 27,56 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan pada sektor publik, baik di bidang ekonomi maupun politik masih perlu ditingkatkan. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya afirmasi dan pelatihat kepemimpinan pada perempuan; peningkatan akses modal, pelatihan usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha perempuan; memperkuat layanan perlindungan perempuan; integrasi perspektif gender dalam semua kebijakan; serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesetaraan gender dan pendidikan keluarga yang inklusif.

#### **2.2.6.5 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks ketimpangan gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat hidup lebih sejahtera. Indeks ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi kesehatan reproduksi diukur dari persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan persentase perempuan yang melahirkan berumur kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan diukur dari persentase laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke atas dan persentase laki-laki dan perempuan menjadi anggota legislatif. Dimensi pasar tenaga kerja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja

(TPAK) laki-laki dan perempuan. IKG bernilai 0-1 dan bermakna negatif. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi ketimpangan gender dan sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan gender yang berarti semakin besar kesetaraan gender yang terwujud. Berikut capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur.



**Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Selama periode 2020-2024, capaian IKG Kota Balikpapan cukup fluktuatif. Capaian terendah pada tahun 2023 sebesar 0,178. Capaian tersebut kemudian naik cukup signifikan pada tahun 2024 sebesar 0,313. Meskipun cenderung naik, capaian IKG Balikpapan masih berada dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal tersebut mengindikasikan kesetaraan gender di Balikpapan masih lebih baik dibanding kesetaraan gender di Kalimantan Timur dan Nasional. Namun demikian, upaya perwujudan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, memperluas akses dan mutu pendidikan perempuan, peningkatan kesehatan perempuan dan akses reproduksi, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam poltik dan pengambilan keputusan.

### 2.2.6.6 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di daerah sangat penting untuk menyiapkan generasi muda yang lebih berkualitas. Salah satu indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga yakni indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan. Indikator tersebut diukur dari jumlah prestasi pemuda dibidang non olahraga ditambah jumlah prestasi dibidang keolahragaan dibagi total pemuda dan atlet yang dibina. Berikut capaian indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 20 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balikpapan Tahun 2022-2024**



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2022-2024, capaian indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan mengalami trend meningkat, terutama pada tahun 2024. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan cukup baik. Partisipasi pemuda dalam pemberdayaa pemuda dan organisasi kepemudaan daerah meningkat, serta pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi yang berjalan cukup baik. Namun demikian, capaian tersebut masih perlu didorong lebih baik pada periode pembangunan berikutnya.

**Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Balikpapan Tahun 2022-2024**

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan prestasi olahraga	45,83	23,45	20,77
2	Persentase Atlet yang Berprestasi	32,64	21,32	15,11
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,07	11,22	13,45
4	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	1,03	2,7	2,28

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, 2025

Selama periode 2022-2024, capaian kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga Kota Balikpapan masih perlu dioptimalkan. Dilihat dari capaian prestasi olahraga, atlet yang berprestasi, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi, dan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri memiliki trend capaian kinerja yang fluktuatif dan cenderung rendah karena dibawah 50 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan prestasi dan atlet olahraga, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan masih perlu mendapatkan perhatian lebih pada periode pembangunan berikutnya.

### **2.3 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing suatu daerah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan wilayah, daya saing tidak hanya mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi andalan, tetapi juga mencakup berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan aspek lainnya.

#### **2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia**

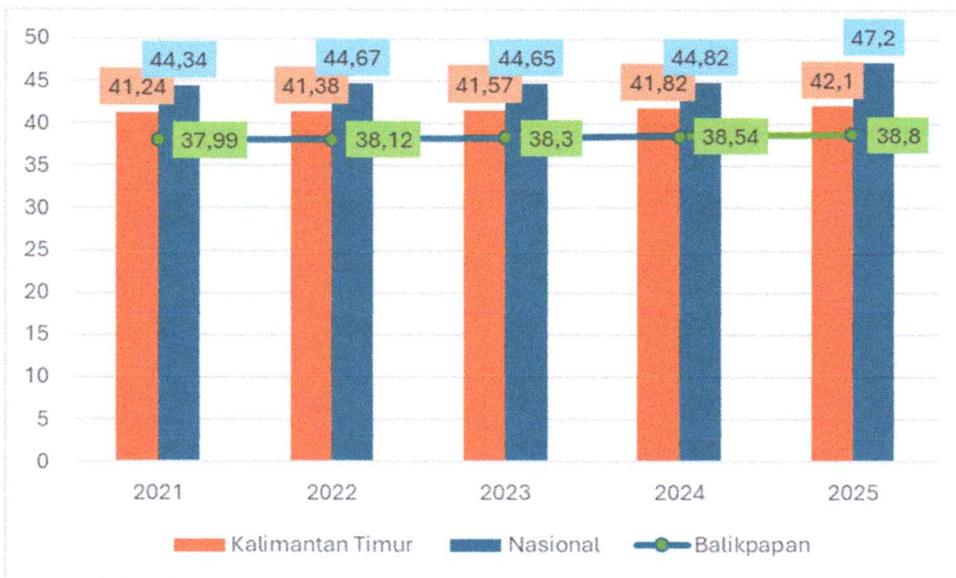
Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan kemajuan suatu daerah. SDM yang kompetitif tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan individu dalam menguasai keterampilan, pendidikan, serta inovasi menentukan efektivitas mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tingkat produktivitas berkaitan erat dengan kualitas SDM yang ada pada daerah terkait. SDM yang unggul akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menghasilkan *output* yang lebih tinggi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Produktivitas yang meningkat secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing SDM juga berkorelasi dengan angka ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi cenderung menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena

beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif lebih tinggi. Sebaliknya, jika angka ketergantungan menurun dan diimbangi dengan peningkatan produktivitas, suatu daerah dapat menikmati "bonus demografi," di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (kombinasi usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam membiayai kebutuhan kelompok usia tidak produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi angka ketergantungan meliputi tingkat kelahiran, angka harapan hidup, serta migrasi penduduk. Daerah dengan angka kelahiran tinggi cenderung memiliki angka ketergantungan tinggi karena banyaknya anak-anak yang belum memasuki usia produktif. Berikut merupakan capaian angka ketergantungan di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 38 Angka Ketergantungan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2021-2025**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Rasio ketergantungan di Kota Balikpapan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2025. Rasio ketergantungan di Balikpapan mengalami peningkatan secara bertahap dari 37,99 pada tahun 2021 menjadi 38,80 pada tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kenaikan beban penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia produktif. Sementara itu, angka ketergantungan Provinsi Kaltim

menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih stabil walaupun berada di angka yang lebih tinggi, dari 41,24 di tahun 2021 menjadi 42,10 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beban ketergantungan di Provinsi Kaltim lebih besar dibandingkan dengan Kota Balikpapan. Selisih angka ketergantungan yang lebih jauh ada pada nasional yang secara umum hampir mencapai 45 persen pada tahun 2021 hingga 2024, dan mencapai 47 persen pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan yang lebih baik sehingga meningkatkan jumlah penduduk kelompok lanjut usia yang masuk dalam kategori non produktif. Data angka ketergantungan nasional pada tahun 2025 meningkat 2,38 persen karena menggunakan data proyeksi penduduk 2025-2035. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki struktur penduduk yang relatif lebih produktif dan berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih kuat.

### **2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Kemampuan suatu daerah dalam mengadopsi serta mengembangkan teknologi dan inovasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi pada era globalisasi dan transformasi digital. Iptek dan inovasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan industri kreatif, ekonomi digital, serta diversifikasi usaha. Dengan meningkatkan adopsi teknologi dan memperkuat ekosistem inovasi, suatu wilayah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat proses industrialisasi yang inklusif dan ramah lingkungan. Sub bagian ini dijabarkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ini, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks inovasi daerah.

#### **2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan**

Agenda hilirisasi menjadi salah satu agenda besar guna meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah. Rasio PDRB industri pengolahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Rasio PDRB industri pengolahan yang semakin

tinggi mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri terhadap perekonomian daerah semakin tinggi dan diharapkan dapat mendorong kenaikan PDRB daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap nilai total PDRB daerah. Kenaikan dan penurunan rasio tidak hanya ditentukan oleh kinerja dan harga komoditas sektor industri pengolahan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor lainnya karena bersifat *zero sum game*.



**Gambar 2. 39 Rasio dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 (%)**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Pada periode 2020-2024, pergerakan rasio PDRB industri pengolahan cukup mengalami fluktuasi. PDRB nominal industri pengolahan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun secara riilnya sempat mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 dan 2024. PDRB nominal industri pengolahan mencapai 69,95 triliun rupiah pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 2,3 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, rasio terhadap PDRB daerah mengalami penurunan sebesar 1,71 persen poin. Turunnya rasio PDRB industri pengolahan disebabkan oleh kenaikan PDRB dari sejumlah lapangan usaha lain yang tidak kalah tinggi. PDRB sektor konstruksi tercatat naik sebesar 2,10 triliun rupiah, sektor perdagangan besar dan eceran naik 1,77 triliun rupiah, dan sektor transportasi dan pergudangan naik 2,05 triliun rupiah.

Turunnya rasio PDRB industri pengolahan di Kota Balikpapan pada tahun 2024 tidak mengubah struktur perekonomian daerah. Industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha yang paling mendominasi nilai

tambah yang dihasilkan oleh Kota Balikpapan dengan rata-rata mencapai 46,70 persen per tahun pada periode 2020-2024. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan didorong oleh tingginya aktivitas produksi kilang minyak milik PT Pertamina yaitu Pertamina Refinery Unit V. Kapasitas produksi kilang minyak Balikpapan mencapai 360 ribu barel per hari dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan penyelesaian proyek RDMP pada tahun 2025. Selain itu, proyek RDMP ini juga ditargetkan dapat menghasilkan produk petrokimia melalui unit Residual Fluid Catalytic Cracking (PT Kilang Pertamina Internasional, 2024). Selain industri kilang minyak, beberapa industri besar dan sedang lainnya juga turut menyumbang PDRB sektor industri pengolahan Kota Balikpapan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 104 perusahaan industri besar dan sedang yang bergerak di berbagai macam lapangan usaha seperti industri makanan, industri barang logam, dan lain sebagainya.

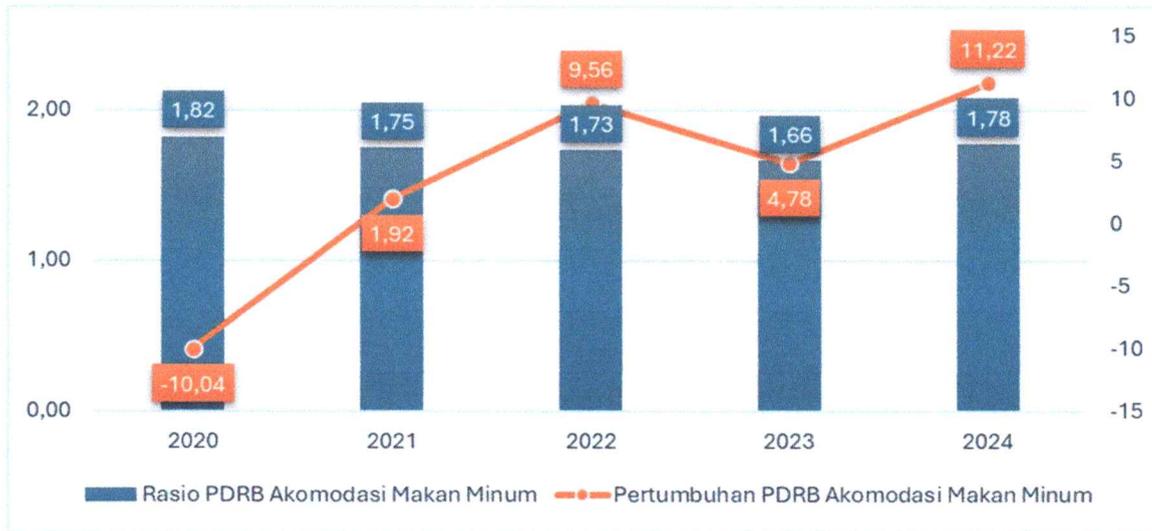
Kontribusi industri pengolahan di Kota Balikpapan juga didukung oleh keberadaan industri mikro dan kecil (IMK). Berdasarkan hasil survei IMK tahun 2023, Kota Balikpapan memiliki 4.759 usaha/perusahaan IMK dan menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. IMK di Kota Balikpapan juga menjadi salah satu sektor yang menyerap ribuan tenaga kerja. Jumlah pekerja di sektor IMK mencapai 9.394 orang pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan IMK tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai tambah sektor industri pengolahan secara umum tetapi juga memperluas lapangan kerja bagi penduduk di Kota Balikpapan.

Sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan berbagai agenda pengembangan industri, baik industri berskala besar dan sedang maupun skala mikro dan kecil. Intervensi dalam pelayanan perizinan, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas pelaku industri perlu ditingkatkan guna mendorong kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan di Kota Balikpapan.

#### **2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**

PDRB akomodasi makan dan minum merupakan indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran nilai tambah yang dihasilkan melalui kegiatan pariwisata. Pemahaman pariwisata saat ini tidak hanya terbatas pada kegiatan rekreasi tetapi juga meliputi kegiatan perjalanan dengan tujuan bisnis dan pendidikan yang bersifat jangka pendek. Rasio PDRB akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan

nilai PDRB sektor akomodasi makan dan minum terhadap total PDRB daerah. Rasio ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kontribusi kegiatan pariwisata terhadap perekonomian daerah.



**Gambar 2. 40 Rasio dan Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan Minum Kota Balikpapan Tahun 2020-2024 (%)**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan tergolong sangat kecil yaitu 1,75 persen per tahun. Angka tersebut sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio PDRB industri pengolahan sebagai lapangan usaha utama di Kota Balikpapan. Sebagai daerah perkotaan, potensi pariwisata Kota Balikpapan tidak terletak pada potensi wisata alam. Namun, jika mengacu pada konsep pariwisata saat ini, kegiatan wisata dengan tujuan bisnis dapat menjadi faktor penarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Kota Balikpapan.

Nilai PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan secara nominal maupun riil terus menunjukkan kenaikan. PDRB nominal sektor ini mencapai 2,73 triliun pada tahun 2024, sedangkan PDRB riil sebesar 1,57 triliun rupiah. Meskipun rasio PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 tergolong kecil, pertumbuhan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 11,22 persen pada tahun 2024. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sektor akomodasi makan dan minum merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

### 2.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif semakin menjadi sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ekonomi kreatif

mencerminkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian suatu daerah, seperti seni, desain, media, kuliner, hingga teknologi berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas, pengetahuan, dan budaya seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi digital.

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, komunitas kreatif, serta akademisi. Faktor-faktor seperti akses terhadap pembiayaan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta infrastruktur pendukung menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

#### 2.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang menghitung perbandingan antara jumlah orang yang berusaha dibantu dengan buruh tetap dengan total angkatan kerja di daerah tersebut. Berusaha dibantu dengan buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Besarnya rasio kewirausahaan dapat mengindikasikan seberapa banyak penduduk yang mau berwirausaha dan membuka lapangan kerja.

**Tabel 2. 22 Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Balikpapan**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap	11.750	11.466	9.591	11.450	13.113
Total Angkatan Kerja	310.169	320.117	329.542	343.384	366.791
Rasio Kewirausahaan Daerah	3,79	3,58	2,91	3,33	3,58

*Sumber: Kondisi Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2020-2024, Diolah*

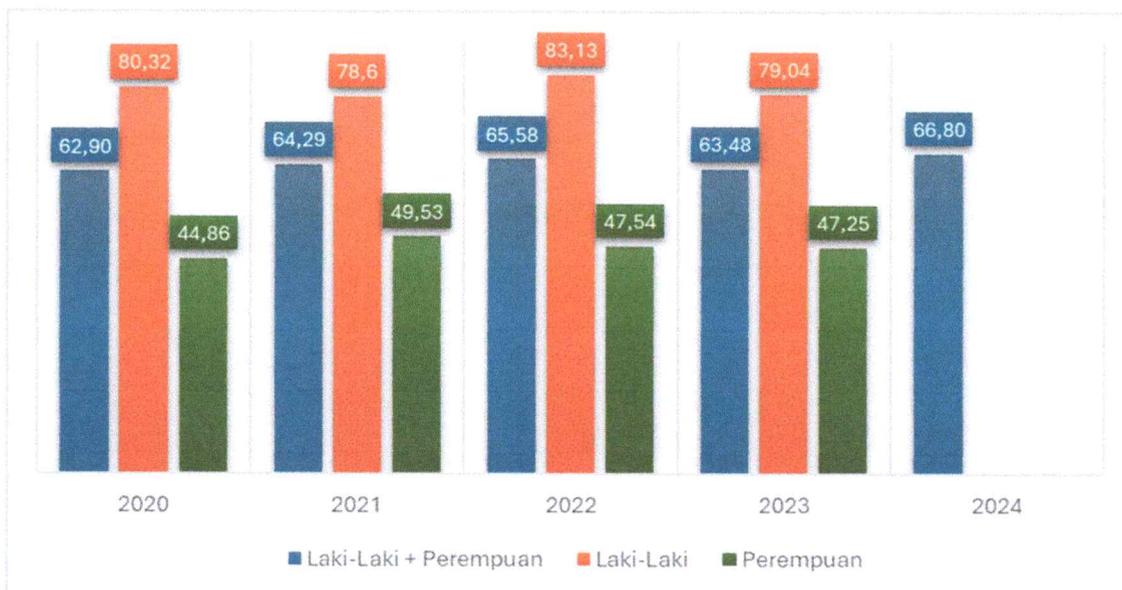
Jumlah penduduk yang menjadi wirausaha dan mempekerjakan karyawan tetap mengalami fluktuasi di saat total angkatan kerja terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat Kota Balikpapan sebetulnya sudah memiliki minat untuk berwirausaha tetapi beberapa diantaranya belum mampu mempertahankan skala usahanya. Kondisi usaha yang belum stabil dapat menyebabkan naik turunnya rasio kewirausahaan. Hal ini umum terjadi pada usaha yang baru berjalan dan masih berskala mikro di mana penerimaan yang diperoleh belum dapat menjanjikan keuntungan jangka panjang. Selain itu, faktor target pasar dan target produksi yang tersegmentasi juga turut

mempengaruhi keputusan untuk mempekerjakan karyawan tetap atau cukup menjalankan usahanya sendiri.

Pada segmen Industri Mikro dan Kecil (IMK), misalnya, keterbatasan modal menjadi salah satu persoalan yang dihadapi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2024, setidaknya 87,48 persen IMK menggunakan modal milik sendiri. Padahal, untuk mengembangkan usaha diperlukan modal yang tidak sedikit, terlebih jika ingin menambah kapasitas produksi, termasuk menambah pekerja di dalamnya. Persoalan seperti suku bunga yang tinggi, persyaratan yang sulit, dan tidak memiliki agunan menjadi sejumlah alasan IMK memilih untuk tidak memanfaatkan pinjaman dari bank. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk bantuan permodalan, pemasaran, peningkatan kapasitas produksi sangat diperlukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan minat dan keberlanjutan kewirausahaan di Kota Balikpapan.

#### 2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Tinggi rendahnya TPAK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tuntutan ekonomi.

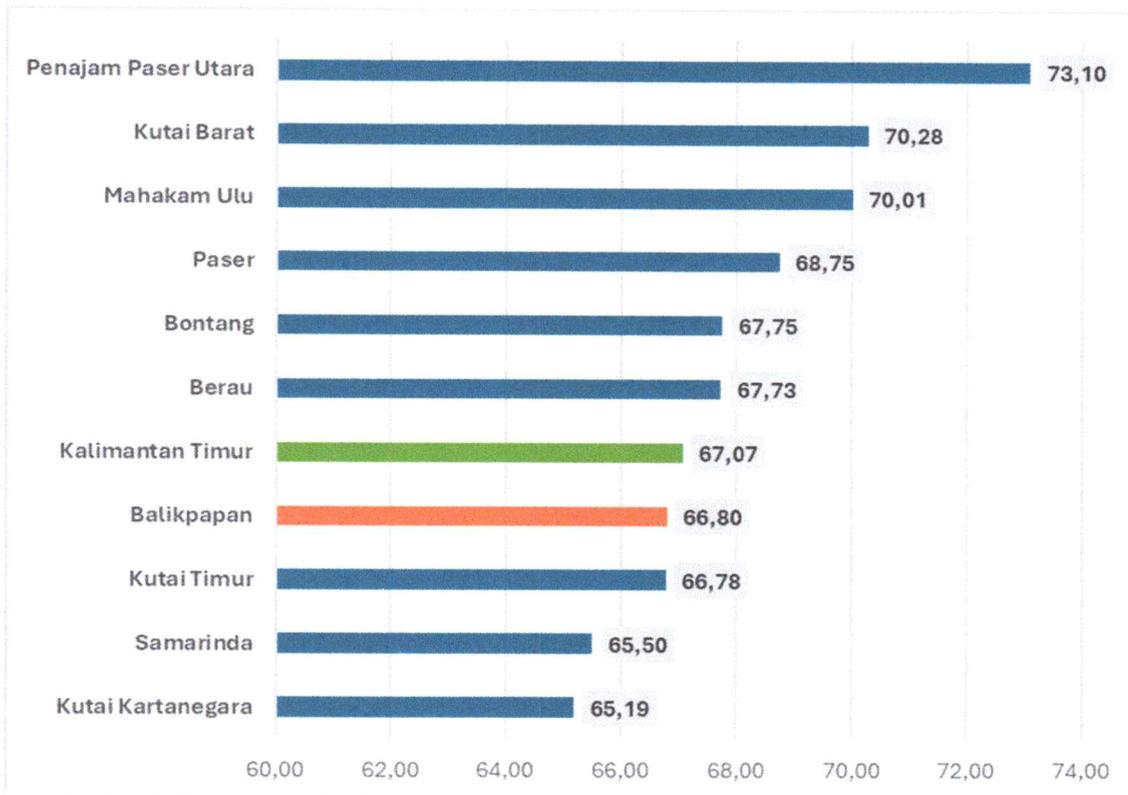


**Gambar 2. 41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024**

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2020-2023 dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2024, Diolah

Keterangan: Data TPAK Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2024 belum tersedia

Penduduk usia kerja yang memasuki angkatan kerja Kota Balikpapan secara umum menunjukkan kenaikan hingga 1,56 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan keinginan penduduk usia kerja untuk masuk ke dalam pasar kerja terus meningkat, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun masih mencari pekerjaan. Pada periode 2020-2023, TPAK laki-laki maupun perempuan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yakni mencapai 80,27 persen per tahun sedangkan TPAK perempuan sebesar 47,30 persen per tahun. Kondisi ini umum terjadi di Kota Balikpapan maupun Indonesia mengingat laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan bagi angkatan kerja perempuan keputusan untuk masuk ke dalam pasar kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur dan status perkawinan.



**Gambar 2. 42 TPAK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

TPAK Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan tetapi masih menjadikan Kota Balikpapan sebagai daerah dengan TPAK terendah keempat se-Provinsi Kalimantan Timur. TPAK Kota Balikpapan lebih rendah 0,27 persen poin dibandingkan dengan TPAK Provinsi Kalimantan Timur dan 6,30 persen poin lebih rendah dibandingkan TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara. Rendahnya TPAK di

Kota Balikpapan mengindikasikan rendahnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar kerja.

Perekonomian Kota Balikpapan yang hingga saat ini didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja berkeahlian dan berpendidikan tinggi serta bentuk industri padat modal menjadi salah satu penyebab belum terserapnya angkatan kerja dengan optimal. Kondisi ini membuat sebagian penduduk usia kerja memilih untuk mengurus rumah tangga atau tidak melakukan aktivitas apa pun karena merasa putus asa dalam mencari pekerjaan. Intervensi untuk meningkatkan keinginan penduduk usia kerja untuk aktif secara ekonomi sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja perlu menjadi prioritas pembangunan daerah guna menjamin daya saing ekonomi daerah.

#### 2.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif perlu untuk ditumbuhkembangkan sehingga untuk mendorong praktik inovasi tersebut diselenggarakan penilaian inovasi daerah yang diukur melalui indeks inovasi daerah. Penilaian indeks inovasi daerah didasarkan pada sejumlah kriteria dan jumlah inovasi yang diajukan.

**Tabel 2. 23 Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Skor	Predikat
2020	1.117	Sangat inovatif
2021	39,2	Inovatif
2022	53,88	Inovatif
2023	39,14	Inovatif
2024	57,21	Inovatif

*Sumber: SK Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020 sampai 2024, Diolah*

Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami perubahan sejak tahun 2021 sehingga skor pada tahun 2020 dihitung dalam skala yang berbeda. Indeks inovasi daerah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang cukup baik di mana tahun 2024 menjadi tahun dengan capaian tertinggi. Skor indeks inovasi daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 18,07 poin dibandingkan tahun 2023, menduduki peringkat ke-37 dari 93 kota se-Indonesia. Ada pun inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama periode 2020-2024 diantaranya Mall Pelayanan Publik, Pantai Balikpapan (Pelayanan terpadu dan terintegrasi buat

layanan kependudukan dan pencatatan sipil), juga inovasi layanan digital. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan juga menerima penghargaan “Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024” atas kinerja Mall Pelayanan Publik yang cepat dan mudah.

### **2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi agenda penting dalam menjamin pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan yang setinggi-tingginya tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk generasi berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana penerapan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan digunakan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru. Perhitungan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru hingga saat ini baru dihitung di tingkat nasional dan provinsi sehingga untuk menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu menggunakan proksi indikator lain yang dianggap dapat mewakili.

### **2.3.4 Transformasi Digital**

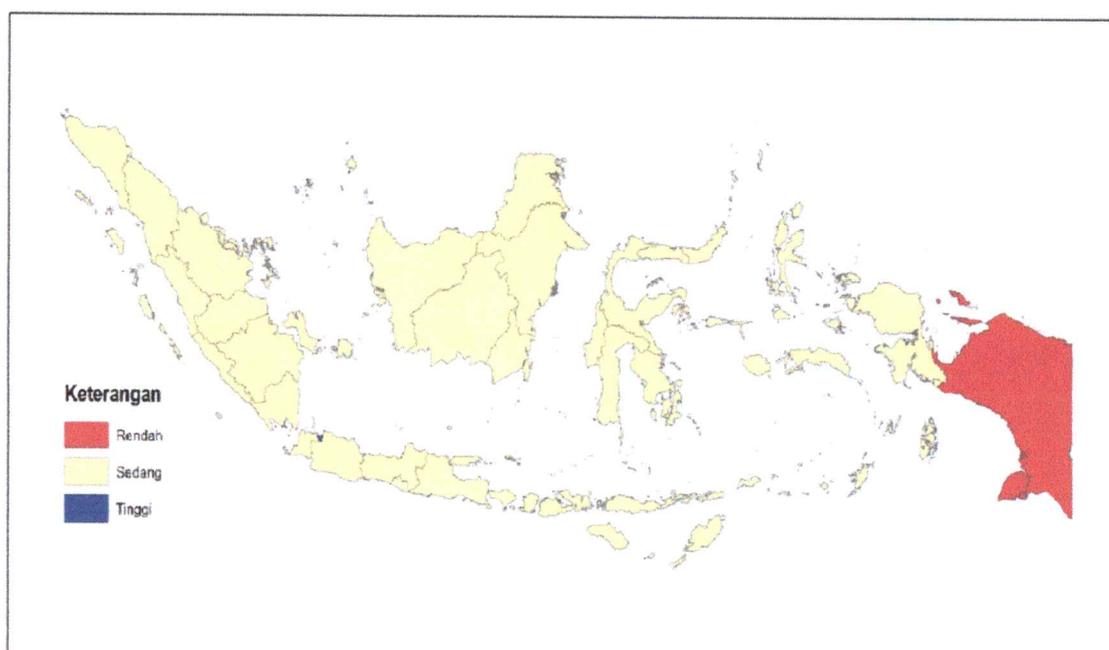
Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi dan merespons dinamika perkembangan global, transformasi digital dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan Indonesia Digital yang kuat, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Transformasi digital juga merupakan proses untuk meningkatkan produktivitas, menumbuhkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi pilar utama dalam transformasi digital yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Penerapan teknologi digital mampu mendorong efisiensi dalam proses produksi, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan inovatif. Pembangunan TIK yang semakin baik akan mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung transformasi digital.

#### **2.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)**

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyusun Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan TIK di wilayah Indonesia. IP-TIK terdiri dari 11 indikator yang dikelompokkan dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian. IP-TIK menggunakan skala 0-10, di mana semakin tinggi nilai

indeks maka menunjukkan pembangunan TIK yang semakin optimal, sedangkan jika nilai indeks semakin rendah menunjukkan pembangunan TIK yang kurang optimal di suatu wilayah.

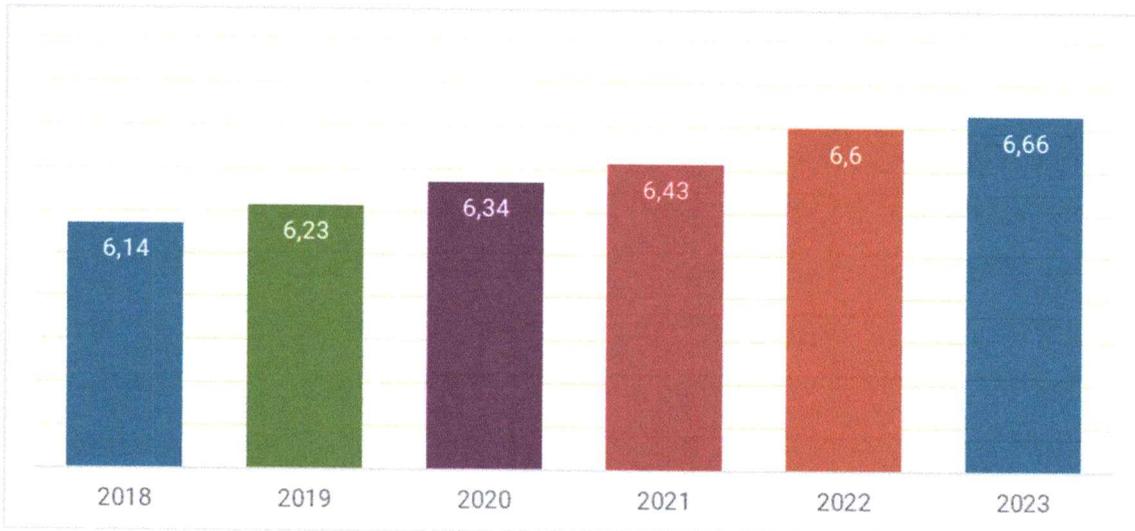
Sejak tahun 2016 BPS mengembangkan IP-TIK pada level nasional dan provinsi mengacu pada metodologi yang dirilis oleh *International Telecommunication Union* (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI) sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK yang dapat diperbandingkan secara internasional. Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pembangunan TIK, tetapi juga sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan TIK, kesenjangan digital, dan potensi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah.



**Gambar 2. 43 Visualisasi Sebaran Indeks Pembangunan TIK Indonesia menurut Provinsi, 2023**

Sumber: BPS (2024)

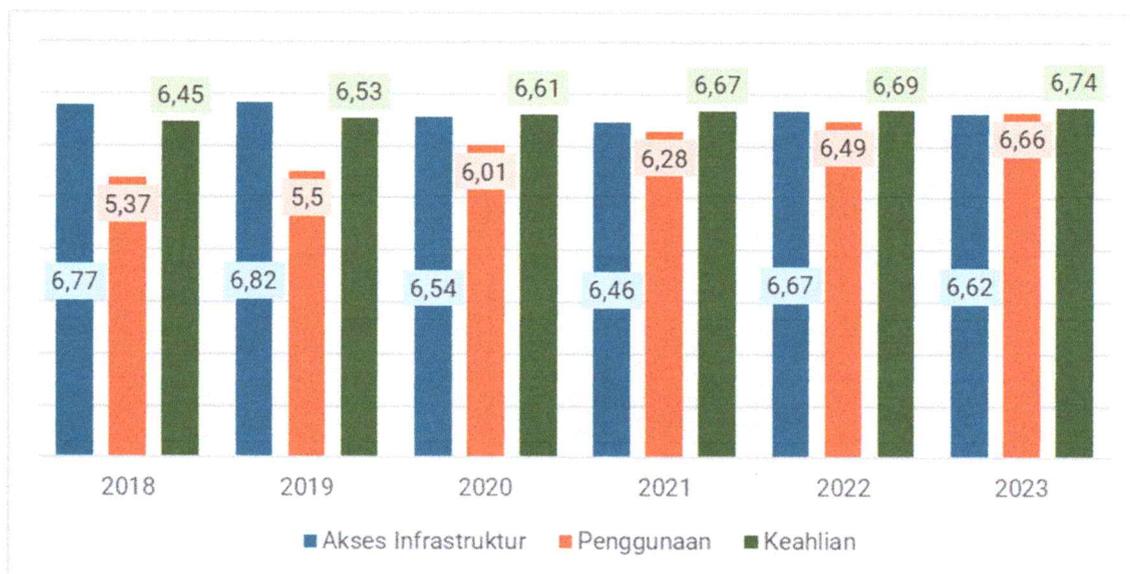
Nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan dalam 3 kategori yaitu, tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Pada tahun 2023 sebagian besar provinsi berada pada kelompok IP-TIK yang dengan kategori sedang, baik pada tahun 2022 maupun 2023 termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi Wilayah induk dari Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 sebagai Proksi**

Sumber: BPS (2024)

Nilai IP-TIK Kota Balikpapan saat ini masih menggunakan proksi data dari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pada tahun 2023, IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,66, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,60. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan penggunaan layanan TIK, serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam pembangunan TIK di wilayah Kalimantan Timur.



**Gambar 2. 45 Nilai Subindeks IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 sebagai Proksi**

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan data subindeks IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada ketiga aspek yang diukur. Subindeks Penggunaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 6,49 pada tahun 2022 menjadi 6,66 pada tahun 2023. Sementara itu,

subindeks Keahlian juga menunjukkan peningkatan dari 6,69 pada tahun 2022 menjadi 6,74 pada tahun 2023. Namun, subindeks Akses dan Infrastruktur mengalami sedikit penurunan dari 6,67 pada tahun 2022 menjadi 6,62 pada tahun 2023.

Peningkatan nilai IP-TIK dan nilai ketiga subindeks tersebut menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan TIK, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Namun, sangat penting untuk terus memperkuat pembangunan TIK di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur guna mengurangi kesenjangan digital antarwilayah. Dengan demikian, manfaat TIK dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di Kota Balikpapan.

#### **2.3.4.2 Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet**

Pada Tahun 2024 Tingkat penetrasi internet di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 80,63 persen, dengan jumlah pengguna internet sekitar 3,1 juta jiwa dari total populasi sekitar 4 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan peringkat kedua tertinggi di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Tengah (82,40%). Dari sisi kontribusi, Kalimantan Timur berkontribusi sebesar 1,42 persen secara nasional dan 23,53 persen kontribusi terhadap total penetrasi internet di Pulau Kalimantan. Kota Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian penetrasi internet tersebut, dengan akses internet yang memadai dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya konektivitas digital.

**Tabel 2. 24 Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet di Pulau Kalimantan Tahun 2024 sebagai Proksi**

<b>Provinsi</b>	<b>Penetrasi</b>	<b>Kontribusi (Nasional)</b>	<b>Kontribusi (Pulau)</b>
Kalimantan Barat	79,03%	2,01%	33,17%
Kalimantan Timur	80,63%	1,42%	23,53%
Kalimantan Selatan	71,76%	1,37%	22,61%
Kalimantan Tengah	82,40%	1,03%	17,06%
Kalimantan Utara	66,69%	0,22%	3,63%

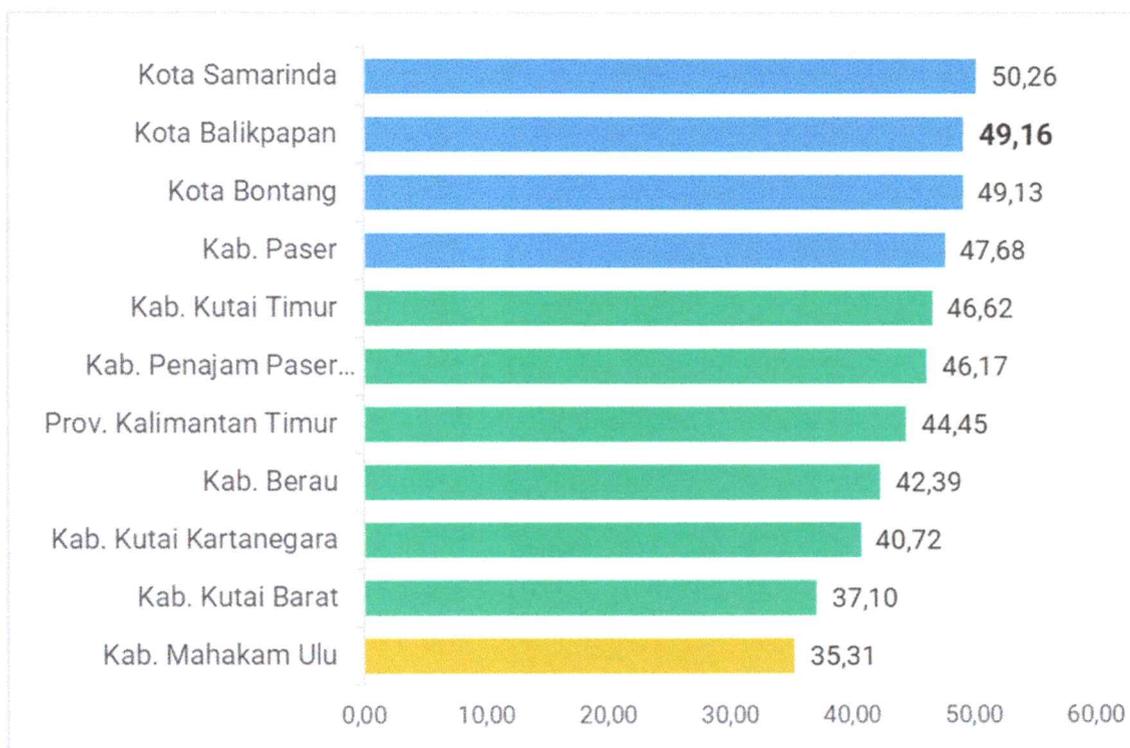
*Sumber: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2024*

Metode koneksi internet di Kalimantan Timur, termasuk Kota Balikpapan, mayoritas menggunakan mobile data dengan operator seluler sebesar 71,43 persen, disusul oleh penggunaan Wifi di rumah sebesar

26,79 persen, dan Wifi di kantor, sekolah, atau kampus sebesar 1,79 persen. Pola penggunaan ini mencerminkan preferensi masyarakat akan akses internet yang mudah dan fleksibel dengan perangkat mobile. Dengan tingkat penetrasi yang tinggi dan pola penggunaan yang didominasi mobile data, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum menjadi wilayah yang siap menghadapi transformasi digital dan mendorong perkembangan ekonomi digital di kawasan Kalimantan.

#### 2.3.4.3 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI). IMDI bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat perkembangan masyarakat digital di suatu wilayah. IMDI disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu infrastruktur dan ekosistem digital, pemberdayaan masyarakat, keterampilan digital, serta peluang lapangan kerja. Keempat pilar tersebut menjadi landasan fundamental dalam membangun dan memperkuat komunitas digital di Indonesia. Berikut gambar grafik kondisi masyarakat digital di Kota Balikpapan berdasarkan hasil pengukuran IMDI pada Tahun 2024.



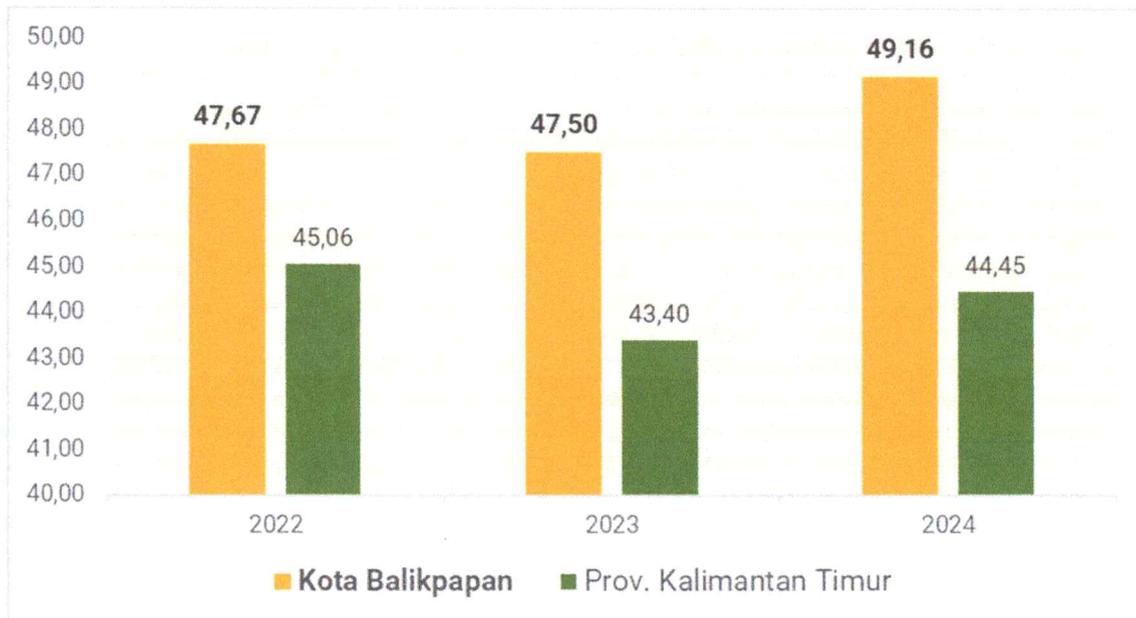
**Gambar 2. 46 Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

Sumber: Buku IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI

Keterangan kategori nilai IMDI:

- **Sangat Rendah:** nilai IMDI kurang dari 30,88
- **Rendah:** nilai IMDI berada di antara 30,88 hingga 36,27
- **Cukup:** nilai IMDI berada di kisaran 36,28 hingga 47,06
- **Tinggi:** nilai IMDI berada di antara 47,07 hingga 52,47
- **Sangat Tinggi:** nilai IMDI lebih besar dari 52,47

Pada tahun 2024, Kota Balikpapan mencatat nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebesar 49,16 yang termasuk dalam kategori tinggi. Nilai ini menempatkan Balikpapan di peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Timur, sedikit di bawah Kota Samarinda yang meraih nilai tertinggi 50,26. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki tingkat pemanfaatan teknologi digital yang cukup baik di kalangan masyarakatnya.



**Gambar 2. 47 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Balikpapan Tahun 2022-2024 (Nilai)**

Sumber: Buku IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI

Nilai IMDI Kota Balikpapan menunjukkan tren positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai IMDI mencapai 47,67, kemudian sedikit menurun menjadi 47,50 pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 49,16. Nilai tersebut secara konsisten berada di atas nilai rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang selama periode yang sama menunjukkan nilai 45,06 (2022), 43,40 (2023), dan 44,45 (2024). Pencapaian ini menegaskan posisi Kota Balikpapan sebagai daerah dengan tingkat kemajuan digital yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Dengan nilai 49,16 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Balikpapan memiliki tingkat pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang cukup baik. Kondisi ini

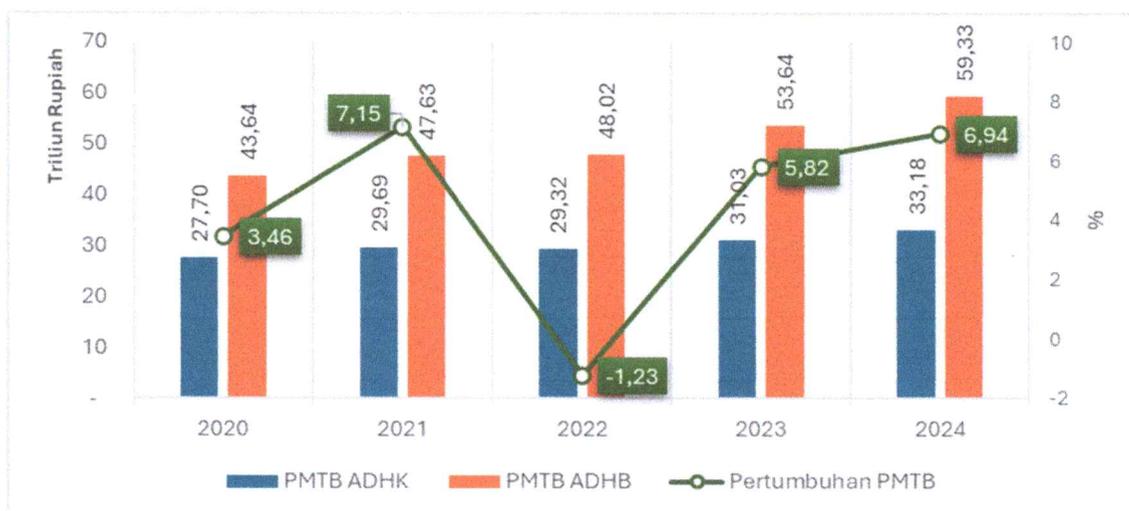
menjadi modal kuat untuk pengembangan lebih lanjut layanan digital dan transformasi digital di berbagai sektor di Kota Balikpapan.

### 2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Sub bab ini menjelaskan kondisi integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah dalam mendukung rantai pasok global. Kondisi perekonomian yang semakin terbuka memberikan peluang bagi Kota Balikpapan untuk mengambil kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah seperti kegiatan ekspor dan investasi. Gambaran mengenai kondisi investasi dan kegiatan ekspor-impor daerah dijelaskan pada bagian berikut ini.

#### 2.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi dapat berbentuk investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDRB, investasi fisik digambarkan oleh indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB merupakan indikator yang menunjukkan penambahan atau pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu.



**Gambar 2. 48 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025

Nilai nominal PMTB Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan setiap tahunnya hingga mencapai 59,33 triliun rupiah pada tahun 2024. Apabila dilihat dari harga konstan, nilai PMTB menunjukkan kenaikan dengan pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 4,43 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan PMTB yang positif

mengindikasikan adanya kenaikan investasi fisik berupa bangunan, infrastruktur, mesin, dan kendaraan di Kota Balikpapan.

Tingginya PMTB Kota Balikpapan menjadikan PMTB sebagai komponen pengeluaran tertinggi yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah. Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Kota Balikpapan mencapai 39,71 persen per tahun. Investasi fisik yang masuk ke Kota Balikpapan tergolong tinggi sejalan dengan pembangunan berbagai infrastruktur fisik, terutama sejak proyek RDMP RU V Pertamina dan peningkatan infrastruktur pendukung IKN berjalan.

### 2.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Kegiatan ekspor dan impor muncul akibat keterbatasan barang dan jasa yang dapat diproduksi di suatu wilayah. Persoalan bahan baku, ketersediaan sarana prasarana, disparitas harga menjadi sejumlah alasan terjadinya aktivitas ekspor dan impor. Bagi daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dapat mendatangkan barang dan jasa dari luar daerah melalui aktivitas impor, sedangkan bagi daerah yang memiliki kelebihan produksi dapat memenuhi permintaan dari wilayah lain dengan melakukan kegiatan ekspor.

Tingginya ekspor dapat menggambarkan seberapa besar produktivitas daerah dalam menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh daerahnya dan wilayah lain. Semakin tinggi ekspor maka semakin pula dorongan untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menggambarkan kemampuan ekspor Kota Balikpapan digunakan indikator net ekspor yang sudah dikurangi besaran impor. Berikut adalah gambaran net ekspor Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 49 PDRB dan Rasio PDRB Net Ekspor Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Diolah dari BPS Kota Balikpapan, 2025

Besaran net ekspor Kota Balikpapan menunjukkan angka yang positif yang mengindikasikan besaran ekspor daerah lebih besar daripada impor. Net ekspor Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen per tahun. Pada tahun 2024, net ekspor Kota Balikpapan mencapai 52,63 triliun rupiah atas dasar harga berlaku atau 44,26 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

Pada periode 2020-2024, rasio PDRB net ekspor terhadap total PDRB Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik meskipun pada tahun 2024 menurun 1,28 persen poin ke angka 34,27. Turunnya rasio PDRB net ekspor disebabkan oleh kenaikan PMTB daerah yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan net ekspor. Pada tahun 2024, nilai PMTB naik 5,69 triliun rupiah sedangkan kenaikan net ekspor sebesar 1,73 triliun rupiah. PDRB net ekspor menjadi kontributor terbesar kedua setelah PMTB dengan rata-rata kontribusi mencapai 32,59 persen per tahun yang mengindikasikan tingginya kegiatan ekspor daerah.

### 2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota Balikpapan yang memiliki konsep sebagai kota nyaman huni atau *liveable city* sesungguhnya merupakan representasi dari sebuah kota yang berkelanjutan (*sustainable city*) dengan harapan kualitas hidup masyarakat dapat dipertahankan dan meningkat. Selain itu, sebagai sebuah kota yang terus berkembang ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi fasilitas yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Secara khusus kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat pada tabel nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 berikut:

**Tabel 2. 25 Nilai Infrastruktur dalam Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023**

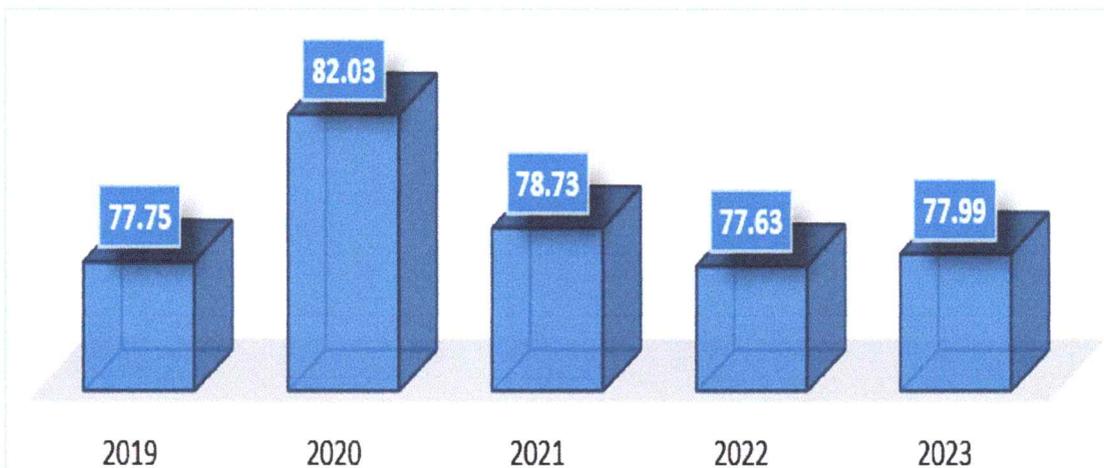
Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Nasional*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,44
Provinsi Kalimantan Timur	4,48	2,41	4,02	3,63	3,30
Rata-Rata Kab/Kota	4,31	2,19	4,15	3,40	3,11
Paser	4,32	2,31	4,17	3,51	2,86
Kutai Barat	4,13	2,04	4,02	3,28	2,75
Kutau Kartanegara	4,21	2,56	3,85	3,61	3,09
Kutai Timur	4,13	2,17	3,85	3,12	2,78
Berau	4,24	2,33	3,69	3,31	2,92
Penajam	4,22	2,41	4,19	3,76	2,98

Kabupaten/ Kota	Dimensi Lingkungan Pendukung				Skor IDSD
	Pilar 1 (Institusi)	Pilar 2 (Infrastruktur)	Pilar 3 (Adopsi TIK)	Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi)	
Paser Utara					
Mahakam Hulu	-	0,78	2,81	3,46	-
Balikpapan	4,56	2,80	4,94	3,42	3,59
Samarinda	4,38	2,32	4,99	3,62	3,79
Bontang	4,59	2,14	5,00	2,88	3,18

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN

Kondisi Infrastruktur berdasarkan IDSD Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki nilai yang cukup baik pada Dimensi Lingkungan Pendukung, yang pilar kedua yaitu infrastruktur memiliki nilai 2,80. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 2,41.

Infrastruktur wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang akan menyokong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Kota Balikpapan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang diukur dari pendapat warga Kota Balikpapan tentang kepuasan layanan infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi indikator ini sebesar 77,75 yang kemudian meningkat signifikan menjadi 82,03 pada tahun 2020, dan terakhir menjadi 77,99 pada tahun 2023. Secara umum capaian indikator IKLI Kota Balikpapan mengalami fluktuasi meskipun dalam tren yang meningkat pada akhir tahun perhitungan.



Gambar 2. 50 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Tahun 2021-2023

Sumber: Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan kinerja penyelenggaraan jalan, sesuai Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-415/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Balikpapan maka total panjang jalan kota adalah sepanjang 501,185 km, yang kondisi jalan dan jembatan Kota Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survei oleh DPU Kota Balikpapan dari tahun 2016-2024 adalah sebagai berikut:

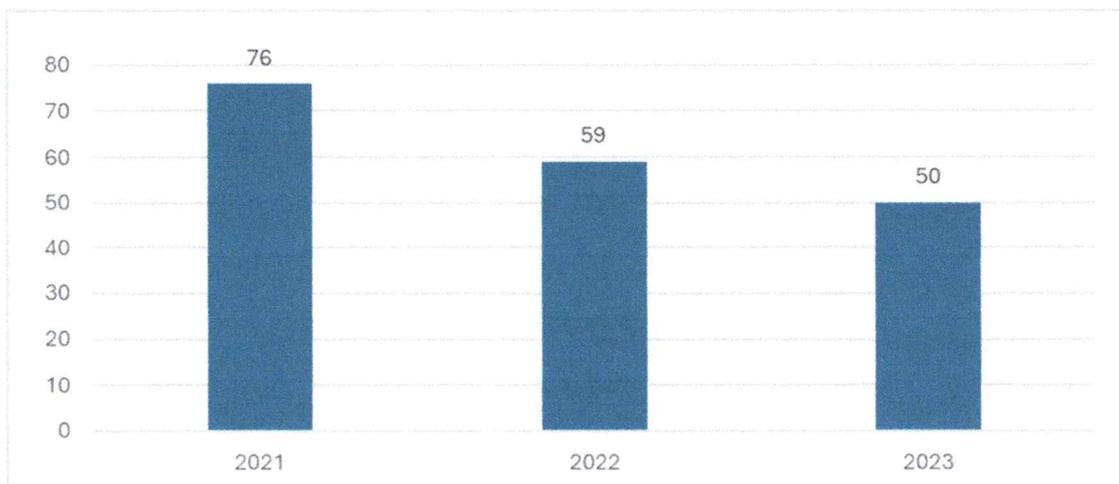
**Tabel 2. 26 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Balikpapan (km) Tahun 2016-2023**

Kualitas	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km
Baik	396,58	95,39	288,95	268,99	365,31	344,947	322,279	137,584	347,595
Sedang	85,93	295,56	133,24	150,13	96,59	102,363	169,129	218,351	116,723
Rusak	18,66	58,60	30,55	54,44	38,91	53,870	27,240	24,297	22,192
Rusak Berat	-	51,63	48,44	27.61	0,38	-	-	62,561	14,669
Jumlah	501,18	501,18	501,18	501,18	501,18	501,180	518,648	442,793	501,185

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam angka 2024

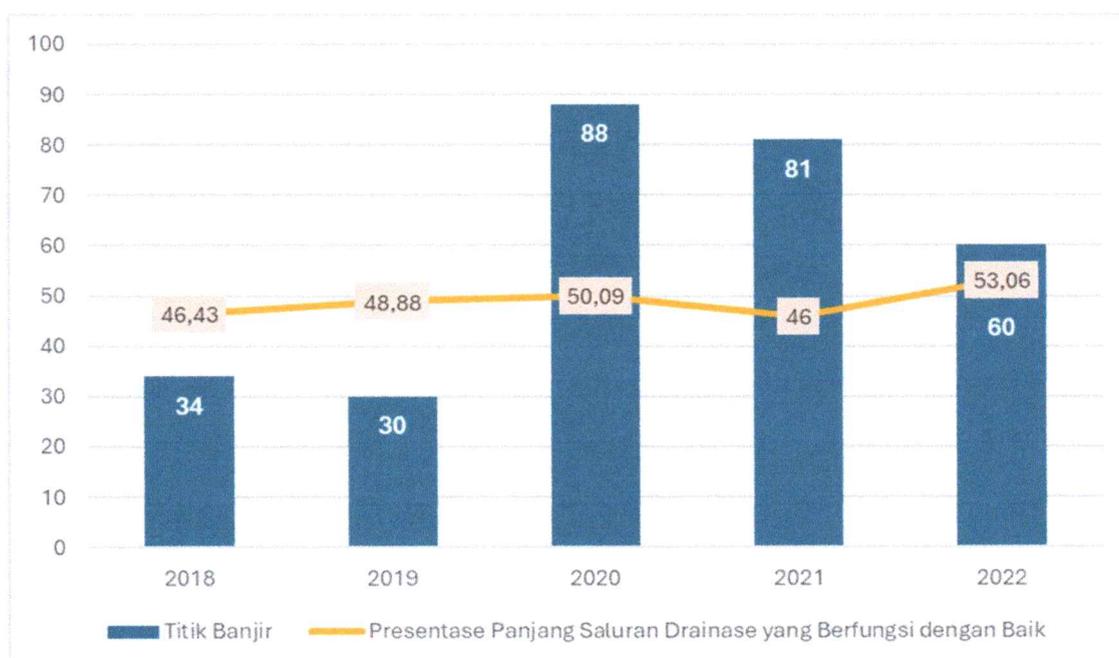
Persentase kemantapan jalan yang dihitung dari jalan baik dan sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2024 adalah sebesar 92,64% atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 96,28%. Hal ini seiring dengan perbaikan data dan perencanaan kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Berdasarkan kinerja pengelolaan sumber daya air, terdapat beberapa indikator sehubungan dengan fokus penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pengelolaan saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku. Sehubungan dengan pengendalian banjir, penyelenggaraan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada *Masterplan* Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.



**Gambar 2. 51 Penurunan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2021-2023**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022



**Gambar 2. 52 Persentase Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik dan Titik Banjir di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Jika dilihat berdasarkan kondisi drainase, terjadi peningkatan pemeliharaan yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase drainase yang berfungsi baik. Adapun titik banjir sesuai dengan *baseline* pada tahun 2015 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50 titik dan menurun menjadi 30 titik pada tahun 2019. Sedangkan berdasarkan *baseline* titik banjir yang disusun pada tahun 2020, titik banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

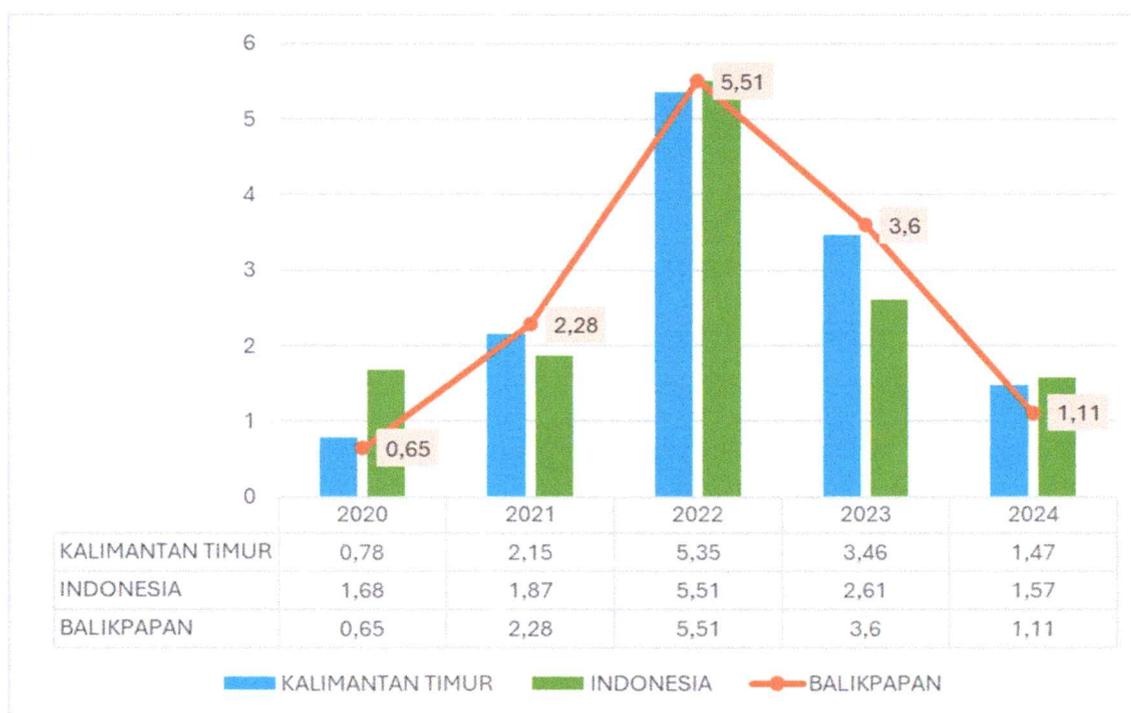
### 2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian suatu daerah stabil tanpa fluktuasi yang signifikan, mencakup pengendalian inflasi, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter, mendukung sektor keuangan, dan mewujudkan kesinambungan fiskal. Indikator yang digunakan untuk mengetahui stabilitas ekonomi makro salah satunya adalah tingkat inflasi.

### 2.3.7.1 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Inflasi menurut BPS adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, terutama kebutuhan pokok masyarakat, atau penurunan daya beli mata uang suatu negara. Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang mencatat perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat. Terdapat berbagai kategori inflasi, seperti inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi, yang masing-masing mencerminkan tingkat keparahan kenaikan harga. Inflasi yang terkendali dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi atau tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berikut tingkat inflasi Kota Balikpapan tahun 2020-2024.



Data inflasi *year-on-year* (YoY) di Balikpapan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, inflasi di Balikpapan tercatat sebesar 0,65 persen, meningkat menjadi 2,28 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mulai terlihat, di mana permintaan barang dan jasa mulai meningkat. Namun, inflasi mengalami lonjakan tajam pada

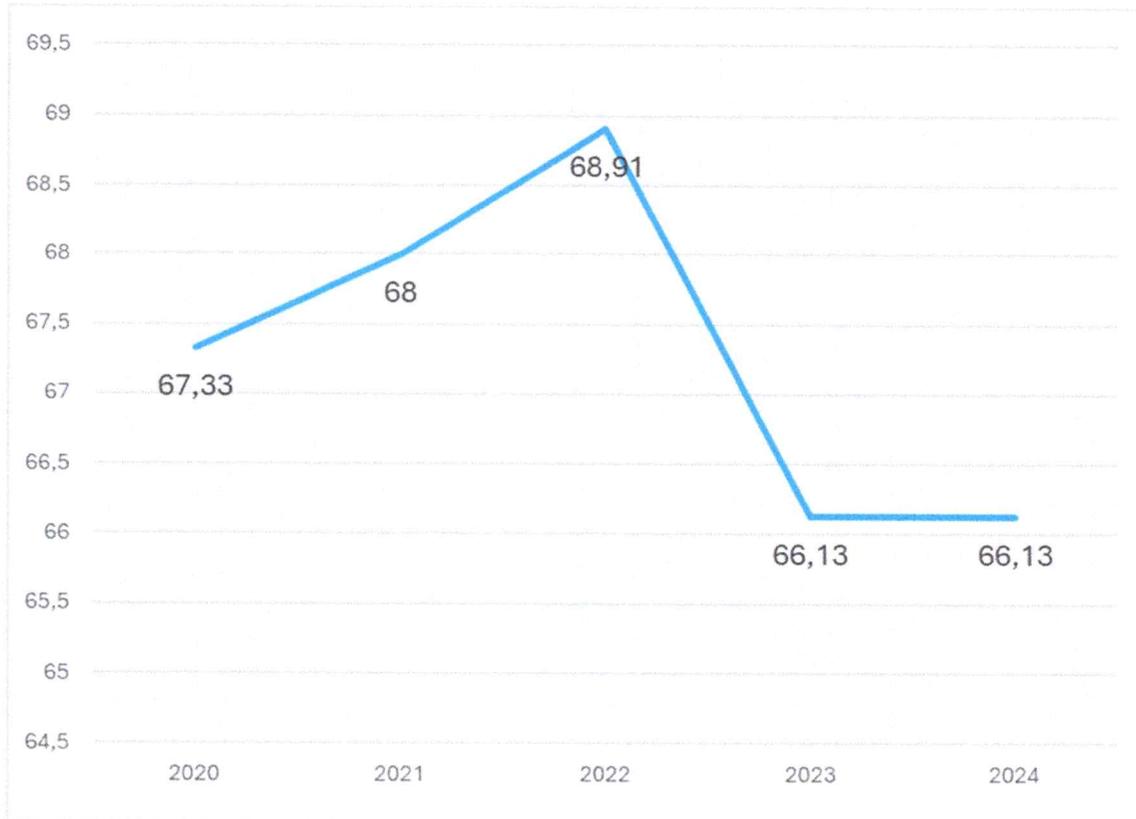
tahun 2022 mencapai 5,51 persen yang menunjukkan adanya tekanan inflasi yang lebih besar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan dan energi serta gangguan rantai pasokan. Pada tahun 2023, inflasi di Kota Balikpapan turun menjadi 3,6 persen, mencerminkan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Memasuki tahun 2024, inflasi kembali menurun menjadi 1,11 persen menunjukkan stabilitas harga yang lebih baik dan pengendalian inflasi yang efektif. Jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan, inflasi di Balikpapan cenderung lebih rendah pada tahun 2024. Kalimantan Timur mencatat inflasi sebesar 1,47 persen, sedangkan Indonesia secara nasional berada di angka 1,57 persen. Penurunan inflasi di Balikpapan ini dapat dipahami sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang berhasil menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga meskipun tantangan dalam pengendalian inflasi tetap ada.

## **2.4 Aspek Pelayanan Umum**

Sub bab ini menguraikan gambaran umum terkait kondisi Kota Balikpapan dari aspek pelayanan umum. Kedua aspek tersebut dijelaskan secara rinci dan sistematis secara komprehensif. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut.

### **2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam menggambarkan kinerja aspek pelayanan umum, antara lain adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, Indeks SPBE, dan Indeks Pelayanan Publik.

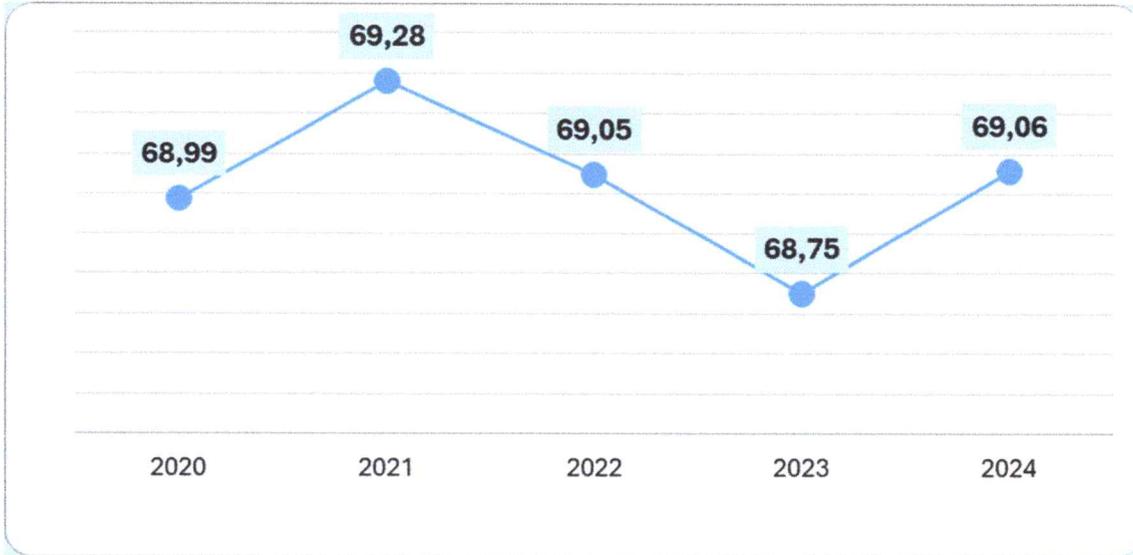


**Gambar 2. 53 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

*Sumber: Sekretraiat Daerah, 2025*

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Balikpapan mendapatkan predikat B pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 10,89 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja reformasi birokrasi belum optimal yang ditandai belum adanya peningkatan nilai RB hingga tahun 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa komponen RB yang belum optimal.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan capaian kinerja bidang tata kelola adalah nilai AKIP. Indikator ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan aktivitas pemerintahan yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Nilai AKIP secara jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mencapai target kinerja yang telah disusun pada awal periode tertentu dan kesesuaiannya dengan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian nilai AKIP Kota Balikpapan tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

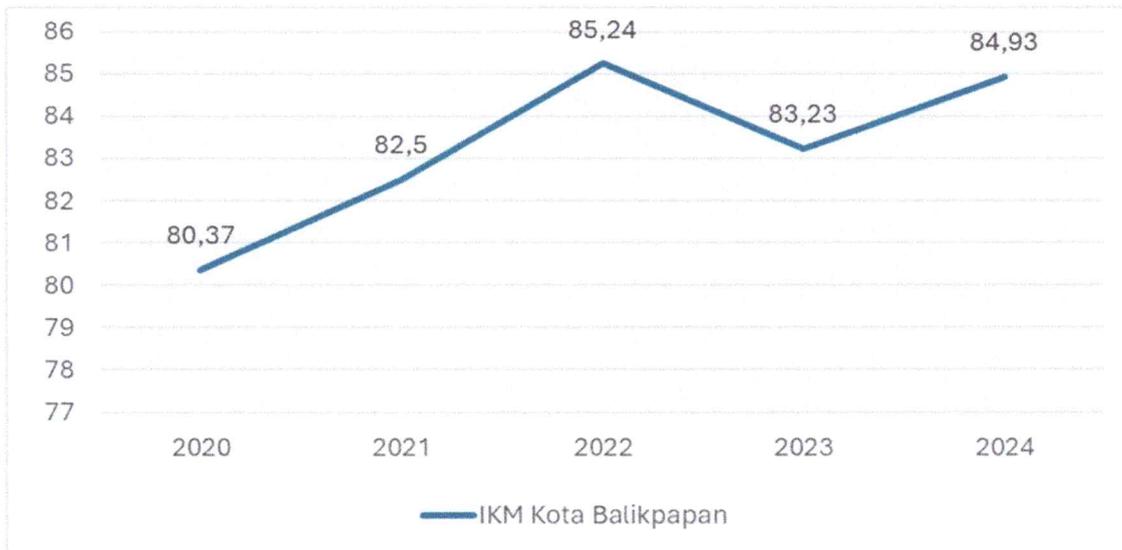


**Gambar 2. 54 Nilai AKIP Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, 2025

Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh predikat B selamat 5 tahun terakhir. Meskipun demikian, kinerja akuntabilitas belum optimal yang ditandai dengan adanya fluktuatif nilai AKIP. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja masih menghadapi tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas indikator kinerja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan, serta mekanisme *cascading* kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi, proses bisnis masih sama dengan nomenklatur.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui aspek pelayanan umum. Sumber data IKM didapat dari hasil survei berdasarkan beberapa komposisi pelayanan. Adapun capaian IKM Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

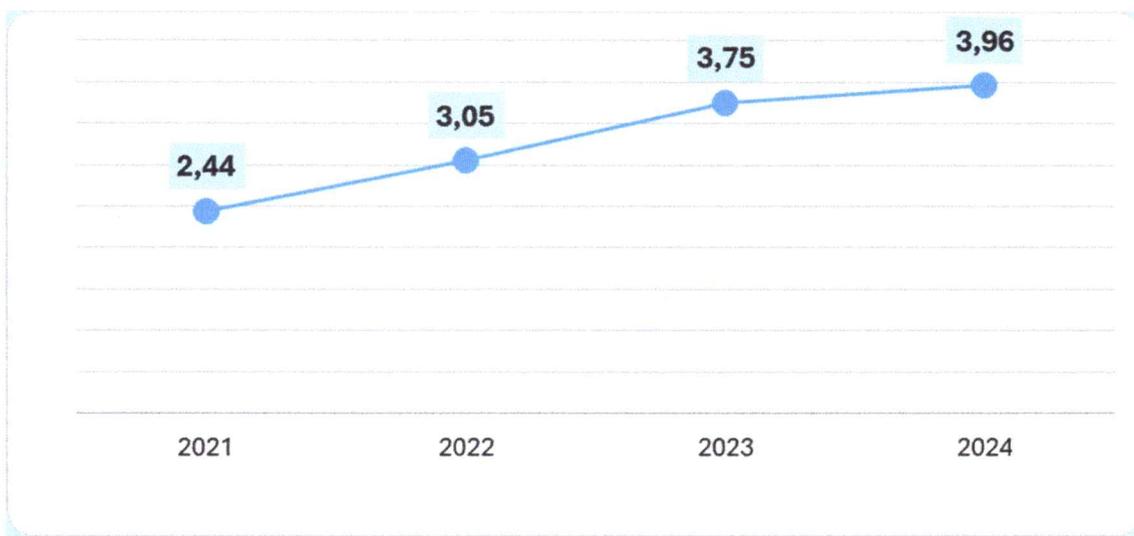


**Gambar 2. 55 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2025

IKM Kota Balikpapan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun pada 2024, dengan rata-rata capaian 79,97. Penurunan tersebut disebabkan oleh tindak lanjut pengaduan masyarakat belum optimal terutama di dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Hasil Evaluasi RKPD 2023), namun berhasil kembali dipulihkan pada tahun 2024. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan semakin diperkuat terutama dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Kinerja pelayanan publik dari sisi digitalisasi perlu dianalisis terutama dalam menciptakan Balikpapan sebagai kota cerdas dan nyaman. TIK memiliki peran penting dalam mengakselerasi pembangunan kota. Adapun kinerja digitalisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 2. 56 Indeks SPBE Tahun 2021-2024**

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Digitalisasi sektor pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan optimal di Kota Balikpapan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SPBE Kota Balikpapan yang semakin meningkat. Selain itu, selama 4 tahun terakhir nilai SPBE juga menunjukkan kinerja positif dengan rata-rata peningkatan, yaitu sebesar 3,08. Di samping itu, peningkatan kinerja paling tinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,70. Hal ini menandakan bahwa digitalisasi pemerintahan sudah berjalan baik dan menjadi modal utama Kota Balikpapan sebagai kota cerdas ke depan.

#### **2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

Aspek ini menjelaskan tentang penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi substansial dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dinilai dari tingkat kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan

sejauh mana diselesaikan oleh aparat. Adapun tingkat kejahatan atau pelanggaran di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 27 Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Kota Balikpapan Tahun 2021-2024**

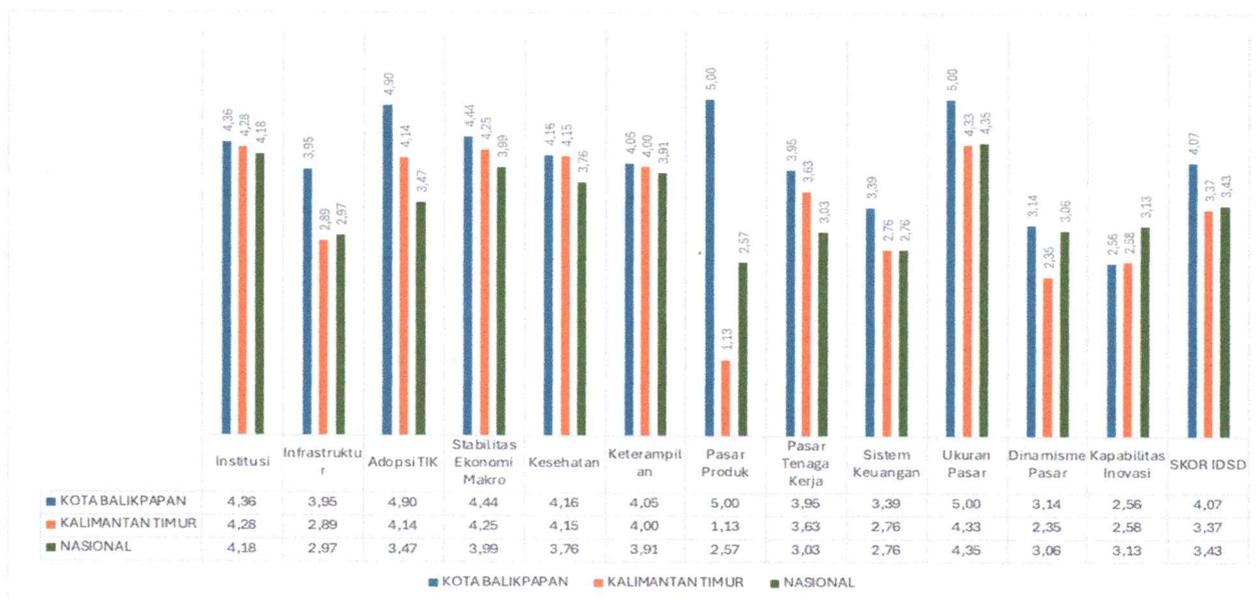
Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Dilaporkan	405	738	1224	1.406
Diselesaikan	276	538	666	854

*Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2025*

Tingkat kejahatan atau pelanggaran di Kota Balikpapan berdasarkan jenisnya menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini ditandai dengan jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan kepada aparat kepolisian. Terdapat tiga jenis pelanggaran yang dilaporkan dengan kasus terbanyak pada tahun 2024, yakni BBM ilegal sebanyak 22,5 persen dibandingkan keseluruhan kasus, pencurian kendaraan bermotor yang mencapai 11,73 persen, dan penganiayaan ringan sebesar 10,38 persen. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, persentase penyelesaiannya mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan dalam penegakan dan penertiban setiap pelanggaran yang berimplikasi pada belum optimalnya tingkat keamanan daerah.

#### **2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Daya saing dikaitkan dengan masalah produktivitas. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara. Konsep pengukuran daya saing dalam IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2024 di Kota Balikpapan dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 2. 57** Skor Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2024

Pada tahun 2024 skor IDSD Kota Balikpapan lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Skor tertinggi berada pada pilar Ukuran Pasar dan Pasar Produk dengan skor 5,00, sedangkan skor terendah berada pada pilar Kapabilitas Inovasi. Hal tersebut mengindikasikan perlu adanya pengembangan kapabilitas inovasi untuk mendukung daya saing Kota Balikpapan.

#### 2.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah Kota Balikpapan diukur dengan melihat capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Kota Balikpapan memiliki IKK sebanyak 494 indikator dan telah dipenuhi seluruhnya. Berikut capaian IKK Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019-2023.

**Tabel 2. 28** Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1	PDRB per kapita	Juta Rupiah	165,69	151,31	160,3	181,29	201,64	214,11
2	Inflasi	%	1,88	0,65	2,28	5,51	3,6	1,11
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	67,31	67,33	68	68,91	66,13	66,13
4	Nilai SAKIP	Poin	68,68	68,99	69,28	69,5	68,75	69,06
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin				76,551	81,251	82,068
6	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%		24,21	33,14	28,28	26,6	26,9
7	Indeks SPBE	Poin			2,44	3,05	3,75	3,96

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Maturitas SPIP	Level				Level 3	Level 3	Level 3
9	Indeks Sistem Merit	Poin				0,65	0,68	0,68
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,65	80,37	82,5	85,24	83,23	84,93
11	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,11	80,35	81,07	81,49	82,03	82,62
12	Indeks Pendidikan	Poin	0,748 2	0,748 8	0,7587	0,7593	0,7599	0,7622
13	Indeks Kesehatan	Poin				0,843	0,8315	0,8595
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin				11,69	14,43	15,33
15	Indeks Warisan Budaya	Poin				0,464	0,4955	0,4956
16	Indeks Liveable City	Poin	77,58	81,69	78,48	77,71	77,85	74,87
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin				63,96	67,64	68,4
18	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan	%				85,14	85,14	96,85
19	Indeks Resiko Bencana	Poin				110	118,21	101,43
20	Indeks Gini	Poin	0,302	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
21	Persentase Pertumbuhan UMKM	%				29,55	20,21	19,23
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,29	9	8,94	6,9	6,09	6,22
23	Tingkat Kemiskinan	%				2,45	2,31	2,23
24	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,99	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
25	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah				15,426	24,125	25,705
26	Skor Pola Pangan Harapan	Poin				86,1	88,6	87,35
27	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang				1,759	2,559	2,67
28	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%				28,46	33,53	38,57
29	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,23	-3,07	7,08	8,42	5,66	9,77
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	77,75	82,03	78,73	77,63	77,96	74,03
2	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin				77,63	77,98	81,62
3	Persentase Permukiman Layak Huni	%				99,07	99,11	99,85
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,13	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,67	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				69,36	69,36	64,39
4	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	Tahun				90,81	90,08	107,45
5	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan	%				54,01		380

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Lokal							
6	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%				95,16	95,16	81,86
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%				98,21		
8	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	%						
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				85,89	85,89	87,07
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,41	75,2	75,5	74,68	75,64	75,87
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				81,37	81,37	81,67
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				84	83	84,58
4	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%				82	100	100
5	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%				100	100	100
6	Persentase UKBM Aktif	%				80	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				81	82	75,92
8	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				10.825	10.838	10.926
9	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				10.072	10.346	10.441
10	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				9.976	10.252	10.315
11	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				56.791		51.614
12	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				337.68 2	84.632	101.088
13	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				337.68 2	391.27 3	313.962
14	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				37.288	35.812	41.011
15	Jumlah Warga Negara	Jiwa				132.97	63.242	64.603

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan					0		
16	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				17.263	19.279	20.253
17	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Jiwa				611	668	773
18	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				12.361	15.885	18.032
19	Jumlah Warga Negara Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	Jiwa				15.686		22.835
20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%				86,67	100	100
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%				98,64	99,03	100,2
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%				96,15	99,04	100,31
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%				100	103,05	104,06
24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%				99,16	98,22	105,82
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				100	99,79	119,99
26	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%				76,72	88,77	100
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%				60,46	96,01	101,39
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				75,63	98,69	100
29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%				100	110,72	115,39
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	%				85,94	95,7	107,66

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar							
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR</b>							
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	Poin				77,63	78,78	84,67
2	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%				55,79	60,43	61,05
3	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%				97,85	97,11	97,11
4	Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%				79,95	79,92	79,92
5	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	%				45	94	94
6	Persentase pelayanan jasa konstruksi	%				29,12	29,73	25,46
7	Nilai SAKIP OPD	Poin				78,87	78,87	79,8
8	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%				89,74	89,74	96,85
9	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%				20	25	42,86
10	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%				55,88	67,65	67,65
11	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%				53,06	53,47	54,22
12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%				97,18	93,39	96,76
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaian dan Non Perpipaian	%				98,54	99,51	99,7
14	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%				97,82	97,96	98
15	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	%				85,36	80	92,64
16	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	%				79	79,45	0
17	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	%				92,8	92,57	93,59
18	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%				100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%				20	25	42,86
20	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks				0,14	0,2	0,25
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				100	82	100
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				76	82	84,32
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%				98,99	98,96	98,97
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%				70,01	92,72	96,76
25	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%				84,93	86	99
26	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Liter/detik				1.510	1.570	1.720
27	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	%				79,05	80,37	98,97
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%				97,18	93,32	96,76
29	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	%				0,7	0,77	96,39
30	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%				3,5		3,42
31	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota				1	1	0
32	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Institusi / Lembaga				66	66	66
33	Panjang pembangunan jalan tol	km				33,12	33,12	27,44
34	Panjang pembangunan jalan kota (km)	km				518,65	442,79	6,32
35	Rasio luas kawasan	%				53,06	53,47	54,2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota							
36	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%				22,25	22,25	95,67
37	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%				92,27	75,67	95,99
38	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%				92,8	100	95,77
39	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%				4,69	4,13	10
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>							
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%				0	0	0
2	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%				21,97	20,13	24,56
3	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%				34,19	36,8	89,27
4	Nilai SAKIP OPD	Poin				72,55	72,55	0
5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%				0	0	0
6	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha				100,88	96,89	21,67
7	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%				0,03	0	0,04
8	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%				1,39	2,08	3,07
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77,29	76,5	76,78
10	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%				0	0	0
11	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%				0	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni							
12	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	%				0,22	0,17	0,12
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%				99,81	99,83	99,98
14	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%				0	0	0
15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%				0	0	0
16	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%				26,11	100	89,27
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%				0,23	0,19	0,13
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>							
1	Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana	%				11,62	4,93	2,05
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%				13,15		18,93
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				55,5	55,5	0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	Poin				81,25	93,13	97
5	Nilai SAKIP OPD	Poin				60,98	60,98	0
6	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%				14	14	64,7
7	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%				79,64	93,24	90
8	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%				77,52	93,8	90
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				71,69	91,45	84,98
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin				77	81,09	95

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Internal Perangkat Daerah							
11	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Layanan				100	100	1
12	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%				100	100	90
13	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%				100	100	100
<b>F</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							
1	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%				43,43	73,42	85
2	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%				79	80	82
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				62,74	62,74	0
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%				83,65	80	80,56
5	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%				43,43	83	85
6	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%				81,46	73,92	55,07
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%				100	100	91,68
8	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%				79	80	82
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				93	92	94
10	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	RTS				5.970	5625	5.670
11	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%				81	85	100
12	Pendampingan psikososial korban	orang				0	0	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	bencana sosial							
13	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	%				12,05	74,23	62
14	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%				12,05	91,21	65,42
15	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%				100	100	91,68
<b>II</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>							
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%				65,58	63,48	66,8
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				63,81	63,81	0
3	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%				2,92	2,8	3,07
4	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%				61	51,52	75
5	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%				25	38,11	36,99
6	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	%				87,5	60,53	54,9
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				87,72	91,78	92,16
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%				77,78	91,18	91,8
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	%				21,06	31,85	46,53
3	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran	%				83,33	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Keluarga (PUSPAGA)							
4	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%				27,77	33,33	38,24
5	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%				67,1	70,05	80
6	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	%				66,37	98,08	96,36
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				82,19	83,37	81,75
8	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Poin				1	38	38
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%				21,56	20	29,87
10	Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	%				20,74	20,74	26,67
11	Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)	%				40	32,14	34,38
12	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%				0,05	0,09	0,001
13	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%				100	100	100
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							
1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%				7,9	2	13,09
2	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%				95	94,9	94,5
3	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%				115	116	114
4	Persentase Keamanan Pangan	%				100	100	100
5	Nilai SAKIP OPD	Poin				81,91	80,08	0
6	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	%				20	40	N/A
7	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%				0,03	0,17	0,1
8	Persentase Penanganan	%				100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah Rawan Pangan							
9	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	%				100	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				73	75	77,54
11	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Poin				86,1	88,6	87,35
12	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%				0,03	0,17	0,097
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							
1	Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah)	%				88,86	75	85,53
2	Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan	%				62,96	67	80,21
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				67,79	67,81	0
4	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	%						0
5	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	%				56	44,4	40
6	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%				62,96	80,2	80,21
7	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	%				63,12	80	88
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>							
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin				50,32	48,91	59,2
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin				84,29	89,98	86,28
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin				50	54,5	54,49
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin				71	79,21	81,28
5	Nilai SAKIP OPD	Poin				70,85	70,85	0
6	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%				35,29	50	89
7	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%				63,96	100	100
8	Persentase RTH yang	%				5,74	10,59	10,63

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dikelola							
9	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	%				24,48	44,74	65,79
10	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%				40,36	29,27	32,93
11	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	%				61,15	100	100
12	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	%				20	100	100
13	Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani	%				152	100	100
14	Persentase pengelolaan persampahan	%				99,1	99	99
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77,66	77,66	78,16
16	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%				73,1	99,47	99
17	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton				159.07 9	117.52 7	48.128
18	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton				35.705 ,36	38.514 ,69	4
19	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen				1	1	0
<b>F</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Nilai				90,86	93,75	93,27
2	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil	Nilai				93,75	94,38	94,41
3	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Nilai				78,47	80	80,56
4	Nilai SAKIP OPD	Poin				71,58	71,58	0
5	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%				91,12	91,63	99,81
6	Persentase Penduduk	%				95,76	97,38	97,43

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil							
7	Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik	%				100	100	100
8	Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun	%				0	0	0
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				86,2	84,16	87,82
10	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	%				99,58	99,65	99,76
11	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Poin				99,91	99,9	99,94
12	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%				99,58	99,65	99,76
13	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%				99,58	99,65	99,76
14	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)	Keteran gan				Ada	Ada	Ada
15	Perekaman KTP elektronik	%				98,95	99,99	100
16	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%				66,2	80,17	99,42
17	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%				25	43,33	62,86
<b>G</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
1	Persentase Kelurahan Kategori Berkembang	%				38,24	100	100
2	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	%				100	100	100
3	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan					##### ##### ##	##### ##### ##	##### ##### #####
<b>H</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							
1	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi	%				52,81	61,02	64,45
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				52,98	52,98	0
3	Persentase tindak lanjut	%				64	68	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk							
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%				30,57	17,59	12,2
5	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	%				8,25	8,4	8,54
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Poin				77,63		78,56
2	VC Ratio di Jalan Kota	Indeks				0,51	0,5	0,55
3	Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola	%				62	63	63
4	Nilai SAKIP OPD	Poin				68,55	68,55	0
5	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	%				113,64	118	84
6	Persentase load faktor angkutan orang umum.	%				37,5	29,6	53
7	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%				62,21	63	66
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77	86,37	78
9	Jumlah dermaga penyebrangan	lokasi				1	1	1
10	Jumlah pelabuhan strategis	lokasi				4	4	4
<b>J</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>							
1	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai				3,1	4,6	4,5
2	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai				3,82	4,07	4,32
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai				2,6	3,7	3,9
4	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai				1,55	2,27	2,64
5	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai				87	95,16	94,64
6	Nilai SAKIP OPD	Poin				70,28	70,28	0
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%				65	89	80
8	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain	%				100	100	92

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	instansi penyelenggaraan negara							
9	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	%				90	96,5	85
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				86,89	86,91	87,08
11	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	%				91,83	88,72	92,35
12	Proporsi individu yang menggunakan internet	%				85,6	83,64	88,7
<b>K</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>							
1	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen				20	15,69	16,74
2	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	Persen				10,96	32,62	3,68
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				80,28	67,26	0
4	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%				5,98	5,44	5,44
5	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%				20	15,69	16,74
6	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya	%				6,53	44,44	53,57
7	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkatkan kapasitasnya	%				28,41	9,07	8,37
8	Persentase Koperasi Sehat	%				2,76	2,51	6,28
9	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%				70,52	78,33	81,94
10	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	%				3,19	8	8,48
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				81,77	82,22	83,02
12	Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank	%				26,2	27,95	34,81
<b>L</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>							
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%				463,26	156,39	128,02
2	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%				4,72	2,01	0,39
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				77,57	73,91	0
4	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang	%				0	0	0

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Penanaman Modal							
5	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%				80	85	95
6	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%				88,17	96,63	93,91
7	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	%				100	100	100
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	%				91,04	94,44	93,88
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				78,02	92,77	94,32
<b>M</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%				10,07	11,22	13,45
2	Peningkatan prestasi olahraga	%				45,83	23,45	20,77
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				67,38	65,95	0
4	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%				1,03	2,7	2,28
5	Persentase Atlet yang Berprestasi	%				32,64	21,32	15,11
6	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%				100	100	100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				82,05	86,48	88,79
<b>N</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%				95	100	100
<b>O</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>							
1	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%				100	80	100
2	Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan	%				80	80	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	komunikasi sandi							
<b>P</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							
1	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai				0,24		0,93
2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%				22,9	22,9	90,33
3	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%				24,87	24,87	44
4	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%				26,66	26,66	66,67
5	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%				85,63	85,63	96,77
6	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%				0		
<b>Q</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>							
1	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%				10,83	21,43	24,91
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				67,38	67,38	0
3	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%				5	6,6	7
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				80	92,16	95,45
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%				42,28	51,76	81,04
<b>R</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>							
1	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai				32,71	65,04	71,78
2	Persentase Arsip yang dikelola	%				60	70	79
3	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%				7	55	76
4	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%				0	0	0
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%				80	33	67
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN</b>							
1	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton				4.800	4.660	4.183
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton				4.251	4.308	4.019
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton				549	352,1	164
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>							
1	Tingkat Hunian akomodasi	%				31,72	45,25	53,54
2	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%				0	13,45	34,68
3	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%				10,61	3,9	3,8
4	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%				17	25	4,37
5	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	%				12	18	29,49
6	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	%				8	33	33,33
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%				1,45	1,48	1,66
8	Jumlah wisatawan mancanegara	orang				11.704	24.511	36.450
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang				1.748.085	2.534.015	2.633.919
10	Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan	orang				1.759.789	2.558.526	2.670.369
11	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	orang				9920	11583	3,93
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>							
1	Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton				14.081	16.956	21.832
2	Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton				187.540	185.175	146.789
3	Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton				16.087	16.568	15.274
4	Total Produksi sub sektor peternakan	Ton				17.714	17.095	24.199
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%				41,54	47	63,38
6	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%				15	44	25
7	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	%				75	75	85
8	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	%				246	343	148,88

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%				40	97,57	52,65
10	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	%				50	100	N/A
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>							
1	pertumbuhan nilai ekspor non migas	%				19,84	-20,04	-16,73
2	persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang	%				69,19	72,81	88,69
3	inflasi pangan bergejolak	%				5,81	6,76	3,54
4	persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	%				8,33	8,33	8,33
5	persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%				6,8	6,34	25,07
6	Nilai SAKIP OPD	Poin				69,98	69,41	0
7	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	%				35,06	38,1	41
8	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	%				80	80	80
9	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%				10,61	6,22	4,7
10	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	Juta Dollar				4029,26	4422,09	4.145
11	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%				68,96	88,26	75,7
12	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	%				76,92	70,91	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77,45	80,35	75,62
14	Persentase kinerja realisasi pupuk	%				13	87	75,17
15	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%				68,96	88,26	97,3
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan Investasi IKM	Persen				6,92	13,51	13,32
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%				1,1	7,86	11,27
3	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	%				12,01	12,74	14,41
4	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	%				45,45	29,02	30,57
5	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	%				4,59	4,74	6,19
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					40	100	30,57
<b>IV</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>A</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							
1	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%				100	100	100
2	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%				100	100	100
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				76,05	76,05	0
4	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	%				97,73	100	100
5	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	%				100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77,45	76,34	76,54
7	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Poin				100	N/A	N/A

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(Provinsi/ Kabupaten/Kota).							
8	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%				87,12	90,16	95,57
<b>B SEKRETARIAT DPRD</b>								
1	Nilai SAKIP OPD	Poin				64,86	0	0
2	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai				65,85	72,79	74,51
3	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%				72,1	82,5	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				78,04	85,47	86,97
<b>V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
<b>A PERENCANAAN</b>								
1	Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)	Poin				41,7	42,76	42,87
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				68,43	0	0
3	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Poin				19,35	20,26	20,34
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Poin				22,35	22,5	22,53
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				82,14	78,61	83,08
6	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Proyek				2	2	3
7	Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Rp				740.89 4.850	732.90 7.000	##### ###
8	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	%				29,55	25,8	20,54
9	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Nilai				13,09	11,22	11,22
10	PDB per kapita	Nilai				181,29	201,64	201,64
11	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil	Nilai				4,96	6,49	1,32

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	per orang bekerja per tahun							
<b>B</b>	<b>KEUANGAN</b>							
1	Nilai SAKIP OPD	Poin				58,66	58,66	0
2	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)					WTP	WTP	WTP
3	Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%				14,34	15,68	15,23
4	Nilai SAKIP OPD	Poin				61,02	65	0
5	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%				100	100	100
6	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%				100	100	100
7	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar				663,69	767,76	885,11
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				74,5		77,5
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				88,93	89,53	89,53
10	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui	%				95	95	95
11	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	%				100	100	100
12	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya	%				0,64	0,67	0,624
13	Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	%				0,49	0,5	0,5
<b>C</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>							
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai			48,48	51,21	62,72	78,59
2	Nilai SAKIP OPD	Poin				89,95	87,49	0
3	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%				88	89,44	84,21
4	Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%				20	40	60
5	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	%				97,81	95,26	88,75

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	%				0,69	79,01	1,34
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				77,08	83,83	83,74
8	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				107,97	55,08	57,37
9	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				20,16	24,65	23,11
10	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%				59,39	34,04	8,01
11	Indeks NSPK Manajemen ASN	Poin				61	73,5	72,68
<b>D</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							
1	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%				17,39	18,94	22,13
<b>E</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	10820	1117	39,2	53,88	39,14	57,21
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%				100	100	100
<b>VI</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
<b>A</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							
1	Kapabilitas APIP	Level				Level 3	Level 3	Level 3
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi	Poin				16,7	16,53	16,71
3	Nilai SAKIP OPD	Poin				76,89	76,89	0
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%				83,33	86,5	91,9
5	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	%				51,67	63,33	75
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				84,5	85	81,44
<b>VII</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>							
<b>A</b>	<b>KECAMATAN</b>							
1	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				61,13	69,9	60,04
2	Indeks Kepuasan	Poin				82,25	84,25	70

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Masyarakat Kecamatan							
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				63,39	63,39	69,44
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin				85,93	84,38	90,6
5	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				69,22	73,58	70,31
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin				81,11	80,92	81,33
7	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				65,56	65,56	67,67
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin				79,44	83,57	83,15
9	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				66,25	66,25	68,26
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin				81,51	81,03	89,46
11	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin				74,2	70,84	70,38
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin				81	80	88,8
13	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin				100	100	100
14	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				16	23,37	14
15	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				100	98	100
16	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin				100	100	100
17	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				8	19,33	20,28
18	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				100	100	100
19	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin				100	100	100
20	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				10	51	24,76
21	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				100	100	100
22	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Poin				100	100	100
23	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				16,35	16,52	17,01
24	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				100	100	100
25	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif	Poin				100	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Yang Ditindaklanjuti							
26	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				15,27	15,9	17,11
27	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				81	98	100
28	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Poin				100	100	100
29	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%				23,37	23,7	23,37
30	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%				100	100	100
31	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				70,5	88	70
32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				79,21	84,38	79,62
33	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				80,22	80,22	75,98
34	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				79,32	69,14	79,8
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				81,83	81,98	82,88
36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				86,63	77,31	86,63
<b>VIII</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							
<b>A</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							
1	Nilai SAKIP OPD	Poin				60,46	60,46	0
2	Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	%				67	100	100
3	Presentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	%				81	85	100
4	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	%				100	75	80

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	CAPAIAN					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%				66,6	100	100
6	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%				83	95	100
7	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%				80	90	100
8	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	%				80	85	100
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin				80,02	79,43	80,2

## 2.5 Gambaran Keuangan Daerah

### 2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Gambaran ringkas kondisi keuangan daerah merupakan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024. Analisis dilakukan terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk melihat sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini juga menjadi basis dalam melakukan proyeksi terhadap target pendapatan dan belanja daerah untuk periode 2026-2030. Kinerja APBD Kota Balikpapan pada periode 2020-2024 digambarkan melalui komponen penyusun APBD yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut adalah ringkasan realisasi dan pertumbuhan APBD Kota Balikpapan tahun 2020-2024.

**Tabel 2. 29 Realisasi dan Pertumbuhan APBD Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024 (Unaudited)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.515.508.487.764,1</b>	<b>1,86%</b>	<b>2.278.259.847.189,6</b>	-9,43%	<b>2.869.130.120.905,73</b>	25,94%	<b>3.632.425.125.737,23</b>	26,60%	<b>4.020.535.025.062,62</b>	<b>10,68%</b>
4,1	Pendapatan Asli Daerah	606.079.950.753,42	-20,68%	755.062.500.914,79	24,58%	811.255.755.825,56	7,44%	966.208.071.540,23	19,10%	1.066.692.925.336,93	10,40%
4,2	Pendapatan Transfer	1.830.196.140.055,0	7,50%	1.443.258.420.222,0	-21,14%	1.987.807.473.947,00	37,73%	2.661.560.594.348,0	33,89%	2.887.703.799.448,00	8,50%
4,3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79.232.396.955,72	2541,08%	79.938.926.052,90	0,89%	70.066.891.133,17	12,35%	4.656.459.849,00	-93,35%	66.138.300.277,69	1320,36%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.145.207.734.777,3</b>	<b>-10,81%</b>	<b>2.375.021.817.795,2</b>	10,71%	<b>2.745.398.221.161,00</b>	15,59%	<b>3.745.103.655.354,64</b>	36,41%	<b>3.942.164.953.093,84</b>	<b>5,26%</b>
5,1	Belanja Operasi	1.596.079.114.613,1	-6,97%	1.744.051.495.995,9	9,27%	1.915.925.588.616,51	9,85%	2.331.395.721.553,33	21,69%	2.487.779.432.633,22	6,71%
5,2	Belanja Modal	428.692.685.694,51	-37,67%	545.701.475.495,62	27,29%	795.946.626.435,12	45,86%	1.391.243.269.229,31	74,79%	1.442.250.144.883,62	3,67%
5,3	Belanja Tidak Terduga	120.435.934.469,68	6355,18%	85.268.846.303,70	-29,20%	33.526.006.109,37	60,68%	22.464.664.572,00	-32,99%	12.135.375.577,00	-45,98%
5,4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-	-
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>370.300.752.986,76</b>	<b>506,43%</b>	<b>-96.761.970.605,59</b>	-126,13%	<b>123.731.899.744,73</b>	227,87%	<b>-114.178.529.617,41</b>	-192,28%	<b>78.370.071.968,78</b>	<b>-168,64%</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>309.171.718.088,05</b>	<b>17,66%</b>	<b>653.536.537.888,77</b>	111,38%	<b>533.862.041.283,18</b>	18,31%	<b>650.800.998.070,97</b>	21,90%	<b>536.945.706.240,46</b>	<b>-17,49%</b>
6,1	Penerimaan Pembiayaan	323.831.718.088,05	11,04%	679.472.471.074,81	109,82%	556.781.496.283,18	18,06%	657.612.998.070,97	18,11%	536.945.706.240,46	-18,35%
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	14.660.000.000,00	-49,21%	25.935.933.186,04	76,92%	22.919.455.000,00	11,63%	6.812.000.000,00	-70,28%	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>204.172.453.684,47</b>	<b>0,60</b>	<b>147.493.793.369,68</b>	0,33	<b>136.780.420.359,09</b>	-0,06	<b>163.448.168.531,26</b>	0,88	<b>536.945.706.240,46</b>	<b>-17,49%</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	149.088.793.369,68	<b>109,83%</b>	136.160.052.859,29	-18,06%	163.448.168.531,26	18,11%	159.157.552.184,37	-18,40%	615.315.778.209,24	14,66%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024, Olah Data 2025

Kinerja APBD Kota Balikpapan pada tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan setiap tahun yang dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan dan belanja yang positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 11,13 persen sedangkan belanja sebesar 11,43 persen yang menunjukkan pertumbuhan belanja lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan belanja yang lebih besar menimbulkan risiko terjadinya defisit anggaran dan berdampak pada cadangan kas daerah. Oleh karena itu, efisiensi pengeluaran, optimalisasi dan perluasan sumber pendapatan perlu dilakukan ke depannya untuk menjamin pengelolaan keuangan yang berkelanjutan. Kinerja pelaksanaan APBD menurut masing-masing komponen dijabarkan pada sub bab berikut ini.

### 2.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (PP No.12 Tahun 2019). Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan kepada publik didukung oleh pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pemasukan di dalam APBD. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.



**Gambar 2. 58 Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Penetapan target pendapatan daerah ditetapkan secara optimis jika melihat rata-rata pertumbuhannya. Pertumbuhan realisasi pendapatan

tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 26,60 persen mendorong realisasi pendapatan daerah mencapai 3,63 triliun rupiah. Jika dilihat dari tingkat capaiannya, realisasi pendapatan tahun 2020 merupakan capaian tertinggi. Tingginya tingkat capaian tersebut didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang mencapai 119,30 persen. Selain didorong oleh pendapatan transfer, PAD juga mampu melebihi target pendapatan yaitu sebesar 129,17 persen yang berasal dari pendapatan pajak daerah dengan capaian realisasi sebesar 128,24 persen, retribusi daerah tercapai 114,28 persen, dan lain-lain PAD yang sah tercapai 146,75 persen.



**Gambar 2. 59 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Kontributor terbesar realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan berasal dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi mencapai 70,10 persen per tahun pada periode 2020-2024. Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing sebesar 27,73 persen dan 2,17 persen. Kondisi ini mengindikasikan sumber pendapatan terbesar berasal dari penerimaan transfer, khususnya dari pemerintah pusat, sedangkan kinerja PAD masih belum optimal. Berikut penjelasan dari setiap komponen pendapatan daerah.

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD

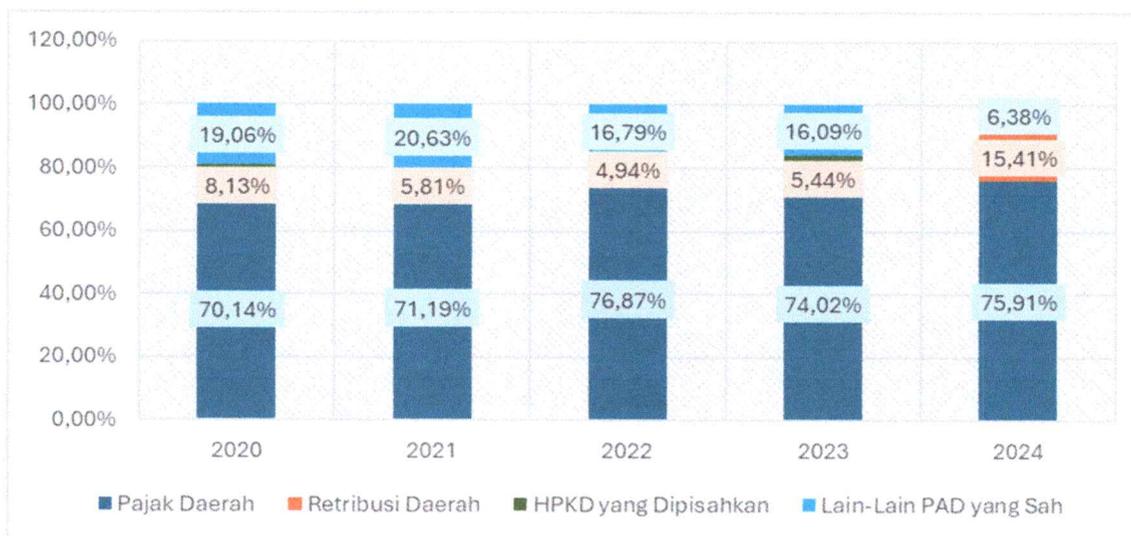
yang Sah. Berikut adalah capaian kinerja PAD Kota Balikpapan pada tahun 2020-2024.

**Tabel 2. 30 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan, Tahun 2020-2024 (Rp. Miliar)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	471,52	606,08	(31,51)	(20,68)	128,54
2021	675,71	755,06	43,31	24,58	111,74
2022	785,52	811,26	16,25	7,44	103,28
2023	985,51	966,21	25,46	19,10	98,04
2024	1.196,86	1.066,69	21,45	10,40	89,12
<b>Rata-rata</b>	<b>721,34</b>	<b>780,54</b>	<b>14,99</b>	<b>8,17</b>	<b>106,14</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi PAD Kota Balikpapan tumbuh sebesar 8,17 persen per tahun dengan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 106,14 persen pada periode 2020-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 24,58 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,74 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 26,43 persen. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan seluruh sumber PAD akibat Pandemi Covid-19, meskipun secara tingkat capaian mampu melebihi target.



**Gambar 2. 60 PAD Kota Balikpapan Menurut Komponen Pendapatan Tahun 2020-2024**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

PAD Kota Balikpapan didominasi oleh komponen pajak daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,62 persen per tahun pada periode

2020-2024. Selanjutnya, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata sebesar 15,79 persen, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 7,95 persen per tahun dan 2,64 persen per tahun. Kontribusi pajak yang tinggi mencerminkan potensi ekonomi yang cukup besar di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 31 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pajak Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	331,50	425,13	(33,96)	(24,79)	128,24
2021	515,00	537,49	55,35	26,43	104,37
2022	576,08	623,58	11,86	16,02	108,25
2023	771,89	715,20	33,99	14,69	92,66
2024	958,00	809,68	24,11	13,21	84,52
		<b>Rata-rata</b>	<b>18,27</b>	<b>9,11</b>	<b>103,61</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, realisasi pajak daerah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan sebesar 9,11 persen per tahun dengan rata-rata capaian sebesar 103,61 persen. Pertumbuhan realisasi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 24,53 persen yang didorong oleh pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tumbuh positif masing-masing sebesar 1,74 persen, 18,14 persen, dan 91,65 persen. Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan komponen pajak tertinggi yaitu pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tumbuh sebesar 386,66 persen dari yang sebelumnya sebesar 954 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,65 miliar rupiah pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai 133,39 persen per tahun pada periode 2020-2024.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 73,62 persen per tahun terhadap total PAD. Pajak daerah terdiri dari penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

**Tabel 2. 32 Realisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Rincian	Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)					Rata-rata (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan	Proporsi
1. Pajak Hotel	23,29	36,49	52,60	65,87	77,74	18,86	7,90
2. Pajak Restoran	70,97	76,74	112,71	147,27	165,55	13,30	18,02
3. Pajak Hiburan	8,37	6,11	18,14	26,73	26,39	29,68	2,60
4. Pajak Reklame	8,51	9,45	9,76	10,68	11,31	3,43	1,64
5. Pajak Penerangan Jalan	121,05	123,15	128,47	138,82	154,49	4,84	22,10
6. Pajak Parkir	12,69	12,55	18,18	24,05	10,49	(3,13)	2,58
7. Pajak Air Tanah	2,01	1,94	2,36	2,51	7,49	39,64	0,50
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,95	4,65	1,09	1,05	1,75	58,95	0,33
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	99,77	117,87	127,39	131,34	154,59	9,15	20,66
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	77,50	148,53	152,85	166,85	199,87	16,71	23,68
<b>Jumlah</b>	<b>425,11</b>	<b>537,46</b>	<b>623,54</b>	<b>715,17</b>	<b>809,68</b>	<b>9,11</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan sumber pendapatan pajak terbesar dengan kontribusi mencapai 23,68 persen per tahun. Pajak Penerangan Jalan menjadi kontributor terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 22,10 persen per tahun sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) menjadi kontributor terbesar ketiga dengan kontribusi sebesar 20,66 persen per tahun.

Sumber PAD lainnya yang cukup strategis adalah retribusi daerah. Retribusi daerah berkontribusi sebesar 7,59 persen per tahun. Meskipun kontribusinya terhadap PAD lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah, pengelolaan retribusi yang optimal dapat mendorong peningkatan PAD yang lebih tinggi. Retribusi sendiri mencakup penerimaan dari pelayanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah yang artinya jika pelayanan publik atau fasilitas meningkat maka PAD daerah dapat ditingkatkan.

**Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Retribusi Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	43,11	49,29	(37,54)	(11,48)	114,31
2021	48,44	43,88	12,36	(10,97)	90,58
2022	74,12	40,11	53,01	(8,59)	54,11

2023	61,57	52,55	(16,94)	31,02	85,36
2024	173,67	164,39	182,08	212,81	94,65
Rata-Rata			38,60	42,56	87,80

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2025, retribusi daerah Kota Balikpapan tumbuh 42,56 persen per tahun. Realisasi pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 mencapai 212,81 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi hingga 11,48 persen. Target retribusi daerah cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Realisasi retribusi tumbuh 3,96 persen per tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan dalam realisasi penganggaran daerah sudah optimal.

Sumber PAD lainnya yang tidak kalah berkontribusi terhadap PAD daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kontribusi sebesar 4,44 persen per tahun. Pendapatan tersebut bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal atau investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Balikpapan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan, dan Perumda Manuntung Sukses Kota Balikpapan. Berikut ini adalah rincian perkembangan target dan realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024.

**Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	16,17	16,17	14,66	(4,13)	100,04
2021	18,80	17,91	16,28	10,71	95,25
2022	10,77	11,32	(42,73)	(36,79)	105,11
2023	21,04	42,96	95,42	279,58	204,17
2024	24,97	24,52	18,67	(42,93)	98,19
Rata-rata			20,46	41,29	120,55

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kota Balikpapan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh 41,29 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 mencapai

279,58 persen. Jika dilihat dari rata-rata capaian kinerja, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 124,84 persen per tahun dengan capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2024. Penetapan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasinya yang mengindikasikan penetapan anggaran cenderung pesimis.

Sumber PAD lainnya yang berperan cukup besar terhadap PAD Kota Balikpapan adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kontribusi lain-lain PAD yang sah mencapai 15,79 persen per tahun. Pendapatan tersebut bersumber dari Hasil Penjualan dan pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda (Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah); Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan BLUD; Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya.

**Tabel 2. 35 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	80,74	115,49	(21,88)	(8,56)	143,04
2021	93,47	155,78	15,77	34,89	166,66
2022	124,55	136,24	33,25	(12,54)	109,39
2023	131,01	155,49	5,19	14,13	118,69
2024	40,21	68,10	(69,30)	(56,20)	169,35
		Rata-rata	(7,40)	(5,66)	141,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi selama periode 2020-2024, dengan penurunan sebesar 5,66 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target. Realisasi capaian kinerja mencapai 141,43 persen per tahun dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 166,66 persen sedangkan yang terendah sebesar 109,39 persen pada tahun 2022.

**b. Pendapatan Transfer**

Sumber pendapatan lain yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah Kota Balikpapan adalah pendapatan transfer. Pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

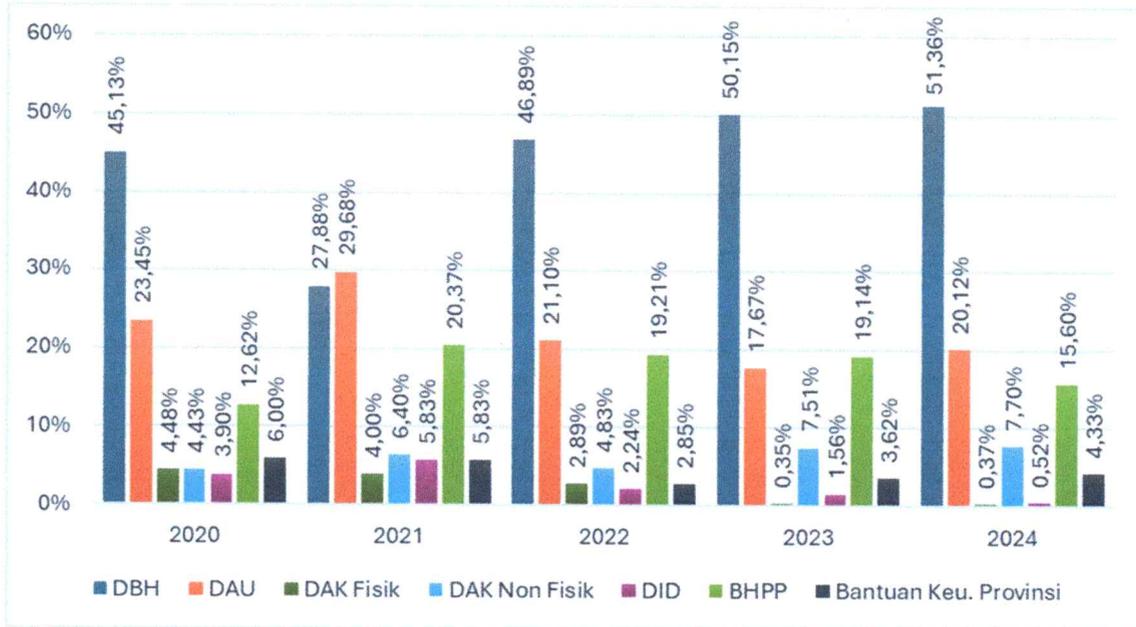
**Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.534,13	1.830,20	(16,42)	7,50	119,30
2021	1.466,66	1.443,26	(4,40)	(21,14)	98,40
2022	1.939,61	1.987,81	32,25	37,73	102,48
2023	2.740,21	2.661,56	41,28	33,89	97,13
2024	2.751,41	2.887,70	0,41	8,50	104,95
		<b>Rata-rata</b>	<b>10,62</b>	<b>13,30</b>	<b>104,45</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pendapatan transfer Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan sebesar 13,30 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 37,73 persen dengan tingkat capaian sebesar 102,48 persen dari target. Pertumbuhan realisasi pendapatan transfer terendah terjadi pada tahun 2021 yang berkontraksi 21,14 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,40 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29.

Pendapatan transfer terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID) dan (b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Besarnya kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2. 61 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pendapatan Transfer di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen DBH dengan rata-rata 44,28 persen per tahun. Sumber pendapatan transfer terbesar kedua adalah DAU dengan rata-rata sebesar 22,40 persen per tahun dan yang ketiga adalah BHPP sebesar 17,39 persen per tahun. Perencanaan keuangan Kota Balikpapan harus mempertimbangkan prediksi dan ketepatan penerimaan DBH karena DBH merupakan sumber pendapatan yang mendominasi. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dana digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik.

**Tabel 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pendapatan Transfer: Dana Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	545,51	825,89	(10,83)	57,35	151,40
2021	370,63	402,43	(32,06)	(51,27)	108,58
2022	851,86	932,15	129,84	131,63	109,43
2023	1.370,84	1.334,89	60,92	43,21	97,38
2024	1.245,38	1.483,10	(9,15)	11,10	119,09
	<b>Rata-rata</b>		<b>27,75</b>	<b>38,40</b>	<b>117,17</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi pendapatan transfer dana bagi hasil (pajak dan bukan pajak) cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,40 persen per tahun pada periode 2020-2024. Pertumbuhan realisasi

tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 131,63 persen dengan capaian kinerja mencapai 109,43 persen. Pertumbuhan dan capaian kinerja yang tinggi didorong oleh pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29. Pertumbuhan realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yang berkontraksi sebesar 51,27 persen meskipun capaiannya mampu melebihi target. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 hingga 98,34 persen dibandingkan tahun 2020.

**Tabel 2. 38 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Umum Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	437,73	429,20	(1,82)	(2,41)	98,05
2021	428,31	428,31	(2,15)	(0,21)	100,00
2022	428,31	419,35	0,00	(2,09)	97,91
2023	471,14	470,20	10,00	12,13	99,80
2024	592,55	581,09	25,77	23,58	98,07
		<b>Rata-rata</b>	<b>6,36</b>	<b>6,20</b>	<b>98,77</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Komponen dana perimbangan lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi Pendapatan Transfer DAU Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 6,20 persen pada tahun 2020-2024. Pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 23,58 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,07 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi 2,41 persen dengan tingkat capaian sebesar 98,05 persen. Kinerja DAU Kota Balikpapan secara umum menunjukkan kinerja yang baik dengan tingkat capaian berkisar pada 98,88 persen per tahun. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kebijakan ini memastikan alokasi dan penyaluran DAU tepat waktu sehingga membantu menjaga konsistensi antara proyeksi dan realisasi.

**Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Alokasi Khusus Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	149,27	163,06	36,25	68,14	109,24
2021	186,07	150,15	24,65	(7,92)	80,69
2022	182,18	153,45	(2,09)	2,20	84,23
2023	223,46	209,15	22,66	36,30	93,60
2024	12,16	10,74	(94,56)	(94,86)	88,30
Rata-rata			(2,62)	0,77	91,21

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Komponen penting lainnya dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah, sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah. Pada periode 2020-2024, realisasi DAK yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan sebesar 0,77 persen per tahun dengan tingkat capaian sebesar 91,21 persen per tahun. Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 109,24 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2024 dengan tingkat capaian yang terkontraksi sebesar 94,86 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya yang terutama dipengaruhi oleh turunnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Komponen pendapatan transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan adalah Dana Insentif Daerah (DID). DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2. 40 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dana Insentif Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Dana Insentif Daerah (DID) (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	60,63	71,30	(68,08)	(61,55)	117,60
2021	84,21	84,21	38,89	18,10	100,00
2022	44,43	44,43	(47,24)	(47,24)	100,00
2023	44,63	41,60	0,45	(6,36)	93,22
2024	22,82	14,95	(48,87)	(64,05)	65,54
	<b>Rata-rata</b>		<b>(24,97)</b>	<b>(32,22)</b>	<b>95,27</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada periode 2020-2024, pendapatan DID yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan berfluktuasi dengan tren yang semakin menurun. Pendapatan DID terus mengalami penurunan sebesar 32,22 persen per tahun dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 mencapai 64,05 persen. Apabila dilihat dari capaian kinerjanya, realisasi pendapatan DID mampu mendekati target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,27 persen per tahun. Kondisi ini terjadi dikarenakan bila terdapat sisa dana, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan rencana penggunaan dan realisasi dari sisa dana DID tersebut untuk pendidikan (termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan), kesehatan (termasuk penanganan pandemi COVID-19 dan digitalisasi pelayanan kesehatan), pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial.

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Tabel 2. 41 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

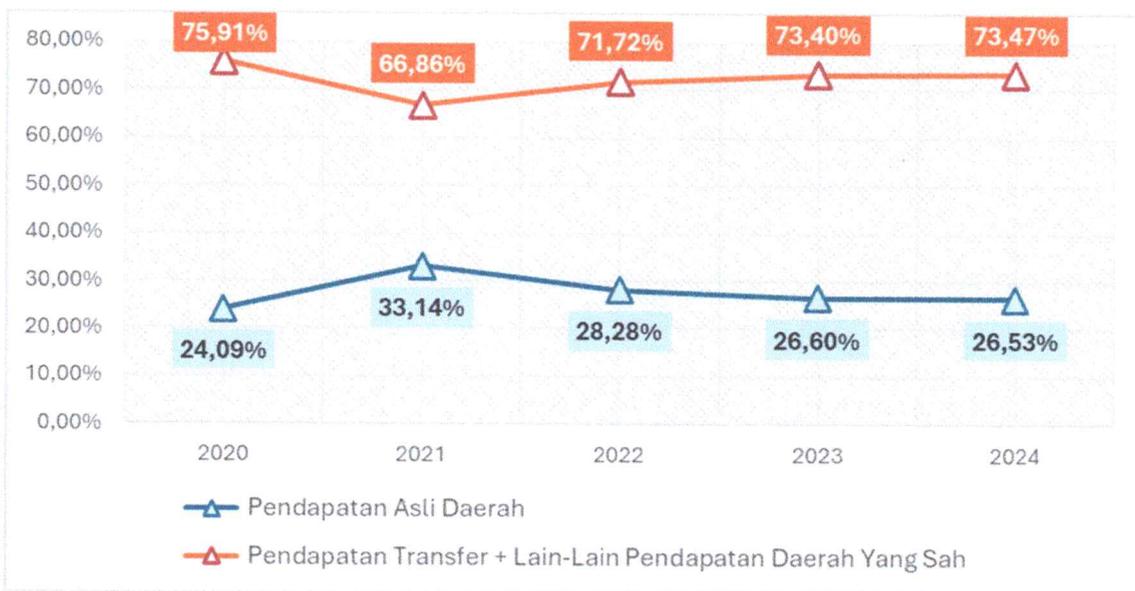
Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	78,97	79,23	2532,38	2541,08	100,33
2021	79,78	79,94	1,02	0,89	100,20
2022	102,27	70,07	28,20	(12,35)	68,51
2023	6,58	4,66	(93,56)	(93,35)	70,73
2024	61,09	66,14	827,98	1320,36	108,26
	<b>Rata-rata</b>		<b>659,20</b>	<b>751,32</b>	<b>89,61</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi pada tahun 2020-2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 751,32 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pada lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2024.

### **Kemandirian Fiskal dan Ketergantungan Fiskal**

Kinerja keuangan pada periode 2020-2024 juga dapat dilihat dari derajat kemandirian fiskal (DKF) dan rasio ketergantungan fiskal (RKF). Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total pendapatan. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Berbanding terbalik dengan derajat kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal ditunjukkan oleh proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan. Semakin besar proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.



**Gambar 2. 62 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Tahun 2020-2024**

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan cenderung berfluktuasi pada periode 2020-2024. Derajat kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 33,14 persen sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 24,09 persen. Derajat kemandirian fiskal Kota Balikpapan termasuk dalam kategori “Sedang”

( $20 < DDF \leq 30$ ) dengan rata-rata sebesar 27 persen pada periode 2020-2024.

Rasio ketergantungan fiskal Kota Balikpapan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” ( $RK > 50$ ) dengan rata-rata mencapai 72 persen per tahun pada periode 2020-2024. Kondisi tersebut mengindikasikan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah didominasi oleh pendanaan dari pihak eksternal, khususnya pemerintah pusat.

#### 2.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Dalam menentukan alokasi anggaran belanja, pemerintah daerah harus melihat sejauh mana kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan daerah agar anggaran yang dibelanjakan efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

**Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	2.392,42	2.145,21	(14,14)	(10,81)	89,67
2021	2.826,44	2.375,02	18,14	10,71	84,03
2022	3.273,13	2.745,40	15,80	15,59	83,88
2023	4.278,68	3.745,10	30,72	36,41	87,53
2024	4.545,98	3.942,16	6,25	5,26	86,72
		<b>Rata-rata</b>	<b>11,36</b>	<b>11,43</b>	<b>86,36</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,43 persen per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -10,81 persen. Rendahnya capaian realisasi dikarenakan terjadi penurunan pos Belanja Modal sebesar 37,67 persen atau turun dari Rp687,77 miliar menjadi Rp428,69 miliar. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 36,41 persen. Tingginya capaian realisasi didorong oleh kenaikan pos Belanja Modal sebesar 74,79 persen meningkat dari Rp795,94 miliar menjadi Rp1,39 triliun.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja untuk belanja daerah Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,36 persen pada periode 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020

dengan tingkat capaian sebesar 89,67 persen dari target belanja daerah Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer (UU HKPD). Selama kurun waktu 2020-2024, hanya ada tiga pos belanja pada Pemerintah Kota Balikpapan yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Ketiga kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama periode 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

**a. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja operasi Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

**Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja Operasi (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	1.808,67	1.596,08	(6,93)	(6,97)	88,25
2021	2.063,98	1.744,05	14,12	9,27	84,50
2022	2.248,01	1.915,93	8,92	9,85	85,23
2023	2.652,87	2.331,40	18,01	21,69	87,88
2024	2.882,99	2.487,78	8,67	6,71	86,29
	Rata-rata		8,56	8,11	86,43

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi belanja operasi mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,11 persen per tahun pada periode 2020-2024. Realisasi belanja mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan pos belanja barang dan jasa sebesar minus 17,76 persen atau turun dari Rp849,56 miliar menjadi Rp697,38 miliar. Pertumbuhan realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 21,69 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan seluruh pos belanja seperti belanja pegawai yang tumbuh sebesar 11,43 persen, pos belanja barang dan jasa yang tumbuh 17,61 persen, dan pos belanja hibah yang tumbuh 131,59 persen.

Belanja Operasi Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,43 persen selama periode 2020-2024. Untuk realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 88,25 persen dari target belanja operasi Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Porsi belanja pegawai perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Menurut Pasal 146 ayat (1) UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30 persen dari total belanja. Belanja pegawai daerah yang dimaksud pada pasal tersebut tidak termasuk belanja khusus untuk tambahan penghasilan guru dan tunjangan guru yang berasal dari TKD.

**b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja modal Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

**Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	438,75	428,69	(47,25)	(37,67)	97,71
2021	648,45	545,70	47,80	27,29	84,16
2022	975,01	795,95	50,36	45,86	81,63
2023	1.587,12	1.391,24	62,78	74,79	87,66
2024	1.649,75	1.442,25	3,95	3,67	87,42
	<b>Rata-rata</b>		<b>23,53</b>	<b>22,79</b>	<b>87,72</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,79 persen per tahun. Pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,67 persen. Rendahnya pertumbuhan realisasi belanja modal pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan seluruh pos belanja modal seperti belanja modal tanah yang turun sebesar 99,62 persen atau turun dari Rp13,02 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp48 juta pada tahun 2020, belanja modal gedung dan bangunan yang turun 45,24 persen,

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang turun 37,22 persen. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 74,79 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang tumbuh 77,40 persen, belanja modal peralatan dan mesin yang tumbuh 77,43 persen sebagai pos belanja modal dengan alokasi terbesar. Capaian kinerja belanja modal Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata sebesar 87,72 persen per tahun pada periode 2020-2024.

**c. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja modal Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

**Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja Modal (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	438,75	428,69	(47,25)	(37,67)	97,71
2021	648,45	545,70	47,80	27,29	84,16
2022	975,01	795,95	50,36	45,86	81,63
2023	1.587,12	1.391,24	62,78	74,79	87,66
2024	1.649,75	1.442,25	3,95	3,67	87,42
	<b>Rata-rata</b>		<b>23,53</b>	<b>22,79</b>	<b>87,72</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi Belanja Modal mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,79 persen per tahun. Pertumbuhan belanja terendah terjadi pada tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 37,67 persen. Rendahnya pertumbuhan realisasi belanja modal pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan seluruh pos belanja modal seperti belanja modal tanah yang turun sebesar 99,62 persen atau turun dari Rp13,02 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp48 juta pada tahun 2020, belanja modal gedung dan bangunan yang turun 45,24 persen, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang turun 37,22 persen. Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 74,79 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang tumbuh 77,40 persen, belanja modal peralatan dan mesin yang tumbuh 77,43 persen sebagai pos

belanja modal dengan alokasi terbesar. Capaian kinerja belanja modal Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata sebesar 87,72 persen per tahun pada periode 2020-2024.

**d. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja tidak terduga Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

**Tabel 2. 46 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Belanja Tidak Terduga (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	145,00	120,44	1189,87	6355,18	83,06
2021	114,01	85,27	(21,37)	(29,20)	74,79
2022	50,11	33,53	(56,05)	(60,68)	66,90
2023	38,68	22,46	(22,81)	(32,99)	58,08
2024	13,24	12,14	(65,78)	(45,98)	91,67
		<b>Rata-rata</b>	<b>204,77</b>	<b>1237,26</b>	<b>74,90</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pada tahun 2020–2024, realisasi capaian kinerja untuk belanja tidak terduga Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 74,90 persen per tahun. Sementara itu, realisasi belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.237,26 persen per tahun. Pandemi Covid-19 menyebabkan tingginya belanja tidak terduga pada tahun 2020 di mana pertumbuhannya mencapai 6.355,18 persen dibandingkan tahun 2019.

**2.5.1.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Analisis pembiayaan ditujukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Sumber pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

**Tabel 2. 47 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	309,10	309,17	17,79	17,66	100,02
2021	604,29	653,54	95,50	111,38	108,15
2022	445,73	533,86	(26,24)	(18,31)	119,77
2023	547,87	650,80	22,91	21,90	118,79
2024	536,62	536,37	(2,05)	(17,58)	99,95
		<b>Rata-rata</b>	<b>21,58</b>	<b>23,01</b>	<b>109,34</b>

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2020-2024 (Diolah, 2025)

Realisasi pembiayaan tumbuh sebesar 23,01 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 111,38 persen, meskipun selanjutnya terkontraksi 18,31 persen pada tahun 2022. Apabila dilihat dari tingkat capaian kinerja, pembiayaan daerah secara umum mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian mencapai 109,34 persen pada periode 2020-2024. Berikut ini adalah rincian komponen pembiayaan daerah Kota Balikpapan.

**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pada periode 2020-2024, satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024.

**Tabel 2. 48 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	323,83	323,83	11,04	11,04	100,00
2021	635,73	679,47	96,31	109,82	106,88
2022	473,32	556,78	(25,55)	(18,06)	117,63
2023	558,52	657,61	18,00	18,11	117,74
2024	536,62	536,37	(3,92)	(18,44)	99,95
Rata-rata			19,18	20,50	108,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan memperlihatkan kinerja yang optimal pada periode 2020-2024. Tingkat capaian kinerja untuk penerimaan pembiayaan daerah mencapai 108,44 persen per tahun yang mengindikasikan terlampauinya target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 117,74 persen. Capaian tersebut didorong oleh tingginya pelampauan penerimaan pendapatan transfer dari yang mulanya ditargetkan sebesar 2,64 miliar rupiah terealisasi hingga 107,37 miliar rupiah (4.060%).

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

**Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rp. Miliar)		Pertumbuhan (Persen)		Capaian Kinerja (Persen)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2020	14,73	14,66	(49,59)	(49,21)	99,51
2021	31,44	25,94	113,41	76,92	82,49
2022	27,59	22,92	(12,24)	(11,63)	83,06
2023	10,65	6,81	(61,41)	(70,28)	63,97
2024	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)	0,00
Rata-rata			(21,97)	(30,84)	65,81

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan selama kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan sebesar 30,84 persen per tahun dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,81 persen per tahun. Pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan dialokasikan sepenuhnya untuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Balikpapan tidak menganggarkan adanya pengeluaran pembiayaan.

**c. Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan**

Selama periode lima tahun terakhir, tren realisasi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni dari Rp2,52 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,02 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer, maupun pendapatan lainnya yang sah.

Meskipun demikian, fluktuasi terjadi pada pos belanja daerah, yang pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,15 triliun dan meningkat drastis hingga Rp3,94 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik, namun tetap perlu dicermati efisiensi dan efektivitas realisasinya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah tergolong relatif kecil dan tidak konsisten setiap tahunnya, bahkan nihil pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa kebijakan penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan dilakukan secara selektif.

**Tabel 2. 50 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.515.508.487.764	2.278.259.847.190	2.869.130.120.906	3.632.425.125.737	4.020.535.025.063
	<b>Dikurangi realisasi:</b>					
2.	Belanja Daerah	2.145.207.734.777	2.375.021.817.795	2.745.398.221.161	3.746.603.655.355	3.942.164.953.094
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.660.000.000	25.935.933.186	22.919.455.000	6.812.000.000	-
<b>A</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>355.640.752.987</b>	<b>(122.697.903.792)</b>	<b>100.812.444.745</b>	<b>(120.990.529.617)</b>	<b>78.370.071.969</b>
	<b>Realisasi Penerimaan Pembiayaan:</b>					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	323.831.718.088	679.472.471.075	556.781.496.283	657.612.998.071	536.370.834.984
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>323.831.718.088</b>	<b>679.472.471.075</b>	<b>556.781.496.283</b>	<b>657.612.998.071</b>	<b>536.370.834.984</b>
<b>A+B</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>679.472.471.075</b>	<b>556.774.567.283</b>	<b>657.593.941.028</b>	<b>536.622.468.454</b>	<b>614.740.906.953</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2020-2024, Olah Data 2025

Defisit riil anggaran menunjukkan dinamika fiskal yang cukup kompleks. Pada tahun 2020 dan 2022, tercatat defisit riil masing-masing sebesar Rp355,64 miliar dan Rp100,81 miliar. Namun, pada tahun 2021 dan 2023, justru terjadi surplus riil, ditandai dengan nilai defisit yang bernilai negatif, yaitu sebesar Rp122,70 miliar dan Rp120,99 miliar. Adapun pada tahun 2024, kembali terjadi defisit riil sebesar Rp78,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kota Balikpapan mengalami fluktuasi, baik karena faktor pendapatan maupun belanja yang belum sepenuhnya seimbang dari tahun ke tahun.

Dalam mengantisipasi defisit tersebut, penerimaan pembiayaan daerah yang mayoritas berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya menjadi andalan utama. Selama lima tahun terakhir, nilai SiLPA selalu tersedia dan cukup besar, misalnya Rp679,47 miliar pada tahun 2021 dan masih cukup kuat pada tahun 2024 sebesar Rp536,37 miliar. Ketergantungan pada SiLPA ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat defisit riil dalam beberapa tahun, posisi keuangan daerah tetap dapat dijaga stabil dengan penggunaan surplus anggaran dari tahun sebelumnya.

Akhirnya, jika dilihat dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (A + B), dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan secara konsisten berhasil menutup defisit riil melalui mekanisme pembiayaan yang memadai, sehingga tetap menghasilkan SiLPA positif setiap tahun. Ini mencerminkan manajemen fiskal daerah yang relatif hati-hati dan terkontrol, meskipun perlu diantisipasi terhadap kemungkinan tekanan fiskal yang lebih besar di masa mendatang jika pendapatan tidak tumbuh seiring dengan peningkatan kebutuhan belanja publik.

#### **2.5.1.4 Neraca Daerah**

Neraca Daerah menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang timbul melalui keadaan masa lampau yang penyelesaiannya melibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Eukitas dapat dijelaskan yakni adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai sangat berperan penting untuk pemerintahan Kota Balikpapan dalam mengukur kemampuan keuangan pemerintah. Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap tahunnya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan baik pada posisi aset, kewajiban maupun pada ekuitas. Sehingga untuk mengetahui sebuah posisi keuangan daerah Kota Balikpapan, berikut perkembangan data Neraca Daerah Kota Balikpapan Periode (2020-2024).

**Tabel 2. 51 Realisasi Neraca Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>12.101.350.613.568</b>	<b>12.416.371.980.064</b>	<b>13.169.795.358.965</b>	<b>14.326.031.895.463</b>	<b>14.867.479.671.916</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>938.341.948.123</b>	<b>921.392.287.210</b>	<b>998.247.611.772</b>	<b>929.055.411.075</b>	<b>926.926.553.697</b>
	Kas	679.559.534.548	556.963.262.323	657.615.144.010	536.622.468.454	614.758.421.204
	Piutang	173.826.475.093	213.110.668.141	233.906.825.176	280.235.427.441	209.305.655.191
	Persediaan	83.245.738.229	151.093.398.389	93.292.599.621	111.666.422.042	100.817.148.592
	Beban Dibayar Dimuka	1.710.200.253	224.958.356	13.433.042.965	531.093.138	2.045.328.710
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>584.736.515.351</b>	<b>645.628.094.622</b>	<b>675.169.926.970</b>	<b>682.060.068.371</b>	<b>668.668.779.393</b>
	Non Permanen	3.056.509.257	3.081.189.366	3.105.797.941	3.122.048.623	3.149.387.440
	Permanen	581.680.006.095	642.546.905.256	672.064.129.029	678.938.019.748	665.519.391.953
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>10.313.106.847.791</b>	<b>10.596.187.367.814</b>	<b>10.757.222.254.746</b>	<b>10.277.030.720.633</b>	<b>11.190.632.943.973</b>
	Tanah	5.368.852.714.404	5.433.536.745.894	5.319.352.832.370	5.220.946.074.937	5.382.278.050.304
	Peralatan dan Mesin	909.928.319.765	1.030.795.987.259	1.206.855.944.949	1.564.882.370.460	1.845.484.517.682
	Gedung dan Bangunan	3.880.708.672.740	3.850.428.544.907	3.987.529.772.274	2.729.111.734.469	2.959.176.638.065
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.186.760.130.539	3.674.736.753.098	4.064.222.801.668	4.635.262.099.655	5.508.759.727.539
	Aset tetap Lainnya	70.399.499.846	71.018.937.116	70.972.197.416	72.197.979.447	73.211.407.629
	Konstruksi dalam pengerjaan	133.261.868.724	147.460.559.821	156.961.061.824	363.775.928.648	340.858.259.793
	Akumulasi Penyusutan	(3.236.804.358.228)	(3.611.790.160.282)	(4.048.672.355.755)	(4.309.145.466.984)	(4.919.135.657.039)
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>265.165.302.303</b>	<b>253.164.230.418</b>	<b>739.155.565.478</b>	<b>1.022.670.210.322,86</b>	<b>699.313.173.042,65</b>
	Tagihan Penjualan Angsuran	10.428.294.192	9.119.567.047	7.938.403.826	7.469.060.048	6.789.529.776
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	239.829.544	377.396.828	3.566.513.788	2.128.182.674	8.716.701.403
	Kemitraan dengan pihak ketiga	145.500.096.000	145.500.096.000	145.500.096.000	145.500.096.000	145.500.096.000
	Aset tak berwujud	34.194.128.183	19.700.198.134	28.028.545.330	34.002.502.778	38.138.851.676
	Aset Lain-lain	74.802.954.385	78.466.972.410	554.122.006.534	833.570.368.822	500.167.994.188

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.5</b>	<b>PROPERTI INVESTASI</b>				<b>1.415.215.485.061</b>	<b>1.381.938.221.811</b>
	Tanah				163.145.540.921,80	163.145.540.921,80
	Gedung dan Bangunan				1.510.898.700.384,38	1.511.557.093.951,80
	Jalan Jaringan Irigasi				34.042.276.624,30	34.042.276.624,30
	Akumulasi Penyusutan				(292.871.032.869,00)	(326.806.689.687,00)
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>42.076.815.265</b>	<b>80.436.155.941</b>	<b>46.103.461.977</b>	<b>52.964.172.650</b>	<b>52.045.706.027</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>42.076.815.265</b>	<b>80.436.155.941</b>	<b>46.103.461.977</b>	<b>52.964.172.650</b>	<b>52.045.706.027</b>
	Utang perhitungan pihak ketiga	88.776.565	177.120.241	21.202.982		
	Pendapatan diterima dimuka	2.284.620.929	2.825.330.249	2.492.419.207	2.625.186.422	894.513.401
	Utang belanja	31.080.244.103	74.980.113.783	41.094.389.620	47.760.797.561	48.439.642.008
	Utang jangka pendek lainnya	8.623.173.668	2.453.591.668	2.495.450.168	2.578.188.668	2.711.550.618
<b>2.2</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Utang kepada Lembaga					
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>12.059.273.798.304</b>	<b>12.335.935.824.124</b>	<b>13.123.691.896.986</b>	<b>14.273.067.722.813</b>	<b>14.815.433.965.889</b>
	Ekuitas	12.059.273.798.304	12.335.935.824.124	13.123.691.896.986	14.273.067.722.813	14.815.433.965.889
<b>4</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>12.101.350.613.568</b>	<b>12.416.371.980.064</b>	<b>13.169.795.358.964</b>	<b>14.326.031.895.463</b>	<b>14.867.479.671.916</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kota Balikpapan 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan arah pertumbuhan yang cukup positif dan stabil. Nilai total aset meningkat dari Rp12,1 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp14,87 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya akumulasi investasi dan pengelolaan kekayaan daerah yang cermat, meskipun dinamika komponen penyusunnya memperlihatkan variasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Komponen aset lancar seperti kas dan piutang mengalami fluktuasi, yang dapat mencerminkan dinamika likuiditas jangka pendek dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola arus kas operasional. Meskipun nilai kas sempat menurun pada tahun 2023, perbaikannya pada tahun 2024 menjadi indikasi adanya upaya penataan pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati dan terarah.

Salah satu catatan penting adalah tren kenaikan nilai aset tetap, terutama pada subkomponen jalan, irigasi, dan jaringan, yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dasar bagi masyarakat. Nilai subkomponen ini melonjak dari Rp3,18 triliun pada 2020 menjadi Rp5,5 triliun pada 2024. Di sisi lain, akumulasi penyusutan juga meningkat cukup signifikan, mengindikasikan bahwa sebagian besar aset tetap telah memasuki usia pemakaian yang panjang dan memerlukan perhatian khusus terkait perawatan dan peremajaan.

Kemunculan properti investasi dalam dua tahun terakhir (2023–2024). Properti investasi merupakan aset berupa properti yang dimiliki pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau meningkatkan nilai ekonomis aset tersebut. Keberadaan properti investasi juga menjadi penanda adanya diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sekaligus sebagai strategi penguatan aset produktif daerah dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan keuangan yang mulai mempertimbangkan pendekatan kewirausahaan sektor publik (*entrepreneurial government*).

Sementara itu, kewajiban daerah masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, dengan nilai berkisar Rp42–52 miliar dalam lima tahun terakhir. Rasio ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kota Balikpapan cukup sehat dan tidak terbebani oleh utang, yang memberikan ruang fiskal lebih luas untuk mendorong belanja publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, ekuitas daerah yang meningkat dari Rp12,05 triliun pada 2020 menjadi Rp14,82 triliun pada 2024 menegaskan komitmen pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kesinambungan pengelolaan kekayaan daerah. Di balik angka-angka tersebut, terdapat narasi kemajuan, tanggung jawab, dan kerja kolektif yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak semata dinilai dari penambahan nominal aset, tetapi juga dari kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

Analisis neraca juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola utang, serta efektivitas dalam pengelolaan aset dan kewajiban lainnya. Analisis ini menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

#### a. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan mudah aset pemerintah daerah dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek. Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).



**Gambar 2. 63 Rasio Likuiditas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Melihat pada hasil perhitungan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka

pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya berjalan dengan lancar.

### **1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki cukup aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rata-rata rasio lancar selama periode ini adalah 18,15. Angka ini secara umum mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian, fluktuasi tahunan yang cukup signifikan, terutama penurunan tajam pada tahun 2021 (sebesar 11,45) setelah berada di angka 22,30 pada tahun 2020, mengindikasikan adanya tekanan pengelolaan kas yang perlu menjadi perhatian.

### **2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

Rasio cepat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan. Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversi menjadi kas, sehingga rasio ini lebih mencerminkan kondisi likuiditas yang sebenarnya. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rata-rata rasio cepat selama lima tahun adalah 16,17, dengan titik terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 9,58. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, konsistensi penguatan rasio cepat tetap perlu dijaga agar ketersediaan aset likuid nonpersediaan mampu menjamin pembayaran kewajiban jangka pendek secara efisien. Nilai 16,17 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki aset likuid yang cukup tanpa harus mengandalkan persediaan.

### 3) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

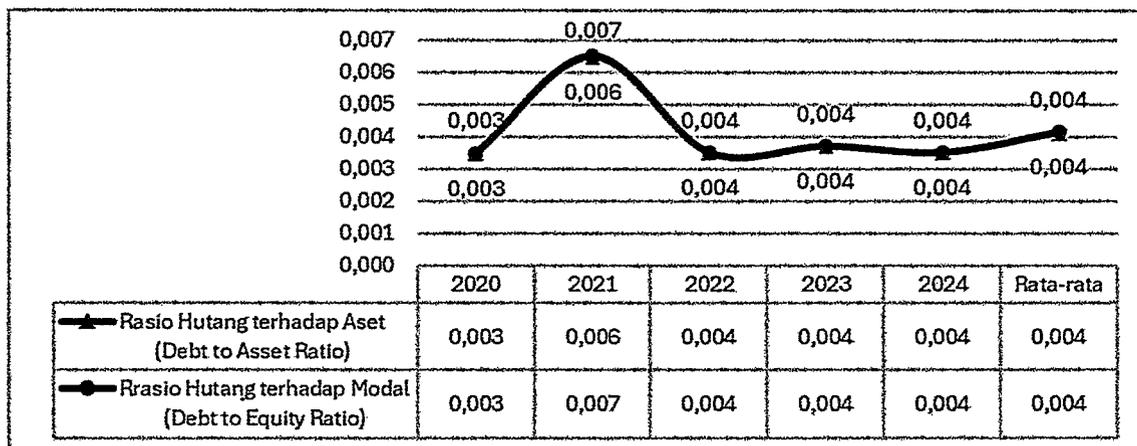
Rasio kas mengukur sejauh mana kas dan setara kas dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini memberikan gambaran paling konservatif mengenai likuiditas pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara langsung.

Rata-rata rasio kas selama lima tahun adalah 11,86. Meskipun masih dalam kategori aman, nilai rasio kas ini juga menunjukkan tren penurunan yang relatif dalam dari tahun 2020 (16,15) ke 2021 (6,92), sebelum akhirnya berangsur membaik hingga 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi likuiditas Kota Balikpapan masih dalam taraf yang relatif sehat, terdapat indikasi ketergantungan pada fluktuasi penerimaan kas yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas fiskal jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengelolaan kas yang terencana dan antisipatif, agar keberlanjutan pelayanan publik tidak terganggu akibat potensi keketatan likuiditas di masa depan.

#### b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset daerah dibiayai oleh utang dan seberapa mampu daerah melunasi kewajiban jangka panjangnya. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*) dan Rasio hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*).



**Gambar 2. 64 Rasio Solvabilitas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Rasio solvabilitas Kota Balikpapan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan posisi keuangan yang relatif sehat dan terjaga dari sisi kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

**1) Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)**

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pembiayaan eksternal. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar risiko solvabilitas daerah karena ketergantungan yang tinggi terhadap utang.

Rata-rata rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*) selama lima tahun tercatat sebesar 0,004, yang berarti hanya sekitar 0,4 persen dari total aset yang berasal dari kewajiban atau utang. Nilai ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sangat tidak tergantung pada pembiayaan berbasis utang dalam mengelola aset daerahnya.

**2) Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)**

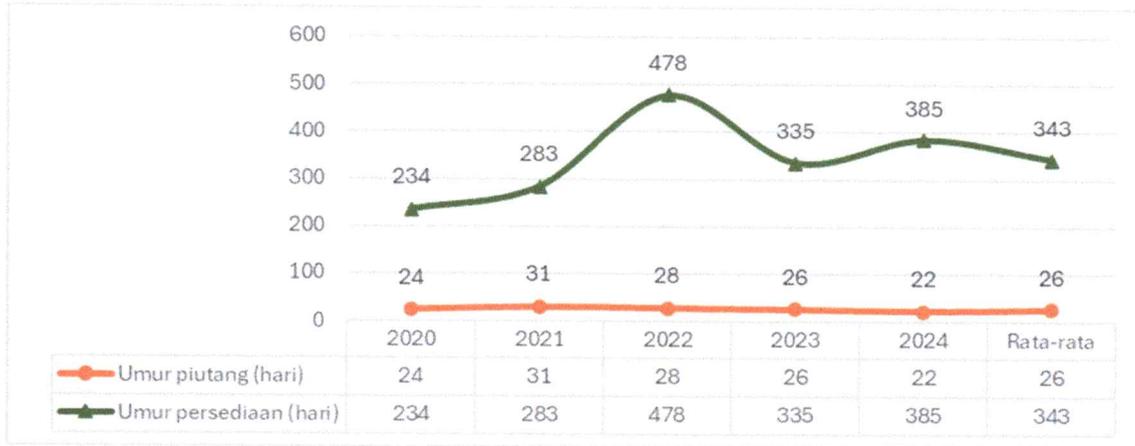
Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara sumber pendanaan dari utang dan sumber internal. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio hutang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tercatat dengan rata-rata yang sama, yaitu 0,004. Angka ini merefleksikan bahwa hampir seluruh modal atau ekuitas yang dimiliki berasal dari sumber internal pemerintah daerah, bukan dari kewajiban kepada pihak ketiga. Kondisi ini merupakan indikator positif terhadap ketahanan fiskal jangka panjang, karena Kota Balikpapan dinilai memiliki fleksibilitas fiskal yang tinggi dan risiko gagal bayar yang sangat rendah.

Meskipun rasio solvabilitas yang sangat rendah ini mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, hal ini juga dapat menjadi sinyal perlunya eksplorasi alternatif pembiayaan jangka panjang yang tetap terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang membutuhkan investasi besar dapat didukung secara optimal tanpa membebani fiskal di masa depan.

**c. Rasio Aktivitas**

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, khususnya dalam mengelola piutang dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur piutang dan umur persediaan.



**Gambar 2. 65 Rasio Aktivitas Kota Balikpapan Tahun 2020-2024**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

**1) Umur Piutang**

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga. Semakin lama umur piutang, semakin besar risiko ketidakmampuan daerah dalam mengonversi piutang menjadi kas. Umur piutang yang tinggi dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dalam lima tahun terakhir, umur piutang rata-rata berada pada angka 26 hari, dengan tren yang relatif stabil dan bahkan menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 menjadi 22 hari, dari sebelumnya mencapai 31 hari di tahun 2021. Perbaikan ini mengindikasikan peningkatan efektivitas dalam penagihan atau pengelolaan piutang daerah, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap likuiditas kas pemerintah daerah. Semakin pendek umur piutang, semakin cepat pula konversi piutang menjadi kas, yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional pemerintahan.

**2) Umur Persediaan**

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset lancar. Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang

dibutuhkan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau penggunaan yang produktif.

Rata-rata umur persediaan selama lima tahun mencapai 343 hari, dan bahkan menyentuh 478 hari pada tahun 2022, hal ini mencerminkan adanya akumulasi barang yang tidak segera dimanfaatkan atau dikeluarkan dalam waktu yang efisien. Situasi ini berpotensi menimbulkan pemborosan, baik dalam bentuk biaya penyimpanan maupun risiko penurunan nilai barang akibat kedaluwarsa atau kerusakan. Umur persediaan yang tinggi berpotensi menyebabkan inefisiensi, terutama jika menyangkut barang yang cepat usang atau memiliki biaya penyimpanan tinggi.

Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengelolaan piutang, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan. Diperlukan langkah strategis untuk mengefisienkan sistem perencanaan kebutuhan barang dan distribusi logistik antar unit kerja, agar nilai aset tidak hanya besar di atas kertas, tetapi benar-benar produktif dalam mendukung pelayanan publik secara optimal.

#### **2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030**

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2020-2024, maka disusun suatu analisis proyeksi keuangan daerah dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2026-2030. Analisis bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2026-2030.

**Tabel 2. 52 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>							
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.066.692.925.337	1.301.282.969.500	1.430.175.737.415	1.646.054.702.040	1.833.954.463.210	2.044.493.972.930	2.280.476.916.160
1.2	Pendapatan Transfer	2.887.703.799.448	2.913.292.954.013	2.665.249.600.000	2.704.164.756.000	2.744.082.197.000	2.785.042.603.000	2.827.088.592.000
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	66.138.300.278	4.500.000.000	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.020.535.025.063</b>	<b>4.219.075.923.513</b>	<b>4.095.425.337.415</b>	<b>4.350.219.458.040</b>	<b>4.578.036.660.210</b>	<b>4.829.536.575.930</b>	<b>5.107.565.508.160</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>							
2.1	Belanja Operasi	2.487.779.432.633	3.133.659.120.633	2.704.399.672.000	2.819.931.023.000	2.940.568.864.000	3.116.545.283.000	3.194.485.997.000
2.2	Belanja Modal	1.442.250.144.884	1.451.589.188.672	1.645.992.819.000	1.706.819.542.000	1.751.609.464.000	1.816.780.949.000	1.909.432.891.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	12.135.375.577	12.805.950.324	13.379.252.000	14.048.215.000	14.750.626.000	15.488.157.000	16.262.565.000
2.4	Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.942.164.953.094</b>	<b>4.598.054.259.629</b>	<b>4.363.771.743.000</b>	<b>4.540.798.780.000</b>	<b>4.706.928.954.000</b>	<b>4.948.814.389.000</b>	<b>5.120.181.453.000</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>78.370.071.968,78</b>	<b>(378.978.336.116)</b>	<b>(268.346.405.585)</b>	<b>(190.579.321.960)</b>	<b>(128.892.293.790)</b>	<b>(119.277.813.070)</b>	<b>(12.615.944.840)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>536.370.834.984</b>	<b>378.978.336.116</b>	<b>303.346.405.585</b>	<b>204.579.321.960</b>	<b>144.892.293.790</b>	<b>137.277.813.070</b>	<b>30.615.944.840</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	536.370.834.984	378.978.336.116	303.346.405.585	204.579.321.960	144.892.293.790	137.277.813.070	30.615.944.840
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	35.000.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>536.370.834.984</b>	<b>378.978.336.116</b>	<b>268.346.405.585</b>	<b>190.579.321.960</b>	<b>128.892.293.790</b>	<b>119.277.813.070</b>	<b>12.615.944.840</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>614.740.906.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Kerangka pendanaan Pemerintah Kota Balikpapan periode 2026–2030 menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, mencerminkan arah kemandirian fiskal yang semakin kuat. Meskipun demikian, pendapatan transfer tetap menjadi pilar utama dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan, sementara pos lain-lain pendapatan sah mengalami eliminasi sejak 2026, yang patut menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah. Dari sisi belanja, Pemerintah Kota menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan dasar melalui peningkatan belanja operasi dan modal yang berimbang. Namun, proyeksi defisit anggaran yang berlanjut, meskipun menurun, serta penyusutan drastis nilai SiLPA mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal untuk menutup defisit di masa depan.

Pada subbab berikut akan diuraikan secara lebih rinci dinamika proyeksi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kota Balikpapan selama periode 2026 hingga 2030.

#### **2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah**

Pertimbangan utama dalam proyeksi pendapatan didasarkan pada analisis tren dari data historis beberapa tahun terakhir untuk setiap objek pendapatan. Proyeksi ini juga mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan historis, kondisi ekonomi makro yang berlaku, serta kebijakan dan strategi terkait pendapatan daerah di masa depan, sehingga hasil proyeksi menjadi lebih realistis. Selanjutnya, kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang akan diarahkan pada:

- a. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peningkatan kerja sama dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2023;
- c. Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan untuk mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan

besaran pajak dan retribusi yang terutang, hingga penagihan dan pengawasan penyetoran pajak dan retribusi, dengan memanfaatkan teknologi;

- d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi perangkat daerah penghasil;
- f. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- g. Kebijakan terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus mempertimbangkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota dalam upaya meningkatkan pendapatan, khususnya yang bersumber dari dana transfer ke daerah; dan
- j. Pembiayaan pembangunan daerah akan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau stakeholders lainnya.

Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 53 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>							
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.066.692.925.337</b>	<b>1.301.282.969.500</b>	<b>1.430.175.737.415</b>	<b>1.646.054.702.040</b>	<b>1.833.954.463.210</b>	<b>2.044.493.972.930</b>	<b>2.280.476.916.160</b>
1.1.1	Pajak Daerah	809.678.302.867	1.053.276.645.000	1.137.538.776.600	1.295.099.823.840	1.437.679.621.400	1.595.824.379.310	1.771.221.292.960
1.1.2	Retribusi Daerah	164.391.311.694	171.835.366.500	190.737.256.815	243.496.411.200	282.521.059.810	327.774.433.620	380.247.095.200
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.519.393.510	24.011.240.000	32.426.898.000	37.290.933.000	42.884.573.000	49.317.259.000	56.714.848.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	68.103.917.266	52.159.718.000	69.472.806.000	70.167.534.000	70.869.209.000	71.577.901.000	72.293.680.000
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.887.703.799.448</b>	<b>2.913.292.954.013</b>	<b>2.665.249.600.000</b>	<b>2.704.164.756.000</b>	<b>2.744.082.197.000</b>	<b>2.785.042.603.000</b>	<b>2.827.088.592.000</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.312.207.705.739</b>	<b>2.361.537.446.899</b>	<b>2.358.683.080.000</b>	<b>2.382.269.910.000</b>	<b>2.406.092.609.000</b>	<b>2.430.153.536.000</b>	<b>2.454.455.072.000</b>
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.483.098.238.756	1.437.368.918.899	1.512.908.513.000	1.528.037.598.000	1.543.317.974.000	1.558.751.154.000	1.574.338.666.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	581.085.614.028	651.806.536.000	592.765.435.000	598.693.089.000	604.680.020.000	610.726.820.000	616.834.088.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10.740.075.783	2.586.563.000	10.955.951.000	11.065.511.000	11.176.166.000	11.287.928.000	11.400.807.000
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	222.329.812.172	261.812.886.000	226.798.641.000	229.066.627.000	231.357.293.000	233.670.866.000	236.007.575.000
1.2.1.5	Dana Insentif	14.953.965.000	7.962.543.000	15.254.540.000	15.407.085.000	15.561.156.000	15.716.768.000	15.873.936.000
<b>1.2.2</b>	<b>Transfer antar - daerah</b>	<b>575.496.093.709</b>	<b>551.755.507.114</b>	<b>306.566.520.000</b>	<b>321.894.846.000</b>	<b>337.989.588.000</b>	<b>354.889.067.000</b>	<b>372.633.520.000</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	450.341.093.709	363.693.507.114	306.566.520.000	321.894.846.000	337.989.588.000	354.889.067.000	372.633.520.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	125.155.000.000	188.062.000.000	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>66.138.300.278</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	4.500.000.000	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<b>66.138.300.278</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.020.535.025.063</b>	<b>4.219.075.923.513</b>	<b>4.095.425.337.415</b>	<b>4.350.219.458.040</b>	<b>4.578.036.660.210</b>	<b>4.829.536.575.930</b>	<b>5.107.565.508.160</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Kota Balikpapan, terlihat adanya kecenderungan peningkatan pendapatan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2030. Jumlah total pendapatan daerah diperkirakan naik dari Rp4,02 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp5,11 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan tren positif dan signifikan. PAD yang semula sebesar Rp1,07 triliun pada tahun 2024, diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp2,28 triliun pada akhir periode. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



**Gambar 2. 66 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen PAD Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Berdasarkan proyeksi komponen PAD Kota Balikpapan tahun 2026 hingga 2030, terlihat bahwa kontribusi utama PAD masih didominasi oleh pajak daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,47 persen terhadap total PAD. Pajak daerah diperkirakan tumbuh secara konsisten dari Rp1,1 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,77 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,71 persen per tahun. Tren ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perpajakan lokal, sekaligus mencerminkan potensi optimalisasi pemungutan pajak yang semakin kuat, baik melalui ekstensifikasi objek pajak maupun intensifikasi pemungutan.

Kontributor kedua terbesar berasal dari retribusi daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,25 persen, dan tingkat pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen, yaitu mencapai 18,93 persen per

tahun. Nilai retribusi diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat, dari Rp190,74 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp380,25 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mengindikasikan potensi besar pada layanan publik berbayar yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut. Namun demikian, dibutuhkan penguatan sistem pelayanan publik yang efisien dan akuntabel agar peningkatan pendapatan ini diikuti oleh peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HKPD) menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, yaitu hanya 2,35 persen terhadap total PAD. Meski demikian, laju pertumbuhan komponen ini cukup menjanjikan, dengan rata-rata 15,00 persen per tahun. Peningkatan dari Rp32,43 miliar menjadi Rp56,71 miliar selama lima tahun mencerminkan adanya perbaikan kinerja BUMD atau aset produktif daerah yang dikelola secara profesional. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta tata kelola investasi yang baik menjadi penting untuk menjaga tren positif ini.

Komponen terakhir, yaitu lain-lain PAD yang sah, berkontribusi sekitar 3,93 persen terhadap total PAD, dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup stabil sebesar 1,00 persen per tahun. Nilainya cenderung stagnan dari Rp69,47 miliar menjadi Rp72,29 miliar sepanjang periode. Walaupun kontribusinya relatif kecil, komponen ini tetap perlu dijaga, terutama untuk mengakomodasi potensi pendapatan dari sumber-sumber yang tidak termasuk dalam kategori utama, seperti pendapatan denda, jasa giro, atau hasil pemanfaatan kekayaan nonproduktif.

Secara keseluruhan, struktur PAD Kota Balikpapan menunjukkan ketergantungan yang besar pada pajak daerah, dengan potensi pertumbuhan signifikan dari retribusi dan HKPD yang dipisahkan. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas perpajakan lokal, peningkatan kualitas layanan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta perluasan basis pendapatan sah lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah tetap menjadi tulang punggung keuangan daerah dengan proporsi terbesar. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



**Gambar 2. 67 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Struktur pendapatan transfer Kota Balikpapan pada periode 2026 hingga 2030 menunjukkan dominasi yang kuat dari transfer pemerintah pusat, yang berkontribusi rata-rata sebesar 87,67 persen terhadap total pendapatan transfer. Nilai transfer dari pusat mengalami peningkatan secara bertahap dari Rp2,36 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp2,45 triliun pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan rata-rata yang relatif rendah, yaitu 1,00 persen per tahun. Sub-komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat masih menjadi porsi dominan, disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik, serta dana insentif yang nilainya relatif kecil namun konsisten. Pola ini mencerminkan keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan yang moderat ini mengisyaratkan bahwa ruang fiskal dari transfer pusat cenderung stagnan, sehingga mendorong daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber penerimaan lain guna menjaga keseimbangan anggaran.

Sementara itu, transfer antar daerah, meskipun kontribusinya lebih kecil yaitu sekitar 12,33 persen, menunjukkan dinamika yang lebih progresif dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,00 persen.

Peningkatan dari Rp306,57 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp372,63 miliar pada tahun 2030 mencerminkan adanya potensi peningkatan kerja sama fiskal antarwilayah atau peningkatan bagi hasil yang diterima Kota Balikpapan dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota lainnya. Pertumbuhan yang lebih tinggi pada komponen ini perlu dimaknai sebagai peluang strategis untuk memperkuat pendanaan daerah melalui skema sinergi antar-pemerintah, terutama dalam konteks pembangunan kawasan dan pelayanan lintas daerah.

Secara agregat, pendapatan transfer Kota Balikpapan menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat, yaitu rata-rata 1,48 persen per tahun selama lima tahun ke depan. Dengan struktur kontribusi yang masih didominasi oleh transfer pusat, Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan dalam membangun kemandirian fiskal. Oleh karena itu, upaya optimalisasi pendapatan asli daerah perlu terus diperkuat, disertai dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan terarah, agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, peningkatan efektivitas pemanfaatan dana transfer juga menjadi kunci agar setiap rupiah yang diterima benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang pada tahun 2024 masih mencatatkan angka Rp66 miliar, mengalami penghentian sejak tahun 2026. Hal ini dapat mencerminkan pergeseran klasifikasi atau berkurangnya sumber-sumber pendapatan non-reguler seperti hibah atau pendapatan khusus lainnya. Penurunan ini perlu mendapat perhatian agar potensi sumber pendapatan alternatif tetap dapat dioptimalkan.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan memperlihatkan arah kebijakan yang mendorong kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang progresif, namun tetap dihadapkan pada tantangan stagnasi pendapatan transfer dan potensi kehilangan pada pos-pos pendapatan non-konvensional. Oleh karena itu, strategi peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan lokal, penyempurnaan regulasi perpajakan daerah, serta pemetaan potensi PAD berbasis data dan teknologi, menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pendapatan daerah di masa depan.

### **2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah**

Belanja Proyeksi belanja daerah didasarkan pada analisis tren data historis dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap objek belanja, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah juga menjadi faktor utama agar hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan memperhitungkan kebutuhan belanja secara proporsional, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan belanja daerah untuk mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah periode 2026–2030 diarahkan pada beberapa prinsip utama.

- a. penganggaran berbasis kinerja dengan orientasi pencapaian hasil guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- b. belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dengan peningkatan alokasi yang terukur dan diikuti oleh peningkatan kinerja serta kualitas layanan publik.
- c. belanja daerah dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.
- d. Belanja honorarium bagi ASN dianggarkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan efektivitas dalam mendukung pencapaian sasaran program. Pemberian honorarium dibatasi dan hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.

- e. penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai, serta volume pekerjaan, dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan tahun anggaran berjalan. Ketujuh, alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas, dengan mengutamakan produk dalam negeri. Perencanaan kebutuhan BMD menjadi dasar bagi SKPD dalam mengusulkan anggaran, baik untuk pengadaan baru maupun pemeliharaan, dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, seperti jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- h. Optimalisasi skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban APBD.
- i. Efisiensi dalam realisasi belanja modal, dengan memastikan proyek yang direncanakan dapat dieksekusi sesuai target waktu dan anggaran.
- j. belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah desa, agar bantuan keuangan dapat digunakan secara optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.
- k. Monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan lebih diperketat, guna menghindari penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana.

Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kota Balikpapan untuk periode 2026–2030:

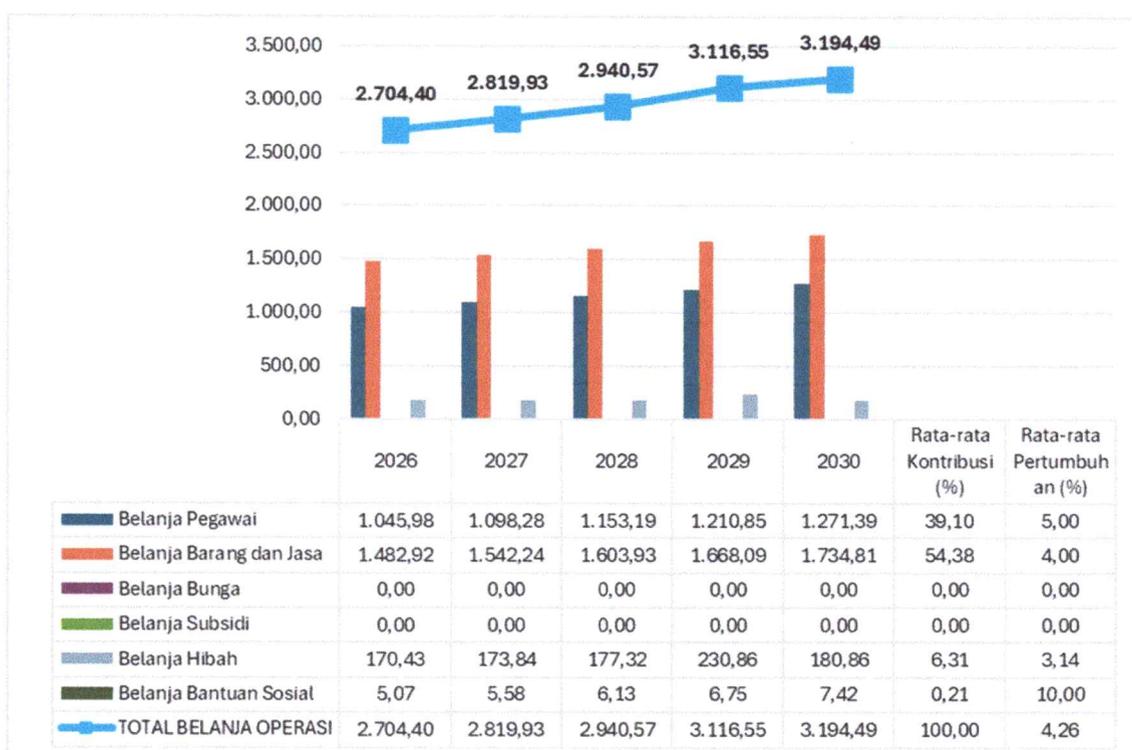
**Tabel 2. 54 Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>							
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.487.779.432.633</b>	<b>3.133.659.120.633</b>	<b>2.704.399.672.000</b>	<b>2.819.931.023.000</b>	<b>2.940.568.864.000</b>	<b>3.116.545.283.000</b>	<b>3.194.485.997.000</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	948.731.492.872	1.365.718.784.826	1.045.976.471.000	1.098.275.295.000	1.153.189.060.000	1.210.848.513.000	1.271.390.939.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.371.045.528.426	1.618.463.647.495	1.482.922.844.000	1.542.239.758.000	1.603.929.348.000	1.668.086.522.000	1.734.809.983.000
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	163.812.269.487	146.306.688.312	170.430.285.000	173.838.891.000	177.315.669.000	230.861.982.000	180.861.982.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.190.141.849	3.170.000.000	5.070.072.000	5.577.079.000	6.134.787.000	6.748.266.000	7.423.093.000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.442.250.144.884</b>	<b>1.451.589.188.672</b>	<b>1.645.992.819.000</b>	<b>1.706.819.542.000</b>	<b>1.751.609.464.000</b>	<b>1.816.780.949.000</b>	<b>1.909.432.891.000</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	28.443.334.370	85.108.867.095	29.592.445.000	30.184.294.000	30.787.980.000	31.403.740.000	32.031.815.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.860.563.977	198.367.528.825	271.465.580.000	277.709.288.000	281.041.799.000	287.505.760.000	294.118.392.000
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.046.523.523	402.587.303.164	354.049.390.000	362.192.526.000	366.538.836.000	374.969.229.000	383.593.521.000
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	836.422.774.618	744.454.818.732	973.909.768.000	1.018.953.095.000	1.054.616.453.000	1.103.392.464.000	1.179.250.696.000
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.412.242.944	562.843.700	1.469.298.000	1.498.684.000	1.528.658.000	1.559.231.000	1.590.416.000
2.2.6	Aset Lainnya	14.064.705.451	20.507.827.156	15.506.338.000	16.281.655.000	17.095.738.000	17.950.525.000	18.848.051.000
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>12.135.375.577</b>	<b>12.805.950.324</b>	<b>13.379.252.000</b>	<b>14.048.215.000</b>	<b>14.750.626.000</b>	<b>15.488.157.000</b>	<b>16.262.565.000</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>0</b>						
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.942.164.953.094</b>	<b>4.598.054.259.629</b>	<b>4.363.771.743.000</b>	<b>4.540.798.780.000</b>	<b>4.706.928.954.000</b>	<b>4.948.814.389.000</b>	<b>5.120.181.453.000</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi tahun 2024 sebagai baseline, analisis terhadap proyeksi belanja daerah Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 2026 hingga 2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat namun konsisten. Pada tahun 2024, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,94 triliun. Lima tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2030, total belanja diproyeksikan meningkat menjadi Rp5,12 triliun, atau tumbuh sebesar 29,88 persen dibandingkan baseline 2024.

Selama periode 2026–2030, struktur belanja daerah menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi tetap dominan, yaitu sekitar 63 persen hingga 64 persen dari total belanja tahunan. Belanja operasi yang pada tahun 2024 sebesar Rp2,49 triliun, mengalami peningkatan menjadi Rp3,19 triliun pada tahun 2030. Ini berarti terjadi pertumbuhan kumulatif sebesar 28,41 persen selama enam tahun. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



**Gambar 2. 68 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Operasi Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Struktur belanja operasi Pemerintah Kota Balikpapan pada periode 2026 hingga 2030 didominasi oleh belanja barang dan jasa, yang mencatatkan rata-rata kontribusi tertinggi sebesar 54,38 persen terhadap total belanja operasi. Nilainya diproyeksikan meningkat dari Rp1,48 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,73 triliun pada tahun 2030, dengan laju

pertumbuhan rata-rata sebesar 4,00 persen per tahun. Tingginya porsi belanja barang dan jasa mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga kelangsungan pelayanan publik dan operasional birokrasi, serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Komponen terbesar kedua adalah belanja pegawai, yang menyumbang rata-rata 39,10 persen dari total belanja operasi, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,00 persen. Nilainya meningkat stabil dari Rp1,05 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,27 triliun pada tahun 2030. Tren ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara, sekaligus mempertahankan stabilitas dan produktivitas birokrasi. Namun, porsi belanja pegawai yang cukup besar juga perlu dikelola dengan prinsip efisiensi agar tidak membebani fiskal daerah secara berlebihan di masa depan.

Selanjutnya, belanja hibah berkontribusi sekitar 6,31 persen terhadap total belanja operasi, dengan pertumbuhan rata-rata 3,14 persen per tahun. Kenaikan nilai belanja hibah yang cukup fluktuatif, terutama lonjakan pada tahun 2029, kemungkinan mencerminkan dukungan terhadap kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penyaluran hibah dilakukan secara selektif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi.

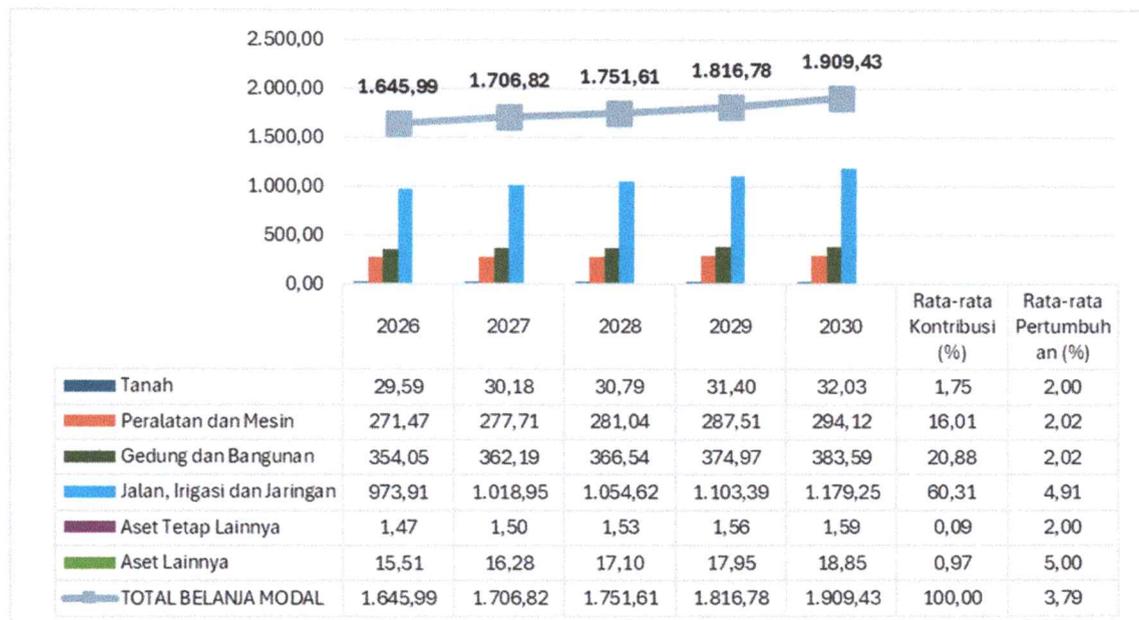
Belanja bantuan sosial, meskipun hanya berkontribusi sekitar 0,21 persen, menunjukkan tren pertumbuhan tertinggi, yakni 10,00 persen per tahun. Peningkatan ini dari Rp5,07 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp7,42 miliar pada tahun 2030 menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap perlindungan sosial masyarakat rentan. Komponen ini menjadi penting dalam konteks respons kebijakan terhadap ketimpangan sosial, dampak ekonomi, serta upaya penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Adapun belanja bunga dan belanja subsidi tidak dialokasikan dalam periode proyeksi ini, yang dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak merencanakan pembiayaan melalui pinjaman berbunga atau intervensi ekonomi berbentuk subsidi langsung, atau belum menjadi kebijakan prioritas dalam lima tahun ke depan.

Secara keseluruhan, struktur belanja operasi Kota Balikpapan mencerminkan orientasi pada pemeliharaan pelayanan publik dan

kesejahteraan pegawai, disertai peningkatan belanja sosial secara bertahap. Oleh karena itu, tantangan ke depan terletak pada bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi, efektivitas layanan, dan daya dukung fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara kontribusi belanja modal tetap terjaga pada kisaran 35 persen–37 persen, menunjukkan keseimbangan antara belanja rutin dan pembangunan jangka panjang. Belanja modal mengalami pertumbuhan dari Rp1,44 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,9 triliun pada tahun 2030, atau meningkat 32,39 persen. Berikut grafik Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



**Gambar 2. 69 Proyeksi Kontribusi dan Pertumbuhan Komponen Belanja Modal Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Struktur belanja modal Pemerintah Kota Balikpapan dalam periode 2026 hingga 2030 menunjukkan kecenderungan pembangunan yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aset tetap daerah. Komponen dengan kontribusi terbesar berasal dari belanja jalan, irigasi, dan jaringan, yang mencapai rata-rata 60,31 persen dari total belanja modal. Nilai alokasinya tumbuh cukup konsisten dari Rp973,91 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp1,18 triliun pada tahun 2030, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,91 persen. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Balikpapan terhadap pembangunan konektivitas fisik, prasarana dasar, serta aksesibilitas wilayah.

Komponen gedung dan bangunan berada pada urutan kedua dalam hal kontribusi, yaitu sebesar 20,88 persen, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 2,02 persen. Kenaikan anggaran dari Rp354,05 miliar menjadi Rp383,59 miliar selama lima tahun mencerminkan fokus pada peningkatan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan publik seperti kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan ini sekaligus mendukung upaya penyediaan infrastruktur sosial yang lebih representatif dan layak.

Peralatan dan mesin juga memperoleh alokasi yang signifikan dengan kontribusi sebesar 16,01 persen, yang mencerminkan investasi pemerintah dalam mendukung efisiensi operasional, modernisasi peralatan kerja, serta digitalisasi layanan publik. Pertumbuhannya pun sejalan dengan komponen bangunan, yaitu sebesar 2,02 persen per tahun.

Sementara itu, komponen belanja tanah dan aset tetap lainnya masih berkontribusi relatif kecil masing-masing sebesar 1,75 persen dan 0,09 persen, dengan pertumbuhan sekitar 2,00 persen per tahun. Kendati nilainya rendah, pengadaan tanah tetap penting sebagai bentuk antisipasi kebutuhan perluasan fasilitas umum maupun pengembangan kawasan baru. Di sisi lain, aset lainnya seperti investasi non-fisik (misalnya perangkat lunak atau sumber daya strategis lainnya) mencatat kontribusi 0,97 persen, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,00 persen, mengindikasikan adanya dorongan awal terhadap transformasi pengelolaan aset berbasis teknologi dan inovasi.

Secara keseluruhan, belanja modal Pemerintah Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan yang stabil dari Rp1,65 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,91 triliun pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,79 persen per tahun. Komposisi belanja ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal Kota Balikpapan tetap menekankan pada pembangunan fisik dan penguatan kapasitas aset daerah untuk mendukung pelayanan publik yang berkelanjutan. Tantangan ke depan terletak pada efisiensi pelaksanaan proyek-proyek modal serta kesinambungan pemeliharaan aset agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Ketiadaan belanja transfer (bagi hasil maupun bantuan keuangan) dalam seluruh periode ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kota

sepenuhnya terfokus pada kebutuhan internal kota dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga menunjukkan kenaikan dari Rp12,13 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp16,26 miliar pada tahun 2030 (naik 34,01 persen), mencerminkan antisipasi terhadap risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kota Balikpapan menunjukkan orientasi anggaran yang berimbang antara aspek operasional dan investasi jangka panjang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menciptakan tata kelola fiskal yang efisien dan berdaya tahan di masa depan.

#### **2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah berorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan daerah ke depan, sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran, diarahkan pada:

- a. Pembiayaan mencakup setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- b. Pembiayaan netto digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran;
- c. Jika diperkirakan ada defisit dalam APBD, defisit tersebut dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
- d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional, dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya, untuk menghindari kemungkinan pengeluaran

pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai jika SiLPA yang direncanakan tidak tercapai;

- e. Jika APBD diperkirakan surplus, surplus tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- f. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

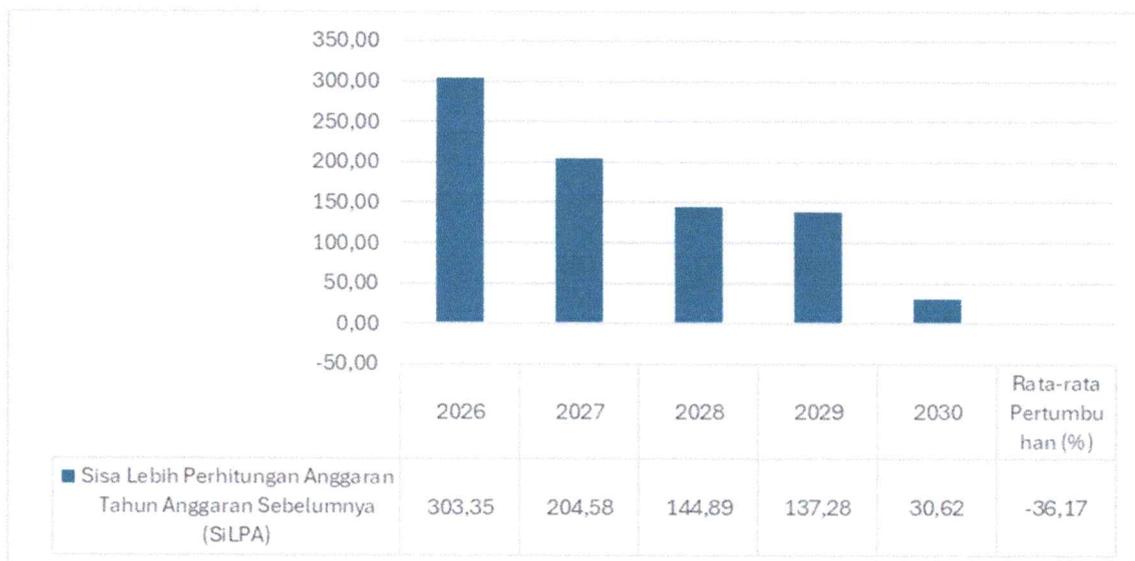
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan dijelaskan pada tabel di bawah berikut ini.

**Tabel 2. 55 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>							
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>536.370.834.984</b>	<b>378.978.336.116</b>	<b>303.346.405.585</b>	<b>204.579.321.960</b>	<b>144.892.293.790</b>	<b>137.277.813.070</b>	<b>30.615.944.840</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	536.370.834.984	378.978.336.116	303.346.405.585	204.579.321.960	144.892.293.790	137.277.813.070	30.615.944.840
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0						
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>
3.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	35.000.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
3.1.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0					0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>536.370.834.984</b>	<b>378.978.336.116</b>	<b>268.346.405.585</b>	<b>190.579.321.960</b>	<b>128.892.293.790</b>	<b>119.277.813.070</b>	<b>12.615.944.840</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan data proyeksi pembiayaan daerah Pemerintah Kota Balikpapan, penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp536,95 miliar. Pada periode 2026–2030, tren penerimaan pembiayaan menunjukkan kecenderungan menurun signifikan dibandingkan baseline tahun 2024. Penerimaan pada tahun 2026 sebesar Rp303,3 miliar, menurun lebih dari 43,44 persen dibanding tahun 2024. Penurunan ini berlanjut hingga Rp30,62 miliar pada tahun 2030. Berikut grafik Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.



**Gambar 2. 70 Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Miliar)**

Sumber: Hasil Olah Data 2025

Proyeksi pertumbuhan penerimaan pembiayaan Kota Balikpapan melalui komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya selama periode 2026–2030, terlihat adanya tren penurunan yang sangat signifikan. Nilai SiLPA menurun tajam dari Rp303,35 miliar pada tahun 2026 menjadi hanya Rp30,62 miliar pada tahun 2030. Penurunan ini mencerminkan rata-rata laju pertumbuhan negatif sebesar -36,17 persen per tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengandalkan saldo anggaran tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan semakin terbatas dari tahun ke tahun. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan efisiensi realisasi anggaran, yang membuat sisa anggaran semakin kecil, atau justru menandakan

tantangan fiskal ke depan terkait ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya tidak dianggarkan pada tahun 2024 mulai muncul pada tahun 2026 sebesar Rp35 miliar dalam bentuk penyertaan modal pemerintah daerah. Pengeluaran ini mengalami penurunan menjadi Rp14 miliar pada tahun 2027, lalu kembali meningkat bertahap menjadi Rp16 miliar pada 2028 dan Rp18 miliar pada tahun 2029 serta 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kota Balikpapan menunjukkan potensi menurunnya kapasitas pembiayaan netto dalam lima tahun mendatang dibandingkan tahun dasar 2024. Hal ini mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan melalui pembiayaan, terutama karena tren penurunan SiLPA sebagai satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan dan meningkatnya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi kondisi ini dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan penguatan pendapatan asli daerah guna menjaga keseimbangan fiskal yang sehat serta mencari alternatif sumber pembiayaan lain guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

#### **2.5.2.4 Proyeksi Perhitungan Kerangka Pendanaan 2026-2030**

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama tahun 2026-2030.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Balikpapan tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 56 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026-2030**

No	Uraian	Baseline Tahun 2024	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	4.020.535.025.063	4.219.075.923.513	4.095.425.337.415	4.350.219.458.040	4.578.036.660.210	4.829.536.575.930	5.107.565.508.160
2	Penerimaan Pembiayaan	536.370.834.984	378.978.336.116	303.346.405.585	204.579.321.960	144.892.293.790	137.277.813.070	30.615.944.840
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>4.556.905.860.047</b>	<b>4.598.054.259.629</b>	<b>4.398.771.743.000</b>	<b>4.554.798.780.000</b>	<b>4.722.928.954.000</b>	<b>4.966.814.389.000</b>	<b>5.138.181.453.000</b>
	<b>KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>4.556.905.860.047</b>	<b>4.598.054.259.629</b>	<b>4.398.771.743.000</b>	<b>4.554.798.780.000</b>	<b>4.722.928.954.000</b>	<b>4.966.814.389.000</b>	<b>5.138.181.453.000</b>
3	<b>PRIORITAS I (70 %)</b>			<b>3.079.140.220.100</b>	<b>3.188.359.146.000</b>	<b>3.306.050.267.800</b>	<b>3.476.770.072.300</b>	<b>3.596.727.017.100</b>
	a. Belanja pegawai			1.045.976.471.000	1.098.275.295.000	1.153.189.060.000	1.210.848.513.000	1.271.390.939.000
	b. Pengeluaran Pembiayaan			35.000.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	c. Belanja wajib dan mengikat lainnya			1.998.163.749.100	2.076.083.851.000	2.136.861.207.800	2.247.921.559.300	2.307.336.078.100
4	<b>PRIORITAS II (20 %)</b>			<b>879.754.348.600</b>	<b>910.959.756.000</b>	<b>944.585.790.800</b>	<b>993.362.877.800</b>	<b>1.027.636.290.600</b>
5	<b>PRIORITAS III (10 %)</b>			<b>439.877.174.300</b>	<b>455.479.878.000</b>	<b>472.292.895.400</b>	<b>496.681.438.900</b>	<b>513.818.145.300</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, Tahun 2025

Berdasarkan proyeksi data kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Balikpapan pada periode 2026 hingga 2030, menunjukkan adanya tren peningkatan kapasitas fiskal secara bertahap, meskipun dengan fluktuasi minor. Pada baseline tahun 2024, kapasitas riil sebesar Rp4,56 triliun, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi Rp4,4 triliun pada tahun 2026, sebelum kembali meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp5,13 triliun pada tahun 2030. Penurunan awal pada tahun 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pembiayaan, dari Rp536,95 miliar pada 2024 menjadi hanya Rp303,3 miliar pada 2026. Meskipun demikian, peningkatan pendapatan daerah dari Rp4,02 triliun pada 2024 menjadi Rp5,1 triliun pada 2030 berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal dalam jangka panjang.

Mengingat keterbatasan anggaran, pengalokasiannya harus dilakukan berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan prioritas daerah. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan harus diarahkan sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus utama pada pendanaan prioritas pembangunan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Kebijakan penganggaran belanja daerah juga mempertimbangkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan. Untuk memastikan penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efektif, arah kebijakan belanja daerah untuk periode 2026-2030 akan diarahkan sebagai berikut:

- a. Mendesain perencanaan anggaran belanja berdasarkan prinsip *value for money*, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan/sub-kegiatan, serta manfaat yang diperoleh dan efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut;
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dengan fokus pada pemenuhan

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;

- d. Belanja untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah memastikan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik;
- e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan, bukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran tahun sebelumnya;
- f. Belanja Daerah mengikuti standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka pendanaan penting untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Selain dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang tersedia, dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat, terutama yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2025-2029), juga sangat diperlukan. Berdasarkan kebijakan alokasi belanja untuk periode 2026-2030, program-program prioritas Kota Balikpapan akan diarahkan pada:

- a. Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
- b. Balikpapan Kota MICE dan Wisata
- c. Balikpapan Kota Ramah Anak
- d. Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
- e. Mengatasi stunting
- f. Pengendalian Banjir
- g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
- h. Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
- i. Transformasi birokrasi

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi tiga kategori prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

1. Prioritas I: Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat, dengan fokus pada mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Prioritas ini dialokasikan sebesar 70 persen dari total kapasitas. Komponen ini terus meningkat dari Rp3,08 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp3,60 triliun pada tahun 2030.
2. Prioritas II: Dialokasikan 20 persen dari kapasitas riil menunjukkan tren peningkatan dari Rp879,75 miliar pada tahun 2026 dan meningkat menjadi Rp1,03 triliun pada tahun 2030. Prioritas ini untuk membiayai belanja yang mendukung visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan pelayanan dasar. Alokasi untuk pemenuhan pelayanan dasar termasuk dalam prioritas II, dengan pertimbangan bahwa prioritas Walikota dan Wakil Walikota juga dipertimbangkan dalam hal ini. Meskipun alokasinya hanya 20 persen, namun program prioritas kedua ini secara substansi berhimpitan/beririsan dengan prioritas pertama sebagai pemenuhan pelayanan dasar.
3. Prioritas III: yang mencakup 10 persen dari kapasitas dialokasikan untuk membiayai belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya nilainya bertumbuh dari Rp439,88 miliar pada 2026 menjadi Rp513,82 miliar pada 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan mencerminkan arah kebijakan fiskal yang cermat dan terukur, dengan upaya mempertahankan disiplin anggaran serta mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan pada periode 2026–2030.

## 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini menyajikan analisis atas permasalahan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yang akan dirumuskan. Bab ini secara umum akan menyajikan dua hal, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan landasan bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk merumuskan intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

### 2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Balikpapan secara umum akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan lintas sektor dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan daerah. Kedua permasalahan ini pada umumnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang

#### 2.6.1.1 Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kota Balikpapan diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara umum dikategorikan berdasarkan dimensi pembangunan berkelanjutan dan landasan transformasi dalam perencanaan jangka panjang. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan meninjau capaian kinerja serta melalui diskusi kelompok terfokus bersama organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakan pendekatan pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah jangka menengah di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut.

**Tabel 2. 57 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor**

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Transformasi Ekonomi	Pembangunan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan	Perekonomian daerah didominasi oleh industri besar	Ekosistem industri belum mendukung pengembangan IKM secara optimal
			Partisipasi angkatan kerja rendah	Angkatan kerja belum sepenuhnya berdayasaing
				<i>Mismatch</i> antara ketersediaan lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja
			Kontribusi UMKM terhadap perekonomian belum optimal	Rendahnya minat berwirausaha
Kapasitas produksi dan pemasaran pelaku UMKM belum optimal				

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian belum optimal Belum optimalnya investasi daerah	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif belum optimal Kunjungan wisatawan belum optimal Penggalian potensi investasi daerah belum optimal Belum optimalnya promosi investasi
2	Transformasi Sosial	Penguatan SDM yang berdaya saing masih belum optimal	Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan Belum optimalnya layanan pendidikan yang berkualitas Perwujudan kesetaraan gender dan keluarga	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi masih belum optimal Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi Pengendalian dan pencegahan penyakit menular, tidak menular, dan cakupan imunisasi dasar lengkap masih perlu dioptimalkan Kualitas sarana prasarana, alat kesehatan, dan obat di fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta) masih perlu ditingkatkan Kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan Tata kelola dan manajemen layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) masih perlu ditingkatkan Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			berkualitas masih perlu dioptimalkan	Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
				Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan
				Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
			Upaya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan masih perlu dioptimalkan	Cakupan pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan masih perlu ditingkatkan
				Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan masih perlu dioptimalkan
				Layanan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) masih perlu ditingkatkan
3	Transformasi Tata Kelola	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Akuntabilitas kinerja belum optimal	Belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja terutama di tingkat PD
				Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi kinerja
				Kualitas indikator kinerja yang belum optimal
				Keterpaduan perencanaan serta mekanisme <i>cascading</i> kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi, proses bisnis masih sama dengan nomenklatur
			Kemandirian keuangan daerah belum optimal	Tantangan dalam menjalankan UU HKPD
				Banyak potensi belum dimanfaatkan secara optimal
Kolaborasi lintas sektor belum optimal	Sinergi program pemerintah dengan swasta masih menghadapi tantangan			
4	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Belum optimalnya ketahanan sosial budaya	Belum optimalnya upaya penanggulangan risiko kelompok rentan	Pemenuhan ruang dan hak anak yang masih belum optimal
				Belum optimalnya pengarusutamaan gender

No.	Aspek	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Belum optimalnya kelestarian lingkungan serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim	Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	Pencemaran lingkungan hidup belum terkendali secara optimal	
					Belum optimalnya ketaatan perizinan lingkungan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan
					Belum optimalnya uang terbuka hijau memadai
					Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
					Kualitas penataan ruang belum optimal
				Belum optimalnya ketahanan bencana dan perubahan iklim	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi bencana
					Pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal
					Konservasi lingkungan belum berjalan maksimal
					Belum optimalnya transisi energi baru dan terbarukan

**2.6.1.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu dijawab melalui proses pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pembangunan berbasis urusan menjadi perlu untuk dilakukan dalam rangka pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Berikut merupakan pemetaan permasalahan urusan pemerintah daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

**Tabel 2. 58 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
1	Pendidikan	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan	Belum optimalnya partisipasi pendidikan di semua jenjang (pendidikan dasar, menengah dan tinggi)
			Belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkualitas
			Masih perlu ditingkatkannya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
			Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal masih perlu ditingkatkan
			Kolaborasi lintas sektor dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan
			Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			dasar masih belum optimal
			Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah
2	Kesehatan	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu, bayi dan
			Belum optimalnya upaya penanganan dan pencegahan stunting
			Pengendalian, pencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular perlu dioptimalkan
			Sarana prasarana, dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan masih perlu ditingkatkan
			Pemenuhan jumlah, jenis, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan
			Peningkatan jaringan lintas sektor dibidang kesehatan perlu dioptimalkan (kader kesehatan, masyarakat, swasta, dll)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum meratanya jalan dalam kondisi mantap	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan belum optimal, masih terdapat sekitar 19,6 persen jalan Kota dengan kondisi rusak dan rusak berat
		Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	
		Sumber daya air baku belum memadai	Ketersediaan sumber air baku masih kurang jika dibanding dengan kebutuhan, belum dapat dilakukan penambahan saluran rumah tangga
			Jaringan pipa yang sudah tua mengakibatkan rawan kebocoran
		Kapasitas TPA sudah overload	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dari sumbernya belum efektif</li> </ul>
			Banyak rumah kompos dan bank sampah yang kurang aktif akibat pandemi covid-19
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Akses permukiman layak belum optimal	Belum optimalnya rumah tangga terfasilitasi sanitasi layak
			Belum optimalnya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh
		Belum optimalnya akses dan kualitas perumahan	Belum tersedianya data perumahan dan data rumah di kawasan rawan bencana yang ter-update secara periodik
			Perencanaan dan pengembangan perumahan belum optimal
			Belum optimalnya penyediaan rumah yang memenuhi standar rumah layak huni
			Belum optimalnya pelayanan penghunian rusunawa
		Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan	Belum intensifnya pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
		perumahan	Pendataan dan informasi belum optimal
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana	Kondisi lahan dan lingkungan biofisik yang cenderung meningkatkan ancaman risiko bencana alam
			Belum optimalnya manajemen kebencanaan dalam bidang sistem informasi dan publikasi kebencanaan
			Belum lengkapnya sarana dan prasarana mitigasi bencana yang berkualitas
			Kurangnya penguatan kapasitas masyarakat
		Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat	Masih adanya tindak kriminalitas
			Belum optimalnya deteksi dini gangguan stabilitas wilayah
6	Sosial	Belum optimalnya kesejahteraan kelompok rentan	Belum optimalnya kerjasama, pembinaan, dan pengawasan organisasi masyarakat
			Perlunya peningkatan bantuan sosial untuk kelompok rentan
			Pengelolaan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu ditingkatkan
			Belum optimalnya kualitas pelayanan rumah singgah atau penampungan
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			
7	Tenaga Kerja	Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Etos kerja masyarakat usia produktif yang belum optimal
			Daya saing tenaga kerja lokal lebih rendah dibanding tenaga kerja luar
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak	Masih adanya ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan
			Belum optimalnya upaya pemenuhan hak anak
			Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
9	Pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Keterbatasan lahan pertanian
			Biaya distribusi bahan pangan tinggi
			Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan sistem pertanian kota
10	Pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Belum optimalnya izin pengelolaan tanah
			Antisipasi persoalan migrasi dan konflik lahan masih kurang
11	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	Menurunnya kualitas udara karena pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan relatif cepat
			Ancaman alih fungsi lahan produktif
			Belum optimalnya pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			hilir
			Potensi pencemaran dan dampak lingkungan bangkitan IKN
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Sistem manajemen keamanan data kependudukan belum optimal Layanan kependudukan belum optimal
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan di tingkat kelurahan dan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas program pemberdayaan Perlunya mempertahankan kinerja kolaborasi lintas sektor
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk Belum optimalnya pelaksanaan kampung KB. Kampung KB bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kuat dan bahagia, melalui adanya Kelompok Kegiatan (Poktan) di dalamnya seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
15	Perhubungan	Layanan transportasi publik belum optimal	Menurunnya ketersediaan angkutan umum. Jumlah angkutan umum mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit di tahun 2021
16	Komunikasi dan Informatika	Pelayanan jaringan telekomunikasi	Belum semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi dengan layanan menara BTS
		Pelayanan <i>e-government</i> perangkat daerah	Belum seluruh perangkat daerah telah terkoneksi internet dan melaksanakan <i>e-government</i>
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Optimalisasi kualitas koperasi	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT hanya &% persen pada tahun 2023
		Menurunnya jumlah kemitraan UMKM dengan perusahaan	Penurunan jumlah penanaman modal asing sebesar Rp121,08 miliar
18	Penanaman Modal	Pertumbuhan realisasi investasi berfluktuasi	Potensi investasi daerah belum seluruhnya dikembangkan secara optimal
			Promosi investasi belum optimal
19	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya prestasi atlet
			Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang olahraga prestasi
			Belum optimalnya pembinaan kelompok wirausaha muda
			Masih terbatasnya penyelenggaraan event keolahragaan dan kewirausahaan

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
20	Statistik	Strukturisasi data belum optimal	Standardisasi metadata belum implementatif
21	Persandian	Ancaman interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik	Belum optimalnya sistem keamanan siber dan perlindungan data.
22	Kebudayaan	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap seni dan budaya lokal
			Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pemajuan kebudayaan
			Masih terbatasnya kelompok seni dan budaya yang aktif
23	Perpustakaan	Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat	Budaya baca masyarakat masih perlu ditingkatkan
			Sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan masih terbatas
			Distribusi bahan bacaan masih perlu ditingkatkan
			Kompetensi pemustaka masih perlu ditingkatkan
24	Kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan	Digitalisasi arsip perlu ditingkatkan
<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
25	Kelautan dan Perikanan	Kontribusi sektor perikanan belum optimal	Produksi perikanan belum optimal
26	Pariwisata	Kontribusi sektor wisata belum optimal	Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
27	Pertanian	Belum optimalnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian daerah cenderung fluktuatif
28	Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan belum optimal	Belum optimalnya pengawasan perdagangan daerah
29	Perindustrian	Kontribusi sektor industri belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi industri
			Menurunnya jumlah pelaku usaha yang melakukan sertifikasi kompetensi
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			
30	Sekretariat Daerah	Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi berdampak	Akuntabilitas kinerja terus meningkat tapi belum optimal
31	Sekretariat DPRD	Dinamika politik yang sangat fluktuatif	Agenda DPRD yang belum terlalu sinergi dengan eksekutif
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
32	Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah	Adanya <i>mandatory</i> aspek-aspek perencanaan secara vertikal dari pusat dan provinsi
			Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan juga

No.	Aspek	Masalah	Penyebab Masalah
			dengan dokumen perencanaan vertikal (RPJPN, RPJMN, RKP) <i>Refocusing</i> anggaran percepatan pencapaian dari level program hingga sub kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan Kota Balikpapan.
33	Keuangan	Kemandirian keuangan daerah belum optimal	Potensi daerah belum dimanfaatkan secara optimal Tantangan UU HKPD
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya implementasi sistem merit pada aparatur birokrasi Kota Balikpapan.	Kualifikasi dan kompetensi ASN belum sesuai dengan standar yang berlaku
35	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai produk kebijakan dan bahan pengambilan kebijakan Belum optimalnya kapasitas tim penelitian dan pengembangan daerah
<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>			
36	Inspektorat Daerah	Tantangan dalam melaksanakan pengawasan di tengah dinamika kebijakan lokal dan nasional	Tantangan memperkuat evaluasi kinerja dan keuangan
<b>Unsur Kewilayahan</b>			
37	Kecamatan	Belum optimalnya peran aktif masyarakat di level kecamatan dan kelurahan dalam partisipasi pembangunan	Peran aktif LPM, PKK, Karang Taruna dan LKM di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan masih perlu dioptimalkan
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>			
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Belum optimalnya pemetaan potensi konflik horizontal	Belum sinkronnya data potensi konflik Belum semua ormas terdata dan memiliki badan hukum

### 2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kota Balikpapan dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan serta berbagai isu pada level internasional, nasional, dan regional. Oleh karena itu, selain menelaah gambaran umum kondisi daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan, perumusan isu strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagai dokumen yang memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional dan regional serta isu-isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan

### 2.6.2.1 Isu Internasional

Rencana pembangunan jangka menengah perlu diarahkan dengan integrasi isu strategis internasional atau global agar membentuk linearitas interaksi antara perkembangan masyarakat, transformasi ekonomi, perubahan lingkungan, pergeseran demografi, dan kemajuan teknologi. Integrasi isu strategis internasional ini memberikan wawasan jangka panjang mengenai peluang dan tantangan baru yang akan membentuk kerangka kehidupan masyarakat di suatu daerah. Dengan mempertimbangkan isu strategis internasional ini, rencana pembangunan akan mendorong inovasi dalam mengembangkan daya saing di tengah-tengah lingkungan global yang terus berubah untuk memenuhi perubahan tuntutan yang diprediksi hadir di masa depan. Secara mendetail, tabel dibawah ini akan menjelaskan mengenai sepuluh isu strategis internasional yang diadopsi dari RPJPN 2025-2045.

**Tabel 2. 59 Telaah Isu Strategis Internasional RPJPN 2025-2045**

Isu Strategis Internasional	Deskripsi
Demografi Global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pesat populasi dunia yang mencapai 9,45 miliar jiwa.</li><li>• Peningkatan pesat populasi lansia</li></ul>
Perkembangan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ancaman hilangnya hampir 40 persen pekerjaan yang digantikan oleh teknologi</li><li>• Urgensi peningkatan kualitas tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih</li></ul>
Konstelasi Perdagangan Global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perdagangan global bertumbuh secara stabil di angka 3,4 persen per tahun</li><li>• Urgensi pemanfaatan peluang melalui pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga kerja sama tingkat regional</li></ul>
Urbanisasi Dunia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proyeksi lonjakan populasi perkotaan hingga 65 persen dari populasi global</li><li>• Perkotaan akan menjadi pusat perekonomian dan kehidupan</li><li>• Kontribusi perkotaan hingga 70 persen dari PDB global</li></ul>
Luar Angkasa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peluang inovasi teknologi luar angkasa yang memberikan nilai tambah perekonomian</li><li>• Limbah luar angkasa yang mengancam operasional satelit</li></ul>
Tata Kelola Keuangan Global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal</li><li>• Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber</li></ul>
Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan suhu global</li><li>• Kejadian cuaca ekstrim</li><li>• Bencana alam</li></ul>

Isu Strategis Internasional		Deskripsi
Persaingan Sumber Daya Alam		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya komoditas penting akibat urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan populasi di Asia.</li> <li>• Potensi penipisan sumber daya, degradasi lingkungan, dan konflik atas kelangkaan.</li> </ul>
Pertumbuhan Menengah	Kelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan kelas menengah hingga 90 persen dari seluruh populasi global.</li> <li>• Fenomena generasi <i>sandwich</i>, peran ganda dalam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk ketergantungan.</li> </ul>
Geopolitik dan Geoekonomi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persaingan antar negara yang menegang</li> <li>• Munculnya poros kekuatan baru</li> <li>• Pengaruh signifikan pada investasi dan perdagangan.</li> </ul>

#### 2.6.2.2 Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Dokumen RPJPN tahun 2025-2045 dan dokumen RPJMN tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai isu-isu strategis nasional. Isu-isu strategis tersebut dibentuk dari dinamika global dan respon atas persoalan pembangunan nasional yang mendesak. Isu-isu nasional ini penting untuk direspon oleh daerah dan mulai diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini mengingat isu nasional yang membawa dampak bagi daerah dan kinerja pembangunan nasional yang ikut ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah.

Isu-isu jangka panjang nasional menentukan efektivitas pencapaian transformasi pembangunan sebagai agenda besar nasional 20 tahun mendatang. Jika isu-isu pembangunan mampu dikelola dan direspon dengan baik, diharapkan dapat menjadi lompatan bagi pembangunan nasional dan daerah. Isu-isu jangka panjang yang telah diidentifikasi di dalam dokumen RPJPN, yaitu:

**Tabel 2. 60 Isu dan Tantangan Pembangunan Nasional**

Isu dan Tantangan	Penjelasan
Produktivitas rendah	<p>Gambar 6.1. SDM jauh tertinggal terlebih pada perempuan.</p> <p>Gambar 6.2. Produktivitas sektor ekonomi yang rendah.</p> <p>Gambar 6.3. Kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal.</p> <p>Gambar 6.4. Sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.</p>
IPTEKIN dan riset lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran IPTEKIN hanya mencapai 0,28 persen dari PDB.</li> <li>• Kualitas dan kuantitas SDM peneliti belum memadai.</li> <li>• Ekosistem riset dan inovasi masih lemah.</li> <li>• Belum berkembangnya kesadaran ilmiah.</li> </ul>
Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelemahan sektor manufaktur</li> <li>• Rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi</li> <li>• Terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi.</li> <li>• Keterbatasan dukungan ekosisten industri di luar Jawa.</li> <li>• Terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.</li> <li>• Lambatnya regenerasi petani dan nelayan.</li> <li>• Kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan.</li> <li>• Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan.</li> <li>• Belum adanya standar proses</li> <li>• Lemahnya kelembagaan petani dan nelayan yang berbadan hukum.</li> <li>• Semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.</li> </ul>
Pariwisata di bawah potensinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelola.</li> <li>• Pengelolaan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah.</li> <li>• Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.</li> <li>• Kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai untuk ekonomi kreatif.</li> <li>• Transformasi digital belum merata</li> <li>• Inovasi dan pengembangan produk ekonomi kreatif masih rendah.</li> <li>• Ekosistem untuk mendukung komersialisasi belum terbentuk.</li> <li>• Akses ke pasar internasional untuk ekonomi kreatif masih terbatas.</li> </ul>
Ekonomi laut belum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut</li> <li>• Belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of</li> </ul>

Isu dan Tantangan	Penjelasan
optimal	<p>Communication (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan.</li> <li>• Belum berkembangnya diversifikasi industri dan <i>emerging sector</i> lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.</li> <li>• Terbatasnya riset dan pengembangan teknologi kelautan.</li> <li>• Rendahnya penanganan sampah plastik</li> <li>• Masih tingginya kegiatan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF).</li> <li>• Belum optimalnya tata kelola dan regulasi ruang laut.</li> </ul>
Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar UMKM memiliki pekerja yang berkeahlian rendah dan banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah.</li> <li>• Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha.</li> <li>• Rendahnya kapasitas pengelolaan.</li> <li>• Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi.</li> <li>• Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.</li> </ul>
Produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas SDM dengan sebagian besar tenaga kerja didominasi lulusan SMP ke bawah.</li> <li>• Ketidaksesuaian keahlian (<i>mismatch</i>)</li> <li>• Informasi pasar tenaga kerja belum optimal</li> <li>• Pasar tenaga kerja belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja.</li> </ul>
Infrastruktur dan literasi digital rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan infrastruktur TIK masih rendah</li> <li>• Pembangunan infrastruktur TIK menghadapi kendala kesulitan geografis di beberapa daerah.</li> <li>• Rendahnya adopsi teknologi, penerapan teknologi untuk hal tidak produktif, konten lokal yang belum memadai, dan daya beli rendah terhadap perangkat telekomunikasi maupun internet.</li> <li>• Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi belum memadai</li> <li>• Produk digital Indonesia menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri.</li> </ul>
Pembangunan belum berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan energi fosil yang masih tinggi</li> <li>• Akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah</li> </ul>

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya penggunaan energi terbarukan</li> <li>• Rendahnya efisiensi energi</li> <li>• Pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>• Pemanfaatan SDA yang cenderung merusak ekosistem</li> <li>• Sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau masih lemah</li> </ul>
Integrasi domestik terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa</li> <li>• Biaya logistik tinggi karena infrastruktur konektivitas belum memadai dan terintegrasi.</li> <li>• Banyak regulasi yang menghambat</li> <li>• Kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.</li> <li>• Terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya.</li> <li>• Ketimpangan pembangunan masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan.</li> <li>• Kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas</li> <li>• Kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun</li> </ul>
Tantangan tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoalan kesehatan berupa meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk masalah kesehatan penduduk usia lanjut dan kesehatan jiwa karena transisi demografi yang diiringi meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat.</li> <li>• Persoalan pendidikan berupa sarpras pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan, pendidikan non-formal yang berkualitas belum memadai, produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global masih rendah, kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah yang berdampak pada keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja.</li> <li>• Tantangan jaminan sosial berupa belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan terutama untuk pekerja informal, tingkat kepatuhan pembayaran iuran rendah.</li> <li>• Tantangan bantuan sosial berupa pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan</li> </ul>

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	<p>ekonomi, bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non-alam serta perubahan iklim, dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan.</p>
<p>Tata kelola pemerintahan belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah.</li> <li>• Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.</li> <li>• Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.</li> <li>• Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D</li> <li>• ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik</li> <li>• Belum meratanya kualitas pelayanan publik</li> <li>• Transformasi digital pemerintahan dihadapkan oleh tantangan mendasar</li> </ul>
<p>Kepastian dan penegakan hukum masih lemah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan aset tindak pidana masih lemah</li> <li>• Potensi pelanggaran HAM masih tinggi</li> <li>• Pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah</li> <li>• Budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah.</li> </ul>
<p>Demokrasi belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan terkait integritas partai politik</li> <li>• Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</li> <li>• Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</li> <li>• Demokrasi terbatas pada hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.</li> </ul>
<p>Tantangan stabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</li> <li>• Meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan</li> <li>• Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan.</li> </ul>
<p>Tantangan ketahanan sosial budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan.</li> <li>• Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global.</li> <li>• Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.</li> <li>• Kebebasan beragama belum disertai kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat dan</li> </ul>

Isu dan Tantangan	Penjelasan
	berorientasi kemaslahatan. <ul style="list-style-type: none"><li>• Penghormatan terhadap keragaman agama dan kebudayaan masih lemah.</li><li>• Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia belum optimal.</li></ul>
Tantangan ketahanan ekologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.</li><li>• Kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem peringatan dini dan penanganan pasca bencana.</li><li>• Pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal.</li><li>• Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi dan air di berbagai wilayah.</li></ul>
Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih kurangnya ketersediaan SDM berkualitas dan penyebarannya belum merata.</li><li>• Belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia.</li><li>• Masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.</li></ul>

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045, diolah

Isu-isu jangka panjang nasional tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan untuk mewujudkan transformasi dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Persoalan membentang dari aspek ekonomi, kualitas SDM hingga persoalan fondasi berupa tata kelola pemerintahan dan pembangunan hukum. Terdapat pula isu besar yang telah lama menjadi perhatian tetapi masih menjadi persoalan, yaitu pembangunan belum berkelanjutan dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.

Sedikit berbeda dengan isu jangka panjang yang mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan mendesak dan mempengaruhi masa depan Indonesia, identifikasi isu jangka menengah memberikan rumusan tantangan sekaligus peluang. Isu jangka menengah yang dirumuskan di dalam dokumen Rantek RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia: hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar;

- *aging population* negara maju: usia produktif negara maju menurun, dan potensi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.
- tantangan transisi energi, tetapi ada peluang untuk pemerataan: perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan;
- penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global: produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global;
- sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral: sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Peluang yang diidentifikasi dari isu strategis jangka menengah yaitu hilirisasi yang telah memberikan dampak positif bagi nilai tambah perekonomian, pemerataan transisi energi di luar Jawa, serta peluang untuk menyediakan pariwisata kesehatan bagi lansia dengan adanya *aging population* di negara maju. Meskipun demikian, juga terdapat tantangan yang perlu direspon secara tepat berupa tantangan transisi energi, penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global sehingga produk Indonesia harus ramah lingkungan, dan aspek tata kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan berupa sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.

#### **2.6.2.3 Isu Strategis Provinsi Kalimantan Timur**

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut:

##### **a. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM**

Isu strategis dalam peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi rencana pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi. Kualitas SDM menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Akses merata terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu kunci untuk mengatasi kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan

kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja. Masih minimnya keselarasan antara keahlian dan kompetensi SDM sesuai dengan pengembangan sektor ekonomi masa depan akan memperbesar potensi ketidaksiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan pasar kerja.

Perubahan struktur ekonomi dalam proses diversifikasi dan transformasi ekonomi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat terdampak, misalnya hilangnya pekerjaan dan usaha yang berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha baru. Isu ini memerlukan mitigasi komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai kebutuhan dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan data dan analisis untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas SDM yang tepat sasaran. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Kalimantan Timur dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun global, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

#### **b. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan**

Isu strategis pengentasan kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian utama. Ketergantungan ekonomi pada sektor industri ekstraktif cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum semua masyarakat di Kalimantan Timur dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan tersebut. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang belum merata memperburuk kondisi sosial-ekonomi, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi, yang semakin memperlebar jurang kesejahteraan. Bertambahnya jumlah penduduk yang di iringi dengan semakin tingginya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, mengakibatkan tantangan terhadap perlindungan sosial masyarakat untuk pengurangan kemiskinan menjadi semakin besar.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh serta komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di Kalimantan Timur. Perlindungan sosial adaptif perlu dirancang untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan sosial, program jaminan kesehatan, program jaminan ketenagakerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan kerja bagi, serta penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, pembangunan di Kalimantan Timur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan antarwilayah secara merata.

**c. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif**

Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur terhadap sumberdaya tidak terbarukan masih tinggi dimana kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kalimantan Timur pada periode Tahun 2013-2024 selalu mendominasi pada kisaran 40-57 persen. Keberlanjutan dan resiliensi ekonomi Kalimantan Timur ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah terutama untuk mengatasi dampak kebijakan transisi energi yang telah disepakati secara internasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global, serta dapat mempengaruhi tingkat inklusifitas dan keberlanjutan pembangunan. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dapat terjadi akibat lambatnya transformasi ekonomi.

Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi di Kalimantan Timur antara lain adalah karena belum optimalnya diversifikasi ekonomi baik secara horisontal maupun vertikal, masih rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara, serta belum berfungsi optimalnya kawasan-kawasan industri. Pelaksanaan transformasi ekonomi diyakini akan membangun resiliensi ekonomi daerah untuk menghadapi tantangan eksternal, seperti krisis ekonomi

global dan/atau bencana, serta meningkatkan inklusifitas pembangunan. Peran Kalimantan Timur ke depan sebagai *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN diyakini akan mengakselerasi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

**d. Pemerataan Pembangunan Wilayah**

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah pemerataan pembangunan wilayah. Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni mencakup disparitas ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fenomena ini memperlihatkan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan yang tinggi akan menyebabkan sebagian wilayah menjadi semakin tertinggal dan kesulitan mengakses peluang pembangunan. Pemerataan pembangunan wilayah secara terfokus dan proporsional sangat dibutuhkan agar inklusifitas pembangunan dapat terwujud. Pemerataan distribusi investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah di Kalimantan Timur. Belum optimalnya kebijakan pembangunan wilayah yang didasarkan pada analisa karakteristik, potensi, serta keunggulan komparatif dan kompetitif suatu wilayah menjadi salah satu hal strategis yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadirnya IKN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

**e. Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi**

Isu strategis yang juga masih memerlukan perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruktur yang belum merata dapat menciptakan kesenjangan antarwilayah, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, tidak terintegrasinya sistem konektivitas dapat mengurangi efisiensi dalam pergerakan orang dan barang, membatasi pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.

Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Kalimantan Timur pada umumnya masih menghadapi masalah dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar. Hal ini perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah tersebut mendapatkan hak kehidupan yang layak, untuk selanjutnya masyarakat tersebut mampu menjadi penopang pembangunan daerahnya. Di sisi lain, persoalan konektivitas antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi publik yang terintegrasi, baik transportasi darat, sungai, laut dan udara yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di era digitalisasi masa kini juga dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan mengakselerasi pertukaran informasi, memfasilitasi bisnis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap perkembangan informasi dan kemudahan layanan publik.

**f. Peluang Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN**

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalimantan Timur kedepan adalah peluang dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rincian Rencana Induk Ibukota Nusantara. Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh IKN menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan *Superhub* Ekonomi IKN memiliki konsep pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan aglomerasi serta pengembangan konsep *tri-city* Balikpapan-Samarinda-IKN yang didukung rantai pasok dari daerah-daerah Mitra IKN. Kedepannya, *Superhub* Ekonomi IKN diproyeksikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Kalimantan Timur.

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan perolehan manfaat dari pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN, sekaligus meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin muncul. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah aspek peningkatan kapasitas SDM sesuai kualifikasi pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industri-industri yang dikembangkan sesuai klaster *Superhub*

Ekonomi IKN, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari Pembangunan *Superhub* Ekonomi dan Mitra IKN adalah pemerataan pembangunan antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat dikendalikan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan dan berkelanjutan.

**g. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK**

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur adalah kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakan oleh sektor ekonomi berbasis lahan, resiko penurunan kualitas lingkungan hidup akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari paru-paru dunia, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menjadi prioritas dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan, dan kegiatan produksi yang berisiko meningkatkan emisi GRK. Transisi menuju energi bersih, perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut, dan penerapan perkebunan dan produksi pangan berkelanjutan merupakan langkah kunci mencapai *net zero emissions* yang ditargetkan terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan daerah akan sangat mempengaruhi pola tekanan terhadap lingkungan hidup. Kehadiran IKN diyakini akan menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang juga akan meningkatkan resiko penurunan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, konsepsi transformasi ekonomi yang berfokus pada pengembangan kawasan- kawasan industri juga perlu diiringi dengan kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah masifnya polusi udara, kerusakan ekosistem, serta penurunan kualitas air. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup. Isu mengenai kualitas lingkungan hidup dan emisi

GRK tidak hanya berfokus pada pelestarian alam saja, namun juga mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan pembangunan wilayah.

#### **h. Kemandirian Pangan**

Isu strategis yang krusial perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah terkait dengan kemandirian pangan. Sebagai daerah yang terdampak langsung dari pembangunan IKN, kebutuhan pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu, permasalahan terkait kemandirian pangan yang dihadapi adalah akses distribusi pangan yang belum memadai karena kondisi geografis yang luas dan infrastruktur pendukung pertanian yang belum merata, masih kurangnya jumlah petani muda terampil yang mampu menerapkan konsep pertanian modern, perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan kondisi tanah yang berdampak pada produktivitas pertanian, serta distribusi, integrasi dan pengelolaan sumberdaya air untuk irigasi yang masih perlu diperbaiki. Keseluruhan isu tersebut memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi dan komprehensif, agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan

#### **i. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan tata pemerintahan yang profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor pemerintahan. Hingga saat ini, masih terdapat disparitas dalam kemampuan teknis, manajerial, dan penggunaan teknologi di berbagai instansi pemerintahan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pekerja keras, dinamis, *agile*, terampil, dan

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar mampu bersaing dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tingginya harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi memerlukan penguatan sistem pengawasan internal, penerapan *e-governance* secara menyeluruh, serta integrasi sistem informasi di seluruh perangkat daerah. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan publik juga penting untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan evaluasi berkelanjutan, Kalimantan Timur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berdaya saing global.

#### **2.6.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Kota Balikpapan**

Penelaahan terhadap isu strategis jangka panjang yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan isu strategis jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Upaya ini dilakukan guna menjaga keselarasan antara kebijakan jangka panjang dengan kebijakan jangka menengah di Kota Balikpapan. Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu nasional, isu kewilayahan, isu regional, hasil evaluasi RPJPD, FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan observasi lapangan, serta penelaahan KLHS RPJPD. Berikut merupakan isu strategis jangka panjang Kota Balikpapan periode 2025-2045.

##### **a. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**

Persoalan tenaga kerja masih menjadi tugas yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Angka pengangguran Kota Balikpapan tergolong tinggi, baik dibandingkan dengan nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,09 persen pada tahun 2023. Selain persoalan pengangguran, ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh rasio gini di Kota Balikpapan juga menunjukkan tren yang semakin naik mencapai 0,323 pada tahun 2023. Tingginya pengangguran dan

naiknya ketimpangan mengindikasikan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi mencapai 49,21 persen per tahun pada periode 2010-2023. Industri pengolahan di Kota Balikpapan digerakkan oleh sejumlah industri besar dengan karakteristik industri padat modal dengan penerapan teknologi tinggi sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan cenderung lebih sedikit dengan kompetensi yang tinggi dibandingkan dengan industri padat karya. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kota Balikpapan masih berfokus pada pertumbuhan yang tinggi tetapi belum dapat menjamin ketersediaan akses lapangan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat dan manfaatnya baru dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Keberadaan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga IKN juga menjadi salah satu urgensi pentingnya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat memengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan karena adanya potensi penambahan jumlah penduduk dan wisatawan yang dapat memengaruhi permintaan komoditas barang dan jasa yang harus disediakan oleh Kota Balikpapan. Naiknya permintaan barang dan jasa dapat mendorong kenaikan produksi. Apabila aktivitasnya tidak dikendalikan secara tepat, dapat memberikan eksternalitas negatif, baik terhadap kehidupan sosial maupun kualitas lingkungan.

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan ke depannya perlu diarahkan pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan pada upaya mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan melalui perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pada upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Secara lebih spesifik, konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini dikembangkan melalui penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ekonomi hijau menekankan pada pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sedangkan ekonomi biru menekankan pada optimalisasi potensi ekonomi di kawasan pesisir atau potensi sumber daya

laut, dan ekonomi sirkular menekankan pada penerapan siklus hidup produk, bahan baku, dan sumber daya yang dapat digunakan selama mungkin. Ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

**b. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kota Balikpapan sudah relatif berada pada posisi yang baik. Namun demikian, meskipun capaian IPM Kota Balikpapan cukup tinggi, masih terdapat kendala pada pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Balikpapan sebesar 10,92 atau setara kelas 1 SMA. Capaian tersebut belum memenuhi wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 12 tahun atau setara kelas 3 SMA. Selain itu, dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan tren fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum semua penduduk di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan menengah dan atas.

Pada aspek kesehatan, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tren yang meningkat, dan secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, AHH Kota Balikpapan 75,64 dan Provinsi Kalimantan Timur 74,72. Meskipun adanya peningkatan pada capaian AHH, upaya peningkatan pelayanan kesehatan masih perlu dioptimalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut: angka kematian ibu yakni 39,59 per 100.000 kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting 19,6 persen (2022), cakupan pengobatan TBC 69 persen (2022), prevalensi kusta 0,2 per 1.000 penduduk (2022), jumlah kasus HIV 338 (2022), (sumber: profil kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022). Sedangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Kota Balikpapan tahun 2022 sudah 100 persen. Capaian tersebut perlu dipertahankan untuk memastikan seluruh masyarakat Kota Balikpapan tercover dalam pelayanan kesehatan yang memadai.

Secara umum, upaya perlindungan sosial di Kota Balikpapan diwujudkan melalui program penurunan kemiskinan dan perlindungan

terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih terkendala pada beberapa hal antara lain terbatasnya tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, Pekerja Sosial, dan lain-lain), belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial yang representatif untuk proses pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial, dan belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan perlindungan sosial (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Selain itu, cakupan program perlindungan sosial lebih banyak bantuan sosial yang bersifat karikatif daripada bersifat pemberdayaan dan jaminan sosial (asuransi sosial).

**c. Reformasi Birokrasi Berdampak dan Tata Kelola Kolaboratif**

Perwujudan good governance sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi memerlukan penguatan dalam sistem dan tatanan birokrasi yang lebih berdampak. Penguatan ini lebih menekankan kepada akuntabilitas sosial dan tidak hanya akuntabilitas kinerja. Capaian bidang tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan hingga tahun 2022 relatif meningkat. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 68,91; Indeks Profesionalisme ASN mencapai 93,07; Nilai AKIP mencapai 69,5 atau predikat B; dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,24. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang telah terpenuhi.

Terlepas dari capaian sektoral yang baik, kinerja bidang tata kelola Kota Balikpapan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks Gini Kota Balikpapan yang masih terus meningkat. Upaya reformasi birokrasi Kota Balikpapan belum cukup optimal untuk menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan yang semakin melebar. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat Kota Balikpapan cukup tinggi, isu pengangguran di tengah dinamika ekonomi dan kemiskinan juga menjadi masalah periodik yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Penyandingan kondisi-kondisi ini mengindikasikan bahwa pelayanan pemerintah Kota Balikpapan perlu diarahkan, tidak lagi pada pemenuhan target internal saja, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan yang bertumpu pada luaran/outcome.

Tata kelola kolaboratif juga turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang. Upaya kolaborasi pemerintah perlu

dipertegas mengingat banyaknya pemangku kepentingan/stakeholders yang terlibat dalam mengejar misi pembangunan Kota Balikpapan. Salah satu misi yang mendapatkan atensi cukup tinggi adalah pengusungan Kota Balikpapan sebagai superhub atau mitra IKN. Kerjasama dan sinergi antar pihak terkait sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok sebagai kawasan transit dan penunjang ibukota, yang juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian sekitar. Selain itu, inisiasi untuk mempromosikan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibition) juga memerlukan peningkatan kapasitas di seluruh lapisan, baik masyarakat, pengusaha, maupun pekerja. Dengan demikian, pendekatan tata kelola yang kolaboratif menjadi agenda penting dalam setiap tahapan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan

**d. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana**

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah krusial yang menopang pembangunan daerah berkelanjutan. Berbagai aspek pendukung kualitas lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup masih terkendala dalam beberapa sektor. Berbagai keterbatasan dalam proses pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumberdaya air, sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat masih menjadi persoalan sehingga berdampak juga terhadap ketahanan daerah menghadapi bencana.

Fokus penyelenggaraan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global. Mandat tersebut dieksplisitkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13 dan ke-15 fokus pada upaya menghadirkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, melindungi dan memulihkan ekosistem secara berkelanjutan. Selain itu, kepentingan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup juga menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif dan bukan hanya secara parsial. Untuk itu diperlukan integrasi perencanaan pola dan struktur ruang perkotaan dan pengelolaan

sumberdaya alam dari hulu ke hilir melalui pendekatan kolaboratif. Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

**e. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota**

Kualitas infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota adalah faktor penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan diharapkan dapat memberikan dampak pada kualitas hidup penduduk menjadi lebih baik. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang baik dan wilayah dengan utilitas yang tertata, tentu membutuhkan perencanaan jangka panjang yang cermat dan diimplementasikan secara bertahap. Kualitas infrastruktur yang baik dan utilitas kota yang tertata, diharapkan menjadikan Kota Balikpapan dapat menjadi tempat yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan untuk tinggal dan berkembang bagi masyarakatnya.

**f. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni**

Mewujudkan kota cerdas yang nyaman huni harus didukung dengan konsep kota berkelanjutan atau *sustainable city*. Hal tersebut penting untuk mempertahankan kualitas hidup warga Kota Balikpapan saat ini dan masa depan. Kota yang menerapkan *sustainable city* dalam penyelenggaraan tata kelola kotanya akan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan harapan generasi penerus dapat merasakan kota yang nyaman huni. Dalam perencanaan tata kelola kota, konsep yang digunakan juga akan mengacu pada kelestarian alam, termasuk pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif baik dalam menjaga lingkungan. Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kota yang nyaman huni perlu diperkuat dengan menjaga kualitas hidup dan kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebagai enabler agar tetap aman dan efektif digunakan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Kota Balikpapan dengan konsep kota cerdas yang nyaman huni perlu melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang kontekstual sesuai dengan karakteristik Kota Balikpapan. Kota Balikpapan sebagai mitra Ibu Kota Negara akan memiliki peran strategis yang berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan komitmen kuat dari pemerintah, stakeholder

terkait dan masyarakat Kota Balikpapan untuk bersama-sama mewujudkan konsep kota cerdas dan nyaman huni.

**g. Maju sebagai Mitra IKN**

Kota Balikpapan sebagai mitra IKN yang menjadi bagian dari superhub ekonomi memiliki peran strategis dalam peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi Ibu Kota Nusantara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi “otot” atau pusat aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran Superhub Ibu Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional.

Kesiapan Kota Balikpapan yang menjadi beranda IKN sekaligus kawasan penyangga IKN menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur berupa penyediaan fasilitas dalam hal permukiman, transportasi, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya fungsi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Pemerintah Pusat supaya persiapan dapat berjalan optimal melalui dukungan pendanaan dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, pengendalian banjir, penataan pergerakan transportasi, penyelenggaraan pendidikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara

**2.6.2.5 Telaah RTRW Kota Balikpapan**

Posisi strategis Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara mendorong adanya kebijakan pengembangan kawasan yang lebih khusus melalui revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Dalam revisi RTRW Kota Balikpapan telah memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis yang menghasilkan sembilan isu strategis prioritas yaitu pertumbuhan dan migrasi penduduk, rawan banjir, keterbatasan sumber dan penurunan kualitas air bersih, degradasi dan pencemaran wilayah pesisir, pengelolaan sampah yang belum optimal, alih fungsi dan konflik lahan, potensi terjadinya bencana alam berupa ancaman longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta keterancamannya biodiversitas.

Dalam revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, tujuan penataan ruang diarahkan untuk **mewujudkan daerah sebagai kota industri dan jasa yang nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan, dan berketahanan bencana guna mendukung fungsinya sebagai pusat pertumbuhan nasional dan bagian dari *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara**. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. penguatan struktur ruang dalam rangka menunjang fungsi Kota Balikpapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
- c. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan, dan
- d. peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata dan ramah lingkungan, terpadu, dan modern.

Adapun kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a. perwujudan kelestarian kawasan lindung;
- b. peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, dan
- c. pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) meliputi:

- a. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan
- c. pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Revisi RTRW juga merespon peluang investasi yang mendukung potensi pengembangan perekonomian di Kota Balikpapan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan telah direvisi untuk merespon Ibu Kota Nusantara. Hal tersebut memberikan konsekuensi pada perubahan pola ruang, Dalam pola ruang kawasan lindung terdapat usulan perubahan, antara lain:

- 1) Perubahan Badan Air menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa di wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Selatan dan wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Kota, serta usulan perubahan

Badan Air menjadi Kawasan Transportasi di wilayah pesisir Kecamatan Balikpapan Selatan.

- 2) Kawasan Ekosistem Mangrove terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yaitu kawasan Ekosistem Mangrove menjadi Badan Air di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.
- 3) Kawasan Holtikultura terdapat rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain yang ditetapkan ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yaitu Kawasan Holtikultura menjadi Badan Air di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Utara.

#### **2.6.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Balikpapan**

Kota Balikpapan apabila dilihat dari kewenangan sesuai dengan target dan indikator TPB sesuai Perpres 59/2017 yaitu 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis, terdapat 195 indikator TPB yang relevan bagi Kota Balikpapan. Terdapat 56,92 persen dari 195 indikator TPB di Kota Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota Balikpapan sebesar 17,59 persen dan 1,03 persen untuk TPB yang belum dilaksanakan serta 24,10 persen untuk TPB yang tidak ada data.

Analisis terhadap 7 TPB Strategis dan mempertimbangkan gap capaian indikator, telaahan dokumen, isu muatan lingkungan hidup, serta hasil masukan dari Konsultasi Publik maka diperoleh daftar isu pendek PB di Kota Balikpapan yaitu :

- 1) Ketersediaan air baku;
- 2) Pengendalian emisi GRK;
- 3) Dampak bangkitan pembangunan IKN ;
- 4) Optimalisasi pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah;
- 5) Degradasi kawasan pesisir dan laut;
- 6) Keterbatasan dan kerusakan lahan;
- 7) Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan.

#### **2.6.2.7 Penetapan Isu Strategis Kota Balikpapan**

Dari permasalahan pembangunan daerah baik yang bersifat multisektor maupun sektoral menjadi bahan lebih lanjut dalam perumusan isu strategis daerah melalui pertimbangan urgensi (*urgency*),

kegentingan (*seriousness*), dan pertumbuhan (*growth*). Isu strategis dapat berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, capaian kinerja pemerintah, laporan KLHS RPJMD 2025-2029, maupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Secara teknis, perumusan isu strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berikut di antaranya: potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS RPJMD, serta isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan penjelasan masing-masing isu strategis jangka menengah daerah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang.

**Tabel 2. 61 Perumusan Isu Strategis Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan kualitas SDM mengalami tren peningkatan	Belum meratanya kualiatas dan daya saing SDM		Demografi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	<b>Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial</b>
	Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif		Urbanisasi dunia	Pergeseran struktur kelas masyarakat		
Kontribusi sektor pengolahan lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 55,97 persen per tahun	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Kecukupan, keamanan, dan pemanfaatan pangan	Perkembangan Teknologi	Rendahnya produktivitas	Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan	<b>Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan</b>
Indeks Ketahanan Pangan Kota Balikpapan meningkat				Persaingan Sumber Daya Alam	Geopolitik dan geoekonomi	
			Konstelasi Perdagangan Global			
			Geopolitik dan Geoekonomi			

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
Konektivitas Kota Balikpapan mengalami kenaikan	Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah		Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan merata	Rendahnya produktivitas	Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	<b>Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota</b>
	Belum optimalnya implementasi ketahanan energi, air	Keterbatasan ketersediaan dan kualitas air bersih Kurang optimalnya pengelolaan sanitasi, limbah, dan sampah				<b>Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>
Cakupan layanan digital di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan		Dampak bangkitan pembangunan IKN				Peluang pembangunan superhub Ekonomi dan Mitra IKN
IKLH Kota Balikpapan sebesar 68,4 termasuk dalam kategori Sedang	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Degradasi kawasan pesisir dan laut	Persaingan Sumber Daya Alam	Krisis lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	<b>Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana</b>
		Keterbatasan dan kerusakan lahan		Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		

Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu KLHS RPJMD 2025-2029	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				(Isu RPJMN)	(Isu RPJMD Provinsi)	
		Buruknya kualitas udara dan pengendalian emisi GRK				
Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam implementasi reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi daerah belum optimal secara menyeluruh		Tata Kelola Keuangan Global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif</b>
Penerapan sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis IT						

**a. Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**

Sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan sebesar 46,70 persen per tahun pada periode 2020-2024. Meskipun sektor ini berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya belum merata dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri sebesar 26,32 persen, sementara sektor jasa mampu menyerap 70,66 persen tenaga kerja pada tahun 2024.

Agar perekonomian Kota Balikpapan dapat tumbuh secara kuat, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan sektor ekonomi berbasis jasa serta industri kreatif yang memanfaatkan potensi daerah. Ekonomi kreatif memiliki peranan penting dalam mendorong lahirnya wirausaha baru. Sektor ini tidak terbatas pada bidang tertentu, melainkan mencakup berbagai jenis usaha yang mengedepankan kreativitas dan inovasi tanpa batas. Dengan mengoptimalkan ide dan kreativitas, masyarakat dapat menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi tanpa bergantung pada sumber daya yang terbatas dan sulit diakses.

Ekonomi kreatif dapat diterapkan dalam berbagai sektor usaha di tingkat daerah. Misalnya, industri kriya, kuliner, dan fashion yang menghasilkan produk konsumsi melalui pelaku industri kecil dan menengah (IKM) maupun industri besar. Selain barang, sektor ini juga mencakup layanan seperti periklanan, arsitektur, desain, film, video, fotografi, serta musik, yang dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar. Potensi ekonomi kreatif di Kota Balikpapan sangat besar, mengingat sektor jasa di kota ini tumbuh pesat dengan kenaikan 8,08 persen pada tahun 2024. Selain itu, jumlah pelaku ekonomi kreatif juga mengalami pertumbuhan positif, meningkat sebesar 33,53 persen pada tahun yang sama. Sektor ini dinilai mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja karena tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selain inklusivitas, pembangunan ekonomi daerah juga harus berorientasi pada keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan dan ekosistem. Berbagai konsep ekonomi berkelanjutan telah berkembang, seperti ekonomi hijau,

ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ekonomi hijau mengutamakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi biru memaksimalkan potensi ekonomi berbasis sumber daya laut dan pesisir. Sementara itu, ekonomi sirkular berfokus pada pemanfaatan kembali bahan baku dan sumber daya agar tetap bernilai dalam siklus produksi selama mungkin.

**b. Penguatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan Sosial**

Isu strategis terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing serta perlindungan sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan SDM berkualitas dan sistem perlindungan sosial yang memadai. Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas SDM suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Balikpapan menunjukkan tren peningkatan dalam IPM, dengan kenaikan sebesar 2,22 poin dalam periode 2018-2023. Pada tahun 2023, IPM Kota Balikpapan mencapai 82,03, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang berada di angka 78,2. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Balikpapan. Namun, meskipun hasilnya positif, upaya untuk memperkuat daya saing SDM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang belum sepenuhnya optimal.

Pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Balikpapan mencapai 10,92 tahun atau setara dengan tingkat kelas 1 SMA. Angka ini masih belum memenuhi standar wajib belajar 13 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di jenjang pendidikan menengah pertama dan atas masih berfluktuasi serta belum mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kota Balikpapan yang belum mendapatkan akses ke pendidikan menengah dan atas. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam layanan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas serta mendorong partisipasi pendidikan di semua jenjang.

Di bidang kesehatan, beberapa indikator masih perlu dioptimalkan. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 19,6 persen, angka kematian ibu (AKI) mencapai 39,59 per 100.000 kelahiran hidup, cakupan pengobatan tuberkulosis (TBC) berada di angka 69 persen, prevalensi

kusta sebesar 0,2 per 1.000 penduduk, serta terdapat 338 kasus HIV. Namun, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Balikpapan telah mencapai 100 persen pada tahun 2022. Keberhasilan ini perlu dijaga agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Ke depan, pengembangan sektor kesehatan harus mencakup penguatan sistem layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi pembiayaan kesehatan, penguatan ketahanan kesehatan, pemanfaatan teknologi medis, serta perbaikan tata kelola sistem kesehatan.

Dalam aspek perlindungan sosial, Kota Balikpapan berupaya melindungi kelompok rentan dan menekan angka kemiskinan melalui berbagai program sosial. Namun, upaya ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, pekerja sosial, dan lainnya), belum tersedianya fasilitas rehabilitasi sosial yang memadai bagi individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami disfungsi sosial, serta cakupan bantuan sosial yang masih belum mencukupi. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan perlindungan sosial belum optimal. Saat ini, program perlindungan sosial lebih banyak berfokus pada bantuan sosial yang bersifat karitatif dibandingkan dengan pendekatan berbasis pemberdayaan dan jaminan sosial seperti asuransi sosial.

**c. Pengendalian, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana**

Perubahan iklim, degradasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta pencemaran dan limbah merupakan tiga isu utama yang dihadapi secara global. Salah satu faktor pemicunya adalah pertumbuhan populasi yang menyebabkan peningkatan aktivitas manusia dan berpotensi memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Fenomena seperti alih fungsi lahan, ketidaksesuaian tata ruang, serta peningkatan volume limbah muncul sebagai konsekuensi dari semakin beragamnya kegiatan manusia.

Lingkungan hidup menjadi salah satu aspek krusial dalam pemerintahan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk di Kota Balikpapan. Sejumlah langkah untuk menjaga kualitas lingkungan telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam beberapa sektor. Tantangan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya air, keterbatasan infrastruktur, serta

kapasitas masyarakat menjadi persoalan yang turut mempengaruhi ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Fokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan bagian penting dari agenda global. Hal ini tercermin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan ke-11, ke-13, dan ke-15 yang menitikberatkan pada pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem. Selain menjadi perhatian di tingkat global, upaya pelestarian lingkungan juga menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur sekaligus daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan mengalami peningkatan aktivitas pembangunan yang signifikan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, perlu adanya pengawasan terhadap aspek lingkungan agar ekosistem tetap terjaga. Salah satu langkah penting adalah memastikan pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, indeks kualitas tutupan lahannya justru mengalami penurunan. Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang harus menjadi perhatian utama guna menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, meningkatnya keberagaman aktivitas di Kota Balikpapan turut berdampak pada peningkatan volume sampah setiap harinya. Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah memperburuk kompleksitas permasalahan ini. Kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, seperti jalan, selokan, sungai, atau lahan terbuka, serta praktik pembakaran sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Balikpapan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap permasalahan persampahan sangat diperlukan. Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi langkah penting guna memastikan sampah dapat ditangani dengan baik, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Ketahanan terhadap bencana juga menjadi isu yang membutuhkan pendekatan holistik, bukan sekadar tindakan parsial. Keamanan dan

ketahanan Kota Balikpapan dalam menghadapi bencana merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan kota, bertujuan untuk melindungi masyarakat serta infrastruktur dari berbagai ancaman bencana. Perencanaan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana harus diterapkan secara optimal, termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem drainase yang efektif guna mengurangi risiko banjir. Namun, masih terdapat tantangan dalam ketersediaan dan kualitas sarana penyelamatan, baik untuk kebakaran maupun bencana non-kebakaran.

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan integrasi antara perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan kolaboratif. Perencanaan kontingensi yang komprehensif harus mencakup berbagai skenario bencana, didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam pemantauan, analisis data, serta sistem komunikasi. Upaya konservasi lingkungan, seperti pengelolaan ekosistem mangrove, dapat berperan dalam mengurangi risiko bencana alam. Selain itu, pelestarian ekosistem alami juga dapat berfungsi sebagai benteng alami terhadap bencana seperti banjir dan erosi. Kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta memperkuat keselamatan masyarakat, guna mewujudkan Kota Balikpapan yang lebih kondusif dan tangguh terhadap berbagai tantangan lingkungan.

#### **d. Infrastruktur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Kota**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, integrasi infrastruktur dan penataan utilitas kota berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang berkualitas serta utilitas yang tertata dengan baik memerlukan perencanaan yang berkesinambungan dan implementasi bertahap dalam periode lima tahunan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai dan utilitas yang tertata, Kota Balikpapan diharapkan dapat menjadi kota yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi warganya. Pencapaian ini dapat diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI) Kota Balikpapan.

Berdasarkan survei IKLI Kota Balikpapan dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, jaringan air bersih, irigasi, dan perumahan, terjadi dinamika dalam tingkat kepuasan masyarakat. Pada tahun 2019, IKLI

tercatat sebesar 77,75, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi 82,03. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 77,99. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, tren IKLI Kota Balikpapan masih menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu tantangan dalam pengembangan infrastruktur terpadu di Kota Balikpapan adalah kualitas infrastruktur jalan. Pada tahun 2023, persentase kemantapan jalan tercatat sebesar 92,16%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 96,28%. Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengendalian banjir, pengelolaan saluran irigasi, dan penyediaan sumber air baku yang belum optimal. Upaya pengendalian banjir dan pengelolaan drainase di Kota Balikpapan selama ini mengacu pada Masterplan Drainase, yang mencakup perencanaan dimensi saluran serta pembangunan bendungan pengendali (bendali) di beberapa titik strategis. Namun, cakupan penyediaan sumber air baku masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengembangannya.

**e. Peningkatan Kota Cerdas dan Nyaman Huni**

Isu strategis dalam peningkatan kota cerdas dan nyaman huni kota Balikpapan mencerminkan berbagai tantangan dan peluang dalam pembangunan kota yang modern, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kota Balikpapan mengusung konsep sebagai kota layak huni (*liveable city*), yang pada dasarnya mencerminkan prinsip kota berkelanjutan (*sustainable city*) dengan tujuan utama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan konsep kota berkelanjutan menjadi dasar utama dalam menciptakan kota cerdas (*smart city*) yang nyaman untuk dihuni. Pengembangan infrastruktur berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti transportasi, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital dalam pelayanan publik, termasuk *e-government*, *smart traffic management*, dan pemantauan lingkungan. Penyediaan akses internet yang luas dan berkualitas untuk mendukung ekonomi digital serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota.

Pengembangan Kota Balikpapan sebagai kota cerdas telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja digitalisasi, di mana Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus mengalami peningkatan dan mencapai kategori sangat baik dengan skor 3,75 pada tahun 2023. Namun, tingkat kenyamanan hunian di kota yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih menghadapi tantangan, dengan kinerja yang fluktuatif dan kecenderungan menurun pada tahun 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tindak lanjut pengaduan masyarakat yang belum optimal. Selain itu, kompleksitas dan keberagaman sosial di Kota Balikpapan yang tinggi turut berkontribusi pada meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah kota.

Sebagai kota yang terus berkembang, Balikpapan perlu memaksimalkan penyediaan infrastruktur, mengelola pemanfaatan ruang secara terkendali, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan yang memungkinkan generasi mendatang untuk tetap menikmati lingkungan sehat dan nyaman. Perencanaan kota juga harus memperhatikan kelestarian ekosistem, termasuk penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang tepat guna berperan sebagai alat pendukung dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan kota.

Dalam perencanaan pembangunan Kota Balikpapan, pemerintah perlu beradaptasi dengan dinamika yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan warga secara lebih efektif. Pengembangan kota cerdas dan layak huni harus melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan masyarakat serta mempertimbangkan pembangunan berbasis kawasan yang selaras dengan karakteristik kota.

**f. Tata Kelola Kolaboratif dan Inovatif**

Tata kelola yang kolaboratif dan inovatif menjadi salah satu isu strategis utama bagi Kota Balikpapan dalam lima tahun ke depan. Percepatan pembangunan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas internasional, media, serta perguruan tinggi. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk

menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti arus migrasi, peran Balikpapan sebagai mitra IKN, perubahan iklim, serta isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Selain dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal, sinergi juga perlu diperkuat dalam birokrasi pemerintahan, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Tantangan utama saat ini adalah memperkuat pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, kerja sama antarperangkat daerah, khususnya di bidang perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan koordinasi kebijakan, perlu ditingkatkan untuk memperkuat efektivitas organisasi serta menghubungkan capaian kinerja organisasi dengan kontribusi individu. Selain itu, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal krusial, terutama dalam kebijakan promosi dan mutasi ASN yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem akuntabilitas daerah.

Selain aspek kolaborasi, inovasi dalam tata kelola juga menjadi elemen kunci, khususnya dalam pelayanan publik. Layanan publik di Kota Balikpapan telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. Penguatan ekosistem inovasi, mulai dari kebijakan, kelembagaan, kemitraan, budaya inovatif, hingga keterpaduan antar-inovasi, menjadi faktor penting dalam mewujudkan layanan publik yang lebih responsif dan efisien.

Untuk mendukung peningkatan kolaborasi dan inovasi dalam pelayanan publik, pengembangan smart governance juga perlu dioptimalkan. Hal ini mencakup perbaikan proses bisnis, peningkatan kapasitas serta integritas ASN, yang pada akhirnya dapat mendorong implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kota Balikpapan. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola internal pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

**g. Maju sebagai Mitra IKN**

Pembangunan serta penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan konektivitas

antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi kota. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat daya saing daerah dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan juga perlu memperkuat sinergi pembangunan dengan IKN guna mendukung fungsi pemerintahan serta mencapai tujuan utama pembangunan ibu kota baru.

Dalam perannya sebagai beranda sekaligus kawasan penyangga IKN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penataan kota. Di antaranya adalah peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, seperti penyediaan hunian yang layak, perbaikan kondisi jalan, pengembangan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan, serta peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, penguatan layanan teknologi informasi dan jasa yang mendukung operasional pemerintahan di IKN juga menjadi faktor penting dalam memastikan integrasi dan efisiensi pembangunan di wilayah ini.

Sebagai mitra strategis IKN dalam konsep superhub ekonomi, Kota Balikpapan memainkan peran penting dalam memperkuat keterkaitan ekonomi serta rantai pasok antarwilayah. Dalam struktur Tiga Kota bersama IKN dan Samarinda, Kota Balikpapan berperan sebagai pusat utama aktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan keunggulannya dalam sektor logistik dan distribusi untuk mendukung perdagangan ekspor dan impor. Selain itu, kota ini juga berkontribusi dalam memperkuat peran Superhub IKN dalam arus perdagangan nasional dan regional. Untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan peran strategis ini, diperlukan sinergi erat antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal penyediaan infrastruktur dan pendanaan yang mendukung kelancaran pemerintahan di IKN. Lebih lanjut, sebagai respon terhadap kebijakan IKN dan dengan memerhatikan situasi serta kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan, diperlukan dukungan terhadap kebijakan tata ruang (RDTR) dan transportasi (Masterplan Transportasi) dengan beberapa penguatan sebagai berikut:

- Perlu adanya antisipasi bahwa Pusat Pelayanan Kota baru di Karang Joang dan sekitarnya akan menjadi pusat pelayanan yang berskala regional (melayani daerah sekitar Balikpapan).

- Mengingat luasnya kawasan budidaya di Balikpapan Utara yang berada pada kelerengan tinggi dan risiko bencana tinggi, perlu ada upaya mengendalikan pertumbuhan di Balikpapan Utara dengan:
  - Mempertegas peraturan zonasi dan ketentuan konstruksi di Balikpapan Utara
  - Mempermudah pertumbuhan di Balikpapan Timur (kecamatan dengan akses ke jalan tol) dengan insentif pembangunan (peraturan zonasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, dll).
- Pertumbuhan kegiatan permukiman dan jasa diarahkan ke utara dan timur Balikpapan agar tidak memberikan beban tambahan bagi bagian tengah dan selatan Balikpapan yang memiliki persoalan kemacetan, sulitnya air bersih, dan kerentanan terhadap bencana banjir.
- Perlu ada perencanaan dan penataan ruang bagi kawasan perkantoran dan jasa yang kemungkinan akan berkembang pesat apabila IKN telah beroperasi.
- Prioritas penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan untuk memperbaiki kinerja jalan di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Selatan dimana mayoritas penduduk Balikpapan tinggal dan tingkat pelayanan jalannya (LoS) masih rendah (*travel demand management*).
- Perluasan rute dan perencanaan sistem transportasi yang mempertimbangkan konektivitas pada skala lingkungan hingga perkotaan serta potensi paratransit.

Secara spesifik, konsep pergerakan penumpang dan barang dalam sistem perkotaan Balikpapan dalam konteks kawasan IKN adalah sebagai berikut:

- Bersamaan dengan menangkap peluang peran Balikpapan sebagai otot IKN dan juga kota jasa, Balikpapan perlu mengendalikan perkembangan kota (*controlled urban sprawl*) di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur yang akan menjadi lintasan utama konektivitas dari IKN ke Balikpapan.
- Jalur kereta api regional Trans Kalimantan perlu diintegrasikan dengan jalur kereta api perkotaan dan/atau jalur angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) di dalam Kota Balikpapan, menghubungkan ke Bandara dan aktivitas rekreasi.

- Langkah mendasar adalah menentukan simpul-simpul utama yang akan menjadi stasiun dan merencanakan pengembangan kawasan berorientasi transit di simpul-simpul tersebut. Kemudian direncanakan rute-rute pengumpan dalam kota.
- Memulai perencanaan dan pengembangan kota berbasis transit dengan melakukan *land banking*.
- Mendorong angkutan barang multimoda (integrasi moda darat melalui jalan tol/arteri dan kereta barang).
- Untuk mengendalikan *urban sprawl*, perlu pemisahan antara koridor logistik dengan koridor penumpang yang melintasi Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Pemisahan dapat dilakukan secara spasial maupun temporal.

### BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas daerah. Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional.

#### **3.1 RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap I Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045**

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran strategis sebagai Tahap I dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Periode ini menjadi fondasi awal dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk dua dekade ke depan.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai periode awal perencanaan memiliki arah pembangunan “Penguatan Transformasi: Balikpapan Kota Cerdas dan Kolaboratif”. Arah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penguatan berbagai aspek pembangunan, seperti peningkatan akses pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, penguatan ekosistem sebagai superhub industri dan jasa serta pengembangan sektor ekonomi potensial, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis dan kolaboratif serta peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas hukum dan demokrasi, peningkatan layanan perkotaan terpadu berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung perekonomian serta memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagai modal Pembangunan berkelanjutan.

RPJMD ini juga menjadi instrumen pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan sektoral lintas perangkat daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran, guna memastikan

keterpaduan dan keberlanjutan antar tahap pembangunan. Dengan pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang terencana dan partisipatif, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan tercapainya pijakan awal yang kuat untuk melanjutkan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya hingga terwujudnya Balikpapan sebagai kota berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan pada tahun 2045.

**Tabel 3. 1 Indikator Sasaran Visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Visi	Target Tahap 1 Tahun 2029	Target Akhir Tahun 2045
<b>Peningkatan perekonomian dan pendapatan perkapita</b>			
1	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,60-7,20	7,00-8,00
	2. PDRB per kapita	378,228-513,384	988,90-1.664,68
	3. Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	17,8	21,99
	4. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	49,76	58,82
	5. Persentase Pekerja di Sektor Jasa	78,57	82
<b>Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan</b>			
2	6. Tingkat Kemiskinan	1,73-1,80	0,04-0,18
	7. Rasio Gini	0,296-0,33	0,280-0,330
<b>Peningkatan daya saing dan inovasi daerah</b>			
3	8. Indeks Daya Saing Daerah	3,90	4,30
	9. Indeks Inovasi Daerah	66	85
<b>Peningkatan daya saing sumber daya manusia</b>			
4	10. Indeks Pembangunan Manusia	84,59	91,71
<b>Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission</b>			
5	11. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	45,04	79,8
	12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,48	75,22

Sumber: RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045

Indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada sasaran visi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-20245 perlu dikawal pencapaiannya pada setiap tahapan pelaksanaan RPJMD. Pengarusutamaan target kinerja sasaran visi tahap I yang telah ditetapkan dalam RPJPD ke dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat disesuaikan dengan memperhatikan pendistribusian target indikator makro pembangunan serta dinamika di Kota Balikpapan.

### **3.2 RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai Integral Pencapaian Visi RPJMD Provinsi dan Nasional Tahun 2025-2029**

Visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yakni “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman” turut

serta dalam mendukung visi Provinsi dan Nasional. Visi Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang berbunyi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dan nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang ditetapkan pada masing-masing level dalam rangka menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur. Berikut merupakan penyandingan misi RPJMD Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025-2029.

Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi (Astacita) Presiden 2025-2029
<p>Misi 1 Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat</p>	<p>Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi</p>	<p>Astacita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</p>
<p>Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan</p>	<p>Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan</p>	<p>Astacita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>
<p>Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan terdidik</p>	<p>Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera</p>	<p>Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas</p>
<p>Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua</p>	<p>Misi 2 Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah</p>	<p>Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p>
		<p>Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>
		<p>Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p>
<p>Misi 5 Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua</p>	<p>Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</p>	<p>Astacita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p>

	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan	Astacita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
--	---	---

### 3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

#### 3.3.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan atau kondisi daerah yang akan terwujud pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebagai hasil pembangunan selama lima tahun. Perumusan visi RPJMD berdasarkan visi kepala daerah terpilih. Visi Kepala Daerah Kota Balikpapan merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi pendukung, baik pada level misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah. Adapun visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

### ***”Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”***

Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Dalam kallimat visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

#### **1. Kota Global**

Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai *Superhub* Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Nyaman untuk Semua

Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif.

## 3. Madinatul Iman

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip yaitu: 1) Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat; 2) Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan; 3) Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota; 4) Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah; 5) Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.

**Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD**

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Visi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045	Visi RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029	Visi RPJMN 2025-2029
"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"	<i>Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045: Superhub Industri dan Jasa yang Maju dan Berkelanjutan dengan Semangat Madinatul Iman</i>	"Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas"	"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Sumber: Analisis, 2025

Visi RPJMD Kota Balikpapan merupakan bagian penting untuk mencapai Visi RPJPD Kota Balikpapan, Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJMN. Visi RPJMD Kota Balikpapan mendukung pencapaian

visi jangka panjang Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua 2045, superhub industri dan jasa yang maju dan berkelanjutan dengan semangat madinatul iman. Visi RPJMD Kota Balikpapan dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur mendukung terwujudnya visi Kalimantan Timur sukses menuju generasi emas. Dalam konteks nasional, RPJMD Kota Balikpapan mendukung pencapaian visi Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

### **3.3.2 Misi Pembangunan Daerah**

Kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, terdapat lima misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing misi pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

#### **Misi 1: Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat**

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.

**Misi 2: Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan**

Misi “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan” bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur terpadu dan menjangkau seluruh wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Balikpapan. Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengembangan konektivitas berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal, penataan pedestrian dan utilitas kota, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan Terang.

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mengembangkan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterpaduan layanan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan, sehingga mampu meningkatkan daya saing kota.

**Misi 3: Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik**

Rumusan misi *"Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik"* bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap pentingnya

menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif mencakup berbagai aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum, serta layanan publik yang inklusif, merujuk pada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat. Adanya kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung aktivitas sehari-hari Masyarakat secara lebih nyaman, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, misi ini juga memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat secara lebih merata, guna mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

#### **Misi 4: Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua**

Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif akan diarahkan menjadi pengungkit perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan untuk semua. Selain itu,

nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan *multiplier effect* kepada seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

**Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua**

Misi ini merepresentasikan tekad untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari. Muara lebih lanjut lagi dari kondisi tersebut yakni lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan daerah adalah mengurangi pencemaran yang dapat muncul akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting. Upaya pelibatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, dengan harapan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pola kinerja kolaborasi antar pihak perlu dikuatkan untuk menjaga lingkungan, diantaranya melalui kerjasama dalam mengadakan program penghijauan, perlindungan daerah tangkapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah konkret yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, kedepan diharapkan dapat menciptakan daerah yang maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dirumuskan telah sejalan dengan 6 (misi) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 8 (delapan) Asta Cita RPJM Nasional, dan 8 (delapan) misi RPJPD Kota Balikpapan.

**Tabel 3. 3 Keselarasan Misi RPJMD, RPJMN, dan RPJPD**

Misi RPJMD Kota Balikpapan 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	Misi (Astacita) Presiden 2025-2029	Misi RPJPD Kota Balikpapan 2025-2045
Misi 1 Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat	Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi	Astacita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 3 Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, inovatif, dan kolaboratif
			Misi 8 Mewujudkan keselarasan dan kesinambungan pembangunan
			Misi 4 Mewujudkan stabilitas kota dan demokrasi substansial
Misi 2 Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan	Misi 3 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan	Astacita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 6 Mewujudkan pembangunan kota cerdas, terintegrasi dan berkeadilan
			Misi 7 Mewujudkan sarana dan prasarana terpadu, berkualitas dan ramah lingkungan
Misi 3 Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan terdidik	Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera	Astacita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Misi 1 Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun manusia unggul dan berdaya saing global
Misi 4 Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua	Misi 2 Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah	Astacita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan

		<p>Astacita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	
		<p>Astacita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan</p>	
<p>Misi 5 Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua</p>	<p>Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</p>	<p>Astacita 1 Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p>	<p>Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan</p>
	<p>Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan</p>	<p>Astacita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>	

Sumber: Analisis, 2025

Rumusan misi RPJMD Kota Balikpapan dirumuskan dengan memerhatikan rencana Pembangunan pada dokumen lainnya, baik di level daerah, provinsi dan nasional. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pembangunan antara perencanaan pembangunan di level nasional, perencanaan Pembangunan di level Provinsi Kalimantan Timur dan perencanaan Pembangunan jangka panjang Kota Balikpapan. Keselarasan tersebut untuk kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan daerah.

### 3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan, serta menjawab dari isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran RPJMD merupakan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan

RPJMD. Tujuan dan Sasaran kemudian dijabarkan lebih detail dalam rumusan outcome. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat ukur untuk memastikan kondisi yang diinginkan dapat terwujud. Berikut tujuan, sasaran, dan indikator RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Beserta Indikator RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Kata Kunci Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kota Global Nyaman untuk Semua	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan		LPE	3,23	4,75	4,95	5,15	5,35	5,55	5,75	
			Tingkat Kemiskinan	2,23	2,20	2,10	2,01	1,91	1,82	1,72	
			Indeks Gini	0,324	0,310	0,304	0,298	0,291	0,285	0,279	
		Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	214,11	225,56	263,727	301,894	340,061	378,228	416,395	
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	8,08	8,23	8,38	8,53	8,68	8,83	9,00	
			Tingkat Inflasi	1,1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	
		Dukungan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	74,03	75,88	77,78	79,72	81,72	83,76	85,77	
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,22	6,12	5,94	5,75	5,57	5,38	5,20	
		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	70,61	77,58	81,06	84,55	88,03	91,52	95,00	
		Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim		Penurunan intensitas emisi GRK	11,20	24,84	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25
Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,40	71,80	71,97	72,14	72,31	72,48	72,65		

Kata Kunci Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)
		hidup									
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	101,43	100,36	99,29	98,22	97,15	96,08	95,00	
Madinatul Iman	SDM Balikpapan yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	82,62	82,87	83,22	83,56	83,91	84,25	84,60	
		SDM yang cerdas dan sehat	Rapor pendidikan	79,40	81,70	82,93	84,70	86,47	88,23	90,00	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15,33	16,29	17,31	18,39	19,54	20,76	22,06	
			Usia Harapan Hidup	75,87	75,94	76,00	76,23	76,47	76,70	76,94	
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	
			Indeks Ketimpangan Gender	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	91,23	91,86	92,49	93,12	93,74	94,37	95,00	
	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	78,28	78,40	78,52	78,64	78,76	78,88	79,00	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan	Nilai AKIP	69,06	69,40	69,74	70,08	70,42	70,77	70,94	

Kata Kunci Visi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keteranga n
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)
		akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,07	82,89	83,73	84,57	85,42	86,28	87,15	
			Indeks Integritas	N/A	77,5	78,2	79	79,7	80,5	81,2	
		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,93	85,62	86,32	87,03	87,74	88,46	89,18	
			Indeks SPBE	3,96	3,85	3,91	3,97	4,02	4,08	4,14	

Sumber: Analisis, 2025

### **3.4 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini menjelaskan berbagai langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima tahun ke depan melalui strategi serta kebijakan pembangunan daerah. Secara garis besar, bab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tahapan pembangunan RPJMD, strategi dan kebijakan arah pembangunan, serta program prioritas pembangunan daerah.

#### **3.4.1 Strategi Penahapan Pembangunan RPJMD**

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan sendiri merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Adanya tahapan pembangunan akan menciptakan sinergi antara perencanaan jangka menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 akan menjadi dasar dalam menentukan tema dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Berikut merupakan tahapan pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan selama periode 2025-2029.



**Gambar 3. 1 Penahapan Pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan memiliki tema pembangunan setiap tahunnya. Tema tersebut selaras dengan tema periode pertama RPJPD Kota Balikpapan 2025-2029 yaitu penguatan transformasi, Balikpapan kota cerdas dan kolaboratif. Adapun tema pembangunan per tahun pada RPJMD Kota Balikpapan yaitu:

- Tahap 1 tahun 2026, Pemantapan Fondasi Pembangunan sebagai Kota Global yang nyaman untuk semua
- Tahap 2 tahun 2027, Peningkatan kota nyaman untuk semua berbasis SDM berkarakter, ekonomi bernilai tambah, infrastruktur tangguh dan tata kelola inovatif
- Tahap 3 tahun 2028, Akselerasi kota nyaman untuk semua berbasis SDM berkualitas, ekonomi bernilai tambah, infrastruktur ramah lingkungan, dan tata kelola kolaboratif
- Tahap 4 tahun 2029: Peningkatan daya saing menuju kota global berbasis SDM unggul, ekonomi dan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola adaptif

#### **3.4.1.1 Lokus Pembangunan Wilayah**

Lokus pembangunan wilayah merupakan bagian dari strategi yang memiliki peran penting untuk memandu pembangunan kewilayahan secara lebih komprehensif. Lokus pembangunan wilayah dapat merujuk pada beberapa arahan yang ada pada dokumen perencanaan lainnya

seperti dokumen RPJMN (lampiran IV), dokumen RTRW dan program prioritas kepala daerah terpilih. Berikut merupakan lokus pembangunan wilayah berdasarkan highlight indikasi intervensi RPJMN di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 5 Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029 untuk Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
1.	Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara A2: Kota Samarinda A3: Kota Balikpapan A4: Kota Bontang A5: Kabupaten Penajam Paser Utara A6: Kabupaten Kutai Kartanegara A7: Kabupaten Kutai Timur	<p>Pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dengan output: pembangunan SPAM Regional Kalimantan Timur</li> <li>2. Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara dengan output: Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dalam negeri yang didukung</li> <li>3. Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara dengan output: Kabupaten/Kota Kreatif yang dikembangkan, penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif, penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik, penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim, penguatan ekosistem kuliner, pelatihan SDM ekonomi kreatif, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, serta edukasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif, inkubasi produk kreatif subsektor film, animasi, dan video serta music</li> <li>4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara</li> <li>5. Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan output: kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - hydrogenated vegetable oil/sustainable aviation fuel) berbahan baku technical oil, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri,</li> </ol>

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		<p>peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembaangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian</p>
		<p>6. Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar), dengan output rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas <i>coal to ammonia</i> di Kutai Timur, pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan</p>
		<p>7. Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki), dengan output: penyusunan data <i>supply-demand</i> dan tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada sektor tekstil, kulit dan alas kaki</p>
		<p>8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil, dengan output: pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor minuman, hasil tembakau, serta bahan penyegar dan penerapan <i>making Indonesia 4.0</i> pada Industri Kecil Menengah (IKM) pada industri aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan</p>
		<p>9. Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan output: pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p>

No	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
		<p>10. Peningkatan produksi pangan nabati, dengan output: alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>11. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik, dengan output: preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistic</p> <p>12. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan output: pengembangan pelabuhan</p> <p>13. Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan output: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang (Kota Balikpapan), Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (Kota Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)</p> <p>14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi, dengan output: pembangunan jalan koridor logistik Tering-Long Bagun 5</p> <p>15. Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan output: pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (<i>Bus the Service</i>) di Kota Balikpapan</p>
2.	<p>Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan A8: Kota Samarinda A9: Kota Balikpapan</p>	<p>Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan output: bantuan PSU bidang perumahan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan sanitasi, bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI, pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, permukiman kembali permukiman kumuh, bantuan pembangunan rumah swadaya, bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi, penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota besar (Samarinda dan Balikpapan), penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda-Zona Kota Tua), pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda untuk mendukung pengembangan pariwisata di IKN dan sekitarnya, serta penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z.</p>

Lokus pembangunan wilayah di Kota Balikpapan tidak hanya yang termuat dalam Highlight Indikasi Intervensi RPJMN 2025-2029, namun juga terdapat pada arah kebijakan per transformasi yang sebelumnya tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Arah kebijakan transformasi Kota Balikpapan mengacu pada lampiran Buku II SEB tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan transformasi merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan landasan transformasi. Arah kebijakan transformasi dijalankan sepanjang pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 berdasarkan kerangka kerja di dalam arah kebijakan setiap periode. Berikut merupakan arah kebijakan pada periode satu dalam kerangka penguatan fondasi transformasi.

**Tabel 3. 6 Lokus Pembangunan Wilayah berdasarkan Arah Kebijakan Transformasi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
<b>Transformasi sosial</b>	1	Perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan penguatan peran layanan kesehatan primer	Seluruh kecamatan, seluruh puskesmas dan posyandu
	2	Penuntasan stunting dan eliminasi penyakit menular dan tropis	Penuntasan stunting di semua kecamatan, peningkatan pengendalian dan penanganan penyakit menular (HIV, TBC, dll) melalui pendekatan integrasi multisektor, serta percepatan eliminasi penyakit malaria melalui rekayasa lingkungan habitat vektor	Seluruh kecamatan
	3	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan berkelanjutan	Pemenuhan dan pemerataan jumlah tenaga medis dan kesehatan pada layanan kesehatan sesuai standar, peningkatan tenaga kesehatan spesialis, peningkatan kompetensi kesehatan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya	Seluruh puskesmas dan rumah sakit
	4	Pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas melalui pelayanan yang disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi serta penguatan ketahanan kesehatan, penguatan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan; Ketahanan kesehatan (farmasi, alat kesehatan, dan surveillance/ketahanan terhadap krisis kesehatan/bencana non alam); Transformasi ketahanan teknologi kesehatan; Pembiayaan kesehatan.	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Barat, Puskesmas di Sepinggan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	5	Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas melalui perluasan akses Pendidikan dini dan Pendidikan dasar (Regulasi, kelembagaan, SDM, sarana prasarana)	Seluruh kecamatan
	6	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan	Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta melalui pengembangan kualitas SDM, sarana prasarana, pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat keberkerjaan tinggi, dan kelembagaan kerja sama antar satuan pendidikan	Seluruh kecamatan
	7	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan tinggi melalui pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic (STEAM)	Seluruh kecamatan
	8	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga	Perkuatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, serta	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		kependidikan	pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3	
	9	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus	Fasilitasi pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai kluster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global	Kecamatan Balikpapan Timur dan Kecamatan Balikpapan Utara
	10	Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan TIK	Seluruh kecamatan
	11	Penguatan masyarakat literasi	Penguatan literasi masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, penyediaan akses buku dan sumber informasi pada perpustakaan dan taman baca masyarakat, pemanfaatan digitalisasi, kampanye literasi dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	12	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.	Seluruh kecamatan
	13	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal dan informal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas	Seluruh kecamatan
	14	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat (termasuk pekerja sosial profesional) melalui akses perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala, terutama untuk daerah 3TP.	
	15	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi.	'Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga kerja konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan.	Seluruh kecamatan
<b>Transformasi Ekonomi</b>	16	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran arus barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	Seluruh kecamatan
	17	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub	Kawasan Industri Kariangau, Sumber, Teritip, 1.029

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya	(Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	18	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai	Kawasan Industri Kariangau, Sumber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	19	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis	Kawasan Industri Kariangau, Sumber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur)
	20	Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi	Kawasan Industri Kariangau, Sumber, Teritip, 1.029 (Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Utara,

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
				Balikpapan Timur)
	21	Penguatan cadangan pangan	Penguatan cadangan pangan melalui penguatan kerjasama, penyediaan infrastruktur pergudangan, pengembangan <i>urban farming</i> , peningkatan investasi dan inovasi di sektor pangan serta optimalisasi Perumda berbasis pangan	Seluruh kecamatan
	22	Pengembangan destinasi wisata potensial	Pengembangan destinasi wisata potensial dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat	Seluruh kecamatan
	23	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilakukan melalui peningkatan daya saing, penguatan jalur distribusi, dan perluasan pasar tujuan komoditas unggulan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	24	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan ekonomi masa depan	Seluruh kecamatan
	25	Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola	Seluruh kecamatan
	26	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii)	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	
	27	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung (sinergi dan integrasi dengan pembangunan IKN).	Seluruh kecamatan
	28	Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan kompetensi SDM, proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Seluruh kecamatan
	29	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Seluruh kecamatan
	30	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah	Penguatan ekonomi dan keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	31	Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	Seluruh kecamatan
	32	Pengembangan ekonomi maritim dan perikanan budidaya	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk <i>research and development</i> dan portofolio ekonomi karbon, <i>coastal tourism</i> , serta <i>marine services</i> , dengan mengedepankan penerapan <i>blue economy</i>	Seluruh kecamatan
<b>Transformasi Tata Kelola</b>	33	Optimasi regulasi daerah	Optimalisasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			instrumen penegakan regulasi daerah.	
	37	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan.	Seluruh kecamatan
	38	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat.	Seluruh kecamatan
	39	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital.	Seluruh kecamatan
	40	Penguatan sistem integritas serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan	Penguatan preventif, edukatif, dan investigative serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi layanan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
		korupsi	perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan.	
	41	Peningkatan kualitas proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi.	Seluruh kecamatan
<b>Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	42	Peningkatan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.	Seluruh kecamatan
	43	Penguatan demokrasi substansial	Penguatan demokrasi substansial melalui Penguatan pendidikan politik masyarakat, fasilitasi penguatan pendidikan partai politik, dan penguatan kebebasan sipil.	Seluruh kecamatan
	44	Peningkatan kualitas belanja daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional dilaksanakan melalui intensifikasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.	
	45	Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi.	Seluruh kecamatan
<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	46	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	Seluruh kecamatan
	47	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan lembaga adat, dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan	Seluruh kecamatan
	48	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	49	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya, budaya tak benda, dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	Seluruh kecamatan
	50	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan	Seluruh kecamatan
	51	Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	Seluruh kecamatan
	52	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi	Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan melalui peningkatan restorasi hutan dan lahan, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	53	Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem	Seluruh kecamatan
	54	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana pengurangan resiko bencana dan ketahanan terhadap perubahan iklim.	Seluruh kecamatan
	55	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural, termasuk adaptasi perubahan iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.	Seluruh kecamatan
	56	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	58	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Seluruh kecamatan
	59	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi	Seluruh kecamatan
	60	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan	Seluruh kecamatan
	61	Pembangunan bendung/ bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan kawasan	Seluruh kecamatan
	62	Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	63	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill untuk mencapai ekonomi sirkular	Seluruh kecamatan
	64	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh kecamatan
<b>Implementasi Transformasi</b>	65	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota	Seluruh kecamatan
	66	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset, mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	69	Pengembangan pelabuhan laut	Fasilitasi pengembangan melalui dikembangkannya pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep <i>Economic Hub</i> tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional)	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	70	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, Balikpapan Kota
	71	Pengembangan bandara	Pengembangan bandara diutamakan pada bandara utama di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk aerocity)	Kecamatan Balikpapan Selatan
	72	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	73	Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	Seluruh kecamatan
	74	Pengembangan transportasi massal terintegrasi angkutan perkotaan	Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi dilaksanakan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal di kota-kota besar dan sedang yang andal, sesuai, modern dan terintegrasi antar simpul transportasi, sesuai dengan proyeksi perkembangan penduduknya	Seluruh kecamatan
	76	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	Seluruh kecamatan
	77	Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	78	Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	Seluruh kecamatan
	79	Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik	Seluruh kecamatan
	80	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi aman dilaksanakan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) maupun dengan mengalirkan air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Seluruh kecamatan
	81	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
			waktu pelaksanaan pembangunan	
	82	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota) dalam RTRW	Seluruh kecamatan
	83	Peningkatan akuntabilitas pemerintah berdasarkan daerah kinerja daerah sasaran	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinerja yang mengacu pada pencapaian sasaran daerah	Seluruh kecamatan
	84	Perkuatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dan penerapan manajemen risiko	Seluruh kecamatan
	88	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian pengembangan aplikasi bersifat khusus.	Seluruh kecamatan

Transformasi	No	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus
	89	Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja Sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, blended finance, pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon	Seluruh kecamatan
	90	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah antar periode.	Seluruh kecamatan

### 3.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan secara lebih operasional. Arah kebijakan setiap misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

**Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Setiap Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
<p><b>Misi 1: Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi</li> <li>• Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional</li> <li>• Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel</li> <li>• Pengembangan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>• Memperkuat aksi pencegahan korupsi</li> </ul>
<p><b>Misi 2: Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian dan pusat pertumbuhan baru</li> <li>• Penataan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni yang berketahanan</li> <li>• Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman</li> <li>• Pengembangan konektivitas</li> </ul>
<p><b>Misi 3: Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan terdidik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi</li> <li>• Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan cakupan imunisasi</li> <li>• Penguatan sistem pelayanan kesehatan meliputi sarana prasarana dan alat, obat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan</li> <li>• Penguatan ketahanan kesehatan melalui pencegahan, deteksi dan respon penanganan, serta perluasan jaringan kesehatan (kader kesehatan, masyarakat, swasta)</li> <li>• Integrasi layanan primer</li> <li>• Pembangunan Prasarana Layanan Kesehatan Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B</li> <li>• Percepatan partisipasi pendidikan dan pengembangan layanan pendidikan dasar (PAUD-SD-SMP-Kesetaraan) sesuai dengan kebutuhan daerah</li> <li>• Penguatan keluarga berkualitas, pendidikan karakter, dan pemenuhan hak anak serta kesetaraan gender</li> <li>• Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam percepatan partisipasi pendidikan di semua jenjang</li> <li>• Penguatan pengelolaan layanan pendidikan</li> <li>• Penguatan kualitas pembelajaran</li> <li>• Penguatan tenaga pendidik dan kependidikan</li> </ul>

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pewujudan kota ramah anak</li> <li>• Penguatan Posyandu dan PAUD sebagai pusat edukasi stimulasi dini</li> <li>• Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini pada anak melalui sekolah parenting</li> <li>• Peningkatan kualitas pengasuhan layak dan stimulasi dini pada anak melalui kerja sama dengan swasta, komunitas dan lembaga non pemerintah</li> <li>• Penguatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran</li> <li>• Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang komprehensif dan termutakhirkan</li> <li>• Penguatan kompetensi angkatan kerja yang bertalenta</li> <li>• Penguatan kemitraan dengan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri</li> <li>• Penumbuhan wirausaha baru berbasis kreativitas dan potensi daerah</li> <li>• Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga</li> </ul>
<p><b>Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Industri Kariangau.</li> <li>• Pembangunan rumah produksi bersama komoditas hasil laut.</li> <li>• Peningkatan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif yang berkelanjutan.</li> <li>• Pengembangan daya tarik wisata kota, infrastruktur pendukung MICE, dan industri hospitality.</li> <li>• Penguatan iklim investasi berkelanjutan.</li> <li>• Pengembangan IKM dan UMKM yang berdayasaing serta penumbuhan minat wirausaha baru.</li> <li>• Pengendalian inflasi daerah.</li> <li>• Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah, peningkatan infrastruktur keuangan syariah, dan pengembangan usaha/bisnis syariah.</li> <li>• Percepatan pembangunan koperasi merah putih.</li> </ul>
<p><b>Misi 5: Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sesuai dengan peruntukkan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup.</li> <li>• Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal</li> <li>• Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah kolaboratif berbasis hulu-hilir.</li> <li>• Pengendalian banjir.</li> </ul>

Misi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural.</li> <li>• Pengembangan ekonomi hijau dalam rangka membangun ketangguhan terhadap perubahan iklim.</li> <li>• Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem</li> </ul>

### 3.4.3 Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD diperlukan strategi yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Strategi pembangunan daerah disusun sebagai kerangka umum untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2030, strategi pembangunan daerah harus memperhatikan arah kebijakan nasional, capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan dan isu strategis daerah, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Strategi juga dirumuskan dengan memperhatikan integrasi antar sektor, antar wilayah, dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang serta dokumen perencanaan lainnya. Berikut indikasi Strategi dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

**Tabel 3. 7 Penyelarasan Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Kata Kunci Visi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan		
		Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan rumah produksi bersama
			pengembangan ekosistem

			ekonomi kreatif	
			pengembangan pariwisata kota dan MICE	
			penguatan iklim investasi hijau	
		Dukungan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas	
			Penguatan konektivitas perhubungan antar pusat pertumbuhan ekonomi	
			Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	
		Menurunnya pengangguran	pengembangan UMKM dan penumbuhan wirausaha baru	
			peningkatan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	
		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan	
			Peningkatan kapasitas Satlinmas	
			Penguatan dialog dengan masyarakat	
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	penguatan rantai distribusi pangan	
			pengembangan pekarangan pangan lestari ( <i>urban farming</i> )	
		Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
				Penguatan pengawasan penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang wilayah
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Penguatan kapasitas penanggulangan bencana			
		Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		
Madinatul Iman	SDM Balikpapan yang berkualitas			
		SDM yang cerdas dan sehat	Pememenuhan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan	

			Penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan
			pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang berkualitas
			Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
			Peningkatan partisipasi pendidikan di semua jenjang
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
			penguatan pendidikan karakter
			Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal
			penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan
			Penguatan ekosistem pembelajaran literasi dan numerasi
			Perluasan akses layanan PAUD dan pengembangan PAUD Holistik-Integratif
			Percepatan pengembangan layanan pendidikan dasar dan kesetaraan
			Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam layanan pendidikan
			Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan
			Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana pendukung layanan kesehatan yang berkualitas
			Penguatan posyandu dan PAUD sebagai pusat edukasi stimulasi dini
			Peningkatan kesadaran dan peran orang tua terhadap penerapan pengasuhan layak dan stimulasi dini
			Peningkatan kompetensi

			SDM kesehatan
			Peningkatan dan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat
			Penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Peningkatan penghargaan, toleransi, dan kerukunan antar suku dan umat beragama
			Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
			Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan
			Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak
			Peningkatan kualitas keluarga
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	
		Peningkatan integritas birokrasi	
		Penguatan kebijakan daerah yang adaptif	
		Penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN	
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	
		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	
	Peningkatan inovasi pelayanan publik		

#### 3.4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program strategis yang memiliki aspek politik dan teknokratik. Pelaksanaan program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mendukung visi dan misi kepala daerah. Dalam dimensi politik, program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi dan misi Walikota serta Wakil Walikota terpilih. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari janji politik yang harus direalisasikan

melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, dalam dimensi teknokratik, program prioritas disusun berdasarkan analisis terhadap isu serta permasalahan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, program ini diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan daerah. Berikut adalah program prioritas pembangunan daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 8 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

Kata Kunci Visi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
<b>Kota Global Nyaman untuk Semua</b>	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan	Meningkatnya Produktivitas Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan		LPE			
				Tingkat Kemiskinan			
				Indeks Gini			
				PDRB Per Kapita			
				Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa			
				Tingkat Inflasi			
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat		Rasio Kewirausahaan daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

			Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Meningkatnya pengembangan IKM	Persentase pertumbuhan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin usaha yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Dukungan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya layanan infrastruktur yang	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	

			berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
					Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Menurunnya pengangguran	
		Meningkatnya angka partisipasi kerja	Angka Partisipasi Kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		Meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor jasa	Persentase pekerja di sektor jasa		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
			Meningkatnya kualitas informasi tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Penurunan intensitas emisi GRK	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	

			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
					Program Pengelolaan Persampahan		
			Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Meningkatnya adaptasi dan mitigasi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
						Indeks Risiko Bencana	
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		

<b>Madinatul Iman</b>	SDM Balikpapan yang berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia	
				Rapor Pendidikan	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
				Usia Harapan Hidup	
		SDM yang cerdas dan sehat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Indikator RPJPD.03)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
				Angka Kematian Ibu (AKI) (Indikator RPJPD.02)	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah		Tingkat Partisipasi penduduk usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Tingkat Partisipasi penduduk usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif		Kejadian Konflik SARA	
				Indeks Ketimpangan Gender	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang		Persentase konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN		

			diselesaikan		PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas		Indeks Ketahanan Pangan	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas				Indeks Reformasi Birokrasi	
				Nilai AKIP		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi		
			Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan melayani	Indeks Perencanaan Pembangunan	
					Indeks Sistem Merit	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Maturitas SPIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Nilai AKIP Perangkat Daerah	
	Pelayanan publik yang semakin prima dan		Indeks Kepuasan Masyarakat			

		adaptif digital	transformasi		Indeks SPBE/Indeks Pemdi	
				Menguatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
						PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
						PRGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
						PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

### 3.4.5 Program Unggulan

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik Walikota dan Wakil Walikota untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Terdapat 9 (sembilan) program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2025-2030. Kesembilan program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Pelaksanaan program unggulan tersebut direalisasikan melalui nomenklatur program yang diampu oleh perangkat daerah. Berikut merupakan penyandingan program unggulan dengan program sesuai nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5/3406 Tahun 2024 di Kota Balikpapan.

**Tabel 3. 5 Penyandingan Program Unggulan dengan Program sesuai Nomenklatur Kepmendagri 900.1.15.5/3406 Tahun 2024**

No	Program Prioritas	
	Program Unggulan	Nomenklatur Program
1	<b>Transformasi birokrasi</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan</b>	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKP UKM)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	<b>Mengatasi stunting</b>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
4	<b>Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata</b>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
5	<b>Pengendalian Banjir</b>	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
6	<b>Lingkungan Hidup &amp; Sosial yang Sehat dan Nyaman</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

No	Program Prioritas	
	Program Unggulan	Nomenklatur Program
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
7	<b>Balikpapan Kota MICE dan Wisata</b>	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
8	<b>Balikpapan Kota Inovatif &amp; Kreatif</b>	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
9	<b>Balikpapan Kota Ramah Anak</b>	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

#### 3.4.6 Dukungan Program Prioritas RPJMD 2025-2029 terhadap Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Program unggulan dari Walikota dan Wakil walikota Balikpapan juga turut serta dalam mendukung capaian program unggulan di level provinsi. Setidaknya terdapat dua program unggulan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yakni Program Gratispol dan Jospol. Berikut merupakan penyandingan dukungan program unggulan provinsi di Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 9 Dukungan Program di Kota Balikpapan terhadap Program Unggulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029**

No	Kegiatan Unggulan	Lokus Indikatif	Dukungan Program
<b>Program Unggulan Gratispol</b>			
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3	10 Kabupaten/Kota	-
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	10 Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
3	Gratis Makanan Bergizi	10 Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Rehabilitasi Sosial
4	Gratis Seragam Sekolah	10 Kabupaten/Kota	Program pengelolaan pendidikan
5	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
6	Gratis Haji dan Umroh untuk Marbot	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
<b>Program Unggulan Jospol</b>			
<b>Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern</b>			
1	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Penunjang Pusat Distribusi Pangan Provinsi	Balikpapan	-
2	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

3	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang, Balikpapan	Program Penyuluhan Pertanian
4	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao, Kopi, dan Karet	Karet: Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Samarinda, Penajam Paser Utara, Balikpapan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5	Peningkatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Pengembangan Agenia Pengendali Hayati (APH)	10 Kabupaten/Kota	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
<b>Jospol 2: Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik</b>			
1	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai Sarana Sistem Rantai Dingin	Berau, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
<b>Jospol 3: Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, serta Penjaga Rumah Ibadah</b>			
1	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	10 Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
<b>Jospol 4: Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital untuk Mendukung UMKM</b>			
1	Bantuan Permodalan, Peralatan, dan Pembinaan UMKM secara Terpadu	10 Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan UMKM
<b>Jospol 7: Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi dan Pelabuhan Internasional</b>			
1	Pembangunan SPAM Regional	Balikpapan, Samarinda, Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi	8 Kabupaten/Kota	-
3	Pembangunan Pelabuhan Internasional Kariangau	Balikpapan	-

Jospol 9: Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
1	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO, dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	10 Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Forum Investasi Daerah	10 Kabupaten/Kota	Program Promosi Penanaman Modal

Selain mendukung capaian program unggulan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan juga berupaya mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah. Berikut merupakan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas Kota Balikpapan.

**Tabel 3. 10 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029**

No	Kegiatan Prioritas Utama	Prioritas Nasional	Nomenklatur Program	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Prioritas Nasional 1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Pengembangan Pangan Hewani	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
4	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
5	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Prioritas Nasional 2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	Konservasi Sumber Daya Air	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Prioritas Nasional 2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Aplikasi	Dinas Komunikasi dan

	Digital		Informatika	Informatika
10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
12	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
13	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Prioritas Nasional 2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
15	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Prioritas Nasional 2	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
16	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Prioritas Nasional 2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
17	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Prioritas Nasional 3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Permukiman
18	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Prioritas Nasional 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Prioritas Nasional 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Prioritas Nasional 3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian

21	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Prioritas Nasional 4	Program Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Prioritas Nasional 4	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
29	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
30	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Dinas Kesehatan

			Kesehatan Masyarakat	
31	Penuntasan TBC	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
32	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
33	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
34	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
35	Investasi pelayanan kesehatan primer	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
36	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
37	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Prioritas Nasional 4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
38	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Prioritas Nasional 5	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

39	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Prioritas Nasional 5	Program Riset dan Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
40	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Prioritas Nasional 5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
41	Pengembangan Industri Kimia	Prioritas Nasional 5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Perindustrian
42	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
43	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Prioritas Nasional 6	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Dinas Sosial
44	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	Prioritas Nasional 6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
45	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Prioritas Nasional 6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Permukiman
46	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prioritas Nasional 7	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan, dan Asistensi	Inspektorat
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
47	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Prioritas Nasional 7	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi

48	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
49	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
50	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Prioritas Nasional 7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
51	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Prioritas Nasional 8	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
52	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Prioritas Nasional 8	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	Prioritas Nasional 8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum

Program prioritas di Kota Balikpapan juga turut serta dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tahun 2025-2029. Berikut merupakan rincian dukungan program terhadap proyek strategis nasional.

**Tabel 3. 11 Dukungan Program Kota Balikpapan pada Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029**

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
<b>Makan Bergizi Gratis</b>				
1	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional	Badan Gizi Nasional (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makannan minuman Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Rehabilitasi Sosial
<b>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Nasional	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)	Program Pengelolaan Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
5	Program Penuntasan TBC	Nasional	Kementerian Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)
<b>Swasembada Pangan</b>				
6	Layanan Irigasi Pendukung Pangan Nasional	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

No	Proyek	Lokasi	Pelaksana	Dukungan Program
<b>Swasembada Energi</b>				
7	North Hub Development Project Selat Makassar	Kalimantan	Swasta	-
<b>Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital</b>				
8	Pengembangan Layanan Digital pemerintah Terpadu	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
9	Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia	Nasional	Badan Informasi Geospasial	-

BAB IV  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah, sekaligus memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Selain mencakup target program, bab ini juga memuat pagu indikatif sebagai proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk alokasi dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Besaran dana yang tersedia merujuk pada sub bab keuangan di Bab II RPJMD, khususnya terkait kerangka pendanaan yang meliputi kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030**

Penyusunan program perangkat daerah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi Kota Balikpapan. Sub bab ini menyajikan daftar program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah													
<b>Program pengelolaan pendidikan</b>														Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
Meningkatnya Partisipasi dan/atau kemampuan Peserta Didik yang menjadi kewenangan pemerintah kota	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)			471.050.67 3.000	487.762.2 47.000	507.741.1 41.000	528.570.43 0.000	550.074.84 0.000						
<b>Program pengembangan kurikulum</b>														Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan

	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal			514.718.000		514.718.000		554.809.000		577.569.000		601.067.000	
<b>Program pendidik dan tenaga kependidikan</b>													
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1 (%)	0	1	2.664.363.000	1	2.758.887.000	1	2.871.892.000	1	2.989.707.000	1	3.111.341.000	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
<b>Program pengendalian dan perizinan pendidikan</b>													
Meningkatnya kualitas dan distribusi satuan pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui			186.652.000		193.274.000		201.190.000		209.444.000		217.965.000	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
<b>Program Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>													Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan







	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	86.33	90.63	40.898.031 .000	93.0 1	42.348.98 0.000	94.97	44.083.60 8.000	98.4	45.892.069 .000	99.91	47.759.146 .000	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>													Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	80.64	81.19	10.734.575 .000	82.1 9	11.115.40 9.000	83.2	11.570.69 9.000	84.2	12.045.369 .000	85.2	12.535.424 .000	
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>													Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	52.15	52.74	119.833.94 2.000	53.3 3	124.085.3 19.000	53.92	129.167.8 92.000	54.51	134.466.80 4.000	55.1	139.937.46 4.000	
<b>Program Pengembangan Permukiman</b>													
	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan			-		-		-		-		-	

<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>													Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	27.61	27.67	224.562.66 0.000	27.7 4	232.529.5 21.000	27.82	242.054.0 03.000	27.94	251.983.89 1.000	28.04	262.235.62 8.000	
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>													Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	96.9	100	12.279.550 .000	100	12.715.19 5.000	100	13.236.01 3.000	100	13.779.000 .000	100	14.339.586 .000	
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>													Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantab	83.85	83.93	486.650.64 5.000	84.0 2	503.915.6 62.000	84.1	524.556.2 05.000	84.18	546.075.30 7.000	84.26	568.291.88 6.000	
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	Persentase Tenaga												Dinas Pekerjaan Umum
	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	11.45	25.4	4.118.115. 000	35	4.264.214 .000	45	4.438.878 .000	55	4.620.976. 000	65	4.808.976. 000	

<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>													Dinas Pekerjaan Umum
Tersedianya Penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan	Nilai Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	61.5	63	4.855.602.000	64	5.027.865.000	65	5.233.808.000	70	5.448.517.000	81	5.670.185.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	84	86		87		88		89		90		Dinas Perumahan, dan Permukiman
<b>Program Pengembangan perumahan</b>													
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100	4.336.396.000	100	4.490.239.000	100	4.674.160.000	100	4.865.911.000	100	5.063.876.000	Dinas Perumahan, dan Permukiman

dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0	100		100		100		100		100		
<b>Program Kawasan Permukiman</b>													
Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	87.01	100	2.475.452.000	33.4	2.563.274.000	53.65	2.668.267.000	78.05	2.777.728.000	100	2.890.738.000	Dinas Perumahan, dan Permukiman
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>													
Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	0	4.29	4.937.155.000	6.86	5.112.312.000	9.43	5.321.714.000	11.99	5.540.029.000	14.56	5.765.420.000	Dinas Perumahan, dan Permukiman
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>													Dinas Perumahan, dan Permukiman

Meningkatnya Lingkungan Perumahan yang mendapat PSU	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	5.14	21.5	11.729.407 .000	26.1 7	12.145.53 4.000	30.84	12.643.01 9.000	35.51	13.161.679 .000	40.19	13.697.150 .000	
<b>Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>													
Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU			-		-		-		-		-	Dinas Perumahan, dan Permukiman

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)												
<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>													Satpol PP
	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda			7.466.602.000		7.731.496.000		8.048.180.000		8.378.345.000		8.719.210.000	
<b>Program Penanggulangan bencana</b>													BPBD
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan			1.496.829.000		1.549.932.000		1.613.418.000		1.679.606.000		1.747.939.000	

<b>Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>													
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran			6.202.684.000		6.422.738.000		6.685.816.000		6.960.091.000		7.243.256.000	BPBD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)												Dinas Sosial
<b>Program Pemberdayaan sosial</b>													
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya	70	80	1.688.427.000	85	1.748.328.000	90	1.819.940.000	95	1.894.600.000	100	1.971.680.000	Dinas Sosial

	dalam Pelayanan Sosial (%)												
<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan</b>													Dinas Sosial
Meningkatnya Layanan Penanganan WN Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani			-		-		-		-		-	
<b>Program Rehabilitasi sosial</b>													Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti			3.126.658.000		3.237.584.000		3.370.196.000		3.508.453.000		3.651.191.000	





Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3.1	3.6	229.195.00 0	3.65	237.326.0 00	3.65	247.047.0 00	3.75	257.182.00 0	3.8	267.645.00 0	
<b>Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</b>													Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya pencari kerja yang mendapat pelatihan yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	75	42	1.430.769. 000	46	1.481.528 .000	46	1.542.212 .000	50	1.605.479. 000	52	1.670.796. 000	
<b>Program Penempatan tenaga kerja</b>													Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan di sektor Formal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	36.99	37.1	651.352.00 0	37.2	674.461.0 00	37.2	702.087.0 00	37.4	730.889.00 0	37.5	760.624.00 0	
<b>Program Hubungan Industrial</b>													Dinas Ketenagakerjaan
Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	54.9	55	2.762.159. 000	56	2.860.153 .000	56	2.977.306 .000	58	3.099.445. 000	59	3.225.543. 000	

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>														
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)													
<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>														Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Meningkatnya kualitas dana efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)			594.104.00		615.181.00		640.379.00		666.650.00		693.772.00		
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan													
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>														Dinas Pemberdayaan Perempuan,



<b>hak anak</b>													Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)			1.509.321.000		1.562.867.000		1.626.883.000		1.693.623.000		1.762.527.000	
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>													
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan			2.288.168.000		2.369.346.000		2.466.395.000		2.567.575.000		2.672.035.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)												
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	77.54	77.54		78.13		79		80		80.88		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

<b>Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b>													
Meningkatnya Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	Persentase Tingkat Konsumsi Energi	94.5	95	823.623.00 0	95.1	852.843.0 00	95.2	887.776.0 00	95.3	924.195.00 0	95.5	961.795.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Program Penanganan kerawanan pangan</b>													
Menurunnya Jumlah Wilayah Rentan Pangan	Persentase Jumlah Kelurahan Wilayah Rentan Pangan yang Diintervensi	100	100	66.919.000	100	69.293.00 0	100	72.132.00 0	100	75.091.000	100	78.146.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Program Pengawasan keamanan pangan</b>													
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	70	77	308.859.00 0	80	319.816.0 00	83	332.916.0 00	87	346.573.00 0	90	360.673.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>													
<b>Program penunjang urusan</b>													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

<b>pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	86		87		88		89		90		
<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Persentase lokasi yang dikelola sesuai regulasi			329.449.00 0		341.137.0 00		355.110.0 00		369.678.00 0		384.718.00 0	
<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitasi Penangana Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	80	85	-	90	-	93	-	95	-	100	-	
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>													Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	78.16	78.31		78.46		78.61		78.76		78.91		
<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>													
Meningkatnya Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	89	26.09	216.201.000	43.48	223.871.000	65.22	233.041.000	8.61	242.601.000	100	252.471.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>													
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100	100	4.306.377.000	100	4.459.155.000	100	4.641.803.000	100	4.832.226.000	100	5.028.821.000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>													
Meningkatnya RTH yang dikelola	Persentase RTH yang dikelola	10.61	10.65	61.465.147.000	10.65	63.645.760.000	10.65	66.252.710.000	10.65	68.970.625.000	10.65	71.776.632.000	Dinas Lingkungan Hidup

<b>Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>													Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Jumlah Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah Limbah B3 yang Terkelola	44687	44787	205.906.00 0	4488 7	213.211.0 00	44987	221.944.0 00	45087	231.049.00 0	45187	240.449.00 0	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>													Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	32.93	35	638.877.00 0	40	661.543.0 00	45	688.640.0 00	50	716.890.00 0	55	746.056.00 0	Dinas Lingkungan Hidup



Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	761.851.00 0	100	788.880.0 00	100	821.192.0 00	100	854.881.00 0	100	889.661.00 0	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup													Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	163.697.00 0	100	169.504.0 00	100	176.447.0 00	100	183.686.00 0	100	191.159.00 0	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan													Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	99	99.2	76.188.002 .000	99.3	78.890.94 2.000	99.4	82.122.33 9.000	99.5	85.491.280 .000	99.6	88.969.416 .000	Dinas Lingkungan Hidup
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>													
Program penunjang urusan pemerintahan daerah													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	87.82	87.84		87.86		87.88		88		88.2		
<b>Program pendaftaran penduduk</b>													
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Perekaman dan Pencertakan KTP-elektronik	99.95	99.95		99.95		99.95		99.95		99.95		
	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	99.42	99.45	1.488.814.000	99.47	1.541.633.000	99.49	1.604.779.000	99.51	1.670.613.000	99.53	1.738.580.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	5.18	17.50		20.00		22.50		25.00		30.00		
<b>Program pencatatan sipil</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	95.09	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	99.77	99.79	-	99.81	-	99.83	-	99.85	-	99.87	-	

	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan	100	100		100		100		100		100		
<b>Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	0	15	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
<b>Program pengelolaan profil kependudukan</b>													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	0	100	1.335.952.000	100	1.383.348.000	100	1.440.010.000	100	1.499.084.000	100	1.560.073.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													



Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan				-		-		-		-		-	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
<b>Program pengendalian penduduk</b>													
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )			1.177.352.000		1.219.121.000		1.269.057.000		1.321.118.000		1.374.866.000	
<b>Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	Angka												Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i>			2.277.745.000		2.358.553.000		2.455.160.000		2.555.879.000		2.659.863.000	

pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )												
<b>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera</b>													Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga			3.773.791.000	3.907.675.000	4.067.734.000	4.234.607.000	4.406.888.000					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	70	75	77	79	81	83						

<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>													
Terselenggaranya Kinerja Lalu Lintas Kota Balikpapan	Konektivitas Darat (%)	63	63	215.882.015.000	63	223.540.911.000	80	232.697.217.000	80	242.243.258.000	80	252.098.706.000	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpadang terhadap Kondisi Ideal (%)	90	92		93		94		95		96		
<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>													
Meningkatnya Kelayanan Kepelabuhanan	Konektivitas Laut	50	50	3.917.357.000	50	4.056.334.000	50	4.222.483.000	50	4.395.704.000	50	4.574.539.000	Dinas Perhubungan
<b>URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	87.08	87.2		87.5		87.7		87.9		88		Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>													
Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86	86.5	19.259.107.000	86.5	19.942.367.000	87	20.759.213.000	87	21.610.827.000	87.5	22.490.044.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Program aplikasi informatika</b>													
Meningkatnya Jumlah Layanan Digital Terintegrasi yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Digital	Persentase Layanan Digital Terintegrasi yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Digital		83	14.861.980.000	84	15.389.242.000	84	16.019.591.000	85	16.676.769.000	85	17.355.249.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>														
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	82.45	84		85		86		87		88			
<b>Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>														Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi	8.33	13.79	-	15.15	-	15.79	-	15.91	-	17.65	-		
<b>Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi</b>														Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif			367.004.000		380.025.000		395.591.000		411.819.000		428.574.000		

<b>Program Pendidikan dan latihan perkoperasian</b>														
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	26.32	32.89	-	32.47	-	32.05	-	32.91	-	33.75	-		Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif	16.01	48.68	360.335.000	48.7	373.119.000	48.72	388.402.000	48.73	404.335.000	48.75	420.785.000		Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)</b>														
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Usaha Mikro	15.38	15.85	2.532.641.000	16.17	2.622.492.000	16.27	2.729.910.000	16.57	2.841.900.000	16.9	2.957.520.000		Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
<b>Program Pengembangan UMKM</b>														Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan

Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	11.14	11.93	6.870.371.000	11.98	7.114.112.000	12.5	7.405.509.000	12.7	7.709.308.000	12.72	8.022.954.000	Perindustrian
<b>Program Penguatan Badan Hukum Koperasi</b>													Dinas Koperasi, Usaha mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam			478.035.000		494.994.000		515.269.000		536.408.000		558.231.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	94,32	94,57		94,82		95,07		95,32		95,57		
<b>Program engembangan iklim penanaman modal</b>													Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	128	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

<b>Program Promosi penanaman modal</b>													
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	10,21	15,21	1.170.925.000	20,21	1.212.466.000	25,21	1.262.129.000	30,21	1.313.906.000	35,21	1.367.361.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
<b>Program Pelayanan penanaman modal</b>													
Meningkatnya Perizinan Berusaha Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97,72	97,82	1.750.193.000	97,92	1.812.285.000	98,02	1.886.517.000	98,12	1.963.909.000	98,22	2.043.808.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
<b>Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>													
Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya	100	100	303.966.000	100	314.750.000	100	327.642.000	100	341.083.000	100	354.960.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu



<b>Program pengembangan daya saing kepemudaan</b>														
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	2,28	2,30	8.501.030.000	2,32	8.802.623.000	2,34	9.163.181.000	2,36	9.539.086.000	2,38	9.927.175.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
<b>Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>														
Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Berprestasi	15	17	17.451.949.000	19	18.071.096.000	21	18.811.294.000	23	19.582.998.000	25	20.379.714.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
<b>Program pengembangan kapasitas kepramukaan</b>														
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	652.237.000	100	675.377.000	100	703.041.000	100	731.882.000	100	761.658.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>														



<b>Program penelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>														
Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Kota Balikpapan	244	250	360.335.00 0	260	373.119.0 00	260	388.402.0 00	265	404.335.00 0	265	420.785.00 0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>														
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>				1.935.514. 000		2.004.181 .000		2.086.273 .000		2.171.859. 000		2.260.219. 000		
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan			1.935.514. 000		2.004.181 .000		2.086.273 .000		2.171.859. 000		2.260.219. 000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan			360.335.00 0		373.119.0 00		388.402.0 00		404.335.00 0		420.785.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

<b>Program Pembinaan Sejarah</b>													
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah Lokal			102.747.00 0		106.392.0 00		110.750.0 00		115.293.00 0		119.984.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>													
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan			1.325.100. 000		1.372.111 .000		1.428.313 .000		1.486.907. 000		1.547.401. 000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan												
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	95,45	81		82		83		84		85		Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Program pembinaan perpustakaan</b>													Dinas Perpustakaan dan Arsip

Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			1.888.358.000		1.955.352.000		2.035.444.000		2.118.945.000		2.205.152.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>													
<b>Program Pengelolaan arsip</b>													Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Persentase Arsip yang dikelola			841.758.000		871.621.000		907.323.000		944.545.000		982.973.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>													Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan			71.037.000		73.558.000		76.571.000		79.712.000		82.955.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>Program Perizinan Penggunaan Arsip</b>													Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip			12.354.000		12.793.000		13.317.000		13.863.000		14.427.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													

<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>														Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap secara Berkelanjutan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4019	4600	694.932.000	4600	719.586.000	4692	749.061.000	4786	779.790.000	4882	811.515.000		
<b>Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>														Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya secara Berkelanjutan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	163	319	1.482.521.000	320	1.535.117.000	327	1.597.996.000	333	1.663.551.000	340	1.731.231.000		
<b>Program Pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan</b>														Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Perikanan melalui Penerapan Standar Kelayakan Pengolahan oleh Pelaku Usaha	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dibina Standar Kelayakan Pengolahan SKP)	0	0	-	20	-	22	-	24	-	26	-		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>														

<b>Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Wisata	Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata			6.984.040.000		7.231.815.000		7.528.032.000		7.836.858.000		8.155.693.000	
<b>Program Pemasaran pariwisata</b>													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	4	3,7	5.781.293.000	3,6	5.986.397.000	3,5	6.231.602.000	3,4	6.487.244.000	3,3	6.751.172.000	
<b>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</b>													Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	4,37	1,60	982.999.000	1,57	1.017.873.000	1,55	1.059.566.000	1,53	1.103.033.000	1,51	1.147.909.000	



<b>Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>													
Meningkatnya Kepatuhan Unit Usaha Pangan Asal Hewan Terhadap Standar Higiene dan Sanitasi Melalui Kepemilikan Rekomendasi NKV	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Rekomendasi NKV	72	75	823.623.00 0	78	852.843.0 00	80	887.776.0 00	80	924.195.00 0	82	961.795.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>													
Meningkatnya Ketahanan Lahan Pertanian Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Perubahan Iklim yang Ditangani	52,65	55	113.248.00 0	60	117.266.0 00	60	122.069.0 00	60	127.077.00 0	60	132.247.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
<b>Perizinan usaha pertanian</b>													Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan





Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	-	9	355.187.00 0	25	367.788.0 00	45	382.853.0 00	45	398.559.00 0	75	414.774.00 0	
<b>Standardisasi dan perlindungan konsumen</b>													
Meningkatnya tertib ukur	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75,7	77,95	346.589.00 0	78,1 7	358.885.0 00	78,40	373.585.0 00	78,62	388.911.00 0	78,84	404.733.00 0	Dinas Perdagangan
<b>Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>													
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi Melalui Promosi	-	15	270.569.00 0	18	280.168.0 00	20	291.644.0 00	22	303.609.00 0	25	315.961.00 0	Dinas Perdagangan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>													
<b>Perencanaan dan pembangunan industri</b>													
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif	0	6,55	2.625.298. 000	8,73	2.718.437. .000	10,92	2.829.785. .000	13,10	2.945.872. 000	15,28	3.065.722. 000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perindustrian
<b>Pengendalian izin usaha industri</b>													Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan







<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	77,5	82,5		82,5		82,7		82,8		82,9			Badan Pengelola Keuangan Daerah
<b>Program Pengelolaan keuangan daerah</b>														
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Serta Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	0	100		100		100		100		100			Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	0	100	28.836.420.000	100	29.859.456.000	100	31.082.509.000	100	32.357.620.000	100	33.674.061.000		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0	100		100		100		100		100			
	Persentase laporan keuangan tepat waktu	0	100		100		100		100		100			
<b>Program Pengelolaan barang milik daerah</b>														Badan Pengelola Keuangan Daerah

<b>daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	83,08	84,08		84,58		85,08		85,58		86,08		
<b>Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah</b>													
meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	93,55	100	3.912.003.000	100	4.050.791.000	100	4.216.712.000	100	4.389.696.000	100	4.568.287.000	Bappedalitbang
<b>Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>													
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan konsisten	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat daerah	85	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bappedalitbang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN</b>													

Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0	3,75	11.341.456.000	4,00	11.743.819.000	4,25	12.224.850.000	4,50	12.726.355.000	4,75	13.244.115.000	
	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	0	100		100		100		100		100		
<b>Program Pengelolaan pendapatan daerah</b>													Badan Pengelola Keuangan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Milyar Rupiah)	885	1405	11.231.073.000	1557	11.629.520.000	1725	12.105.869.000	1912	12.602.494.000	2119	13.115.215.000	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	83	83,25		83,5		83,75		84		84,25		
<b>Program Kepegawaian daerah</b>													Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM









Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti			-		-		-		-			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>													
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah</b>													
Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	80	81		81,5		82		82,5		83		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													Bakesbangpol
	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional			8.496.325.000		8.797.752.000		9.158.110.000		9.533.807.000		9.921.682.000	

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik												
	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik			5.557.024.000		5.754.172.000		5.989.865.000		6.235.589.000		6.489.279.000
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan												
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	78	80	1.609.732.000	83	1.666.841.000	88	1.735.115.000	89	1.806.295.000	90	1.879.783.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya												
	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi			2.501.755.000		2.590.510.000		2.696.618.000		2.807.243.000		2.921.453.000



## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Subbab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Balikpapan untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### 4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kota Balikpapan.

**Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Balikpapan**

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,23	6,50 - 7,00	6,53 - 7,05	6,55 - 7,10	6,58 - 7,15	6,60 - 7,20		
2	Tingkat kemiskinan	Persen	2,23	2,15 - 2,20	2,04 - 2,10	1,94 - 2,00	1,83 - 1,90	1,73 - 1,80		
3	Indeks Gini	Nilai								
4	PDRB Per Kapita	Juta								
5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	Persen								
6	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai								
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,22	5,85 - 5,90	5,78 - 5,87	5,70 - 5,84	5,63 - 5,82	5,56 - 5,79		
8	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Nilai								
9	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen								
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,40	71,80	71,97	72,14	72,31	72,48		
11	Indeks Risiko Bencana	Poin	101,43	109,35	108,12	106,89	105,66	104,43		
12	Indeks Pembangunan Manusia									
13	Rapor Pendidikan									
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat									
15	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,87	75,94	76,00	76,23	76,47	76,70		
16	Indeks	Poin	0,169	0,160	0,160	0,155	0,150	0,150		

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Ketimpangan Gender									
17	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai								
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai								
19	Nilai AKIP	Poin	69,06	69,40	69,74	70,08	70,42	70,77		
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai								
21	Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi	Poin								
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai								
23	Indeks SPBE/Indeks Pemdi	Poin								

Sumber: Analisis Data, 2025

#### 4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut adalah target kinerja daerah Kota Balikpapan.

**Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	91,23	91,86	92,49	93,12	93,74	94,37	95	DKP3
2	Penurunan intensitas emisi GRK	%	11,2	24,84	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25	DLH
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	68,4	71,64	71,97	72,14	72,31	72,48	72,65	DLH
4	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	101,43	101	99,8	98,6	97,4	96,2	95	BPBD
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	96,76	97,39	97,41	97,43	97,46	97,48	97,5	DPU
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%		30,45	31,26	32,07	32,88	33,69	34,5	DLH
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	5,9	5,67	5,4	5,13	4,86	4,59	4,33	DKP3
8	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1.3	2.458	2.515	2.572	2.628	2.685	2.742	DPU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Aman	%		38,75	41,81	44,88	47,94	51	54,06	DPU
10	Persentase Penurunan Emisi GRK									DLH
11	a. Kumulatif	%		0,24	0,9	1,62	2,4	3,24	4,14	DLH
12	b. Tahunan	%		-9,22	10,13	12,17	14,45	16,75	19,44	DLH
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,23	4,75	4,95	5,15	5,35	5,55	5,75	BAPPEDA LITBANG
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta	214,11	225,56	263,73	301,89	340,06	378,23	416,4	BAPPEDA LITBANG
3	Tingkat Kemiskinan	%	2,23	2,2	2,1	2,01	1,91	1,82	1,72	DINSOS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,22	6,12	5,94	5,75	5,57	5,38	5,2	DISNAKER
5	Indeks Gini	Indeks	0,324	0,31	0,304	0,298	0,291	0,285	0,279	BAPPEDA LITBANG
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	82,62	82,87	83,22	83,56	83,91	84,25	84,6	BAPPEDA LITBANG
7	Rapor pendidikan	Nilai	79,4	81,17	82,93	84,7	86,47	88,23	90	DISDIKBUD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	15,33	16,29	17,31	18,39	19,54	20,76	22,06	DISPUTAKAR
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,87	75,94	76	76,23	76,47	76,7	76,94	DKK
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,17	0,16	0,16	0,155	0,15	0,15	0,15	DP3AKB
11	Persentase Pekerja di Sektor Jasa	%	70,66	77,71	77,93	78,14	78,36	78,57	78,78	DISNAKER
12	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	9	5	5	5	4	4	4	DKK
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,8	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25	16,04	DKK
14	Cakupan penemuan kasus tuberculosis (treatment coverage)	%	63,31	81,6	82,52	83,44	84,36	85,28	86,2	DKK
15	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	84	84,98	85,731	86,482	87,233	87,984	88,735	DKK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	104	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	DKK
17	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :									
18	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	85,56	87,71	88,33	88,94	89,56	90,17	90,79	DISDIKBUD
19	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	91,82	91,96	92,11	92,25	92,39	92,54	92,68	DISDIKBUD
20	c. Numerasi SD/Sederajat	%	78,31	78,62	78,93	79,25	79,56	79,87	80,18	DISDIKBUD
21	d. Numerasi SMP/Sederajat	%	88,26	88,43	88,6	88,78	88,95	89,12	89,29	DISDIKBUD
22	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,99	11	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	DISDIKBUD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,35	14,4	14,5	14,59	14,68	14,78	DISDIKBUD
24	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	%	20	20,42	20,84	21,26	21,68	22,1	22,5	DISDUKCAPIL
25	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi	%	92,2	92,48	92,76	93,04	93,32	93,6	93,9	DISNAKER
26	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%		68,57	69,89	71,22	72,54	73,86	75,18	DISNAKER
27	Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	%		67,17	68,34	69,51	70,67	71,84	73,01	DISNAKER

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%		23	23,15	23,3	23,45	23,6	23,75	DISDIKBUD
29	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	indeks		70	71,11	72,23	73,34	74,45	75,56	DP3AKB
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	8,08	8,23	8,38	8,53	8,68	8,83	9	BAPPEDA LITBANG
2	Tingkat Inflasi	%	1,1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	2,50±1	BAPPEDA LITBANG
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11	7,12	7,13	7,13	7,14	7,14	7,15	BKAD
4	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	74,03	75,88	77,78	79,72	81,72	83,76	85,77	BAPPEDA LITBANG
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,07	82,89	83,73	84,57	85,42	86,28	87,15	BKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	45,55	47,5	48,07	48,63	49,2	49,76	50,33	BAPPEDA LITBANG
7	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	17,91	17,98	18,04	18,11	18,17	18,24	18,3	BAPPEDA LITBANG
8	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,21	64	64,5	65	65,5	66	66,5	BAPPEDA LITBANG
9	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	%	1,78	1,94	2,2	2,46	2,72	2,98	3,23	DPOP
10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	36.45	39.962	41.041	42.12	43.199	44.278	45.357	DPOP
11	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Usaha	618	670	782	894	1006	1118	1.23	DPOP
12	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	%	1,69	2,27	2,45	2,63	2,83	3,04	3,27	DKUMKMP
13	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,58	4,02	4,208	4,396	4,584	4,772	4,96	DISNAKER

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,2	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	DKUMKMP
15	Return on Asset (ROA) BUMD	%	3,78	6,38	6,46	6,54	6,63	6,71	6,79	BKAD
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,71	52,94	53,17	53,4	53,63	53,86	54,07	DISNAKER
17	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	%	88,7	89	89,3	89,6	89,9	90,2	90,5	DISKOMINFO
18	Disparitas Harga	%		9,77	9,55	9,34	9,13	8,91	8,7	DISDAG
19	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	38,64	33,18	33,06	32,95	32,83	32,71	32,6	BAPPEDA LITBANG
20	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	34,27	42,34	42,76	43,18	43,6	44,01	44,43	BAPPEDA LITBANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%		82,69	83,56	84,42	85,29	86,15	87,02	DISPERKIM
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,6	BPPDRD
23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%		29,85	325,955	35,341	380,865	40,832	435,775	BKAD
24	Total Kredit/PDRB	%		23,01	25,483	27,956	30,429	32,902	35,375	BKAD
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	70,61	77,58	81,06	84,55	88,03	91,52	95	SATPOL PP
2	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0	0	0	BANKESBANGPOL
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	78,06	78,3	78,52	78,64	78,76	78,88	79	SETDAKOT
4	Nilai SAKIP	Poin	69,06	70,16	70,43	70,7	70,96	71,23	71,5	SETDAKOT
5	Indeks Integritas Pemerintah	indeks	75,08	77,5	78,2	79	79,7	80,5	81,2	INSPEKTORAT
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,93	84,95	85,64	86,34	87,05	87,76	88,48	SETDAKOT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital	Poin	3,96	3,85	3,91	3,97	4,2	4,08	4,14	DISKOMINFO
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,07	4,08	4,1	4,11	4,13	4,14	4,15	BAPPEDA LITBANG
9	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,19	4,54	4,55	4,56	4,58	4,59	4,6	SETDAKOT
10	Jumlah kejadian tindak kriminal	Kasus	1.406	1.167	1.139	1.111	1.082	1.054	1.025	BANKESBANGPOL
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>										
<b>I</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	75,26	76,88	78,51	80,13	81,75	83,38	85,00	DISDIKBUD
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,56	99,64	99,71	99,78	99,85	99,93	100	DISDIKBUD











NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DKK
21	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	DKK
22	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DKK
23	Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	DKK
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,49	98,74	98,99	99,24	99,49	99,74	100	DPU
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,99	94,00	96,00	96,40	97,60	98,80	100	DPU
6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DPU
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85,94	86,61	87,28	87,95	88,62	89,29	90,00	DPU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	83,47	84,56	85,65	86,74	87,83	88,92	90,00	DPU
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	DPU
<b>D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0	25	30	35	40	45	50	DISPERKIM

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0,32	10,26	20,20	30,14	40,08	50,00	DISPERKIM
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	87,27	87,73	88,19	88,65	89,11	89,57	90,00	DISPERKIM
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,72	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	DISPERKIM
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	17,6	18,83	20,06	21,29	22,52	23,75	25,00	DISPERKIM
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	33,57	36,31	39,05	41,79	44,53	47,27	50,00	BPBD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	6,46	100	100	100	100	100	100	BPBD
<b>F</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	79,33	81,11	82,89	84,67	86,45	88,23	90,00	DINSOS
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS
<b>II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
<b>A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	DISNAKER
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	71,88	73,23	74,59	75,94	77,29	78,65	80,00	DISNAKER
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	57,43	60,36	63,29	66,22	69,14	72,07	75,00	DISNAKER
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	55,08	57,57	60,05	62,54	65,03	67,51	70,00	DISNAKER

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	38,09	40,08	42,06	44,05	46,03	48,02	50,00	DISNAKER
<b>B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	42,94	45,78	48,62	51,46	54,3	57,14	60,00	DP3AKB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	DP3AKB
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	9,14	8,19	8,01	7,83	7,66	7,49	7,33	DP3AKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	100	100	100	DKP3
<b>D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>										
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPR
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	0	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50	DPPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	36,06	38,38	40,71	43,03	45,35	47,68	50	DPPR
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	0	DPPR
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	86,8	87,33	87,87	88,40	88,93	89,47	90	DPPR
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	DPPR
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	99,51	99,59	99,67	99,76	99,84	99,92	100	DLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	5,3	6,92	8,53	10,15	11,77	13,38	15,00	DLH
<b>F</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	99,99	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	96,7	99,5	99,60	99,70	99,80	99,90	100	DISDUKCAPIL
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,71	99,76	99,81	99,86	99,90	99,95	100	DISDUKCAPIL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	78,79	80,66	82,53	84,40	86,26	88,13	90,00	DISDUKCAPIL
<b>G</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	0	DP3AKB
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	0	0	0	0	0	DP3AKB
<b>H</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,19	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	DP3AKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	64,45	65,38	66,30	67,23	68,15	69,08	70,00	DP3AKB

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,20	12,00	11,80	11,60	11,40	11,20	11,00	DP3AKB
<b>I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										
1	Rasio konektivitas	Angka	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70	DISHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	DISHUB
<b>J URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90,91	91,59	92,27	92,95	93,63	94,31	95,00	DISKOMINFO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	80	82	84	86	88	90,00	DISKOMINFO
<b>K URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	64,06	65,05	66,04	67,03	68,02	69,01	70,00	DKUMKMP
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	1,33	1,69	2,05	2,42	2,78	3,14	3,50	DKUMKMP
<b>L URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	106.450,02	100	100	100	100	100	100	DPMPSTP
<b>M URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	DISKOMINFO
<b>O URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34,73	42,28	49,83	57,38	64,93	72,48	80,00	DISKOMINFO
<b>P URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	88,08	88,40	88,72	89,04	89,36	89,68	90,00	DISDIKBUD
<b>Q URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		81,04	80	82	84	86	88	90	DISPUTAKAR
<b>R URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	80,25	83,55	86,85	90,15	93,45	96,75	100	DISPUTAKAR
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	67	100	100	100	100	100	100	DISPUTAKAR
<b>III</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	%	88,96	90,70	92,44	94,18	95,92	97,66	90	DKP3
<b>B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	48,71	9,64	2,70	2,63	2,56	2,50	2,44	DPOP
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	3,94	4,95	5,96	6,97	7,98	8,99	10,00	DPOP
3	Tingkat Hunian Akomodasi	%	58,43	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	DPOP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,78	1,94	2,2	2,46	2,72	2,98	3,23	DPOP
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	24,46	25,39	26,32	27,25	28,18	29,11	30,00	DPOP
<b>C</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Hektar	3465,06	4033,74	4602,42	5171,1	5739,78	6308,46	6877,14	DKP3
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	284,98	5	5	5	5	5	5	DKP3
<b>D</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	DISDAG
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	75,17	80	81	82	83	84	85	DISDAG
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	78,02	80	81	82	83	84	85	DISDAG
<b>E</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	66,67	67,23	67,79	68,35	68,91	69,47	70,00	DKUMKMP
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	20,89	25,74	30,59	35,44	40,29	45,14	50,00	DKUMKMP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	DKUMKMP
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	2	4	6	8	10	12	DKUMKMP



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	96,66	97,22	97,77	98,33	98,89	99,44	100	SETDAKOT
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	53,23	56,86	60,49	64,12	67,74	71,37	75,00	SETDAKOT
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	7,67	10,56	13,45	16,34	19,22	22,11	25,00	SETDAKOT
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
1										
2										
<b>V</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>A</b>	<b>PERENCANAAN</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	%	11,22	11,25	11,30	11,35	11,40	11,45	11,50	BAPPEDA LITBANG
2	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	%	1,32	3,50	4,25	5,00	5,75	6,50	7,25	BAPPEDA LITBANG
3	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	20,54	20,54	25,00	27,50	30,00	32,50	35,00	BAPPEDA LITBANG
4	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dokumen	3	3	4	4	5	5	5	BAPPEDA LITBANG
<b>B</b>	<b>KEUANGAN</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	10,11	10,26	10,42	10,57	10,73	10,89	11,05	BKAD
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	26,53	26,93	27,33	27,74	28,16	28,58	29,01	BKAD, BPPDRD
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	58,85	59,73	60,63	61,54	62,46	63,40	64,35	BKAD
4	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,28	13,48	13,68	13,89	14,09	14,31	14,52	BKAD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	10,88	11,04	11,21	11,38	11,55	11,72	11,90	BKAD
7	Assets Management		1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	BKAD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	16,42	16,67	16,92	17,17	17,43	17,69	17,95	BKAD
<b>C KEPEGAWAIAN</b>										
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	57,4	58,5	60,26	62,06	63,92	65,84	67,82	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,10	25,00	27,00	29,16	31,49	34,01	36,73	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	36,60	37,00	38,48	40,02	41,62	43,28	45,02	BKPSDM
<b>D PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										





## BAB V PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman pemerintah kota dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi panduan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah secara umum, termasuk perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik yang berbasis analisis data dan menggunakan metode ilmiah untuk mengevaluasi berbagai aspek penting. Aspek tersebut meliputi gambaran kondisi umum daerah, capaian pembangunan, serta kerangka pendanaan yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilakukan melalui kajian objektif, terukur, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi dinamika pembangunan yang terjadi di Kota Balikpapan.

RPJMD ini juga mengidentifikasi tantangan utama dan isu-isu strategis yang berperan sebagai tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan. Isu-isu tersebut bersifat mendesak dan berdampak luas, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, proses identifikasinya dilakukan tidak hanya dari sudut pandang internal, tetapi juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Hal ini bertujuan agar solusi yang dihasilkan relevan, praktis, dan mampu menjawab kebutuhan nyata daerah.

Selanjutnya, isu-isu strategis yang telah dirumuskan menjadi dasar penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas agar pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan dapat dilakukan. Hasil dari evaluasi secara berkala akan dijadikan acuan dalam kebijakan lanjutan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN